

Cak Nur dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman/ ke-bhinneka-an keyakinan di Indonesia. Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar.

Cak Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Cak Nur meyakini bahwa manusia sebagai individu yang paripurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis.

Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibu kota, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Buku ini adalah salah satu hasil kegiatan itu.



Karya Lengkap
Nurcholish Madjid

Keislaman,
Keindonesiaan,
dan Kemodernan



Karya Lengkap Nurcholish Madjid

Keislaman, Keindonesiaan,
dan Kemodernan



Penyunting:
Dr. Budhy Munawar-Rachman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARYA LENGKAP
NURCHOLISH MADJID

Penyunting:
Dr. Budhy Munawar-Rachman



Nurcholish Madjid Society

Proyek **Karya Lengkap Nurcholish Madjid**
Editor: Budhy Munawar-Rachman (Ketua),
Elza Peldi Taher dan M. Wahyuni Nafis

KARYA LENGKAP NURCHOLISH MADJID

Penyunting Dr. Budhy Munawar-Rachman
Copyright @ Keluarga Nurcholish Madjid
All rights reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama Agustus 2020

Penerbit:
Nurcholish Madjid Society (NCMS)
Grha STR Lt. 4, Ruang 411
Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550



DIALOG KETERBUKAAN



DAFTAR ISI

Dialog Keterbukaan

- ♦ Oposisi Suatu Kenyataan — 3357
- ♦ Oposisi Bukan Musuh Pemerintah — 3365
- ♦ Oposisi Tidak Identik Melawan Arus — 3383
- ♦ Oposisi atau Kedewasaan — 3393
- ♦ Berpolitik tanpa Keberanian — 3399
- ♦ Perasaan Tersumbat Bisa Berbahaya — 3407
- ♦ 1998: Babak Baru Wajah Indonesia — 3415
- ♦ Masa Depan Indonesia — 3419
- ♦ Episode 27 Juli: Sabtu Kelabu — 3429
- ♦ Menatap Masa Depan Islam — 3443
- ♦ Tidak Usah Munafik! — 3461
- ♦ Negara Islam: Produk Isu Modern — 3489
- ♦ Apatisme Pembicaraan Negara Islam — 3503
- ♦ Tarik-menarik antara Kekuasaan dan Islam — 3511
- ♦ Islam Indonesia Bisa Dibentuk — 3525
- ♦ Rindu Kehidupan Zaman Masyumi — 3529
- ♦ Romantisme Masa Lalu — 3541
- ♦ Uskup Belo Hanya Tokoh Agama — 3547
- ♦ Sang Penarik Gerbong Itu — 3557
- ♦ Argumen al-Attas Sulit Dipertahankan — 3565
- ♦ Mencari Kebenaran yang Lapang — 3573
- ♦ Tuhan: Antara Allah dan Dewata Raya — 3577
- ♦ Islam dan Sempalan Ekstrim — 3591
- ♦ Apa Kata Kiai Saja — 3595
- ♦ Kita Ini Masih Kanak-kanak — 3607
- ♦ Mahasiswa Jadi Katup Pengaman — 3611
- ♦ Paramadina dan Investasi Kemanusiaan — 3615
- ♦ Sastra Sufistik sebagai Eskalasi Kesadaran — 3619
- ♦ Antarumat Jangan Saling Menggeneralisasi — 3631
- ♦ Ada yang Mengorbankan ICMI — 3643

OPOSISI SUATU KENYATAAN¹

Partai oposisi ternyata masih belum mendapat tempat di Indonesia. Buktinya, ketika cendekiawan Islam, Nurcholish Madjid, kembali melontarkan gagasan tersebut dalam suatu seminar di Jakarta, berbagai reaksi segera menyambutnya. Saat itu, Panglima ABRI, Try Sutrisno, Menteri Dalam Negeri, Rudini, bahkan pimpinan PPP dan PDI — dua partai yang disebut Nurcholish dapat berfungsi sebagai oposisi — tegas-tegas menolaknya.

Namun, menurut dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pernyataannya itu, tidak harus diwujudkan sekarang. “Yang saga maksud, agar ide ini mulai dipikirkan sejak sekarang,” katanya.

Dalam suatu pertemuan menjelang pemilu 1971 — dihadiri Adrian Buyung Nasution, Nono Anwar Makarim, Goenawan Mohamad, serta tokoh pemuda dan mahasiswa — dia pernah menyarankan agar mahasiswa dan pemuda mendukung partai politik. Pertimbangannya, Golkar yang didukung oleh militer, mesin birokrat, dan *money* (3M), sudah dapat dipastikan menang. Untuk itu, dukungan dari mahasiswa dan pemuda sebaiknya diberikan kepada parpol, guna mengimbangi Golkar. Pada tahun 1971, dia belum bisa memberikan dukungan aktif kepada parpol. Sebab pada masa itu, Cak Nur, sapaan akrabnya, masih menjabat sebagai Ketua Umum HMI, organisasi yang bersifat independen, dan dia

¹ Majalah *Forum Keadilan*, “Oposisi Suatu Kenyataan”, Nomor 18, 24 Desember 1992. Pewawancara Tony Hasyim dan M. Isa Idris.

dituntut untuk bersikap netral. Baru pada Pemilu 1977, Cak Nur menjadi juru kampanye PPP. Pada waktu itu, katanya, dia terbawa-bawa paham “pemihakan rasional,” seperti yang berkembang di negara-negara maju. Artinya di negara-negara maju, kaum terpelajar biasanya cenderung memilih kontestan yang lemah, dengan tujuan mengimbangi yang kuat.

Berikut ini petikan wawancara Nurcholish Madjid dengan Tony Hasyim dan M. Isa Idris dari majalah *Forum Keadilan*.

Anda melontarkan kembali gagasan perlunya partai oposisi itu. Apa latar belakangnya?

Sebenarnya gagasan itu sudah lama saya lontarkan dan reaksi yang timbul beberapa tahun lalu sama dengan yang sekarang. Dan, saya juga tidak mengatakan itu orisinal dari saya, sebab banyak juga intelektual yang membicarakan itu. Saya kira, pada prinsipnya, dalam demokrasi yang sehat diperlukan *check and balance*. Jadi, ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dari pandangan yang agak filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar, ya *toh?* Karena itu, harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar. *Nah*, selanjutnya kita menghargai sikap seseorang dengan komitmen mereka. Misalnya, seseorang menyatakan, “saya hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni”. Dalam melaksanakannya, *kan* belum tentu dia benar? Karena itu, tanpa mengurangi iktikad baiknya, dalam masyarakat harus ada semacam mekanisme untuk tukar pikiran. Atau, dalam bentuk yang lebih canggih, adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya.

Cara beroposisi itu bagaimana?

Gambarannya adalah, *to check*, yaitu membuktikan apa tindakan-tindakannya yang sudah memasyarakat, mencerminkan iktikadnya. *Nah*, orang itu dengan sendirinya berhak untuk mengakui

bahwa saya masih tetap setia kepada cita-cita saya. Tapi, masyarakat juga berhak membuktikan. Jadi di sini, kita bukan bicara tentang iktikad, bukan bicara tentang komitmen batin, tapi bicara tentang wujud sosial komitmen batin itu. Soalnya, komitmennya tadi, menyangkut masyarakat luas atau orang lain. Maka, masyarakat berhak mengecek: “Ini benar nggak?” Kalau merasa itu kurang benar atau tidak benar, ya harus diimbangi dengan pikiran lain.

Bagaimana kira-kira peranan partai oposisi itu?

Partai oposisi adalah wujud modern dari ide demokrasi. Maksud saya, dalam suatu masyarakat, oposisi itu adalah suatu kenyataan. Jika kelompok itu tidak diakui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman. *Nah*, jika ini dibiarkan, eskalasi akan terjadi. Artinya, kecurigaan makin tinggi dan ancaman juga kian tinggi. Akibatnya, timbul nafsu beroposisi untuk semata-mata menjatuhkan pemerintah. Inilah yang tidak sehat. Jadi, sekarang yang kita bicarakan adalah oposisi loyal.

Dulu, sudah ada istilah seperti ini. Jadi orang itu beroposisi kepada pemerintah, tapi loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama. Bahkan kepada pemerintah pun, dalam hal-hal yang jelas baik, harus loyal. Dan menurut saya, oposisi loyal ini memang diciptakan untuk mengantisipasi munculnya oposisi yang sekadar oposisi. Oposisionalisme itu negatif.

Saya tegaskan di sini, oposisi itu berbeda dengan oposisionalisme. Oposisionalisme itu adalah menentang sekadar menentang, sangat subyektif, bahkan mungkin iktikadnya kurang baik, seperti misalnya kebiasaan mendaftar kesalahan orang semata. Yang dimaksud oposisi di sini adalah oposisi dalam semangat yang loyal, dalam arti mengakui keabsahan suatu pemerintah untuk bertindak dan mengklaim sebagai pemerintah yang baik. *Nah*, oposisi hanyalah bertugas untuk mengecek.

Kenyataannya, belum apa-apa kalangan pemerintah sudah menanggapi ide partai oposisi ini secara negatif...

Saya bisa mengerti mengapa orang khawatir terhadap oposisi. Sebab, banyak orang yang tidak bisa membedakan oposisi dengan oposisionalisme.

Bagaimana partai oposisi dapat hidup di negeri ini, sementara kita mengutamakan asas kekeluargaan?

Dalam bahasa Inggris, ada istilah *family quarrel*: pertentangan dalam keluarga. Pertengkaran seperti ini biasanya sengit sekali, umumnya lebih sengit dibanding pertengkaran dengan orang lain. Namun, orang Jawa mengatakan, *tega larane*, tapi *ora tega matine*. Artinya, kita mungkin tega melihat anggota keluarga kita itu sakit, tapi kita tidak akan tega melihat dia mati. Karena itu, dalam demokrasi yang bersifat kekeluargaan ini, oposisi memang tidak ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah. Saya pun berpendapat, kita sebagai bangsa yang berdaulat, memang berhak mempunyai sistem sendiri, tapi sebaiknya ada segi universalnya. Dengan kata lain, demokrasi tidak mungkin hidup kalau sistemnya monolitik.

Melihat situasi saat ini, akan adakah perubahan politik pada tahun 1993 nanti?

Pada tahun 1993 ini, saya kira masih merupakan tahap persiapan dan penyiapan. Yang sebenarnya penting adalah tahun 1998. Jadi, semua yang kita bicarakan sebetulnya adalah semacam penyiapan mental untuk masyarakat umum. Untuk itu, saya sering bicara mengenai alternatif: pandangan alternatif, kelompok alternatif, orang alternatif.

Itu semua harus kita siapkan mulai dari sekarang agar nanti kita tidak kaget. Sebab, persoalan terbesar bangsa kita adalah tidak pernah mengalihkan kekuasaan secara damai. Kalau 1998 nanti

gagal, tidak terbayangkan lagi kapan kita berbuat begitu. Sebab, kalau gagal, berarti *set back* kan? Terjadi peralihan kekuasaan secara berdarah.

Karena itu, selalu terngiang-ngiang di telinga saya ucapan T.B. Simatupang, yang mengingatkan kita: kalau kita gagal, kita akan *kejeblos* kepada apa yang disebut Amerikalatinisme. Di negara-negara Amerika Latin itu sudah terjadi sekian kali kudeta. Dan, harga itu luar biasa mahal. Jadi pada 1993 nanti, menurut saya penting *sih* penting, tapi fungsinya masih sebagai penyiapan.

Jika dibandingkan dengan mitos perubahan 20 tahunan pada bangsa kita, bukankah ini suatu kemandekan?

Saya kira tidak. Kalau ada kesan penundaan, itu *kan* karena masalah stabilitas. Dan, perubahan itu tidak selalu spektakuler. Sangat berwarna, tapi tidak spektakuler. Apalagi, tentu saja tidak selalu berdarah.

Perubahan pada 1908 (Kebangkitan Nasional) tidak berdarah dan spektakuler, tapi sangat signifikan, sangat bermakna. Waktu itu, untuk pertama kalinya timbul kesadaran bahwa melawan penjajah tidak bisa lagi dengan cara-cara tradisional, tapi melalui cara modern. Kemudian pada 1928 — dalam Kongres Pemuda waktu itu diputuskan untuk punya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa — sebetulnya juga tidak spektakuler, tapi sangat signifikan. Kemudian, pada 1965 juga sangat spektakuler.

Nah, sekarang pun sebetulnya sama dengan tahun 1908 dan 1928, meskipun tidak spektakuler, tapi sangat bermakna. Karena adanya reintroduksi dari nilai demokrasi yang lebih maju, seperti yang Anda lakukan sebagai orang pers. Itu *kan* reintroduksi. Jadi, di bawah naungan slogan keterbukaan kita mengisinya. Ini semuanya pekerjaan berat.

Kalau pada tahun 1993, proses perubahan ini dipaksakan, kira-kira bagaimana?

Saya kira kurang *smooth*. Anda tahu proses-proses yang terjadi sebelum pemilu kemarin. Itu semuanya membuat kurang *smooth*. Mengapa? Karena rakyat ternyata belum terlatih. Saya dari dulu berpendapat, kita ini harus terbiasa berpikir alternatif.

Setelah Pemilu 1977, Anda mendukung siapa?

Pada 1982 saya sedang sekolah. Jadi tidak ikut-ikutan. Pada Pemilu 1987, saya netral.

Sekarang?

Saya netral.

Bukannya Anda ini Golkar?

Oh, ya itu di MPR. Itu karena ada ketentuan, utusan golongan. Sebetulnya, kalau bisa, orang-orang dari wakil golongan itu ingin membentuk fraksi tersendiri, berarti wakil golongan itu mempunyai pandangan yang sama. Padahal, mereka itu diambil dari macam-macam golongan.

Jadi, Anda sebenarnya bukan berasal dari Golkar?

Ya, *enggak* bisa. *Wong*, saya bukan anggota.

Sebaiknya, orang-orang seperti Anda, Gus Dur, atau agamawan ikut berpolitik praktis atau tidak?

Sebaiknya tidak. Jadi, kita harus berada di satu daerah yang di sana kita dapat berdiri bebas. Seperti saya, godaan untuk berpolitik praktis itu cukup besar. Godaan dari orang lain, bukan dari saya. Namun, saya selalu menghindar karena saya ingin mempertahankan kebebasan saya untuk bergerak, juga kebebasan untuk berpikir. Ya,

kalau sekarang saya dibawa-bawa ke Golkar melalui MPR, itu *kan* suatu hal yang sumir saja, tidak sampai mengikat. Dan mereka juga tahu, mereka memberikan kebebasan kepada saya.

Selain orang seperti Anda, siapa lagi yang seharusnya tidak usah berpolitik praktis?

Ya, tentu saja mereka yang bisa digolongkan cendekiawan. Terutama cendekiawan yang memang penampilannya cendekiawan, dan tidak namanya saja yang cendekiawan. Banyak orang yang secara umum disebut-sebut cendekiawan tapi penampilannya birokrat.

Nah, seperti Anda yang wartawan, *kan* juga termasuk cendekiawan. Jadi menurut saya, redaktur-redaktur, penulis-penulis, wartawan, profesor, akademisi, atau yang menjadi *opinion maker*, sebaiknya tidak mengikatkan diri secara formal ke suatu kekuatan politik. Mereka ini seharusnya menjadi kekuatan cadangan, *reserve*.

Apa tidak sebaiknya mereka yang menjadi oposan, agar ada keseimbangan?

Oh, tidak. Mereka sebaiknya jangan jadi oposan langsung. Kalau jadi oposan langsung mereka akan seperti partai. Fungsi mereka adalah menyuplai pikiran-pikiran. Istilahnya, mereka ini bebas tapi aktif.

Sekarang ini, pikiran alternatif baru sampai tahap pergantian wakil presiden. Kalau sampai presiden, bagaimana?

Ya, baru sampai wakil presiden. Itu bagus, *kan*? Makanya yang sekarang kita teruskan. Tapi, tampaknya untuk presiden masih belum bisa. Dan yang kita lakukan itu bukan untuk tahun 1993, tapi untuk 1998.

Lima tahun mendatang (1993-1998) kelihatannya akan didominasi isu politik yang keras

Biar saja. Biarkan rakyat ramai. *Nah*, di sinilah kita memerlukan peranan ABRI untuk menjaga itu. Kita berharap sekali militer bisa menjaganya. Biarlah masyarakat gaduh, tapi tidak akan hancur karena ada yang menjaga kita. *Nah*, di sinilah kita harapkan ABRI berperan. Pada 1993 ini kita belum siap melakukan pergantian kepemimpinan nasional, karena bangsa kita tidak biasa melakukan hal-hal yang mendadak.

Agar pergantian kepemimpinan nasional berjalan lancar, ada yang menyarankan masa jabatan presiden dibatasi. Anda setuju?

Seharusnya memang begitu. Harus ada ketegasan mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Itu juga mempunyai efek terhadap kerelatifan tokoh tadi. Jadi, sewaktu-waktu bisa ada pergantian dengan enak. Betul, itu betul sekali. *Nah*, setelah itu, kepada Bung Karno, kita ucapkan terima kasih karena beliau telah mengantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan. Dan juga kepada Pak Harto, yang telah mengantarkan kita kepada kemajuan ekonomi. Jadi, setelah dua landasan ini (persatuan dan kesatuan serta kemajuan ekonomi — *ed.*) diletakkan, mari kita menata kehidupan politik secara baru. Sebab setelah mereka, tidak akan ada lagi “Bapak Bangsa” seperti Bung Karno dan Pak Harto itu. Yang kelak muncul adalah *primus inter pares*, orang yang sedikit lebih dari yang lain. Karena itu, bila ada pergantian dengan orang lain, tidak ada persoalan. [✧]

OPOSISI BUKAN MUSUH PEMERINTAH¹

Nurcholish Madjid, secara konsisten melontarkan pikiran-pikiran tentang perlunya partai oposisi. Di benak pikiran Cak Nur, sapaan akrabnya, esensi oposisi adalah *check and balance*, tidak berarti *to oppose*, tapi juga *to support*. Dengan formalitas *check and balance* itu, maka *pent-up feeling* atau perasaan-perasaan yang tersumbat akan tersalurkan. Dan itu bisa menjadi lebih produktif. Sebab orang-orang (yang tersumbat — *ed.*) bisa dijadikan sumber ide-ide yang paling kreatif dan maksimal. Karena selama ini mereka tidak terlibat. Pikiran-pikiran tersebut tertuang dalam wawancara Nurcholish Madjid dengan wartawan Majalah *TIRAS*, A. Dhomiri dan Usman Sosiawan.

Sebenarnya, bagaimana persisnya gagasan Anda tentang perlunya partai oposisi itu?

Sebelumnya, saya harus menegaskan bahwa saya tidak akan mengklaim orisinalitas gagasan tersebut. Ini merupakan bagian *discourse* kita. Misalnya, kalau bertemu tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, kami selalu bicara hal itu karena kebetulan saya memiliki garis pemikiran yang sama. Oleh karena itu, ini lebih tepat disebut

¹ Majalah *TIRAS*, “Oposisi Bukan Berarti Menjatuhkan Pemerintah”, No. 34/bln. 1.1/21 September 1995. Pewawancara A. Dhomiri dan Usman Sosiawan.

lontaran. Dan, lontaran ini sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum Sidang Umum MPR lalu.

Pada sidang-sidang MPR, saya menyaksikan sendiri dalam pidato terakhir fraksi-fraksi umumnya menyebutkan bahwa di Indonesia tidak ada oposisi. Saya lihat hanya PDI yang agak lumayan. Tetapi, belakangan, saya merasa bahwa kecenderungan ini ada pada anak muda kita. Jadi, sebetulnya jika gagasan ini terlontar dari seseorang termasuk saya, itu tentu bukan lontaran secara individual.

Maksudnya?

Ini cuma konstataasi (hal melihat atau menetapkan gejala atau tanda-tanda dari suatu keadaan atau peristiwa) dari kecenderungan yang sudah ada. Dan ini antara lain karena bangsa ini bangsa yang sukses, dalam arti ekonomi dan pendidikan berbangsa. Peningkatan kemampuan di bidang ekonomi dan pendidikan akan mempunyai akibat peningkatan di bidang politik. Itu dengan sendirinya. Seperti artikulasi, wawasan, aspirasi, sekarang ini *kan* semakin kaya, karena orang semakin tinggi pendidikannya.

Artinya, peningkatan ekonomi dan pendidikan itu harus dibarengi dengan deregulasi di bidang politik?

Ya terang. Misalnya secara karikatural, kalau makannya sudah beres, dia akan bicara tentang sesuatu yang lain. Dan itu yang lebih tinggi termasuk aspirasi politik. Itu logis sekali. Makanya, menurut saya negeri ini akan semakin ribut dalam pengertian positif. Artinya, akan semakin banyak yang berani menuntut. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Bahwa pemerintah sendiri menyadari. Buktinya, buruh sekarang boleh berdemonstrasi, perizinan-perizinan akan dibuka. Saya pikir itu antisipasi yang bagus.

Lantas, bagaimana Anda mengaitkan sejumlah perkembangan tadi dengan kemungkinan adanya partai oposisi?

Dengan *back drop* seperti itu, maka berbicara oposisi sebenarnya hanya membumbui kecil saja. Cuma, ini menjadi persoalan karena ada sejumlah orang yang trauma dengan istilah itu. Jadi, karena ada pengalaman-pengalaman spesifik bangsa ini pada tahun 1950-an, oposisi lantas dibayangkan sebagai sikap-sikap yang tidak bersahabat dan apriori. Dalam masyarakat yang belum dewasa, bisa saja begitu. Tapi, kita percaya bahwa masyarakat sudah semakin dewasa. Dalam masyarakat yang belum dewasa, masih kanak-kanak, maka mengingatkan trauma itu, berarti menghina. *Ad hominim* istilahnya. Tertuju pada orang, lalu *character assassination* atau pembunuhan karakter, dan sebagainya. Nah, kalau kita secara terbuka dan formal mengakui perlunya ekspresi *check and balance*, maka kritik-kritik yang kekanak-kanakan, *ad hominim* yang lalu merosot menjadi menghina, itu akan terhindari. Justru kalau ditutup-tutupi, orang akan cenderung ke arah negatif.

Tampaknya ada nuansa pendewasaan masyarakat dalam lontaran Anda itu?

Ya, proses pendewasaan dan percepatan proses demokratisasi. Bisa saja kita secara optimistis membiarkan proses itu berlangsung secara alami. Tetapi, sesuatu yang dibiarkan menurut proses alam, bisa terlalu lama dan tidak terkontrol. Jadi harus ada *deliberation*, kesengajaan. Tidak boleh *by accident*, atau secara kebetulan.

Revolusi?

Kalau itu jangan, kita semua kan tidak menghendaki itu. Secara pribadi bolehlah saya mengakui trauma tahun 1965-1966. Dalam arti, kita jangan lagi mengalami proses yang harus menumpahkan darah.

Ada pendapat, oposisi tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Lantas, oposisi mana yang Anda maksud, formal atau informal?

Karena perkataan oposisi itu sendiri bisa menimbulkan trauma, maka tidak usahlah kita memutlakkan kata oposisi. Yang lebih penting, tumbuhkan mekanisme pengawasan dan pengimbangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *check and balance* itu. Kalau ditanyakan formal atau informal, jelas harus formal. Yang informal bukan berarti tidak perlu, jelas harus formal. Yaitu dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal. Dalam hal ini, tentu melalui partai.

Oposisi yang informal memang sudah terjadi sekarang. LSM-LSM hampir semua begitu. Juga, misalnya, gambaran di balik kata-kata orang yang vokal. Tokoh vokal sebenarnya wujud dari *check and balance* yang informal. Tapi justru supaya hal ini tidak *accident* dengan segala eksesnya, maka lebih baik diformalkan. Sebab kita sendiri sering menggunakan metafor letupan, meletup. Artinya, suatu daya yang selama ini ditahan kemudian meletup. Kalau kecil meletup, kalau besar maka jadi ledakan.

Sejauh mana formalitas itu penting dalam hal ini?

Itu jelas. Dengan formalitas mekanisme *check and balance* itu, maka *pent-up feeling* atau perasaan-perasaan yang tersumbat itu akan tersalurkan. Dan itu bisa menjadi lebih produktif. Sebab orang-orang ini bisa dijadikan sumber ide-ide yang paling kreatif dan maksimal. Karena selama ini mereka tidak terlibat. Jadi ada kemampuan untuk menjaga jarak. *Keep distances* dari kenyataan-kenyataan. Sebaliknya, bagi mereka yang terlibat, keterlibatannya itu sendiri akan mewarnai pendapat dan sikapnya.

Waktu saya berbicara di Salemba, ada yang bertanya, “Apakah tidak perlu partai baru?” Logikanya sederhana saja: kalau itu memang diakui hak politik, termasuk pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi — yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan berkumpul — maka logikanya diperbolehkan lahirnya partai baru. Tapi, karena terbentur aturan formal — yang *notabene* buatan kelompok yang sekarang memegang kekuasaan

— maka sekarang kita gunakan saja apa yang tersedia. Dan itu berarti PPP dan PDI.

Tapi apakah itu mungkin, kalau melihat posisi PPP dan PDI yang tak lebih sebagai subordinasi kekuasaan?

Itu *kan* sekadar langkah. PDI dan PPP posisinya memang canggung. Disebut partai pemerintah, bukan. Disebut partai oposisi, juga bukan. *Nah*, saya kira kecanggungan posisi inilah yang membuat mereka jadi tidak mampu berbuat. Tidak mampu mengambil inisiatif, yang kemudian diikuti oleh perasaan serba-salah. Dan kenyataannya memang begitu. Melangkah sedikit saja tegurannya sudah *out of proportion*.

Kalau begitu, mengapa alternatifnya bukan partai baru?

Memanfaatkan PPP dan PDI, itu yang paling mungkin. Orang bisa bicara, termasuk saya, bahwa yang paling ideal adalah membentuk partai baru. Itu memang bebas dari segala macam. Tetapi kenyataannya, kita terbentur pada aturan-aturan, kepada ini-itu, yang memakan waktu untuk mengubahnya. Misalnya, ada peraturan yang menyebutkan bahwa kontestan pemilu itu hanya ada tiga. Coba, bagaimana nanti mengubahnya? Tetapi, kalau PPP dan PDI itu sendiri yang memanfaatkan posisinya, maka apa yang kita harapkan sebagai *check and balance* itu akan terwujud.

Dan, dari situ akan ada *multiplying effect* (efek penggandaan), termasuk mereka sendiri yang akan menyadari. Sehingga, begitu melihat aturannya tidak cocok, ya diubah. Jadi menurut saya, lebih praktis memfungsikan PPP dan PDI sebagai partai pengawas dan pengimbang, kalau kita masih harus menghindari perkataan oposisi.

Lalu, apa yang harus dilakukan. Mungkinkah dibatasi oposisi yang demikian itu merupakan lawan dari penguasa atau *ruling party*?

Betul. Memang tidak selalu, apalagi kalau kita tangkap esensi oposisi adalah *check and balance*, tidak berarti *to oppose* tapi juga *to support*. Kalau kita bandingkan di Amerika, di sana *kan* formalnya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Sekarang, misalnya partai pemerintah dari Partai Demokrat, maka oposisinya Partai Republik. Tapi dalam beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Sebagian Republik memihak sini, sebagian Demokrat memihak sana, dan sebagainya. Namun, itu semua dilakukan dengan inisiatif penuh dari orang-orang itu.

Jadi, itu bukan masalah kebijakan golongan atau kelompok, melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat. *Nah*, PPP dan PDI sebenarnya bisa seperti itu. Tapi, *pertama*, ada masalah mental, yaitu melepaskan diri dari stereotip bahwa mereka bukan ini bukan itu. Atau ya ini, ya itu. Maksudnya, bukan partai pemerintah, juga bukan partai oposisi.

Konkretnya?

Sekarang kita tegas saja, siapa mereka itu? Kalau mengaku partai pemerintah, tagih dong kepada pemerintah: mana bagian saya untuk memerintah. Coba, tahun 1970, PPP menang di Jakarta. Secara logika, PPP seharusnya yang memerintah Jakarta. Tapi, itu *kan* tidak logis. Di Aceh, PPP selalu menang, tidak pernah sekalipun PPP diberi kesempatan untuk memerintah Aceh. Itu *kan* tidak logis. Dalam hal ini, terus terang, Malaysia jauh lebih maju. Negara Bagian Kelantan dimenangkan oleh PAS dan selalu diperintah oleh PAS, meskipun Mahathir dari UMNO sengit sekali. Tapi, itu suatu mekanisme demokrasi yang logis.

Masalahnya di Indonesia ini adalah kemandirian partai. Kita tahu bahwa ketergantungan parpol sudah sedemikian parah. Lalu apa tindakan riil yang harus mereka lakukan dalam rangka memosisikan partai agar bisa mandiri?

Yang riil adalah dimulai dengan suatu tindakan. Pada pemilu yang akan datang mereka harus berani menyatakan diri sebagai calon presiden. Ismail Hassan Metareum harus mulai tampil sebagai calon presiden. Megawati juga begitu. Ini *kan* tinggal dua tahun saja, harus mulai dicoba.

Sesederhana itu?

Kedengarannya memang sederhana, tetapi kompleks sekali. Karena apa? Kita sekarang dihadapkan kepada pertanyaan, “Oke, saya akan pilih Anda, tetapi apa bedanya dengan ini?” Harus ada proses redefinisi. Mendefinisikan kembali dirinya, siapa sebenarnya saya ini. Maksudnya wawasan, program dan sebagainya. Artinya, dengan dimulai sikap yang simbolik tadi, akan ada banyak redefinisi, *multipling effect* yang banyak. Partai dipaksa untuk mendefinisikan kembali wawasannya, visi politiknya apa. Dengan berdasar visi politik itu, lalu programnya apa. Dengan begitu antisipasinya kalau mau menang. Misalnya, memperluas basis konstituensi, basis pemilihnya. PPP *kan* pemilihnya terbatas. Suatu partai dengan pemilih yang sudah terjajah. Saya berani taruhan, PPP tidak kampanye punya segitu perolehan suaranya. Turun tidak banyak, naik juga tidak banyak. Kalau seperti itu, lalu untuk apa berpartai? Berpartai itu *kan* untuk suatu saat menang dan memerintah. Logikanya *kan* begitu.

Lalu, bagaimana kita bisa mengoposisikan kedua parpol itu sementara ABRI juga mempunyai wakil di DPR?

Sebetulnya, adanya ABRI di DPR itu, karena tindakan-tindakan darurat. Itu ide awal Orba yang diotaki oleh almarhum Ali Moertopo. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, ide seperti ini sifatnya darurat. Saat itu *kan* ada ketakutan terhadap upaya mengubah ideologi negara. Di situ Pak Harto berpikir, sehingga pada akhirnya sampai pada asas tunggal.

Seharusnya, kalau sudah ada asas tunggal, tindakan darurat segera ditinggalkan. Dan kita kembali kepada hal yang wajar. ABRI sendiri sekarang ada progres. Misalnya jumlah mereka di DPR dikurangi. Selain itu, statemen-statemen yang keluar dari ABRI — seperti Menhankam Edi Sudradjat — menurut saya itu luar biasa. Ketika seminar Sesko ABRI di Bandung pekan lalu, saya mempunyai kesan bahwa yang hadir itu mengerti dan bisa mengapresiasi apa yang saya kemukakan.

Anda mengatakan bahwa peraturan itu dibuat dalam keadaan darurat. Bukankah itu berarti perlu perombakan?

Kita tidak mengesampingkan begitu saja kegunaan dari peraturan-peraturan tersebut. Waktu itu ada istilah *sloganeering*, maka jadilah Golkar sebagai *single majority*. Memang, hal itu sudah terbukti baik karena negara ini selamat. Artinya, apa yang dikehendaki Ali Moertopo terwujud. Tetapi, karena sifatnya darurat *kan* bisa kontra produktif.

Bukankah oposisi itu merupakan produk pemikiran liberal?

Deregulasi sepuluh tahun yang lalu itu bagaimana? Itu *kan* pemikiran liberal. Ternyata sekarang diterima sebagai kenyataan.

Baik. Tadi Anda juga mengatakan bahwa gagasan ini tidak baru.

Benar. Gagasan seperti ini, sebenarnya sudah tercetus pada seminar-seminar Angkatan Darat. Misalnya, gagasan pemilu dengan sistem distrik. Pada waktu itu partai masih kuat dan mereka menentang gagasan tersebut. *Yah*, kandaslah gagasan itu. Dalam ekonomisasi politik, tentu saja harus dihindari resiko yang terlalu besar, mengingat basis Orba masih *fragile*. Namun, bukan berarti ide itu tidak relevan.

Dulu, di Angkatan Darat, banyak sekali orang yang berpikir demokratis. Misalnya, ide tentang dwi partai, seperti di Amerika — yang menggambarkan adanya partai pemerintah dan oposisi. Itulah *check and balance*, kebebasan untuk mempertahankan atau mengganti pemerintah. Atau *freedom to fire and hire the government*. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka gagasan itu dikesampingkan. Majulah solusi-solusi darurat, yang ternyata — harus diakui — terbukti kita bisa berjalan selama 30 tahun. Tetapi tidak benar juga, kalau ini lantas, sebagai solusi yang permanen. Bangsa ini makin maju, *kok*.

Lalu apa komentar Anda tentang tanggapan Pak Harto, bahwa oposisi itu tidak dikenal dalam budaya bangsa Indonesia?

Saya bisa melakukan *empathy* terhadap Pak Harto. Artinya, saya berusaha menempatkan diri pada posisi Pak Harto, beliau itu terlibat sebenar-benarnya dalam proses pembentukan negara ini. Jadi beliau melihat turun-naiknya bangsa ini. Karena itu, bagi saya, sangat masuk akal jika Pak Harto memberikan statemen itu. Tetapi saya membuat interpretasi di samping melakukan *empathy* tadi.

Maksud Anda?

Menurut saya, Pak Harto secara logis mewakili banyak orang yang memiliki trauma dengan eksperimen tahun 1950-an. Menurut saya ketika itu Indonesia secara tidak realistis, menerapkan demokrasi liberal. Tidak realistis, karena orang banyak masih buta huruf. *Nah*, akhirnya gagal total. Lihat Filipina yang mencoba menerapkan demokrasi *ala* AS, akhirnya gagal juga.

Jadi kaitannya dengan itu, memang relevan argumen mengenai siap atau belum siap. Itu bukan megada-ada. Di situ ada masalah kenisbian. Artinya, mampu dan tidak mampu itu, apa dan bagaimana mengukurnya? Saya bisa melakukan interpretasi seperti itu, karena Pak Harto dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan

pendapat itu tidak saja boleh, tetapi juga baik. Dan kenyataannya memang demikian. Dalam perjalanan kepresidenannya, ada juga kemajuan. Hari demi hari menunjukkan bahwa dia mendengar pendapat-pendapat dari luar, dan kemudian mengambilnya.

Kalau begitu, tanggapan Pak Harto bukan merupakan bantahan atas lontaran Anda itu?

Saya tidak bilang begitu. Cuma, sekadar ilustrasi — sekali lagi saya minta maaf dan jangan ditafsirkan seolah-olah saya mengklaim orisinalitas — saya juga pernah berbicara mengenai ideologi terbuka. Ini pun merupakan wacana banyak kalangan. Beberapa tahun lalu, saya pernah mempunyai kesempatan untuk menyatakan hal itu secara umum. Ketika itu, saya diundang Menteri Sosial dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, yang dilaksanakan di Aula Museum Satria Mandala. Saat itu disebut bahwa yang hadir adalah angkatan muda. Tetapi ternyata yang datang adalah perwira muda. Yang bicara waktu itu adalah almarhum Soediro, yang mewakili Angkatan 28. Alamsyah mewakili Angkatan 45, dan saya disebut sebagai angkatan penerus.

Apa yang Anda katakan dalam acara itu?

Ketika mendengar uraian Soediro dan Alamsyah, terkesan asyik sekali karena penuh dengan cerita nostalgia. Giliran saya berbicara, *kan* tidak mungkin bercerita tentang masa lalu. Tidak enak karena di belakang saya ada Sarwo Edhi Wibowo. Saya katakan pada forum, bahwa saya tidak bisa bernostalgia. Saya mengajak hadirin, melihat ke masa depan. Saya tegaskan pula bahwa kita semua sepakat bahwa masa depan kita adalah demokrasi — suatu tatanan sosial politik modern. Dan itu memerlukan ideologi modern, yang sifatnya *open ended*, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan sekali untuk selamanya, tetapi hanya rumusan aspirasi.

Saya katakan, Pancasila adalah rumusan aspirasi. Kalau menyebut Pancasila sebagai ideologi, boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya, itu kurang tepat dibanding Marxisme sebagai ideologi. Pancasila bisa menjadi ideologi modern, kalau kita biarkan *open ended*. Maksudnya, Pancasila jangan dirumuskan secara mendetail sekali, untuk selamanya atau *once and for all*. Sebab, hal itu akan menyebabkan ideologi menjadi ketinggalan zaman.

Maksud Anda semacam doktrin?

Ya, doktrin yang tertutup.

Bisa Anda berikan bukti?

Contohnya komunisme yang cuma bertahan 75 tahun dan akhirnya menjadi *obsolete*. Itu sebetulnya dalil Karl Meinhem, yang menyebut *ideology tends to be obsolete*. Nah, dalam rangka itu, maka berarti tidak dibenarkan adanya satu kelompok atau perorangan yang mengklaim sebagai yang berhak merumuskan. Jadi serahkan saja kepada dinamika masyarakat. Inilah *open ended ideology*.

Bagaimana reaksi masyarakat ketika itu?

Wah, keras sekali. Saya dituduh macam-macam. Tapi, sekali lagi, ini merupakan ilustrasi bahwa Pak Harto mendengar suara dari bawah. Sebab, tak lama setelah itu, Pak Harto dalam pidatonya di Bogor, menyebut soal ideologi terbuka. Sekali lagi, saya tidak mengklaim orisinalitas, tetapi itu menunjukkan bahwa Pak Harto mendengar dan menerima. Beliau bisa menerima kritik dengan gayanya yang khas.

Termasuk lontaran gagasan tentang oposisi ini?

Saya katakan tadi, selain melakukan *empathy* terhadap apa yang beliau sebutkan — bahwa di Indonesia tidak mengenal oposisi — saya juga melakukan interpretasi. Yang dimaksud Pak Harto dengan oposisi adalah oposisi seperti tahun 1950-an, yang konotasinya itu sikap-sikap bermusuhan dan obsesi menjatuhkan pemerintah. Sementara, kita yang kembali ke UUD 1945 harus mengakui itu sebagai rahmat.

Idenya sendiri *kan* ide pemerintah kuat, seperti Amerika. Kita meniru Amerika, yaitu pemerintah yang periodik — di Indonesia 5 tahun, di Amerika 4 tahun. Dan, selama itu, presiden tidak pernah dijatuhkan. Di Amerika baru sekali terjadi skandal *Watergate*. Namun, dia masih tetap dihormati. Jadi, oposisi yang terjadi di Indonesia, tidak seperti oposisi yang terjadi di tahun 1950-an. Ini di dalam kerangka UUD 1945, di mana pemerintah tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Karena itu, oposisi hanya berarti pengawasan dan pengimbangan tadi.

Dengan kata lain, Anda menganggap bahwa Pak Harto tidak sepenuhnya menentang oposisi?

Exactly. Yang dimaksud oposisi oleh beliau adalah oposisi *ala* 1950-an. Jadi, ini adalah interpretasi saya yang berdasarkan *empathy*. Saya menempatkan diri pada posisi beliau, yang menempatkan diri pada posisi yang menjalani sejarah 1950-an. Jelas saja hal itu membekas dalam dirinya. Apalagi saat itu, beliau masih muda. Jadi menurut saya, beliau tidak menentang oposisi. Buktinya beliau juga menegaskan bahwa beda pendapat itu penting. Itu *kan* sama saja.

Masalahnya sekarang, apakah hal ini akan dibiarkan terjadi *by accident* atau *deliberation*. Kalau *by accident*, maka akan terjadi letupan dan tidak terkontrol. Sebaliknya, jika *deliberation* yang artinya diarahkan dan diberikan pengakuan, semuanya akan bisa lebih bertanggung jawab. Repotnya, kalau ini ditekan-tekan atau *pent-up feeling* itu tadi, maka yang muncul adalah *greget* atau emosi,

yang kemudian akan muncul *ad hominim*. yang tertuju kepada orang tua.

Dan gejala *ad hominim* itu sekarang sudah tampak?

Sudah jelas sekali. Kalau nanti sudah dibuka semuanya, orang menghina akan tidak mendapat simpati. Sekarang orang menghina itu diberi tepukan, karena yang lain merasa tersalurkan.

Lantas, bagaimana Anda mengaitkan oposisi itu dengan UUD 1945. Bertentangkah ide itu dengan konstitusi kita?

Jelas tidak. Sama sekali tidak. Saya punya *feeling* bahwa Pak Harto referensinya adalah pengalaman tahun 1950. Kalau itu, memang benar sekali. Kita tidak akan pernah bisa mengulangi lagi kesalahan tahun 1950-an. Oposisi itu juga bersifat kekeluargaan. Artinya, *conjugal values* itu dipertahankan. Jadi tidak ada kesengitan. Atau istilahnya paguyuban. Tetapi tidak berarti dalam keluarga tidak ada saling mengingatkan. Ingat-mengingat itu bentuk sederhana dari *check and balance* dalam sebuah keluarga.

Berarti, oposisi itu pun tidak bertentangan dengan asas musyawarah-mufakat?

Musyawarah-mufakat sebenarnya berangkat dari istilah dalam kultur Minang, sesuai dengan pepatah: *Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat*. Lihat saja Muchtar Naim dalam melihat pola budaya. Dia menyatakan, bahwa pola budaya Indonesia ini ada dua, yaitu: Jawa dan luar Jawa. Eksponen luar Jawa itu *kan* Minang. Tapi sebetulnya tidak terlalu simetris. Kalau dilihat dari segi bahasa, kita menerima dengan enak, tenang, dan baik sekali. Dan bahasa nasional itu dari bahasa Melayu. Dan itu berarti keluarjawaan, yang berarti pula budaya pantai.

Maksud Anda?

Artinya, Jawa yang pantai pun begitu. Pantai Jawa itu lebih dekat kepada budaya pesisir, bukan pedalaman atau *inland culture*. Ciri-cirinya adalah kosmopolit. Orang Semarang, Palembang, Surabaya, ya sama saja walau berpindah tempat. Kemudian, egaliter dan *mobil*. Mereka juga bersifat terbuka dan berkecenderungan pola ekonomi dagang. Prototipenya Sriwijaya. Kalau Majapahit itu masih maritim. Dengan demikian, kalau kita kaitkan antara oposisi dengan asas musyawarah-mufakat, memang bisa bertemu. Karena istilah itu diambil dari budaya Minang, yang juga merupakan pola budaya pantai. Dan kita ketahui masyarakat dengan budaya pantai itu lebih terbuka.

Tetapi, di Indonesia terkenal juga budaya *ewuh pakewuh*, yang sering menjadi kendala untuk melakukan ini-itu?

Begini. Itu juga banyak stereotip. Banyak sekali yang menganggap bahwa orang asing tidak mengenal budaya *ewuh pakewuh*. Padahal, orang Amerika itu sopan sekali. Mereka terkadang lebih sopan, lebih *ewuh pakewuh* daripada kita. Saya punya pengalaman ketika pertama kali ke Amerika. Saya diperkenalkan oleh teman, yang memang sudah mengenal saya betul, kepada orang-orang Amerika lainnya. Terus terang, saya merasa risi dan menganggap teman saya terlalu berlebihan. Tetapi, rupanya, memuji orang merupakan bagian dari budaya mereka. Orang Amerika itu memang pemuja. Jadi, kita tidak bisa mencap budaya *ewuh pakewuh* itu negatif. Hal itu bisa negatif jika ditempatkan tidak pada tempatnya.

Contohnya?

Misalnya dalam masalah benar dan salah. *Ewuh pakewuh* itu mungkin yang punya andil, sehingga kita dianggap sebagai bangsa yang lembek dari segi etika, atau *soft nation*. Kita cenderung membi-

arkan. Ini menurut saya tidak pada tempatnya. Kita harus tegas, apalagi dalam Islam kita mengenal *furqân*, yang berarti ketegasan dalam menentukan baik-buruknya sesuatu.

Artinya, tak perlu PPP dan PDI *ewuh pakewuh* untuk mencalonkan presiden dari partainya?

Ya, itu sebagai contoh simbolik tadi. Dengan begitu kita harapkan akan menjadi *multiplying effect*, seperti keterpaksaan unruk mendefinisikan kembali siapa saya, merumuskan kembali program, dan sebagainya. Sebab, kalau tidak demikian, itu *absurd* namanya. Dan ini penting untuk mendidik orang atau rakyat dalam melihat alternatif.

Selama ini kita tidak melihat banyak alternatif. Makanya, ketika Naro mencalonkan diri sebagai calon wapres, saya senang dan saya dukung, walaupun saya dari F-KP. Saya katakan itu secara terbuka. Hanya saya bilang, kalau hal ini berlanjut, dan terjadi pemilihan, saya tidak akan memilih Naro. Terus terang saya tidak suka. Jadi ini pemihakan terhadap sistem, bukan perorangan. Dan ini penting.

Tadi Anda juga menyebut oposisi yang informal, sudah banyak di Indonesia. Bagaimana dengan Fordem (Forum Demokrasi), Petisi 50, Partai Rakyat Demokrat, dan lain-lain?

Munculnya beragam kelompok itu jelas merupakan suatu hal yang positif. Itu merupakan bagian dari pertumbuhan demokrasi. Itu pula sebabnya mengapa pemikiran demokrasi merumuskan tentang perlunya kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat. Termasuk lahirnya PCPP yang membuat orang takut akan menjadi pesaing ICMI. Kalau ICMI demokratis, ya tidak usah mengkhawatirkan PCPP. Biarkan saja dia tumbuh.

Bukankah lahirnya kelompok-kelompok di luar sistem itu justru akan menambah letupan-letupan, seperti yang Anda sebut tadi?

Memang benar. Itu bisa ditafsirkan sebagai letupan, kalau proses terbentuknya disertai dengan perasaan terpaksa. Tetapi kalau dengan perasaan kebebasan, karena diakui, itu bukan merupakan letupan, melainkan suatu penyaluran yang wajar. Jadi kemunculan seperti itu berbeda dengan kemunculan dalam situasi yang ditekan-tekan, atau karena *greget* tadi.

Kalau melihat kondisi PPP dan PDI, mana yang kira-kira lebih siap untuk mengoposisikan dirinya? Atau, perlukah mereka berkoalisi untuk menjadi kekuatan oposisi?

Tidak perlu begitu, karena nantinya sangat artifisial. Kalau PPP dan PDI memang mau menyatu, biarkan saja secara alami. Memang menyedihkan kalau persoalan di tubuh PDI itu tidak habis-habisnya. Ini, menurut saya, karena banyak orang berpolitik hanya sebagai politisi, bukan sebagai negarawan. Kalau sebagai oposisi, maka obsesinya selalu kepentingan pribadi atau kedudukan.

Makanya saya berpendapat, kalau memang mereka negarawan, mestinya mereka terjun dalam proses demokrasi — meskipun mereka tidak memperoleh apa-apa. Termasuk itu tadi, mencalonkan diri sebagai presiden, walaupun dia nantinya tidak mendapat apa-apa dan hanya mendapat kesulitan. Tetapi masyarakat akan melihat. Di situlah, saya menghargai sikap orang seperti Gus Dur. Cuma, kalau ditanya, mana yang lebih siap antara PPP dan PDI untuk dijadikan oposisi, saya kira itu hanya masalah teknis. Saya tidak tahu mana yang lebih siap.

Kesannya, lontaran Anda tak lebih dari sekadar ajakan moral?

Saya setuju dengan istilah ajakan moral. Dengan kata lain, ini semacam gerakan *people empowerment*. Ini menyangkut masalah inisiatif. Dan inisiatif itu menyangkut masalah penggunaan kesempatan. Persoalannya adalah, kesempatan itu harus diciptakan. Bukan ditunggu atau diberi orang. Coba bayangkan, jika tiga partai

ini seimbang akan sangat bagus sekali kehidupan politik kita ini. Dan sekali lagi, saya yakin, masyarakat kita tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang terjadi di tahun 1950-an. Karena itu, dalil Orba untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu sudah betul. Ini dalam kerangka UUD 1945. Makanya, oposisi bukan berarti menjatuhkan pemerintah. [❖]

OPOSISI TIDAK IDENTIK MELAWAN ARUS¹

Label oposisi, jika diterapkan dalam konstelasi politik di negeri ini, khususnya dalam sistem kepartaian kita, selalu bernada negatif. Padahal, hakekat oposisi itu, sebagai *check and balance*, pengawasan dan pengimbangan. Jadi partai oposisi itu wujud dari pengakuan adanya perbedaan pandangan. Pikiran perihal perlunya partai oposisi di Indonesia, secara intens digulirkan Nurcholish Madjid. Dan berikut ini petikan wawancara wartawan Tabloid *Detik* (almarhum) Mahmud F. Rakasima, Zulfikri, dan Nurrahmad dengan Nurcholish Madjid.

Penilaian Anda terhadap keterbukaan Pak Harto minta dikritik?

Saya melihat segi positif dari permintaan Pak Harto untuk dikoreksi. Bahwa ini merupakan bagian dari pertumbuhan kebangsaan kita terutama di bidang politik. Memang kita juga harus mengakui bahwa ada kemajuan dari pembangunan ekonomi yang berjalan dengan lancar dan diakui dunia internasional. Tapi juga tidak mungkin untuk ditutup-tutupi bahwa ada ketertundaan dalam pembangunan politik. Barangkali kalau disebut gagal, mungkin *sih* tidak, tetapi kalau pembangunan politik terus tertunda, bisa jadi kegagalan pada akhirnya.

¹ Tabloid *DETIK*, "Oposisi Tak Identik Menentang Terus", No. 025 TAHUN XVII, 25-31 Agustus 1993. Pewawancara Mahmud F. Rakasima, Zulfikri dan Nurrahmad.

Padahal yang disebut merdeka itu lebih banyak politiknya. Kita menentang penjajah karena penjajahan itu merampas kemerdekaan politik kita. Kebetulan penjajahan itu asing, ya Belanda maupun Jepang.

Pembangunan politik perlu mendapat prioritas?

Ya. Bahkan perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi Pak Harto sudah memberi isyarat menuju ke sana. Dan itu harus disambut dengan baik.

Misalnya apa?

Yakni persoalan *basic* mengenai letak perbedaan pendapat. Banyak orang bilang soal itu bukan baru lagi. Tapi pernyataan Pak Harto bisa dikembangkan menuju pengakuan akan hak berbeda pendapat. Jadi bukan hanya perbedaan pendapat itu absah atau nyata dan tidak mungkin diingkari. Tapi diberikannya pengakuan pada rakyat untuk berbeda pendapat dan hak untuk tidak setuju, *right to dissent*.

Termasuk tidak setuju terhadap penyimpangan yang dilakukan pemerintah. *Nah*, mungkin karena keharusan kehidupan politik nasional, kita harus tunduk. Tapi ketundukan itu dengan *reserve* bahwa suatu saat penyimpangan itu harus diubah. Dan harus ada sikap seperti itu.

Di negara yang sudah maju demokrasinya, mekanismenya sudah jalan. Misalnya pergantian kubu Partai Republik oleh kubu oposisi dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski Partai Republik tidak setuju dengan pemerintahan Partai Demokrat, namun apa yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat, orang Republik itu harus tunduk.

Nah, sikap ketidaksetujuan ini perlu untuk kemungkinan memberikan alternatif di masa depan. Saya menilai hal itu wajar untuk

kita pikirkan di sini. Janganlah perbedaan pendapat ditafsirkan sebagai permusuhan yang negatif.

Jadi soal perbedaan pendapat itu esensial?

Ya, memang itu yang paling esensial. Demokrasi justru diciptakan untuk mengatasi perbedaan pendapat. Tapi cara mengatasinya harus damai, *human*, konstitusional, dan tidak berdarah. Sebab konflik *kan* bisa berdarah. Dan kalau setiap konflik diselesaikan dengan darah, masyarakat akan hancur.

Apa perbedaan pendapat itu karena *generation gap*?

Ya. Perbedaan pendapat itu memang tidak bisa dihindari. Ada karena perbedaan usia, atau generasi. Masalahnya apakah perbedaan itu dianggap prinsipil, sehingga menghalangi kerja sama atau mengganggu dalam memecahkan masalah di tingkat nasional. Jadi memang diperlukan kedewasaan dan mengembangkan kultur berbeda pendapat secara dewasa.

Menurut Cak Nur, pilihan kebijakan apa yang harus dikoreksi?

Tentu ada urutan prioritas. Saya setuju dengan pendapat mantan Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn.) Sayidiman, bahwa UU mengenai kepartaian harus diubah. Karena membuat masyarakat jadi tertutup. Kedua, UU mengenai pemilihan umum harus diubah.

Sebenarnya ide penyederhanaan partai itu bagus. Kita tidak mau energi habis untuk mengurus partai yang tidak terkendalikan jumlahnya, seperti tahun 1950-an. Dan penyederhanaan partai itu bisa ditempuh secara demokratis. Jadi tidak seperti UU sistem kepartaian sekarang ini, di mana ada pembatasan dua partai dan satu Golkar. Tapi terlebih dulu harus diatur mekanisme di mana nanti partai yang muncul bisa 2 atau 3.

Bisa memberi contoh?

Misalnya, pencalonan presiden Amerika, sebelumnya ada banyak calon yang bermunculan. Tapi kemudian setelah dikristalisasi hanya ada dua dari partai dan satu calon dari independen. *Nah*, agar kualitas para pemimpin kita bisa seperti itu, sebetulnya kita bisa memakai sistem distrik. Sayangnya ide sistem distrik yang dimunculkan dalam seminar Angkatan Darat Kedua, yang kemudian ditentang sendiri oleh kalangan partai, karena bertentangan dengan *vested interest* mereka.

Menentang itu bukan karena visi tentang perlunya pembangunan politik. *Nah*, dengan sistem distrik ini, wakil rakyat punya kewajiban moral untuk mewakili daerah pemilihnya. Sekarang *kan* nggak jelas kualitas wakil rakyat kita. Ini akibat mereka dipilih oleh pusat, sehingga jangan heran jika mereka menjadi semena-mena, dan banyak ditemukan keganjilan-keganjilan.

Ide Anda untuk memperbaiki?

Sistem pengangkatan anggota DPR/MPR harus ditinjau kembali. Taruhlah UUD memang menganut asas adanya perwakilan dari golongan ahli. Tapi pengangkatan itu harus bisa meyakinkan daerah yang diwakilinya. Jadi tidak bisa pengangkatan itu ditiptkan dari atas. Memang dulu ada kekhawatiran pengangkatan diperlukan untuk menepis kemungkinan adanya perubahan ideologi negara.

Tapi sekarang kondisinya sudah berubah drastis, dan tidak relevan mengajukan kekhawatiran ideologi seperti masa lalu. Selain itu, kebebasan pers harus diberikan, termasuk diberi kesempatan berdirinya partai oposisi. Karena *trend*-nya keterbukaan, maka Golkar pun harus diakui sama sebagai partai politik seperti PPP dan PDI. Jadi tidak boleh lagi ada pengistimewaan di dalam kehidupan politik.

Apa artinya perlu melegitimasi PPP dan PDI sebagai partai oposisi?

Ya betul. Tapi juga bisa bukan PPP dan PDI yang menjadi partai oposisi. Yakni kalau sistem kepartaiannya diubah terlebih dahulu, nanti akan muncul suatu kekuatan politik baru dalam wujud partai oposisi.

Berati ada perubahan format politik?

Ya. Dan *nggak* apa-apa. *Toh* ada tiga atau empat partai politik nantinya. Tapi yang jelas bukan partai yang jumlahnya tidak bisa dikendalikan. Kita *nggak* perlu banyak partai. Sebab boros dan tidak ekonomis. Cuma masalahnya berdirinya partai oposisi ini, apakah melalui legitimasi formal atau melalui proses. *Nah*, yang bagus kalau penyederhanaan melalui proses *kan* lebih demokratis, dinamis, dan lebih representatif. Kalau itu terjadi kita akan punya wakil rakyat yang pas kepada *constitunce*-nya.

PPP dan PDI menolak disebut partai opsosisi. Bagaimana ini?

Ya. Saya tahu itu. Sebab perkataan oposisi itu masih begitu menghantui dan traumatik. Wajar saja kita merasa khawatir dengan akibat-akibat negatif yang proposional. Sebetulnya ini kesalahan kita sendiri yang tidak mendidik rakyat secara realistis. Kita harus menciptakan suasana di mana kehadiran partai oposisi itu wajar-wajar saja.

Apakah munculnya partai oposisi, karena ada masyarakat yang tidak terwakili?

Oh jelas dong. Golongan Putih *kan* fenomena munculnya suara masyarakat yang tidak tertampung di dalam partai politik yang ada saat ini. Sekarang ini Golput masih kecil karena memang dihalangi, tapi kalau diberi keleluasan bergerak, Golput jelas akan cepat membesar. Padahal modus Golput itu ada benarnya. Yakni memilih untuk tidak memilih.

Apa urgensinya kehadiran partai oposisi?

Urgensinya di dalam demokrasi itu ada mekanisme *check and balance*, pengawasan dan pengimbangan. *Nah*, mekanisme itu tidak akan efektif bila tak ada pengakuan resmi tentang adanya partai oposisi. Jadi partai oposisi itu wujud dari pengakuan adanya perbedaan pandangan, itu sah dan tidak usah khawatir bahwa partai oposisi itu akan menggulingkan pemerintahan.

Kenapa?

Karena kita menganut UUD '45, di mana pemerintah itu tidak bisa dijatuhkan. Pemerintah mempunyai periode masa jabatan selama lima tahun. *Nah*, sebelum datang masa lima tahun yang dibutuhkan, sampai saat ada pemerintah yang baru hasil pemilu, pemerintah yang lama tidak bisa dijatuhkan.

Kita menganut sistem UUD '45 dengan sistem presidensial. Sistem itu sebenarnya meniru Amerika, di mana presidennya tidak bisa dijatuhkan kecuali karena faktor pelanggaran yang serius. Presiden Nixon, misalnya. Sepanjang perjalanan Amerika, baru Nixon yang terkena pelanggaran berat. Jadi tidak seperti di India di mana oposisinya hanya bertujuan menjatuhkan pemerintah. Juga di Pakistan, atau di negeri-negeri Eropa Barat seperti Inggris.

Prediksi Anda partai oposisi itu kapan bisa terlaksana?

Dari sekarang harus mulai dirintis. Misalnya PPP dan PDI harus berani mengatakan bahwa karena kita bukan partai yang memerintah, jadi kita namanya partai oposisi. Dan sikap itu diwujudkan dalam berbagai tindakan dan kebijaksanaan politik partainya. Jadi sikap politik itu tidak hanya menentang, tapi juga setuju.

Di Amerika saja, *beleid* dari Partai Republik terkadang didukung Presiden dari Partai Demokrat. Atau sebaliknya. Jadi tidak berarti

kehadiran partai oposisi itu identik dengan menentang terus. Tapi yang terpenting adalah ada sikap kritis dan *reasoning*-nya setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Jangan bisanya cuma kebulatan tekad saja. Butek.

Adakah landasan konstitusional berdirinya partai oposisi?

Saya pikir ada. Itu *kan* cuma masalah penerjemahan dari beberapa ketentuan di dalam konstitusi.

Apa syaratnya?

Ya terlebih dulu harus dengan mengubah undang-undang sistem kepartaian dan UU mengenai pemilu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan ide Sayidiman bahwa kita sekarang memerlukan deregulasi politik.

Tetapi ada yang tetap ingin mempertahankan agar Golkar dalam posisi sebagai *single majority*?

Kita memang sejauh ini bicara dari kondisi ideal. Tapi dari segi praktis untuk jangka waktu yang lama, mungkin keinginan untuk mempunyai sistem perpolitikan yang mengenal *single majority*. Partai Kongres di India, atau LDP di Jepang pun begitu, sejak zaman Mc Arthur yang sekarang hancur.

Jadi artinya gagasan *single majority* itu tidak unik Indonesia. Tapi akan beda, apakah sistem itu mengenal oposisi atau tidak. Di Jepang meski LDP selalu berkuasa tetapi tetap partai oposisinya hidup betul dan tidak pura-pura. Karena itu, LDP sekurang-kurangnya merasa, bahwa partai tidak bisa menjalankan politik semauanya, karena ada partai oposisi yang mengontrolnya.

Ini terlihat ketika sudah sekian lamanya berkuasa, kebobrokan LDP pada akhirnya bisa dibongkar oleh partai oposisi. *Nah*, kalau

tidak ada partai oposisi, kemungkinan terbongkarnya kebobrokan di tubuh LDP kecil.

Sejauh mana kendala kepemimpinan paternalistik?

Ya jelas soal paternalisme selalu disebut-sebut ketika orang membicarakan kemungkinan berdirinya partai oposisi itu. Tapi *kan* model-model kepemimpinan paternalistik bukan khas Indonesia saja. Di Jepang sendiri, faktor senioritas tetap memegang peranan penting.

Jelas itu merupakan bagian dari kultur politik yang harus kita perhitungkan. Tapi menurut saya, hal itu tidak perlu menjadi penghalang yang tidak teratasi. Buktinya Jepang sendiri meski tetap paternalistik, *toh* demokrasi tetap berjalan.

Apa Petisi 50 atau Forum Demokrasi bisa menjadi Partai Oposisi?

Bisa saja. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Sayidiman tentang deregulasi politik. Tapi yang penting harus diciptakan mekanisme yang wajar dan terbuka guna menuju proses kristalisasi. Jadi bukan Petisi 50, Forum Demokrasi membuat partai sendiri-sendiri. Dan tidak mustahil juga nanti, ada orang Petisi 50 atau Forum Demokrasi yang masuk ke PPP dan PDI. Jadi ide dasar partai oposisi itu, *check and balance*.

Apa tanpa partai oposisi mekanisme *check and balance* itu tidak bekerja?

Oh jelas. Memang ada unsur lain yang bekerja seperti kalangan akademisi, pers dengan kebebasan persnya. Tapi itu unsur-unsur yang akan membentuk mekanisme *check and balance*. Padahal secara formal yang paling penting ialah partai oposisi. Dan kita masih perlu mengetes sejauh mana partai oposisi itu bisa bekerja dalam sistem yang paternalistik seperti sekarang ini.

Anggapan rakyat tentang partai oposisi masih bernada negatif. Bagaimana komentar Anda?

Karena itulah PPP dan PDI pun segan disebut partai oposisi. Karena efek di bawah. Tapi kalau rakyat terus-menerus ditakuti dengan citra partai oposisi, kapan rakyat kita bisa dewasa untuk berdemokrasi. Padahal hakekat PPP dan PDI, tidak masuk di dalam posisi pemerintahan, itu *kan* namanya oposisi.

Apa yang pantas dikritik untuk Pak Harto?

Yang jelas jangan pribadinya. Di Amerika saja ada beda antara mengkritik (*to criticize*) dan menghina (*to insult*). Mengkritik itu selalu baik dan menghina itu jahat dan bisa dituntut. Sayangnya, sering kita tidak bisa membedakan kedua hal itu. Jadi kita harus mulai belajar. Dan demokrasi *kan* tidak langsung jatuh dari langit. Demokrasi itu harus melalui proses belajar dan pengalaman. Termasuk kita harus belajar untuk mengkritik dan menerima kritik. Jangan salah kalau ada pejabat yang dikritik nanti mengira dihina.

Jadi persoalannya terletak pada penafsiran peran dwi fungsi ABRI dalam masyarakat yang lebih terbuka?

Ya betul. Jadi semua itu mempunyai efek kepada penyiapan kita untuk mengalami suksesi secara damai, konstitusional dan lancar. Dan juga untuk menyadarkan masyarakat kita, bahwa kita tidak perlu lagi ada figur yang dominan sebagai Bapak Bangsa.

Bangsa Indonesia sudah 48 tahun merdeka, dan hidup di bawah dominasi Bapak Bangsa. *Pertama* di bawah Bung Karno, dan *kedua* Pak Harto.

Kalau kita mau jujur, hampir semua persoalan itu diselesaikan oleh satu orang. Meskipun ada *state* dan panggung-panggung seperti DPR/MPR, tapi sebetulnya penyelesaian terakhir secara prinsipil dilakukan oleh satu orang. Memang itu tidak ada salahnya

dan setiap bangsa pernah melalui hal itu. Nah kalau nanti terjadi suksesi, kita belum pernah bisa membuktikan tanpa Bapak Bangsa ini bisa atau tidak kita melaluinya.

Kenapa?

Pemimpin itu yang pertama di antara yang sama (*the first among the equals*). Nah, kalau prinsip itu tidak kita kembangkan dalam mekanisme berdemokrasi dengan institusi politik yang sehat, kedewasaan berbeda pendapat, maka kemungkinan terjadinya percekocokan (*quarrel*) di antara orang yang sama akan tidak terhindari. Karena kita selalu tergantung kepada Bapak Bangsa. Jadi intinya jangan sampai kehidupan berbangsa kita tergantung kepada satu orang saja. [❖]

OPOSISI ATAU KEDEWASAAN¹

“Saya optimis,” kata Dr. Nurcholish Madjid, ahli filsafat Islam dan pendiri Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, ketika menyampaikan pandangannya tentang prospek umat Islam di Indonesia kepada wartawan *TEMPO*, Wahyu Muryadi dan Priyono B. Sumbogo. Ia juga memaparkan perihal kerukunan antar-pemeluk agama sebagai satu keharusan dalam konstelasi kehidupan beragama.

Wajah Islam menjelang 1991, makin manis, terutama terhadap pemerintah. Bahkan, akhirnya lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didukung sejumlah pejabat. Komentar Anda?

Soal wajah umat Islam manis, itu resiprokal — hasil proses dua belah pihak. Kualitas dan fungsi umat Islam yang seperti itu berkaitan dengan meningkatnya pendidikan. ICMI pun harus kita baca dalam kerangka itu.

Selama ini umat Islam merupakan kelompok yang relatif vokal. Ada lembaga seperti masjid. Maka, dari dulu suara yang diwakili para ulama nyaring terdengar. Ajaran agama memberikan pedoman normatif, maka suara mereka selalu bernada normatif. Yaitu nada apa yang seharusnya.

¹ Majalah *TEMPO*, “Oposisi Atau Kedewasaan”, No. 44/20, 29 Desember 1990. Pewawancara Wahyu Muryadi dan Priyono B. Sumbogo.

Dengan sendirinya selalu ada jarak dengan kenyataan yang berjalan menurut apa yang mungkin. Adanya jarak itu mengesankan sikap oposisi terhadap pemerintah. Pernah ada adagium yang mengatakan ulama yang paling jahat adalah ulama yang datang kepada pemerintah.

Itu sama dengan sikap kaum intelektual, yang juga bicara apa yang seharusnya. Intelektual di Amerika, ya, kekiri-kirian. Di Eropa Timur, kekanan-kananan. Ada *gap* dengan kenyataan. Ini tak bakal berubah.

Sekarang, intelektual Islam yang *notabene* berpendidikan modern Barat memperhitungkan fakta-fakta hingga cara berpikirnya tidak semata-mata normatif tetapi juga *scientific*. Mereka tahu cara sehingga mereka itu disebut cendekiawan.

Tidak usah sembunyi-sembunyi, cendekiawan yang berkumpul di Malang itu 90% berpendidikan Barat. Baik Barat yang ada di Indonesia maupun yang di Barat sana. Maka, ada kombinasi. Jadi, ICMI harus dilihat sebagai gejala menutup kesenjangan antara yang seharusnya dan apa yang mungkin. Inilah optimisme saya.

Dalam lima sampai sepuluh tahun akan terasa kematangan dan kedewasaan yang menaik. Misalnya, kehendak terhadap pemerintah. Taruhlah, pemerintah harus adil. Dahulu, keinginan itu hanya slogan. Kelak bisa disertai tindakan, usul, atau konsep mengenai masalah keadilan itu.

Munculnya ICMI, apa bukan bukti umat Islam makin kompromistis terhadap pemerintah?

Orang seperti Amien Rais atau Watik Pratiknya, yang selama ini dikenal oposan dan sekarang ikut ICMI, saya tak mengenal itu kompromi. Itu adalah kedewasaan. Oposisi berbeda dengan *oppositionalism*. Oposisi adalah suatu tugas, dalam arti loyal pada pemerintah. Bila pemerintah tidak benar, mereka ingatkan. Ini yang disebut amar makruf nahi munkar.

Umat Islam, karena beberapa pengalaman politik di masa lalu — sebagian karena kesalahan sendiri, sebagian yang lain karena konspirasi dengan luar — menghasilkan pengalaman politik yang negatif. Itu berlarut jadi *sindrom oppositionalism*. Misalnya, kasus Warman dan Tanjungpriok bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini karena sebagian besar orang Indonesia itu umat Islam.

Namun, kalau sebagian besar orang Indonesia adalah Katolik, ya umat Katolik yang begitu. Contohnya di Filipina. Yang memimpin New People's Army para pastor. Di Burma, yang sebagian besar rakyatnya menganut Budha, yang memimpin perlawanan terhadap Ne Win, ya para biksu. Bentuk *oppostionalism* muncul karena pesimisme. Karena merasa tak didengar, lalu mereka berteriak.

Apakah sekarang umat Islam sudah memperlihatkan sikap oposisi loyal?

Itu masih harapan. Kalau diakui eksistensinya, misalnya, wadah ICMI, orang akan makin berpikir positif. Orang-orang ini punya ide sendiri mengenai negara. Inilah kegunaan terbesar dari adanya ICMI.

Apa misalnya Muhammadiyah atau NU belum memperlihatkan sikap itu?

Secara perorangan sudah. Tapi, secara kelembagaan belum. Kini banyak jenderal dan pejabat punya latar Muhammadiyah. Sebab, organisasi ini memiliki tradisi tak terjun dalam politik praktis. Jadi, berkurang dinding antara pemerintah dan Muhammadiyah. Maka, orang mudah masuk ke jajaran birokrasi.

Sebaliknya dengan NU. Pernah sebagai partai politik, maka dinding itu kuat sekali. NU pergi dari ekstrim ke ekstrim. NU pernah *walk out* dari sidang DPR (1982). Tapi saya belum pernah mendengar ada jenderal yang berasal dari NU. Setelah kembali ke *khittah*, tampaknya NU sudah memperbaiki diri.

Oposisi loyal harus partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) harus tegas fungsinya. Seandainya saya pemimpin salah satunya, ketua umum pada tiap pemilu harus mencalonkan diri sebagai presiden. Jangan belum-belum sudah butek, atau kebulatan tekad. Memang, jangan mengharapkan menang.

Yang penting mendidik rakyat menyediakan alternatif. Kalau tidak begitu, itu yang namanya kompromistis. Ismail Hasan Metareum, misalnya, harus tegas. “Sayalah calon presiden dari PPP”. Begitu. Atau kalau dia merasa tak sanggup, cari calon lain dari PPP. Pokoknya, memberikan alternatif pada rakyat untuk memilih. Dan pemerintah harus memberi kesempatan itu pada rakyat.

Apakah karena selama ini tidak ada suasana yang kondusif?

Ya. Dulu memang pada 1965-1966 masih rawan. Maka tercipta suasana seperti itu. Tapi seharusnya tidak menjadi pandangan politik permanen. Sekarang sedikit demi sedikit pemerintah membuka kemungkinan itu. Buktinya, orang diberi kesempatan memberikan tafsiran terhadap Pancasila, asal bertanggung jawab.

Sikap pemerintah yang elastis itu, apa sudah saatnya?

Memang kita tidak menghendaki grafik terjal. Saya setuju landai saja, asal terus naik. Kita harus mendorong proses demokrasi itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Menurut saya, momen pemilu nanti harus digunakan untuk merintis secara substantif proses demokratisasi ini.

Berkenaan dengan pemilu, partai-partai itu harus jelas, berani atau tidak tampil sebagai alternatif. Tak usah dengan retorika bombastis — itu indikasi tidak dewasa. Tapi dengan tenang menyatakan, sebetulnya negara kita setelah sekian lama membangun adalah itu, dan konsep kami adalah ini. Dan itu kami yang laksanakan. Mestinya begitu.

Mengapa keberanian partai-partai menampilkan diri kurang mencuat ke permukaan?

Saya takut, seperti dibilang Bung Hatta: zaman besar ketemu orang kecil. Momennya besar tapi orangnya kecil. Tidak berani menangkap momen.

Sikap umat Islam memanfaatkan momentum itu?

Sebaiknya umat Islam lebih dewasa. Artinya, dukung siapa saja yang mau didukung. Contohnya, sewaktu Musda Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Bengkulu. Karena di situ banyak yang Golkar dan PPP, saya lihat *kok* tak ada yang PDI. Maka, saya bilang, mungkin kita perlu mencari *volunteer* masuk PDI.

Kemudian, PPP yang mengklaim sebagai partai Islam?

Saya berharap PPP jangan mempersempit dirinya hanya dengan mengklaim sebagai partai orang Islam. Sebab, sekarang orang lebih banyak memperhatikan apa yang dia mau dari segi politik. Jangan hanya mengandalkan simbol.

Kita beralih. Belakangan ini kerukunan antara pemeluk agama kembali jadi isu. Pandangan Anda?

Itulah. Saya bilang berkali-kali, kenapa saya marah. (Seraya menarik napas panjang). Saya ada hak sedikit untuk mengakui bahwa saya telah berbuat untuk mengembangkan toleransi itu. Tiba-tiba Arswendo mengganggu dengan *guyon* begitu saja. Saya merasa disepelekan betul. Sebab, teman-teman saya, yang selama ini tidak setuju dengan istilah toleransi dan sebagainya itu, akan dengan gampang mengatakan: Nah, betul kan, Cak Nur, bahwa mereka kayak gitu itu. Masa begitu *kok* ditolerir.

Jadi, itu namanya menarik karpet dari bawah meja Anda. Meja Anda terguling, *you pull the carpet from under my table*. Saya bilang begitu pada Jakob Oetama (Pemimpin Redaksi Kompas — *ed.*). Jadi, marah saya bukan karena umat, begitu. Saya ini sudah capek disalahpahami, difitnah, dan sebagainya karena mengembangkan toleransi. Tapi Arswendo sudah mengganggu secara tidak bertanggung jawab. Tolong ini disebut.

Jadi, bukan sikap saya itu akomodasi kepada umat. Paramadina itu waktu berdiri, macam-macam datang reaksi. Difitnah seolah sudah digunakan oleh orang Kristen dan sebagainya, karena kita selalu mengajukan argumen untuk toleransi.

Ini berat. Sebab, ada landasan teologisnya. Dan itu kita kembangkan, sampai-sampai orang semacam John L. Esposito ke sini mencari artikel-artikel saya untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tiba-tiba oleh Arswendo dibeginikan saja dengan *guyon*, karena ingin oplahnya naik. Bagaimana kita nggak marah. Tapi dengan pemerintah bertindak tegas, orang mulai positif lagi.

Negara ini mayoritasnya umat Islam. Karena itu, kerukunan beragama jauh lebih terjamin daripada kalau terbalik. Lihat saja di mana-mana. Orang boleh mengatakan sebagai retorika politik bahwa berkat Pancasila kita toleran. Namun, secara substansi adalah berkat Islam kita toleran. [❖]

BERPOLITIK TANPA KEBERANIAN¹

Oposisi, seringkali dianggap satu kata yang ikut serta menghantui peta politik negeri ini. Padahal, oposisi itu, hanyalah satu diksi yang diambil dari perbendaharaan kata modern. Di sisi yang lain, kita pun memungut beberapa kata modern untuk beberapa nama, seperti; republik, presiden, dan parlemen. Untuk itulah, Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim, mempersoalkan, mengapa kita hams menolak istilah oposisi? Sebab hakekat dari oposisi itu adalah *check and balance*, pengawasan dan perimbangan. *Media Indonesia* melalui Budiman S. Hartoyo melakukan wawancara dengan Nurcholish Madjid di kediamannya.

Oposisi, secara teori, adalah bentuk keikutsertaan masyarakat yang dipimpin berupa keikutsertaan mengoreksi. Tapi kenyataan sehari-hari apa yang Cak Nur lihat?

Ya, belum. PPP dan PDI macet. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya dan diakui kedua partai itu, bahwa mereka adalah pelengkap penderita. Jadi dimulai dengan kenyataan bahwa partai-partai itu tidak berfungsi. Tapi itu karena kedudukan mereka yang canggung (akibat) disubsidi dan sebagainya. Selain disubsidi, tak boleh disebut partai oposisi. Tapi disebut partai pemerintah juga

¹ *Media Indonesia*, “Bagaimana Bisa Berpolitik Tanpa Keberanian”, Minggu, 17 September 1995. Pewawancara Budiman S. Hartoyo. Selama sebulan, setelah wawancara ini dimuat, *Media Indonesia* Edisi Minggu, “diistirahatkan”.

tidak, karena tak ikut memerintah. Sementara Golkar selalu mengatakan *single majority*. Kalau ada mayoritas, berarti ada minoritas. *Lho*, (partai) minoritas itu *kan* oposisi (tertawa).

Karena undang-undang kita tak mengakui oposisi, ada yang menganggap sebaiknya partai politik minoritas menjadi “*critical party*”, partisipan yang kritis.

Begini. Kalau ada trauma terhadap oposisi, harus dimengerti. Karena memang ada pengalaman yang pahit sekali sekitar tahun 1950-an, saat banyak partai oposisi. Yakni, suatu kelompok yang dengan gaya yang sengit selalu ingin menjatuhkan pemerintah. Ya, waktu itu kita belum dewasa. Banyak masyarakat yang buta huruf. *Nah*, pengalaman ini membuat anggapan oposisi tidak cocok dengan kondisi kita. Tapi sebetulnya, partai oposisi itu sebenarnya adalah *check and balance* (pengawasan dan perimbangan) yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Bukan hanya dalam masyarakat Minang. Tapi juga Jawa. *Kan* ada tradisi *mepe* (demonstrasi berjemur di siang hari). Oposisi *kan* cuma istilah modern. Mengapa kita harus takut menggunakannya? Apalagi kita sudah meminjam istilah modern lainnya, seperti menamakan negara kita republik, kepala negara kita presiden, parlemen dan sebagainya. Mengapa kita harus menolak istilah oposisi? Begitu juga dengan “*critical party*”. Taruhlah kita tak boleh menggunakan istilah oposisi. Tapi mereka (partai politik) tetap harus menjadi kekuatan pengawas dan pengimbang.

Dilihat dari segi personil parpol, baik PPP maupun PDI, bagaimana? Apakah sudah cukup berpotensi untuk melakukan *check and balance* itu?

Kemampuan itu sering tercipta karena kesempatan. Masalahnya, kesempatan itu tak selalu diberikan tapi harus diciptakan sendiri. *Nah*, seringkali kita meremehkan orang pada saat ia belum melaku-

kannya. Seperti terjadi pada Pak Harto 30 tahun silam. Orang bertanya: apa bisa (beliau memimpin negara). Ternyata, ya sangat bisa (tertawa). *Nah*, Buya (Ismail Hasan Metareum) misalnya. Orangnya *kan* halus begitu. Tapi *toh* bisa juga meledak. Bahkan, ketika isu parpol yang digencet mencuat belakangan, sebenarnya ini isu lama. Tapi *toh* bisa juga meledak. Tapi yang menarik, bahwa hal itu Buya yang mengatakan (tertawa). Jadi jangan meremehkan. Tapi mari kita ciptakan kondisi supaya orang berani dan memunculkan potensinya. Selain itu, ini masalah mentalitas saja. Yakni, bagaimana Buya atau Megawati melepaskan diri dari stigma (cap) partainya. Contohnya, Kwik Kian Gie. Orang boleh bilang dia Cina. Tapi dia tidak peduli. Dia terus saja. Dan sekarang jelas ia tampak sebagai seorang yang benar-benar nasionalis.

Apakah oposisi tidak mengecilkkan arti “musyawarah untuk mufakat?”

Kalau menurut (sejarawan) Taufik Abdullah, ini masalah hegemoni makna. Musyawarah-mufakat itu seperti sekarang ini. Istilah ini berasal dari orang-orang Minang. Mereka yang pertama kali menggunakannya. Tapi musyawarah-mufakat dalam masyarakat Minang, tidak berarti konsensus. Mufakat berasal dari *muwâfaqah* yang berarti persetujuan. Artinya, laksanakanlah apa yang disetujui. Prosesnya bisa terjadi melalui voting. Kalau konsensus itu *ijmâ'*. Jadi keliru. Dalam mufakat bisa tetap berbeda pendapat, namun tetap dilaksanakan persetujuan biar pun melalui voting. Bukan seperti sekarang ini.

Dalam sejarah republik ini, baik dalam Demokrasi Terpimpin maupun yang sekarang ini, oposisi haram. Nanti kalau ada pun, akan dituduh liberal?

Itu proses saja. Kini, dalam ekonomi kita melakukan berbagai deregulasi. Ide-ide semacam ini, di masa lalu disebut liberal. Tapi

sekarang diterima. Malah nanti pada tahun 2002, kita akan liberal sepenuhnya. *Nah*, kalau nanti, politiknya masih tidak demikian, maka jadinya tidak simetris. Tidak sinkron, sehingga dapat menimbulkan berbagai krisis. Singapura jangan dijadikan contoh. Negara itu *kan* hanya sebesar Jakarta, terbilang kecil. Karena itu bisa saja Singapura maju dengan cara-cara yang khas Lee Kuan Yew. Kalau kita yang luasnya dari Sabang ke Merauke ini mengikuti, bisa meledak. Jadi sebaiknya kita mencontoh bangsa-bangsa yang cenderung federal itu. Mungkin kita tak menerapkan federalisme, tapi otonomi daerah harus jauh lebih besar ketimbang sekarang. Sebetulnya, untuk kesekian kalinya saya katakan: ide (oposisi) ini bukan gagasan orisinal saya. Diskursus (silang pendapat) di antara kita, saya hanya mengangkatnya ke permukaannya. Dan sebagai gejala, kita pun sudah melakukan.

Contohnya?

Contohnya: pikiran mengenai otonomi daerah lebih besar. Buruh sudah mulai demonstrasi. Lalu berbagai deregulasi. Juga, untuk tahun 1996, kegiatan politik tak perlu izin. Justru pesta yang perlu izin, karena dapat mengganggu orang banyak. Seperti yang menutup jalan. Jadi sebetulnya sudah banyak antisipasi yang sehat. Seperti berbagai statemen yang dilontarkan (Menko Polkam) Soesilo Soedarman belakangan ini. Banyak yang bagus sekali.

Misalnya?

Ya, seperti yang dilontarkannya pada Seminar Nasional Sesko ABRI beberapa waktu silam: bahwa sekarang ini harus ada sikap yang positif terhadap aspirasi dari bawah. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan (Menhankam) Edi Sudrajat. *Wah*, demokratis sekali. Misalnya, orang yang naik ke atas tak boleh hanya mengandalkan kedekatan pada atasan. Ya, soal *favouritism*. Harus berdasarkan kemampuan. *Nah*, bagaimana kita bisa mempromosikan orang

berdasarkan kemampuan tanpa adanya demokrasi? Tak mungkin *kan*? Sekarang ini orang naik karena *favouritism*. Dan kita tak menyalahkan proses yang barangkali memang menghendaki apa yang kita alami. Cuma kita menyalahkan cara berpikir bahwa hal-hal yang merupakan proses itu bersifat permanen. Ini salah. Misalnya, seperti yang dialami Golkar sekarang ini *kan* proses penyelesaian suatu persoalan pada waktu itu. Yang kita tahu otaknya adalah almarhum Ali Moertopo. Dengan segala hormat kepada beliau, karena memang idenya berhasil. Tapi *kan* salah bahwa semua itu solusi permanen. Kita bisa terjebak pada ilusi yang berbahaya. Keadaan sekarang ini semakin normal, jadi yang diperlukan aturan-aturan yang semakin normal.

Lalu begini, ya. Ini sudah sering saya kemukakan. Yakni, selama 50 tahun ini kita baru punya dua presiden: Soekarno dan Soeharto, yang juga berfungsi sebagai Bapak Bangsa. Yang *get things done*. Yang membuat persoalan dapat diselesaikan. Secara formal, boleh diklaim bahwa semua proses pengambilan keputusan di negara kita selama Orde Baru adalah secara konstitusional. Tapi siapa yang tidak tahu bahwa keputusan akhir tetap di tangan Pak Harto (tertawa). *Lho*, nanti, setelah Pak Harto, pertama kalinya kita akan mempunyai presiden yang *primus inter pares*. Yang pertama dari yang sama: orang biasa saja. Sehingga ini berarti masalah negara akan lebih banyak dipertaruhkan pada struktur. Bukan pada pribadi lagi. *Nah*, berbicara mengenai struktur, berarti kita berbicara mengenai kekuatan-kekuatan politik yang berfungsi. Seperti partai, parlemen, pers. Karena itu struktur ini harus dimulai dengan kebebasan-kebebasan asasi. Seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Ini seperti pilihan bepergian. Bisa naik pesawat terbang, kapal laut, mobil atau kereta api. Yang paling berstruktur adalah kereta api. Karena siapa pun masinisnya, tetap saja keretanya berjalan mengikuti rel. Tidak bisa dibelokkan semaunya masinis. Jadi yang lebih menentukan struktur. *Nah* kita harus menciptakan struktur (politik) dari sekarang. Jangan lagi tergantung pada pribadi seseorang. Dengan demikian masalah

sukses menjadi tidak penting. Siapa yang menggantikan Pak Harto, tidak menjadi soal lagi. Tidak perlu ribut dan panik. Memang, bukannya tak ada negatifnya. Seperti di Amerika, orang bisa jadi tak peduli pada politik. Ya, siapa saja yang menjadi presiden, keadaannya kurang lebih sama saja. Karena sudah ada strukturnya yang lebih menentukan.

Tapi bukankah Pak Harto sudah menegaskan bahwa mekanismenya ada?

Pak Harto betul. Tapi ada saja kemungkinan perkembangan di masa depan. Berkembang bukan dalam arti perubahan. Yang dimaksudkan mekanisme oleh Pak Harto itu bukan seperti di AS, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi meski dipilih MPR, suatu interpretasi logisnya adalah menjelang pemilihan MPR, dalam kampanye pemilu, orang sudah mulai mempunyai gambaran siapa yang bakal jadi presiden. Karikturnya, meskipun masinis sedikit menentukan, *toh* kita tak akan menyerahkan pekerjaan itu pada orang gila (terbahak). Selain itu, dengan syarat *primus inter pares* pada presiden pasca Pak Harto, berarti harus ada alternatif-alternatif. *Nah*, alternatif ini disediakan partai-partai politik. Mereka harus melatih diri untuk menjadi komponen demokrasi yang efektif. Jangan *absurd*: (menyelenggarakan) kampanye, tapi kalau ditanya siapa calon presidennya, ya itu juga. Bagaimana ini.

Mungkin karena tidak ada keberanian.

Ya, itulah. Berpolitik tapi tidak punya keberanian, bagaimana? Ismail Hasan Metareum atau Megawati, misalnya. Mereka harus berani bilang: pilih PDI atau PPP, saya presidennya. Ini program saya. Begitu, dong. Kalau takut, itu karena takut pada bayangan saja.

Nanti dianggap melangkahi. “Ewuh pakewuh” dan soal budaya.

Nah, soal budaya. Yang disebut Indonesia itu bukan gabungan puncak-puncak budaya tertentu. Tapi hasil proses dinamik dari *take and give* dan osmose budaya, dan itu paling banyak terjadi di Jakarta. Jadi jati diri Indonesia itu siapa? Karena paling banyak menguasai birokrasi orang Jawa memang dominan. Tapi untuk mengklaim Jawa sebagai budaya Indonesia, *that is very very wrong*. Apalagi kita memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bukan bahasa Jawa, meski jauh lebih canggih. Bahasa Melayu adalah bahasa pantai yang tak mengenal hirarki, lebih terhuka, dinamis dan kosmopolitan. Artinya, karena bahasa adalah cermin budaya, budaya Indonesia yang berciri lebih *coastal culture* ketimbang *inland culture*, sebetulnya lebih siap menerima demokrasi. [❖]

PERASAAN TERSUMBAT BISA BERBAHAYA¹

Gagasan tentang perlunya partai oposisi di Indonesia, yang dilempar Nurcholish Madjid, memancing perdebatan seru di media massa. Presiden Soeharto pun angkat bicara: Di Indonesia tak perlu ada partai oposisi. Di samping memberikan argumen tentang perlunya partai oposisi, Cak Nur, panggilan akrabnya, dalam wawancara dengan Zainal Abidin dan Yadi Sastro dari Majalah *UMMAT*, juga coba menjabarkan lebih dalam tentang isi pemikirannya yang ia tuang dalam seminar Perspektif Islam dalam Indonesia Modern, 4 September 1995, di Gedung Perpustakaan Nasional.

Apa latar belakang gagasan Anda tentang perlunya partai oposisi di Indonesia?

Sebetulnya sudah lama saya berkata begitu. Sejak menjelang sidang MPR dulu. Waktu itu orang tidak menanggapi secara positif. Sekarang tanggapannya lebih positif, lebih luas.

Sebetulnya begini. Kita sudah 50 tahun merdeka dan baru punya dua presiden: Soekarno dan Soeharto. Kedua-duanya sebetulnya tidak hanya berfungsi sebagai presiden, tetapi juga sebagai Bapak Bangsa. Artinya, figur yang sangat dominan, yang boleh dikatakan menyelesaikan seluruh persoalan kita sebagai bangsa. *Nah*, setelah 50 tahun merdeka ini, dan dengan mengantisipasi keadaan nanti-

¹ Majalah *UMMAT*, “Perasaan Tersumbat bisa Berbahaya”, No. 7/Thn. I, 2 Oktober 1995. Pewawancara Zainal Abidin dan Yadi Sastro.

nya, untuk pertama kali kita akan punya presiden yang tak lagi berfungsi sebagai Bapak Bangsa. Untuk itu perlu ada struktur. Peran presiden tidak lagi terlalu dominan, menyelesaikan semua masalah, namun ia tunduk pada suatu mekanisme atau struktur.

Kepada Pak Harto, sebagai Bapak Bangsa, sejauh ini kita insya Allah tetap percaya. Tapi, saya kira Indonesia mendatang akan menyaksikan dan akan mempunyai bentuk pemimpin yang biasa saja, yang *primus inter pares*, yang pertama dari yang sama. Jadi, sebetulnya sama dalam sederetan calon, dan ini hanya dipilih karena menonjol sedikit saja. Karena itu lembaga kepresidenan perlu kita letakkan dalam suatu mekanisme atau struktur yang memungkinkan terjadinya pengawasan dan penyeimbangan, *check and balance*.

Di negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat, kita juga melihat perjalanan yang sama. Beberapa presiden pertamanya adalah Bapak Bangsa. Namun, setelah tahap tertentu, setelah ada stabilitas dan kebebasan-kebebasan asasi menjadi kebutuhan, yang lebih diperlukan adalah struktur yang baik. Lalu pergantian presiden setiap 4 tahun (di AS) bukan peristiwa yang luar biasa.

Apakah tahapan semacam itu kini sudah tercapai di Indonesia?

Memang di sini ada perbedaan. Soal itu agak relatif, maka orang mudah sekali untuk berbeda. Dalam pandangan saya, tahapan itu sudah tercapai. Karena apa? Proses penumbuhan bangsa ini telah berjalan dua generasi. *Pertama*, konsolidasi kebangsaan sebagai *nationstate* dengan Bung Karno sebagai tokohnya. *Kedua*, dari segi ekonomi dan pendidikan, tokohnya Pak Harto. Keduanya berhasil. Peningkatan-peningkatan ini akan berlanjut pada hal-hal prinsipil: peningkatan kemampuan secara umum, khususnya kemampuan politik. Seperti kemampuan menyatakan pendapat dan kemampuan mengartikulasikan aspirasi. Karena itu, Indonesia sebagai akibat dari kesuksesannya ini akan semakin “ribut”, namun dalam arti positif.

Makin tahu hak dan kewajibannya juga berarti akan banyak menuntut. *Nah*, karena sekarang ini penyaluran dari proses itu belum diakui sepenuhnya, maka terjadi letupan-letupan. Sebenarnya perkataan letupan itu *majâz*, dikiaskan pada gejala alam: sesuatu disumbat bisa meletup atau meledak. Sebetulnya ada cara lain yang lebih damai, lebih tidak merusak kalau memang sengaja dibikinkan saluran. Perasaan tersumbat atau tertekan ini tidak boleh didiamkan terlalu lama, karena bisa berbahaya sekali kalau meledak, bukan sekadar meletup. Karena ini bangsa yang besar sekali. Nomor empat di dunia. Apakah bangsa yang besar ini akan kita biarkan mengalami perasaan tersumbat? Indikasinya sudah ada yaitu munculnya orang-orang yang vokal itu.

Namun bukankah saat ini juga sudah adanya saluran-saluran yang mulai dibuka? Misalnya, buruh boleh berdemonstrasi dan izin bicara mulai longgar.

Betul. Sebagai anjang-ancang, semuanya yang telah diisyaratkan oleh pemerintah itu sangat positif. Terutama yang terakhir, yang keluar melalui Soesilo Soedarman dan Oetoyo Oesman: tahun 1996 tak perlu ada izin untuk semua kegiatan politik. Itu yang kita tunggu-tunggu. Lalu, kalau semuanya telah menjadi kenyataan — semua orang telah bebas menyatakan pendapat, bebas berkumpul, dan kemudian bebas berserikat — kira-kira apa wujud yang paling nyata?

Orang akan menantang, mendirikan partai politik. Bukankah ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat? Dan nanti akan terjadi aksi-reaksi yang kuat. Karena itu maka saya bilang, manfaatkan saja PDI dan PPP. Dorong mereka menjadi partai yang secara formal dan legal menjadi partai pengontrol, pengawas dan penyeimbang. Sekarang ini *kan* tanggung sekali, oposisi bukan, partai pemerintah juga bukan. Kecanggungan ini membuat mereka tidak berfungsi. Sebetulnya dengan ini kita menolong partai-partai supaya mereka berfungsi.

Bagaimana Anda menanggapi pernyataan Pak Harto yang tegas menyatakan tak perlu ada oposisi di Indonesia?

Saya memahami itu sebagai masalah semantik saja. Pak Harto adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pertumbuhan bangsa ini, jadi wajar kalau masih ingat dengan pengalaman-pengalaman yang sangat pahit pada tahun 50-an. Ketika itu kita porak-poranda hanya karena mau menerapkan demokrasi menurut Barat, lebih tepatnya Eropa Barat. Bukan Amerika, sebab UUD '45 itu meniru Amerika. Lima tahun pemerintahan kita sama dengan Amerika 4 tahun. Jadi, selama lima tahun itu tidak bisa dijatuhkan. Tidak seperti di Inggris, Belanda, dan sebagainya: sekarang jadi perdana menteri, besok bisa dijatuhkan.

Pada tahun 50-an begitu. Tapi sekarang tak perlu. Yang kita perlukan bukan oposisi yang menjatuhkan pemerintah, tetapi yang mengawasi dan mengontrol serta mengimbangi. Jadi ide ini tetap setia kepada UUD '45 dan Pancasila. Dengan begitu, ada gabungan yang serasi antara pemerintah yang kuat (tidak bisa dijatuhkan selama lima tahun) dan kontrol, sehingga nanti akan menjadi *clean government* — yang sekarang jadi obsesi bagi ABRI.

Tapi ini soal pengalaman saja. Sebab, bangsa Indonesia belum pernah mengalami kehidupan politik yang benar-benar dengan oposisi, kecuali tahun 50-an yang memang rusak, sehingga menjadi trauma. Dan trauma itu membayangi sampai sekarang, menjadi trauma generasi tua. Generasi muda nggak tahu lagi. Saya saja tidak begitu merasakan. Pada sudut ini saya melakukan empati memahami situasi psikologis orang seperti Pak Harto dan yang lain. Pengalamannya begitu. Tapi kita lalu menerangkan bahwa oposisi adalah istilah politik yang intinya pengawasan dan pengimbangan.

Kalau memang oposisi masih riskan karena ada trauma, tidak usah menggunakan kata “oposisi”. Intinya, koreksi. Kita memang tahu bahwa pemimpin itu selalu beriktikad baik. Tapi, karena pemimpin ini menyangkut nasib orang banyak, kita tidak

boleh mempertaruhkannya hanya kepada niat baiknya, harus dikontrol. Surat *al-Ashr kan* begitu? *Pertama*, iman, pribadi sekali. Kemudian amal saleh. Di sini harus ada yang mengingatkan. Tidak mungkin kita berkata, “Saya sudah beriman, jadi mau berbuat baik dan percayakan saja kepada saya”. Apalagi dalam politik, yang jelas menyangkut orang banyak, harus ada *tawâshaw bi ’l-haqq* (mekanisme pengawasan) dan *tawâshaw bi ’l-shabr* (dengan kesabaran).

Sebetulnya, jika sebatas koreksi, bukankah sedikit banyak *check and balance* ini sudah berjalan, dan ada kelompok-kelompok penekan?

Ya, tapi ini harus berjalan secara terbuka, legal dan formal. Sekarang sudah berjalan, tapi tidak terbuka, maka terjadi letupan-letupan, dan timbul kesalahpahaman. Jika ada legalisasi, bahwa memang itu ada, diakui, dan ada kepastian peraturan, *check and balance* akan berjalan efektif. Anda sendiri dari pers pasti merasakan, betapa pers itu terkadang harus hati-hati secara tidak perlu hanya karena aturannya tak selalu jelas.

Keberatan lain, soal budaya. Sebagian orang menganggap kita tak punya kultur oposisi.

Sekarang kita tanya saja pada Muchtar Naim, budayawan dari Minangkabau, yang selalu mengontraskan antara Minang dan Jawa. Saya melihat lebih luas dari itu, soal budaya pantai (Minang) dan pedalaman (Jawa). Kalau kita jujur, ketika bahasa Melayu diterima oleh kita semuanya, maka sebetulnya kita ini menjadi kemelayuan dan jatidirinya budaya pantai, bukan pedalaman. Budaya pantai ini lebih bergerak, *mobile*, terbuka, egaliter dan kosmopolit. Karenanya cara-cara pengambilan keputusan pun dilalui dengan ide musyawarah dan mufakat itu, yang *nota bene* diambil dari bangsa Minang. Tetapi dalam budaya Minang, mufakat itu tak

harus berarti konsensus. Mufakat itu harus ada keputusan bersama, kalau perlu *voting*.

Dalam tradisi Jawa, ada juga tradisi “*mepe*”. Yaitu, rakyat berjemur di luar keraton, di bawah terik matahari, untuk menyampaikan ketidakpuasan pada penguasa. Jadi, sebetulnya ada budaya itu di sini.

Keberadaan partai oposisi menjanjikan negara yang lebih demokratis. Tapi masih ada perhitungan risiko bahwa ini akan mengarah ke anarki.

Pertama, itu belum terwujud. Boleh saja orang berspekulasi begitu. *Kedua*, kalau memang dikhawatirkan begitu, kita bisa melakukan tindakan hati-hati. Karena itu harus ada eksperimentasi terbuka. Dan karena terbuka itu akan ada benar dan salah. Misalnya, ternyata kita membuat kesalahan, lalu ada *chaos*, direm saja dan diluruskan lagi. Tapi kalau dari semula sudah takut lalu tidak mau mencoba, itu mati. Macet nanti.

Itu pula sebabnya saya menginginkan proses ini dimulai dari sekarang, ketika Pak Harto masih kuat, dan ABRI juga masih kuat. Agar jika ada kesalahan, masih ada pengendalinya. Pembukaan katup-katup ini juga tak dapat menunggu terlalu lama. Jangan sampai oposan kelewat banyak. Sebab, kalau terus-menerus disumbat, letupan akan besar. Letupan yang besar akan berarti ledakan.

Demi kepentingan demokratisasi, menurut Anda, mana yang lebih baik: ada suksesi pada 1998 atau tidak?

Ah, itu tidak relevan sama sekali. Saya berikan kiasan soal perlunya struktur dengan naik kereta api. Kita ke Surabaya naik kereta api tanpa pernah bertanya siapa masinisnya. Kita percaya betul ada rel dan di setiap stasiun ada yang mengarahkannya. Ada struktur

yang membuat kita merasa aman. Siapa pun yang memimpin negara ini, tak jadi persoalan.

Ini semuanya memang untuk menyiapkan agar kita lebih mantap ketika sudah tidak dipimpin lagi oleh Bapak Bangsa. Idealnya adalah, jika Pak Harto masih tetap memimpin, kemudian beliau mengantarkan kita ke arah itu. Jadi bisa lebih mulus. Karena, cepat atau lambat, keperluan akan adanya struktur yang lebih mantap ini harus dipenuhi. [❖]

1998: BABAK BARU WAJAH INDONESIA¹

Cendekiawan Islam Nurcholish Madjid belakangan ini sering bicara tentang demokratisasi, selain persoalan beragama yang *hanîf*, yang kemudian memancing banyak reaksi. Untuk prospek tahun 1993, ia memaparkan banyak hal tentang persoalan demokratisasi di Indonesia. Berikut ini petikan wawancaranya.

Sidang Umum MPR lima tahun lalu diwarnai interupsi. Bagaimana prediksi Anda, suasana Sidang Umum MPR Maret mendatang?

Interupsi itu sendiri datang dari ABRI, tentang pemilihan wakil presiden. Tapi interupsinya masih agak klise. Yang kita harapkan, suatu kontribusi pemikiran yang kreatif. Dalam hal ini saya kira ada harapan, karena kita sudah lima tahun belajar terbuka belakangan ini. Sedikit banyak nilai keterbukaan ini sudah kita internalisasi dan kita sosialisasi juga. Meskipun saya kira Sidang Umum nanti itu masih kelanjutan dari masa lalu, dan penggarapan yang intensif ke arah perubahan yang lebih berarti belum terjadi. Saya berpendapat, menjelang 1998, penggarapan yang betul-betul substantif dan prinsipil mesti dilakukan.

Cak Nur menyebut perlunya oposisi. Maksudnya?

¹ Majalah *TEMPO*, “Baru Bisa Dimulai 1998”, No. 44/22, 2 Januari 1993. Pewawancara Amran Nasution.

Orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak terbiasa berpikir alternatif, karena itu berkaitan dengan kesediaan untuk berbeda pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyatakan pikiran. Untuk itu, salah satu yang diperlukan adalah lembaga oposisi. Itu sebetulnya hanya kelembagaan dari suatu *trend* yang sudah ada dalam setiap masyarakat: selalu ada kelompok yang tidak setuju kepada susunan mapan. Diakui atau tidak diakui. Menurut saya, harus diakui, supaya perjalanannya menjadi sehat. Persoalan terbesar, menurut saya, Indonesia belum pernah mengalami pengalihan kekuasaan secara damai, dan kalau gagal tidak tahu lagi saya, berapa lama lagi kita harus mundur.

Ada yang mengatakan bahwa bicara soal demokrasi, keterbukaan, sama dengan bicara soal budaya.

Memang saya tidak berilusi, kita bisa loncat begitu saja. Kita bisa menarik pelajaran dari pengalaman kita sendiri, maupun pengalaman bangsa di sekitar kita, misalnya Filipina. Dia ditinggalkan Amerika tahun 1947. Lalu bereksperimen langsung dengan budaya Barat. Pada waktu itu, saya kira orang Filipina cukup beralasan untuk optimistis. Karena memang tingkat pendidikan mereka relatif lebih tinggi. Kemudian mereka orang Katolik, yang mempunyai afinitas kultural dengan Barat. *Tob* mereka gagal, dan akhirnya menampilkan seorang Marcos, yang efeknya sampai sekarang belum selesai. India pun begitu, setiap hari ada pembunuhan politik, ada yang atas nama agama, ada yang atas nama bahasa, atas nama perbatasan negara bagian, etnis, dan lain-lain. Dalam hal ini saya kira terlalu jelas kalau kita harus bersyukur, negara kita ini begitu besar tapi bersatu dan aman.

Ada yang mengatakan, belakangan ini, kita menuju arah lebih demokratis, Kopkamtib dibubarkan, kekaryaan ABRI di tempat tertentu dikurangi.

Saya setuju dengan jalan pikiran itu, memang ada gerak progresif. Itu jelas dan memberikan harapan. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa negara kita ini *kan* sedang berkembang, banyak sendi yang masih goyah. Karena itu, peranan ABRI yang secara stereotip dikatakan sebagai stabilisator dan sebagainya itu masih diperlukan. Analoginya begini, demokrasi yang mapan di dunia ini sebagian besar adalah kerajaan; ada Swedia, Norwegia, Denmark, dan seterusnya. Sebab, simbol raja, mahkota itu, menjadi pengikat dari semuanya. Thailand juga bisa menjadi contoh. Meskipun di sana banyak kudeta, modal asing tetap mengalir, karena ada rajanya. Amerika itu, karena undang-undang dasarnya kuat sekali.

Umat Islam sendiri bagaimana, siap atau tidak melaksanakan demokratisasi itu?

Secara keseluruhan, belum siap. Tapi sudah ada sebagian yang agak siap, yang biasa disebut golongan menengah. Kalau secara kelompok barangkali di antara umat Islam yang paling siap itu adalah alumni HMI, tapi jumlahnya kecil sekali, dan itu pun belum dibuktikan secara empirik. Saya katakan demikian, sesuai dengan yang dipraktikkan dalam kongres-kongres HMI dari sejak dulu. Bebas, tak ada pengarahan dari siapa pun. Alumni atau senior saja kadang bisa kena tendang di sana.

Tadi Anda menyebut harus dimulai 1998. Kenapa?

Menurut saya, MPR tahun 1993 ini biarlah berlalu dengan segala sekuritanya. Setelah itu, tahun 1998, harus mulai dilansir, dan kita nanti akan melihat, kalau muncul tiga calon presiden. Itu *kan* berarti tidak ada lagi Bapak Bangsa, tapi hanya sesama tiga calon yang memiliki kelebihan tertentu. Karena itu, nanti perpindahan dari satu ke yang lainnya tidak menjadi soal besar. [❖]

MASA DEPAN INDONESIA¹

Percakapan yang dilakukan di kediaman Nurcholish Madjid, mengupas tentang pandangan-pandangan cendekiawan muda perihal keadaan Indonesia sejak tahun 1966, dan satu pandangan ke depan, jika situasi itu, direfleksikan pada 15 tahun atau 20 tahun mendatang. Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda menilai keadaan sekarang, jika diproyeksikan pada 15 tahun atau 20 tahun mendatang, dilihat dari segi politik dan ekonomi?

Saya kira saya bisa memulai dengan menyatakan sesuatu mengenai perkembangan yang paling akhir, yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang, yaitu perpecahan di kalangan PDI, misalnya.

Satu hal yang saya sesalkan, bahwa dari beberapa pernyataan pimpinan PDI, baik yang lama maupun yang “baru”, terutama yang “baru”, masih belum tercermin jiwa mandiri yang kuat. Terbukti dari adanya semangat mau minta restu, minta izin dan sebagainya kepada orang-orang pemerintah atau pihak pemerintah dalam kaitan dengan usaha mereka untuk mengatasi persoalan dalam PDI. Jadi jiwa mandirinya masih belum kuat.

Saya kira salah satu prinsip dari partai adalah keotonoman. Harus otonom. Karena itu harus dimulai dengan keyakinan pada diri sendiri bahwa dia harus bertindak otonom, tidak meng-

¹ Harian *Kompas*, “Drs. Nurcholish Madjid tentang Masa Depan Indonesia”, 5 Desember 1973.

harapkan semacam restu atau perlindungan dari pemerintah. Ini menurut pendapat saya, mempunyai *impact* yang cukup jauh. Yaitu pertumbuhan demokrasi yang diharapkan itu akan selalu terhambat dengan mentalitas semacam itu. Dan saya ulangi, menurut pendapat saya, partai yang akan menopang pertumbuhan demokrasi adalah partai yang didukung oleh orang-orang dengan independensinya yang tinggi. Saya khawatir kalau melihat beberapa tokoh yang terlibat di sini, misalnya Isnaeni yang begitu banyak pengalamannya dan juga Sunawar Sukawati, yang juga orang yang sangat berpengalaman dan beberapa kali menjadi menteri dan sebagainya, tapi masih berbuat serupa itu, memang menimbulkan pesimisme. Dan saya khawatir hal ini akan sampai mereka wariskan kepada generasi muda. Sehingga untuk waktu yang lama, generasi yang lebih muda pun, akan mempunyai sikap jiwa semacam itu, yakni tidak sanggup bertindak otonom, tidak sanggup mandiri. Ini kekhawatiran kita! Dan saya kira, sikap seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, sangat merugikan pertumbuhan demokrasi.

Kita sudah sering menanamkannya sebagai “Bapakisme”, orientasi ke atas, dan sebagainya. Jadi kalau mau lebih baik, sepuluh atau lima belas tahun yang akan datang, salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana membina partai ini dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul bisa menjadi partai yang independen, yang otonom. Itu berarti tidak saja dari pemerintah kita harapkan sesuatu kebijaksanaan atau pengertian, tetapi lebih-lebih dari pendukung partai itu sendiri. *Dus* pemerintah tampaknya dengan adanya sikap seperti sekarang ini, seperti yang kita baca di koran atau yang kita dengar, tidak bisa disalahkan, kalau kemudian mereka ikut campur tangan. Sebab pemerintah merasa campur tangannya ditunggu, paling tidak diharapkan.

Jadi saya berpendapat, partai itu harus jadi suatu organisasi politik yang pikirannya itu atau cara berpikirnya lebih strategis, lebih bersifat jangka panjang. Saya khawatir, kalau sekarang ini beberapa orang melihat partai, lebih sebagai “sawah-ladang” daripada tempat investasi politik. Artinya, terus-terang saja partai

dianggap sebagai suatu badan yang bisa memberi kehidupan secara pribadi-pribadi, tak dianggap sebagai tempat persemaian benih-benih kehidupan politik yang sehat untuk pertumbuhan demokrasi. Dalam hal ini, misalnya beberapa partai yang pernah ada di Indonesia, ternyata lebih positif. Misalnya saja Masyumi, lepas dari beberapa hal politik mereka yang tidak kita setuju. Tetapi arah mereka lebih kepada investasi politik itu. Begitu juga dengan partai PSI (Partai Sosialis Indonesia), juga Partai Kristen dan Partai Katolik, yang dulu bergabung dengan Liga Demokrasi. Dan dengan orientasi semacam ini, maka sebuah partai hendaknya menyadari bahwa usia perjuangan itu lebih panjang daripada usia manusia, termasuk usia partai itu sendiri. Jadi kalau tidak berhasil selama hidupnya memperoleh jabatan atau kekuasaan, janganlah mereka menarik kesimpulan bahwa perjuangan itu gagal.

Jadi partai sebagai tempat investasi politik bisa panjang usianya. Saya ambil contoh, misalnya partai SPD di Jerman yang sekarang sedang berkuasa, partainya Willy Brand. Itu *kan* baru berkuasa setelah seratus tahun berdirinya. Tapi SPD bangga dan berhak untuk berbangga, bahwa mereka punya andil yang besar dalam mendorong proses demokratisasi di Jerman. Tentu saja bersama CDU dan partai lainnya. Tetapi yang menarik bagi saya, begitu tinggi daya tahannya (SPD), sehingga mereka tidak tergoda untuk berkuasa dan baru mendapat kekuasaan setelah seratus tahun. Ketika mereka tidak berkuasa, mereka banyak berbuat yang positif bagi bangsa Jerman. Umpamanya dalam pembuatan konstitusi dan pengembangan kehidupan demokrasi.

Nah, saya sebutkan partai, itu tidak saja suatu partai, tetapi seluruh bangsa Indonesia sebenarnya harus mempunyai pilihan semacam itu. Yakni harus lebih berpikir strategis, tidak taktis semata-mata. Dan saya kira, karena persoalannya, persoalan masa depan, maka yang pertama kali dituntut kesadarannya atas hal ini adalah generasi muda. Bagaimana mereka membiasakan diri untuk melihat masa depannya lebih jauh, untuk tidak terpedaya, terpukau oleh persoalan kekuasaan.

Cosmas Batubara pernah mengakui, bahwa Angkatan 66 tempo hari, tidak mempunyai konsep untuk pembangunan, bahkan untuk menjaga kontinuitasnya ke masa depan. Bagaimana pendapat Anda dalam persoalan ini?

Kalau konsep itu dalam arti suatu perumusan formal yang disepakati oleh orang-orang yang berkumpul di satu tempat atau dalam satu badan, saya kira generasi muda sekarang juga tidak membikin itu. Akan tetapi hal itu tidak berarti, bahwa generasi muda sekarang tidak berkonsep. Sebab konsep itu akan merupakan bagian latihan dari masing-masing generasi muda itu, apakah melalui pendidikan formalnya di universitas misalnya, ataukah dari pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh dalam kegiatan sehari-hari. Jadi *shcooling* politik tidak hanya yang formal melalui organisasi, akan tetapi juga bisa diperoleh seseorang melalui kegiatan-kegiatan pribadinya. Meskipun menurut pendapat saya, keterlibatan dalam suatu organisasi, terutama organisasi kepemudaan merupakan suatu *schooling* politik yang baik sekali.

Tetapi saya kira, di mana saja tentu tidak bisa kita harapkan dari generasi muda suatu konsep yang selesai, suatu *finished concept*. Mereka mempunyai keinginan-keinginan untuk masa depan atau aspirasi. Dan karena mereka relatif lebih terpelajar dari yang lalu, mereka lebih mengetahui kemungkinan-kemungkinan dari aspirasi itu untuk dilaksanakan. Jadi menurut pendapat saya, konsep serupa itu akan muncul. Misalnya, suatu hal yang sekarang ini yang tidak disukai generasi muda ialah beberapa “embel” terhadap beberapa nilai; nilai demokrasi, nilai keadilan sosial dan sebagainya. Maksud saya, “embel-embel” itu misalnya, Demokrasi Pancasila. Sebagai suatu bangsa kita juga mempunyai ciri khusus. Tetapi kalau dengan nama Demokrasi Pancasila, lalu tertutup kemungkinan menutup pengalaman-pengalaman demokrasi dari negeri atau bangsa lain, ini kita keberatan. Seakan-akan Indonesia merupakan suatu kelompok manusia yang terlepas dari konteks umat manusia.

Lantas, bagaimana pengembangan Demokrasi Pancasila di masa mendatang?

Saya kira cara yang sebaik-baiknya merumuskan bagaimana Demokrasi Pancasila itu, adalah suatu demokrasi yang dalam penerapannya tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan, itu sulit sekali diterangkan. Tetapi kesalahan-kesalahan itu antara lain menimbulkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua atau menimbulkan sistem perekonomian yang kapitalis, perkembangan individualisme yang tak terkontrol, lalu sikap-sikap yang eksploitatif terhadap alam bahkan manusia. Dan akhirnya semua orang yang menyadari itu salah!

Dan sekarang ini sudah ada perbaikan-perbaikan. Jadi Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang harus kita hayati dengan mengambil pelajaran yang paling baik dari bangsa-bangsa lain, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Misalnya Amerika Serikat adalah negara demokrasi sejak diproklamirkan dua ratus tahun lalu. Tapi oleh karena beberapa kesalahan dalam pelaksanaan demokrasinya, maka Amerika antara lain menjadi suatu negara yang mempunyai sistem yang kurang adil terhadap kulit berwarna, kurang adil terhadap beberapa golongan minoritas dan sebagainya.

Dan sekarang ini dengan sekuat tenaga, orang-orang Amerika sedang memperbaiki melalui Kennedy dan macam-macam. Jadi demokrasi pun ternyata berkembang. Sekarang ini suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia, bisa melihat dan menarik pelajaran dari bangsa-bangsa lain, sehingga tidak perlu mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Dan menurut pendapat saya, perkembangan demokrasi yang paling baik adalah demokrasi yang disertai sosialisme, yaitu sosialisme demokratis, yang mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial. Jadi saya pribadi beranggapan, misalnya, ideologi demokrasi dan ideologi sosialisme seperti yang saya sebutkan pada partai SPD, adalah paling baik untuk kita.

Mungkin Anda bisa lebih menjelaskan lebih jauh, kata “embel-embel” yang dipergunakan terhadap generasi muda.

Maksud saya, saya mempunyai kesan generasi muda sekarang tidak suka pada embel-embel demokrasi, walaupun itu Demokrasi Pancasila dan sebagainya. Bukan karena embel-embel itu sendiri, tetapi dengan embel-embel itu kemudian ada kesan pintu ditutup bagi kemungkinan menarik pelajaran tentang kekuasaan demokrasi dari negara-negara lain, seakan-akan semua harus kita ciptakan sendiri, “*made in Indonesia*”. Padahal, kita bisa belajar dari bangsa-bangsa lain, yang lebih dahulu berpengalaman daripada kita. Saya kira itu tidak ada kaitannya dengan perasaan harga diri sebagai bangsa. Sebab memang dunia semakin kecil, dan saling tukar-menukar pengetahuan, pengalaman dan informasi semakin besar. Jadi tidak ada halangannya.

Apakah itu berarti perlunya mempelajari komunisme, mungkin untuk memerangi komunisme itu sendiri?

Memang ada keputusan MPR dulu yang melarang Marxisme/Leninisme. Sebetulnya yang harus dilarang adalah penganutan Marxisme/Leninisme. Sedangkan Marxisme dan Leninisme sebagai ilmu pengetahuan dan bahan studi, saya kira tidak perlu dilarang. Sekurang-kurangnya begitu hendaknya dalam jangka panjang, kalau sekarang tidak bisa ditembus. Kita barangkali cukup relevan untuk Indonesia, melarang penganutan ideologi Marxisme/Leninisme, akan tetapi demi kebaikan bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka mengembangkan konsep-konsepnya sendiri seperti Pancasila dan sebagainya, mempelajari Marxisme/Leninisme, saya rasa seharusnya tidak dilarang.

Kalau mempelajari, apakah nantinya tidak sampai pada penganutan?

Nah, apakah mempelajari itu akan mendorong orang untuk menganut, saya kira itu tergantung kepada kemantapan pada diri sendiri (*self-confidence*). Jadi saya khawatir kalau orang yang membuat sesuatu larangan mempelajari Marxisme/Leninisme karena takut akan menganut Marxisme dan Leninisme, saya khawatir itu sebagai pertanda tiadanya kemantapan pada diri sendiri.

Menurut saya, bangsa Indonesia, sudah semakin mantap terhadap ideologinya sendiri yaitu Pancasila. Dan terang jauh lebih mantap daripada dulu. Semua pihak lebih mantap daripada dulu. Oleh karena itu, saya rasa tidak dalam waktu dekat ini, tapi dalam masa mendatang yang tidak terlalu jauh, kita akan cukup aman dari segi ideologi untuk memperbolehkan mempelajari Marxisme/Leninisme sebagai suatu bahan perbandingan.

Kalau Anda bisa memberikan sedikit pendapat di bidang ekonomi.

Saya bukan ahli ekonomi.

Ya, saya tahu. Dan bagaimana pendapat Anda menjaga kontinuitas pembangunan kita?

Saya kira, kita sekarang masih dalam kontradiksi, apakah adil dulu atau makmur dulu. Sekarang ini kelihatannya dianut: makmur dulu, baru adil. Oleh karena itu, para teknokrat kita, tidak mau dituduh mengabaikan segi keadilannya. Mereka merasa mempunyai komitmen terhadap keadilan sosial. Tetapi menurut pendapat saya, persoalannya masih tetap sama, yaitu: apakah bisa...makmur dulu baru adil, apakah tidak akan terjadi suatu keadaan di mana interes ekonomi yang tumbuh bersama kemakmuran itu akan menghalangi pelaksanaan keadilan sosial. Jadi kalau keadilan sosial tidak diperjuangkan dari sekarang dan kita mentolerir adanya kaya dan miskin, maka yang kita khawatirkan sistem seperti ini akan memperoleh pengukuhan-pengukuhan secara resmi, mendapatkan

akar untuk bertahan. Misalnya nanti akan terefleksikan dalam hukum, terefleksikan dalam struktur politik, sosial, dan sebagainya, sehingga cita-cita keadilan sosial tidak akan tercapai. Sebab orang yang sudah berada di atas, itu akan bertahan supaya tetap di atas. Padahal keadilan sosial menuntut kerelaan orang di atas untuk turun sedikit, agar yang di bawah bisa naik sehingga bisa menjadi relatif sama. Jadi saya kira persoalan sekarang ini masih tetap pada masalah itu.

Karena menurut pendapat saya, di antara poin-poin Pancasila sekarang ini yang paling urgen adalah keadilan sosial. Kalau kita melihat satu persatu dari Pancasila, maka poin pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu bolehlah. Saya rasa, kita sudah diperbolehkan untuk merasa mantap. Tercermin dari G30S hingga sekarang, Sila Peri Kemanusiaan, masih kurang kita perhatikan. Demikian pula Kedaulatan Rakyat. Sila Persatuan Indonesia, suatu aset yang luar biasa bagi Indonesia.

Tapi di antara semua yang paling kurang diperhatikan adalah keadilan sosial. Jadi saya kira tokoh-tokoh lama seperti Hatta dan sebagainya “*concerned*” dalam masalah ini. Dan dia benar. Secara teknis, Hatta sudah tidak relevan, tapi dari segi aspirasi dan ideologinya cukup relevan.

Dalam bangsa kita terdapat sub-kultur yang berbeda-beda dengan ideologi yang bermacam-ragam. Sekarang bagaimana caranya untuk memelihara keselarasannya?

Ini merupakan pertanyaan yang menarik meskipun sulit, karena kita orang-orang Indonesia belum mengetahui norma-normanya. Untuk mengatasi persoalan ini, kita harus mengalami beberapa kematangan, yaitu kematangan berpolitik, bernegara dan bermasyarakat, terutama yang menyangkut proses masyarakat majemuk (*plural society*). Saya kira di balik konsep masyarakat majemuk ini, sudah ada beberapa kematangan yang dituntut tadi, antara lain kematangan untuk berkeyakinan.

Dalam hal ini bagaimana kita yakin akan tetapi cukup dewasa, sehingga terjadi dua hal dalam waktu yang bersamaan: yaitu kita yakin betul akan sistem nilai-nilai kita masing-masing, tapi pada waktu yang bersamaan kita yakin pula bahwa orang lain berhak untuk menikmati dan meyakini sistem nilai-nilai mereka sendiri. Sehingga tidak ada paksaan dalam soal keyakinan seperti ini. Menurut pendapat saya, ini menyangkut persoalan kematangan berpolitik, bernegara dan bermasyarakat. Sebab satu hal untuk bersikap seperti itu adalah kedewasaan dan kemantapan pada diri sendiri, sehingga tidak timbul sikap kekanak-kanakan. Saya kira, itu juga mungkin menyangkut hal yang lebih serius lagi, yakni konsep antropologi (*antropological concept*) yakni menyangkut konsep atau pengertian bahwa manusia itu harus saling percaya mempercayai.

Bagaimana dalam kenyataannya?

Menurut pendapat saya, hal itu ada turun-naiknya. Ada masanya bangsa kita secara keseluruhan atau beberapa kelompok dalam bangsa kita begitu matang, sehingga sangat mampu menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Misalnya, Masyumi pada tahun 50-an bisa bekerja sama baik sekali dengan unsur-unsur Kristen, Katolik dan Sosialis atas dasar titik-tolak bersama, yaitu menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Dan waktu itu juga atas dasar *front* bersama, yakni menghadapi Bung Karno. Tetapi maksud saya adalah, Masyumi pada waktu itu begitu dewasa dan begitu sehatnya terhadap golongan lain, meskipun ia harus keras terhadap PKI. Selanjutnya kalau saya bicara mengenai golongan Islam, masalahnya lain lagi. Karena kultur golongan Islam itu sendiri dan kolonial Belanda, golongan ini isolatif dan konfrontatif terhadap Belanda, menyebabkan golongan Islam dalam arti yang khusus ini tidak mengalami pendidikan modern.

Di sini modern dalam arti pendidikan Barat. Dengan demikian kalau kita ambil saja suatu perhitungan kasar, golongan Islam

baru mengenal sekolah setelah merdeka, yakni setelah penyerahan kedaulatan. Ini berarti baru tahun 1962, ada anak orang Islam yang menginjak mahasiswa dan pada tahun 1965 sudah ada yang memperoleh gelar Sarjana Muda.

Baru pada tahun 1970-an anak-anak orang golongan Islam sudah banyak yang memperoleh Sarjana lengkap. Maka bermunculan “Sarjana-sarjana santri”. Dan ini menurut pendapat saya *impact*-nya besar sekali, terutama dalam menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri. Begitulah prosesnya berkelanjutan sampai sekarang.

Apakah proses ini akan memakan waktu yang panjang?

Saya kira tidak terlalu panjang. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, katakanlah golongan Islam itu dari kelompok yang tidak sekolah kemudian sekolah dan sampai menjadi sarjana, terjadi dalam waktu 20 tahun. Jadi ini menunjukkan grafik yang tajam sekali. Dan pada tahun 70-an berikutnya, perkembangan sosial golongan Islam itu sudah mulai berpijak pada struktur sosial yang berbeda daripada sebelumnya. Dengan demikian cita-cita konsep masyarakat majemuk tadi perkembangannya lebih progresif. Namun demikian sarjana santri itu pada tahun 70-an ke atas kira-kira sampai tahun 80-an lebih *inword-looking*. Karena ini dampaknya kepada masyarakat belum terasa. Saya sering ditanyai, sekarang sudah ribuan sarjana Islam, tetapi mengapa *impact*-nya tidak begitu besar seperti belasan sarjana dahulu ketika masuk Masyumi. [❖]

EPISODE 27 JULI: SABTU KELABU¹

Nurcholish Madjid barangkali salah satu dari sejumlah intelektual kita yang bisa bicara apa saja, tanpa konflik kepentingan. Kini, ia adalah salah satu petinggi di Dewan Pakar ICMI, penggerak Yayasan Wakaf Paramadina, anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan anggota Dewan Penyantun Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) — suatu hal yang bisa dijadikan indikasi minatnya yang serius terhadap masalah penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ia hanya ingin melihat, tampaknya, bagaimana demokrasi benar-benar diterapkan di Indonesia. Hampir semua pendapatnya bertolak dari itu dan tidak merasa risih, jika harus mengkritik atau bertentangan sikap dengan lembaga, ketika ia menjadi anggotanya.

Itu sebabnya, *D&R* memilihnya untuk diwawancari tentang berbagai hal aktual yang terjadi belakangan ini: dari soal PDI, Peristiwa 27 Juli, hingga KIPP. Berikut petikan wawancara Rachmat H. Cahyono dan M. Husni Thamrin dengan mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Meski baru sementara, pengumuman temuan Komnas HAM tentang korban Peristiwa 27 Juli, tampaknya mengecewakan banyak pihak

¹ Majalah *D&R*, “Berani Benar, Juga Berani Salah”, No. 05/XXVII/14 September 1996. Pewawancara Rachmat H. Cahyono dan M. Husni Thainrin.

Itu masalah perspektif. Komnas HAM itu terjepit antara suara pemerintah dan suara umum. Pemerintah menganggap Komnas HAM terlalu ceroboh mengumumkan 74 orang hilang. Padahal, yang kami katakan adalah “dilaporkan sebagai hilang”. Jadi, lagi-lagi masalah perspektif. Karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, Komnas HAM berusaha betul untuk menindaklanjuti temuan-temuannya.

Bagaimana jika temuan itu menimbulkan masalah dengan pemerintah?

Tidak apa-apa. Justru yang lebih berbahaya, dalam soal menimbulkan masalah itu, adalah pengingkaran kenyataan. Jadi, pemerintah harus mau menerimanya. Sulitnya, 74 yang dilaporkan hilang itu, sebagian besar hanya nama, tanpa alamat. Terus terang saja, kami baru pertama kali menangani yang semacam itu dan itu paling sulit.

Sebetulnya, Peristiwa 27 Juli dan aksi penanganan sesudahnya mencerminkan satu sikap, atau kebijakan pemerintah yang seperti apa?

Harus dilihat dulu latar belakangnya. Sebetulnya, yang menonjol adalah aksi solidaritas kepada Mega. Karena, secara psikologis, orang memang bersimpati kepada yang memelas, yang *underdog*. Dalam hal ini, Mega adalah *underdog* karena ia ditaklukkan oleh kekuatan yang sangat besar, yang sangat dominan, yaitu pemerintah aktif. Itu dengan asumsi bahwa memang Kongres Medan hasil rekayasa, dan saya kira itu bukan rahasia lagi.

Tentu saja ada segi benarnya di balik masalah psikologi itu. Prinsip suatu organisasi sosial (orsos) atau organisasi politik (orpol) yang mandiri itu harus dihormati. Tidak boleh ada intervensi. Kalau kita betul-betul menginginkan suatu orsos atau suatu orpol mencerminkan kehendak orang banyak, dengan sendirinya harus

diberikan kebebasan memobilisasi (massa). *Toh*, kalau umum tidak bisa menerima idenya, tidak akan terjadi mobilisasi. Makanya, rakyat itu harus diberi kebebasan.

Ada prinsip-prinsip itu sekitar tanggal 27 Juli?

Kita lihat, mengapa hal itu sampai terjadi. Ya, terang itu persoalan kita semua dan dalam hal ini tidak bisa ditunjuk hidung: siapa yang paling bersalah. Masalah kultur, budaya politik kita, memang masih perlu pengembangan.

Misalnya, kita mulai dengan soal keadaban, *civility*. Kita bicara mengenai *civil society*. Inti dan jiwa dari *civil society* adalah keadaban tadi, yaitu suatu sikap yang berani menerima bahwa orang lain memiliki sikap politik dan hal-hal yang berbeda dengan kita. Juga berani berpandangan bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar untuk suatu persoalan. Karena, manusia itu relatif. Karena itu, sebetulnya *civility* atau keadaban itu sangat erat dengan konsep musyawarah. Proses musyawarah itu proses mutual, proses “saling”. Artinya, tidak ada tinggi dan rendah. Semua orang mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, dan mempunyai kewajiban untuk mendengarkan pendapat.

Saya kira, akumulasi dari tidak adanya *civility* di kalangan PDI sendiri itulah (yang menyebabkan) bencana 27 Juli. Kita tabu bagaimana mereka itu direpotkan oleh konflik internnya. Sebelum adanya intervensi itu, ada friksi intern dulu. Bagaimana dalam sebuah Kongres di Medan (1993) bisa terjadi pendobrakan pintu dengan bulldoser, itu *kan uncivilized*, tidak ada *civility*.

Sekarang, bandingkan dengan NU. Setiap organisasi pasti ada potensi konflik. Itu di mana-mana. NU juga punya, tapi bisa diselesaikan. Entah sulit, entah mudah, itu soal lain. Tapi, bisa diselesaikan dengan cara yang beradab. Juga ada di Muhammadiyah. Jadi, kalau secara intern sehat sebagai *civil society*, faktor eksternal tidak-bisa masuk. Terbentur duluan. Ini persoalan kita semua.

di mana-mana begitu. Bukan hanya PDI. Jadi, orang tidak bisa meniadakan begitu saja, basil musyawarah. Intinya itu: toleransi.

Faktor lainnya, yang sulit itu, adalah masalah legitimasi. Dalam hal ini, saya kira diperlukan pandangan yang agak sedikit lebih adil. Barangkali benar bahwa Soerjadi itu tidak legitimate karena dipilih melalui forum yang direkayasa, tapi bagaimana dengan Mega? Munasnya (1993) itu *kan* juga rekayasa. Beberapa tentara, saya kira Hendropriyono (Mayjen A.M. Hendropriyono, kini komandan Koordinasi Pendidikan dan Latihan TNI AD) dan Agum Gumelar (kini Pangdam Wirabuana) itu punya peran betul. Jadi kita harus adil. Dalam hal ini, memang kita tertumbuk dengan persoalan intern PDI yang menyangkut AD/ART. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu persoalan mereka.

Tapi, intervensi terhadap kepemimpinan Mega terlalu kasat mata

Karena sistem politik kita, yaitu adanya pembina politik. Jadi, institusi pembina politik itu sudah tidak betul, karena tidak ada dasar hukumnya. Asumsinya, orang itu berpartai untuk merebut kekuasaan secara damai, yaitu melalui pemilu. Kalau menang, berkuasa. Maka, pemerintah sebetulnya, partai yang sedang berkuasa; sedangkan partai yang tidak berkuasa itu sama k:edudukannya dengan pemerintah. Sebab, ada asumsi, nanti, kalau partai yang tidak berkuasa menang (pemilu), dialah yang akan memerintah.

Karena itu, tidak masuk akal ada pembina politik, lalu yang membina itu pemerintah. Itu berarti suatu partai dibina oleh partai lain. Poin ini penting sekali karena kaitannya dengan kemandirian. Karena itu, institusi pembina politik itu sama sekali tidak benar. Itu salah satu agenda reformasi politik yang harus dilenyapkan.

Kasih kebebasan kepada partai-partai, juga Golkar. Sebab, *by definition*, kalau suatu organisasi sudah ikut pemilu dan berjuang memperebutkan kursi, itu namanya partai.

Bahwa Golkar itu *ruling party*, itu boleh. Seperti UMNO di Malaysia atau LDP di Jepang. Tapi, *ruling party* adalah partai yang sedang melakukan *ruling*, *kan* begitu saja. Tidak boleh diidentikkan dengan negara. Kewajiban kita itu membela negara, bukan membela pemerintah. Pemerintah dibela kalau benar. Kalau tidak? Kalau negara, tidak bisa benar atau tidak bisa salah. Negara adalah negara, harus diterima. Jadi, kita mengabdikan kepada negara, bukan kepada pemerintah.

Maka, karena ada masalah pembina politik itu, terjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Karena sekarang yang berkuasa Golkar, pengurus PPP dan PDI itu disahkan Golkar, *kan* begitu. Bagaimana? Itu *kan* tidak fair. Mestinya, kalau memang begitu permainannya, setiap kali ada pemilihan-pemilihan di Golkar harus disahkan PPP dan PDI. PPP dan PDI harus diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan.

Oleh karena itu, ini tidak betul, harus dikembalikan kepada masalah independensi itu lagi. Demikian juga misalnya masalah litsus untuk calon anggota DPR. Litsus itu menjadi alat untuk menentukan bisa tidaknya seseorang diterima dan kriteria itu datang dari pemerintah. Itu berarti wakil rakyat tadi wakil pemerintah, bukan wakil rakyat. Litsus itu juga suatu akibat langsung dari kultur politik yang tidak betul, konsekuensi logis dari suatu sistem politik yang ada pembina politiknya.

Jadi, pemerintah begitu dominan dalam berbagai sektor?

Makanya, itu tidak demokratis.

Dikaitkan dengan kultur politik saat ini, apa memang harus seperti itu kebijakan pemerintah?

Jelas, ini masalah perjalanan sejarah bangsa. Ini masalah budaya pesisir dan pedalaman. Jadi, Indonesia ini dirancang oleh mereka yang asal budayanya itu pesisir. Karena itu, bahasa nasional yang

dipilih bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Padahal, orang yang datang ke Kongres Pemuda 1928, banyak orang Jawa.

Karena itu, yang banyak berperan pada masa-masa prakemerdekaan dan pada masa-masa awal kemerdekaan itu orang Sumatera, orang Minang, karena cocok dengan kultur pesisirnya. Selain karena menguasai bahasa Melayu modern, pendidikan mereka juga modern, karena dipilih oleh Belanda untuk menerima pendidikan Belanda. Sama dengan orang Yogya-Solo, Manado, yang dipilih untuk menerima pendidikan Belanda. Karena itu, sebenarnya, peletakan ide-ide dasar kenegaraan kita itu adalah oleh orang-orang Minang. Lihat saja konsep musyawarah-mufakat. Ungkapannya pun banyak mengambil dari bahasa Arab: hakim, hukum, musyawarah, mufakat, dan sebagainya.

Pada waktu itu, orang Jawa belum terlalu menguasai bahasa Melayu. Mereka umumnya berbahasa Belanda dan Jawa. Kalaupun berbahasa Melayu, bahasa Melayu pasar. Jadi, Indonesia itu sebenarnya dirancang dengan pola budaya pesisir. Itu banyak sekali buktinya. Karena itulah langsung demokrasi, meskipun gagal, pada tahun 1950-an. Itulah sebabnya Bung Karno memindahkan ibukota Yogyakarta ke Jakarta. Karena, baru Jakarta, yang mengindonesia. Jakarta itu *meltingpot*, yang kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya.

Namun, ketika terjadi konsolidasi, terutama setelah revolusi fisik, mulai terlihat, bahwa orang-orang dari pedalaman itu lebih siap memasuki administrasi dan birokrasi, karena mereka sendiri sudah dididik orang Belanda sebelumnya, menjadi *ambtenaall*, pegawai. Masa konsolidasi itu kemudian meneguhkan kultur pedalaman. Pada zaman Bung Karno, proses itu masih tarik-menarik. Pada zaman Pak Harto, yang berperan hanya kultur pedalaman. Pak Harto adalah orang pedalaman betul. Dan Pak Harto, sudah memerintah 30 tahun, ternyata efektif, lebih efektif daripada masa berkembangnya kultur pesisir pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Ini tentu saja sepanjang berkenaan dengan birokrasi

dan kemiliteran. Tentara sebagian besar orang Jawa. Karena, mereka sudah terbiasa berpikir hierarkis, menerima komando.

Namun, itu harus dipandang sebagai solusi jangka pendek. Padahal, ada cita-cita menegakkan demokrasi. Demokrasi itu lebih cocok dengan budaya pesisir. *Nah* ketegangan itulah yang antara lain menjadi muara semua persoalan yang ada saat ini. Di satu pihak dirasakan ada dominasi budaya pedalaman yang tidak pada tempatnya, tapi efektif. Bayangkan saja, Bung Karno berkuasa 20 tahun, segala macam kekacauan ada. Pak Harto berkuasa 30 tahun, hampir tidak ada kekacauan sama sekali. Luar biasa. Itu antara lain karena menggunakan pendekatan kultur pedalaman.

Apa maksudnya solusi jangka pendek itu?

Karena, akan bertentangan dengan cita-cita pertama bangsa Indonesia dan juga bertentangan dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa maritim, bangsa pesisir. Tarik-menarik antara kultur pedalaman dan kultur pesisir itu, dalam beberapa hal, dimenangkan pedalaman, yaitu terutama dalam birokrasi dan administrasi. Karena itu, pedalamanisme tersebut muncul dalam budaya pejabat dan budaya pegawai. Tapi, dalam wawasan Indonesia modern, yang diwakili kaum intelektual, cendekiawan, dan disalurkan melalui bahasa Indonesia, pesisir menang. Bahasa Indonesia saat ini menghancurlumatkan sama sekali bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Jadi, ada skors plus-minusnya.

Dalam jangka panjang juga yang menang itu pesisir, karena ofensif. Pedalaman itu defensif sekali, bertahan. Contohnya, bahasa Jawa itu tidak lagi mampu memuat pesan-pesan modern yang dapat ditampung bahasa Indonesia. Itu akan punya dampak pada budaya pedalaman. Bahwa sekarang ini masih ada dominasi budaya pedalaman di kantor-kantor, itu masalah waktu saja.

Kalau kultur pedalaman masih mendominasi pemerintahan sekarang ini, apakah itu anugerah atau musibah?

Dilihat dari jangka pendek, itu anugerah. Dilihat dari segi wawasan dan sifat keindonesiaan, itu suatu anomali, suatu hal yang menyimpang — kata musibah mungkin terlalu keras. Yang terang, harus ada *take and give*.

Jadi, kultur politik kita adalah cermin dari pergeseran-pergeseran itu. Posisi dari pihak mereka yang mapan, terhadap kemungkinan perubahan, itu pahit. Karena itu, kemudian, sering salah langkah, sering salah tindak. Tidak usah pemerintah, golongan masyarakat yang mapan pun kalau merasa terancam oleh suatu *emerging forces*, meminjam istilah Bung Karno, suatu kekuatan baru yang sedang muncul, ya, salah tindak semua.

Padahal, Indonesia ini belum selesai prosesnya. Saya perkiraan baru selesai tahun 2020-an. Itu pun tahap pertama. Karena, tekadnya itu negara demokratis, artinya terbuka, sehingga promosi sosial, mobilitas vertikal, tidak lagi berdasarkan hal-hal kenisbatan (askriptif), misalnya sukunya apa, bahasa daerahnya apa, keturunan siapa. Itu tidak lagi relevan, maka kenaikan ke atas dipertaruhkan kepada kemampuan. Satu unsur kemodernan, unsur pesisir sebetulnya, orang berkuasa karena mampu. Dalam hal itu, faktor pendidikan yang berperan.

Ada pengaruhnya bagi orang Islam Indonesia yang kebetulan mayoritas?

Karena pendidikan ini penting sekali dalam mobilitas vertikal, orang Islam relatif paling tepat naik karena mulainya dari minus. Golongan lain sudah lebih dulu di atas, sehingga kenaikannya kecil. *Nah*, kenaikan cepat orang Islam itu menimbulkan perasaan terancam bagi pihak lain. Itu sesungguhnya persoalan yang relatif sekali.

Di kalangan orang Islam pun, yang dominan adalah yang memiliki pendidikan modern. Karena itu, dulu, NU tidak tahan di daerah Masyumi karena didominasi oleh orang-orang berpendidikan

Belanda. Tapi, sekarang lihat saja NU, siapa yang paling banyak berperan di situ: orang-orang yang berpendidikan modern.

Jadi, tumbuh golongan intelektual Islam yang jumlahnya besar sekali. Umumnya, mereka membawa suasana jihad, berposisi kepada pemerintah. Jadi, pada waktu itu, pidato, ceramah, dan khutbah didominasi oleh demagogi. Dan itu berbahaya. Karena itu, kita cari kanalisasi, saluran. ICMI dibuat, sedikit banyak berhasil: mereka masuk. Maka, yang dulu kerjanya mencerca pemerintah, kini kerjanya membela pemerintah. Ada eksesnya, dengan sendirinya. Tapi, garis besarnya begitu.

Ketika mereka masuk, ada ramai-ramai. Entah apalah namanya. Tapi kemudian, ada suara bahwa pemerintah sudah bermesraan dengan (umat) Islam. Pemerintah melakukan hal-hal yang menimbulkan kesan bermesraan dengan Islam, karena menyadari kekuatan itu tidak mungkin dilawan. Itu kekuatan yang tumbuh secara obyektif.

Kenapa pasca-Peristiwa 27 Juli, seolah-olah umat Islam takut kehilangan momen “kemesraan” dengan pernerintah itu, sehingga lahir pernyataan-pernyataan dukungan terhadap kebijakan pemerintah?

Nah, itu psikologi orang yang sudah mempunyai kedudukan. Itu harus dibaca sebagai satu pembelaan diri, memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan, kalau Anda dalam posisi mereka, itu logis sekali. Sangat logis.

Ketika pemerintah begitu takut kepada umat Islam, semua dicap sebagai ekstrim kanan, *kan*? Pada tahun 1960-1970-an, sembahyang di kantor saja sudah dianggap ekstrim kanan. Dan, dalam latar politik waktu itu, logis. Makanya, saya bilang, “Islam yes, Partai Islam, no”. Maksudnya, agar semua orang bisa mengaku Islam dengan bebas.

Sekarang, terbalik, *kan*? Tapi, untuk mereka yang obsesinya bukan kekuasaan, ya, harus tetap melihat keadaan yang sebenarnya.

Kalau boleh mengaku, kira-kira saya menempatkan diri dalam posisi seperti itu.

Kini, ada kelompok Islam seperti ICMI dan ada Gus Dur dengan NU-nya, yang agak di luar arus utama. Fenomena itu mencerminkan apa?

Memang, yang naik itu baru kelompok modernis, yang mulai pendidikan umum pada tahun 1950-an, karena adanya kebijakan memasukkan pendidikan umum ke dalam pesantren dan sebaliknya, yang dikeluarkan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Kelompok Islam kota. Kelompoknya Gus Dur itu, baru masuk tahun 1970-an. Oleh karena itu, Gus Dur mewakili suatu kelompok yang merasakan adanya deprivasi, tak terikutkan, tak tersertakan. *Nah*, itu lebih simpel daripada ICMI.

Padahal, secara obyektif, ICMI itu dibuka untuk semuanya. Mereka yang merasa bisa ikut serta, seperti GMNI, masuk saja. Di Sumatera Barat, pengurus ICMI-nya, orang GMNI. *Why not? There is nothing wrong about that.* ICMI itu memang fragmentasi betul. Potensi konfliknya tinggi. Tapi justru karena itu, kalau kita kembali ke masalah keadaban, mungkin punya potensi untuk lebih baik.

Begini tesnya. Bandingkan sikap PPP, HMI, dan ICMI berkenaan dengan kasus seperti Sri Bintang Pamungkas. Bintang dipecat PPP. Ia anggota Dewan Pakar ICMI. Tapi meski Bintang sudah diadili seperti begitu, tidak satu pun orang ICMI yang berpikir memecat dia. Tidak ada perasaan takut. Waktu Muktamar ICMI kemarin, Bintang dengan enak datang di muktamar dan ketemu dengan siapa saja. Yang menarik, tidak ada stigma sama sekali. *Kan*, enak tuh. *Civility.* Itu ICMI.

Sekarang PPP. Matori Abdul Djilil baru saja ikut Pernyataan Keprihatinan 1 Juli, sudah diurak-urak oleh Hamzah Haz, padahal sama-sama dari NU. Lalu, HMI. Pengurus HMI mengintruksikan siapa saja anggotanya yang aktif dalam Komite Independen

Pengawas Pemilu (KIPP), supaya keluar. Itu ironi yang luar biasa. HMI betul-betul melawan kodratnya sendiri. Ketika mereka akan memperingati 50 tahun HMI, tahun 1997, (kalau begini ini namanya) belum tahun emas, tapi tahun besi karatan.

Apa yang bisa dilakukan umat Islam dalam kondisi seperti sekarang?

Kita lagi meniti buih. Salah injak kecemplung. Tapi, karena ini semua bagian dari pertumbuhan bangsa, apa pun yang terjadi, kita harus terus berjalan. Dalam jangka panjang, berbahaya jika orang mengira yang sekarang terjadi bersifat permanen. Ini tidak betul. Misalnya sistem kepartaian. Dari sudut Pak Harto mungkin dipakai sebagai dasar konsensus nasional, memang betul tapi konsensus nasional untuk mengatasi persoalan jangka pendek, yaitu bahaya PKI. Kalau tidak begitu, kita belum tahu bagaimana jadinya Indonesia.

Itu nyata betul, cuma sifatnya darurat, *emergency*. Dan karena *emergency*, tentunya tidak perlu diteruskan. Kalau diteruskan, itu tidak natural, suatu keadaan normal ditangani secara *emergency*.

Dalam kondisi sekarang, kemungkinan pengembangan masyarakat sipil atau masyarakat madani bagaimana?

Pertama, by definition, civil society adalah asosiasi-asosiasi non-pemerintah, tidak hanya *nongovernmental* (NGO), tapi termasuk yayasan, badan, lembaga riset, dan sebagainya, yang independen. Karena itu, *civil society* atau masyarakat madani itu biasanya menjadi penyangga antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sikapnya melindungi rakyat, tapi kadang-kadang juga menjadi juru bicara pemerintah kepada rakyat. Yang diperlukan sekarang ini adalah independensi. Karena itu, saya tidak setuju, setiap kali ada orang mendirikan asosiasi kemudian minta restu pemerintah. Tidak betul

itu. Termasuk sehabis kongres mesti menghadap. *Wah*, itu berarti menyerahkan independensinya. Itu feodal.

Bisakah independensi itu ditumbuhkan dalam kondisi sekarang?

Independensi itu masalah sikap mental. Karena itu harus dipelajari, dieksperimentasikan. Orang harus belajar independen. Banyak masyarakat yang takut bebas, seperti pernah disinyalir oleh Erich Fromm. Kebebasan itu berarti mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Itu berat. Itulah mengapa Jerman bisa dipimpin seorang Hitler, yang tidak jelas sekolahnya. Karena Hitler mengatakan, “Sudah, serahkan kepada saya saja. Bangsa Jerman akan menjadi besar, bangsa Arya”. Dan karena mengalami kekalahan pada Perang Dunia I, orang Jerman pun berbondong-bondong menyerahkan kebebasannya itu kepada Hitler. Itu *kan* gerakan pengkultusan.

Apakah model semacam itu bisa terjadi di sini?

Jangan sampai. Karena itu, harus ditekankan, selain berani benar, juga harus berani salah. Artinya, eksperimen. Pakistan saja kondisi ekonominya lebih berat dibanding Indonesia, berani bereksperimen dengan demokrasi. Lihat saja Benazir Bhutto. Padahal, kita ini, kata peninjau luar, sebagai *corporate nation* paling berhasil. Dan karena didukung oleh bahasa, kita adalah bangsa baru yang paling sukses dengan bahasa nasional. Kemudian, ada kelengkapan-kelengkapan ideologi kenegaraan, seperti Pancasila dan UUD 1945. Malaysia saja masih kalah dengan kita, Filipina apalagi. India juga. Jadi, artinya, kalau kita bereksperimen dengan demokrasi, jelas ada eksesnya. Tapi insya Allah bisa di-*handle* dengan lebih baik, daripada di Pakistan, India, dan lain-lain. Ini masalah kemauan politik saja.

Dikaitkan dengan adanya Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP)?

KIPP itu sifatnya gerakan moral, tidak mengharapkan dampak legal, apalagi politis. Dampaknya dampak moral, mendidik masyarakat menyangkut demokrasi, dan lebih kepada masalah *civility*, keadaban. Terus terang saja, kita semuanya harus belajar. Berat itu menerima orang lain berbeda. Berat sekali. Kecenderungan kita itu otoriter karena masih feodal, pantang dibantah.

Menyinggung pemilu, satu kontestan saat ini babak belur sebelum bertanding. Apa masih mungkin menghadirkan pemilu yang berkualitas?

Demokrasi tidak terbatas pada pemilu, tapi dalam *civil society*. Jadi pemilu itu dibiarkan saja lewat. Bisa kita anggap sebagai angin lewat saja. Tapi yang penting itu penerapan demokrasi melalui eksperimen-eksperimen: Dan karena eksperimen, jelas saja kemungkinan kita salah. Misalnya kebebasan diterjemahkan menjadi semau-maunya. Itu berbahaya sekali. Bukan begitu demokrasi. Itu pernah diingatkan Bung Hatta dalam bukunya, *Demokrasi Kita*. Itu bisa menjadi manual, buku pegangan buat kita. Demokrasi menurut Bung Hatta, bukan berarti kebebasan tak terbatas. Itu namanya *chaos*. Dan kalau *chaos* yang terjadi, ada pembenaran bagi tampilnya orang kuat. Jadi demokrasi yang dilaksanakan secara salah akan mengundang lawannya sendiri. Itu persis yang diramalkan Bung Hatta akan terjadi dengan Bung Karno. Situasi mendorong Bung Karno tampil jadi diktator.

Makanya, kalau Peristiwa 27 Juli itu tidak terkontrol, kacau betul, pasti akan tampil seorang diktator. [❖]

MENATAP MASA DEPAN ISLAM¹

Memasuki bulan Desember 1992, beberapa majalah dan surat kabar, terus-menerus melakukan “polemik” atas ide-ide pembaruan Nurcholish Madjid, khususnya berkaitan dengan pidato kebudayaan yang disampaikan di TIM, 21 Oktober 1992. Di samping itu, juga terbit buku-buku yang “mengkritik” ide-ide pembaruan itu. Untuk mendapatkan penjelasan tentang perkembangan Islam di Indonesia dewasa ini dan menjawab isu-isu yang dilontarkan dalam media-media tersebut, M. Syafi’i Anwar dan Budhy Munawar-Rachman melakukan wawancara panjang dengan Nurcholish Madjid, mengenai konsekuensi isu-isu tersebut dan implikasinya pada masa depan Islam di Indonesia.

Seperti kita ketahui, belakangan ini ada perkembangan Islam yang sangat menggembirakan. Di mana-mana ada kegairahan atau antusiasme dalam beragama. Anda sering menyebut fenomena ini sebagai fenomena “santrinisasi”. Istilah santrinisasi yang Anda pakai itu tampaknya lebih bersifat antropologis, daripada istilah “islamisasi” yang tampak lebih politis. Anda sering mengatakan bahwa proses ini tidak terjadi secara mendadak, tapi mempunyai akar-akar yang panjang dalam sejarah Islam di Indonesia. Anda sering memberi contoh, misalnya, bahwa proses santrinisasi orang

¹ Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur’an*, “Menatap Masa Depan Islam”, Nomor 1, Vol. V, Th. 1994. Pewawancara M. Syafi’i Anwar dan Budhy Munawar-Rachman.

abangan/priyayi yang agak spektakuler, sangat tampak dalam gejala Masyumi. Yaitu, ketika orang-orang yang mempunyai latar belakang sosio-kultural priyayi itu, lalu muncul sebagai pemimpin-pemimpin Islam. *Nah*, puncak antusiasme itu justru terlihat dengan jelas sekarang ini. Tapi di tengah perkembangan Islam yang baik tersebut, bagaimana Anda melihat, apa yang disebut orang secara salah, sebagai fenomena “fundamentalisme”. Misalnya, berkembangnya harakah-harakah yang begitu antusias dalam mengkaji masalah-masalah keagamaan di kampus-kampus umum?

Ya, itu adalah bagian dari antusiasme, seperti yang saya katakan dalam makalah itu. Maksudnya di sana ada suatu sosiologi mengenai perubahan sosial. Contohnya adalah seperti dulu: Isu lemak babi. Sampai-sampai Indo Mie terkena. Padahal asetnya diekspor ke Saudi Arabia. Lalu ada berita di *TEMPO* mengenai anak muda yang minta dibersihkan perutnya karena sudah merasa memakan lemak babi itu. Ini *kan* mengharukan. Mengharukan karena ada semacam kegairahan agama yang tulus dan mendalam tapi terkesan tak tahu agama. Sebab kalau kita tahu, memakan makanan haram — tapi tidak sengaja — itu tidak apa-apa.

Jadi harakah-harakah itu memang merupakan bagian “gejala antusiasme” dalam beragama. Biarkan saja, mungkin dalam makalah saya itu — dari segi pemilihan kata — ada yang menyinggung perasaan orang yang sedang dalam antusiasme itu. Berarti kita gagal dari segi metodologi, bukan dari segi isinya. Yang kita tunggu itu, tentu saja pertumbuhan yang lebih dewasa. *Nah*, antusiasme dalam proses santrinisasi ini masih bercampur-aduk. Ada pengalaman-pengalaman buruk yang terbawa, sehingga tujuan dari semua ini masih mewarisi pengalaman buruk kita itu.

Proses ini saya kira masih terus akan berlanjut, mudah-mudahan kadar reaktifnya semakin tidak berarti. Yang kita tunggu sekarang adalah proses pematangan. Insya Allah, kalau sudah diterima sebagai keyakinan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat,

Islam akan menyatakan diri dalam perwujudan etis dan moral yang kuat. Sehingga nanti Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang basis etika dan moralnya adalah Islam. Ini bukan hanya masalah keyakinan, tapi juga keyakinan sosiologis, karena masyarakat Indonesia itu *kan* mayoritas Islam.

Pemikiran Anda ini tampaknya ada kemiripan dengan konsep *civil religion* yang dilcembangkan oleh Robert N. Bellah, maksudnya walaupun secara simbolis kita tidak menampakkan suatu formalitas Islam, secara substansial itu adalah Islam....

Civil Religion di Amerika itu sebetulnya dasarnya Kristen Protestan, yakni dari White Anglo Saxon Protestant (WASP). Di antara ide-idenya berasal dari Thomas Jefferson. Padahal ia sendiri bukan Kristen ortodoks. Dia seorang unitarianis-deisuniversalis. Tuhan yang ditulis dalam deklarasi kemerdekaannya pun adalah "The God of Nature" dan "Nature's God". Jadi tidak khas Kristen, karena Thomas Jefferson yang merencanakannya. Tapi begitu sampai ke masyarakat, ide itu mengalami Kristenisasi.

Demikian juga dengan Pancasila. Sebutlah Pancasila itu non-Islam. Tapi umat Islam sekarang mengisinya dengan Islam. Contohnya musyawarah. Musyawarah itu *kan* perintah al-Qur'an. Orang Kristen juga mengatakan kita harus bermusyawarah, tanpa mengatakan itu nilai Islam. *Nah*, itu yang kita maksud, bahwa Indonesia itu Muslim dalam arti etika. Etikanya itu Islam, tapi tidak usah kita beri label Islam. Untuk apa? PPP dulu digugat karena tidak berlabel Islam. Pak Idham Khalid mengatakan, lebih baik minyak samin cap babi daripada minyak babi cap onta. Jadi yang penting isinya.

Maka jika bangsa kita mau maju, itu harus dihubungkan dengan etika yang kuat. Bangsa kita itu, kalau menggunakan terminologi Gunnar Myrdal tergolong *soft state*, konsep baik dan buruk tidak jelas. Tidak ada etos *furqân* (pembeda antara yang benar dan salah). Ini disebabkan karena pengalaman kita pada agama

mengalami formalisasi. Misalnya hanya dengan wudu yang salah sudah diancam masuk neraka.

Anda berharap bahwa Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah semacam yang sering dikatakan para ahli sebagai “Islam Peradaban”? Dalam teori peradaban disebutkan bahwa yang menentukan jatuh-bangunnya suatu peradaban adalah adanya suatu etika yang kuat.

Al-Qur’an itu sebenarnya lebih banyak mengajarkan etika. Memang ada perintah shalat, misalnya. Tapi itu sebenarnya “pakunya” dan “mozaiknya” sendiri bukan paku itu. Mozaik itulah yang membuatnya indah. Itu sebenarnya yang mau saya katakan dalam makalah saya di TIM. Tapi ternyata bagi banyak orang pemikiran semacam itu lompatan, sehingga masih kaget. Jargonnya atau idiomnya saja belum dikenal.

Tentunya jika “Islam Peradaban” itu menjadi tema sentral, maka Islam harus mengembangkan terus-menerus diskursus dengan peradaban lain. Bisa dalam bentuk dialog atau konvergensi, atau mungkin saling mengisi. Jadi besarnya suatu peradaban tidak karena benturan-benturan dalam arti politis, tapi barangkali kebudayaan. Maksudnya ada usaha saling mengisi. Bagaimana pendapat Anda?

Ya memang begitu. Karena itu, saya selalu mengutip al-Qur’an seperti perintah untuk mencari titik-temu (*kalimah sawâ*). Pada suatu ketika saya ceramahkan soal ini. Tapi ada yang menolak dengan semangat berkobar-kobar dan mengatakan, “kalau begitu Tuhan memerintahkan sesuatu yang mustahil dong?” Ayat itu mengatakan, setelah perintah untuk mencari titik-temu itu: “kalau memang mereka tidak mau, katakan kepada mereka: Saksikanlah bahwa kami orang Islam”. Artinya ada kemungkinan orang tidak mau diajak mencari titik-temu karena itu kita harus menegaskan

identitas diri kita: Saya ini orang Islam. *Nah*, seyogyanya sebagai muslim kita memang harus terbuka dan lapang dada terhadap pencarian titik-temu itu.

Dari sudut ini Pancasila adalah *kalimah sawâ'*. Kesalahan beberapa orang itu karena melihat Pancasila sebagai alternatif terhadap Islam, Kristen, Cina, kemudian ingin membuat jalan. Titik-temunya adalah kepentingannya membuat jalan yang bagus. Ini titik-temu antar-kita.

Di mana tempat syariat dalam “Islam Peradaban” tersebut?

Memang Islam Peradaban sedikit lebih di atas syariat — dalam arti kita tidak lagi mempersoalkan syariat. Pakistan yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam, sampai sekarang tidak tahu bagaimana melaksanakannya, karena perbedaan aliran. Ditambah lagi kemiskinan dan pandangan kedaerahan. Syariat itu sebenarnya bisa dibagi dua: Kalau yang dimaksud syariat itu menyangkut ibadah, maka harus dikembalikan kepada individu. Dengan kata lain sangat tergantung bagaimana individu itu sendiri. Pelajarilah baik-baik dan putuskan sendiri. Masa soal ibadah ini selama 14 abad nggak selesai-selesai. Kemudian yang menyangkut umum, itu *tah* ada khilafiyah. Di situ agak sedikit sulit karena kita harus menarik dulu ke tataran yang lebih tinggi. Sebetulnya dalam literatur klasik, sudah ada jargon-jargon seperti *maqâshid al-syarî'ah* dan sebagainya. Itu adalah *ratio-logis* yang harus ditanggapi dengan cara yang canggih — yang berarti menangkap pesan dasar al-Qur'an itu sendiri. Itu sebetulnya yang dikehendaki oleh neo-modernisme Fazlur Rahman.

Di sini kita memasuki juga soal amar makruf nahi munkar. Dalam konteks ini ada perintah Tuhan, yaitu ajakan kepada *khayr* dan *ma'rûf*. Dalam bahasa Indonesia *khayr* dan *ma'rûf* semuanya diterjemahkan dengan “kebaikan”. Tapi sebenarnya ada perbedaan, *khayr* itu kebaikan universal, sedang *ma'rûf* itu sesuatu yang dikenal sebagai baik dan ada kaitannya dengan adat dan kontekstual,

ada hubungannya dengan ruang dan waktu. Sebutlah *khayr* itu normatif-universal, yang *ma'rûf* itu operatif-kondisional.

Umat Islam sekarang ini harus melakukan dua hal: *pertama*, menangkap apa itu *khayr*. Di sini berarti mengangkat ajaran Islam pada level *high generalization*. Kemudian menurunkannya dalam *al-ma'rûf*, yang sekarang masih menjadi problem bagi sebagian umat Islam. Karena kita harus tahu konteks zaman dan tempatnya. Misalnya sarung. Dulu untuk orang Indonesia sarung adalah tanda kesalehan. Tapi di India, kesalehan itu bukan dengan sarung, tapi dengan pakaian India itu. Di Indonesia, sarung sekarang sudah diganti dengan celana. Tahun 50-an saya di pesantren kalau salat harus pakai sarung. Kalau tidak, bisa dilempar batu. Tapi kalau sekarang makin sedikit yang pakai sarung. Jadi semuanya bisa berubah *kan?*

Sering dikatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih “fiqih oriented,” dan Anda juga “dituduh” termasuk orang yang menegasikan atau tidak mau memperhatikan soal-soal fiqih, bagaimana tanggapan Anda?

Kalau hanya sampai pada taraf slogan, sering orang mengatakan, “ini gara-gara orientasi fiqih”. Pak Rasjidi sendiri pernah menyebut soal ini. Mungkin mereka tidak menemukan problem, karena hanya sampai pada taraf retorika. Tapi begitu diterjemahkan dalam konsep, orang mulai terganggu. Padahal yang kita maksud adalah fiqih yang *ad hock*. Kalau fiqih dalam arti sebenarnya, ya pemahaman agama yang menyeluruh itu, yang tadi kita bicarakan.

Tapi fiqih dalam arti sempit, refleksinya di sini seperti Persis. Sampai sekarang majalah *al-Muslimun* masih penuh kontroversi. Isinya masih bagaimana hukumnya ini-itu. Padahal mereka mengaku pengikut Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu bukan hanya mengarang fiqih. Ia mengarang juga falsafah.

Tapi apakah itu memang merupakan penghayatan keagamaan yang paling rendah? Dan dalam konteks ini bolehlah kita mengatakan, bahwa ada tingkat-tingkat dalam penghayatan keberagamaan, di mana penghayatan keberagamaan di level peradaban, atau “Islam Peradaban” tadi, ada di tingkat tertinggi, karena bersifat filosofis dan etis?

Jelas statemen itu ada benarnya, tapi ada tendensi pejoratif dan merendahkan orang. Di sini sebenarnya kita harus memahami idiom-idiom agama. Jadi sebenarnya kita tidak berhak mengganggu persepsi beragama orang-orang itu. Kalau mereka sudah tenteram, ya biarkan. Kita tidak bisa menariknya ke atas. *Toh* mereka sudah menemukan makna hidup. Makna hidup itu yang paling penting. Cuma kalau masalahnya perbaiki masyarakat yang menyeluruh, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus ada pembagian kerja. Saat kita ngomong-ngomong seperti ini, kita tidak membayangkan bahwa 100 juta orang Indonesia itu tidak seperti kita. Jangankan Indonesia, Amerika saja sampai sekarang masih seperti itu. Masih retorik juga. Kita tidak usah berilusi bahwa orang-orang lain itu akan seperti kita. Tetap akan ada kerucut tinggi-rendah. Cuma yang selalu mewarnai keputusan untuk orang banyak, *kan* yang disebut sebagai *trend makers* (penentu kecenderungan).

Kalau dilihat dari perdebatan yang berkembang sejak ceramah Anda di TIM sampai sekarang, banyak hal-hal yang sulit kita terima dari alasan-alasan mereka. Ada yang menarik dari ungkapan Masdar F. Masudi, mereka itu mencerca tidak pada konsep yang ada tapi pada bayangan. Persoalannya, kalau kita perhatikan sejak meledaknya kasus itu, menurut kami tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi kemudian menggelingding sedemikian rupa sehingga muncul atau tercipta keterkaitan dengan masa lalu, trauma dan sebagainya. Kritikan-kritikan itu tidak mengarah kepada suatu konsep atau pada satu titik orientasi yang jelas, tetapi pada “bayangan” itu sendiri.

Ya, waktu saya mengemukakan itu, mereka memberi reaksi dengan mengatakan, “Kalau Anda mengatakan begitu, maka hasilnya ini”. *Nah*, kemudian hasilnya ini *kan* yang dikutip. Tapi mereka tidak bertanya dulu apakah saya mengatakan begitu atau tidak. Seperti halnya Gus Dur yang telah menjadi korban isu *Assalamu’alaikum* harus diganti. Karena itu, kalau sembahyang, diganti saja dengan selamat pagi, selamat siang. Padahal konteksnya sama sekali tidak begitu.

Gus Dur cerita sama saya, kasusnya sangat spesifik. Seorang menteri mengeluh pada Gus Dur: “Gus, itu gimana, semua orang membuka pidatonya dengan *Assalamu’alaikum* dan menutup pidatonya dengan *Wassalamu’alaikum*. Gimana, ya buat saya ini susah. Kenapa? Kalau saya tidak mengucapkan dibilangnya saya tidak suka. Kalau mengucapkan, saya tidak fasih”. Gus Dur mengatakan, “Ya...sudah, selamat pagi, selamat sore *kan nggak* apa-apa”. Tapi yang ditulis wartawan, Gus Dur menganjurkan *Assalamu’alaikum* diganti. Tapi Gus Dur orangnya tidak peduli, ya... biarkan saja. Tidak berusaha membantah, *nggak* apa, begitu *kan*. Kemudian setelah itu, ditarik-tarik sendiri oleh wartawan yang bersangkutan: Karena Gus Dur menganjurkan itu, maka kalau shalat subuh, ya salamnya selamat pagi...?! Nilainya jelas tidak ada. Akhirnya menjadi sumber fitnah saja.

Seperti itu juga ketika saya mengatakan bahwa “Allah itu dewa air” dengan mengutip Ismail Faruqi. Itu *kan* eksploitasi terhadap saya. Padahal urutannya panjang sekali dan kita bisa merujuk ke berbagai literatur. Maka, mereka sebetulnya terbayangi oleh imajinasi mereka sendiri. Silakan saja membaca buku-buku yang sudah saya tulis. Tapi memang persoalan yang muncul ke permukaan itu tidak selalu satu. Ada soal psikologis, ada soal kepribadian, sosiologis, dan sebagainya.

Reaksi seperti di Masjid Amir Hamzah itu, menyangkut pada soal peranan. Suatu bidang yang sesungguhnya ingin mereka pegang secara optimal, tapi mereka tidak mampu memerankannya, karena secara inklusif kita telah mengambilnya. Jadi mereka merasa

kehilangan peran. Sesungguhnya bukan niat kita mengambil peranan orang. Misalnya ketika saya mengatakan “Islam Yes, Partai Islam No!” itu sebenarnya mengurangi peranan mereka. Sebab kalau mereka paham tujuan kita, justru mempermudah keinginan tercapai, yaitu “Islamisasi Indonesia sebagai isu nasional,” itu tujuan kita.

Kalau hubungannya secara sosiologis, mungkinkah yang disebut pengambilalihan peranan tadi ada hubungannya dengan kecemburuan intelektual, yang berkaitan dengan pendidikan? Mayoritas pengkritik Anda yang vokal itu dari Timur Tengah. Sementara orang yang studi Barat — semacam Anda dan lainnya — sudah terbiasa dengan kritik, obyektivitas, rasionalitas, dan sebagainya. Sementara itu, mereka melihat agama sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi, sesuatu yang sudah selesai. Jadi ada, katakan saja, suatu “keterasingan intelektual” pada diri mereka dalam menangkap idiom-idiom modern.

Saya kira itu betul. Mereka terasing karena — seperti Anda katakan tadi — tidak menguasai idiom-idiom; juga jargon-jargon yang kita gunakan. Karena sosiologi yang kita pakai itu, sosiologi modern. Karena itu setiap kali ke Timur Tengah, saya selalu menganjurkan anak-anak yang belajar di sana: “Anda beruntung karena belajar agama di negeri Arab. Tapi kalau Anda tidak mempelajari teknik menyatakan pikiran modern, Anda tidak akan sambung dengan Indonesia”. Di dunia Islam pun, siapa yang paling komunikatif dengan umum, pada akhirnya adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pemikiran modern. Sebutlah, Hasan Hanafi. Menulis dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya modern. *Fushḥah*, klasik, tapi pengekspresianannya modern. Sekarang surat kabar *Akḥbâr al-Yawm* bahasanya modern. Ada istilah bahasa Arab klasik modern. Klasik itu standar, masih mengikuti standar al-Qur’an, tapi ekspresinya modern. Orang-orang ini tampaknya tidak terbiasa dengan bahasa modern. Misalnya satu-dua dari mereka tahu bahwa artinya *isti‘mâr* itu penjajahan, tapi pada

tingkatan ide itu sendiri, mereka terlalu terkungkung oleh dunia intelektualitasnya sendiri yang agak terbatas.

Idealnya, kalau kita bisa kerja sama, kita adakan diskusi terus-menerus, sehingga ada simbiose mutualistik. Contohnya, Zainun Kamal, Pak Quraish Shihab. Nanti kalau Alwi Shihab pulang, dia akan menjadi putra mahkota intelektual Islam Indonesia. Dia di Mesir dapat *cum laude*, kemudian sekarang belajar di Amerika. Jadi kombinasi yang ideal. Sebetulnya belajar ke Timur Tengah tidak ada bedanya dengan belajar di mana saja asal tahu ke mana mereka harus pergi. Seperti Harun Nasution, menjadi seperti sekarang ini karena dia mencuri waktu. Dia di al-Azhar tapi sering ke perpustakaan American University of Cairo.

Kalau kembali kepada *paper* Anda di TIM itu, di situ Anda berbicara bagaimana sekarang ini terjadi perubahan sosial yang besar dan respon-respon keberagamaan yang keras. Melihat respon semacam ini bagaimana Anda menilai respon itu?

Mungkin saya kurang bijaksana dalam makalah itu meskipun saya usahakan untuk diperhalus dengan contoh-contoh di Amerika. Mereka tersinggung. Memang ada titik lemah makalah itu dari segi metodologi, segi penyampaian, tapi seandainya itu dihindari, pasti menjadi netral sekali, dan akan menjadi susah. Analisisnya akan terlalu abstrak. Misalnya untuk menyebut agama Ibrahim, karena mereka tidak pernah mendengar, mereka kaget. Padahal dalam Kitab Suci *kan* biasa. Sedang al-Qur'an mengatakan, "*Kemudian Aku wahyukan kepada engkau Muhammad, hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif*," (Q 16:123).

Mereka tidak terbiasa berpikir dari sudut perbandingan yang kuat (*comparative perspective*). Misalnya, kitab yang dipakai *Bid'ayat al-Mujtahid*. Semua mazhab dipelajari. Tapi kalau di Pesantren Persis di Bangil, tampaknya hanya satu. Bahwa inilah yang benar. Karena itu, mereka paling risih dengan komparasi.

Sekarang muncul isu yang lebih besar dari mazhab Sunni, yaitu munculnya Syi'ah. Dan di Bangil, Persis di depan hidung mereka, ada pesantren Syi'ah. Mungkin, ketegangan-ketegangan di sana, antara lain dilampiaskan kepada kita.

Karena itu, ide Anda tentang sikap “inklusivisme internal” dalam beragama masih menjadi persoalan besar dalam tradisi keberagamaan di Indonesia?

Ya. Waktu saya ke Sulawesi Selatan, ke Universitas Muslim Indonesia, *al-hamd-u li 'l-Lâh* sambutannya cukup baik dan simpatik. Tapi ada satu-dua orang yang berapi-api menyerang saya. Karena judul yang mereka minta itu tentang toleransi, ada yang menanggapi: tidak ada kompromi! Tidak ada kemungkinan titik-temu. Waktu saya menjawab: Anda mengatakan tidak ada titik-temu antara Islam dan *ahl al-Kitâb*, tapi al-Qur'an mengatakan demikian. Apakah Anda menuduh al-Qur'an memerintahkan sesuatu yang mustahil. Dia ketawa. Data itu ada, tapi tidak menjadi bagian dari idiom mereka. Ini memang masalah perkembangan pengetahuan.

Dalam sejarahnya, Indonesia memang menganut suatu pandangan keberagamaan yang monolitik.

Kita hanya satu, Sunni dan Syafi'i. Kemudian dengan adanya gerakan-gerakan reformasi, ada sedikit variasi. Yang dipilih oleh reformasi itu hal-hal yang terlampau jelas, yaitu soal *furû'iyah*. Apalagi Persis. Kalau Muhammadiyah masih tetap pada pendidikan modern. Kalau Persis misalnya soal menghalalkan katak. Sebetulnya, dulu Islam di Indonesia itu bervariasi, dengan sisa-sisa seperti sejarah intelektual di Aceh, dengan tampilnya Hamzah Fansuri yang dilawan oleh al-Raniri. Kemudian di Sumatera Barat dan Jawa pernah ada tradisi yang ada hubungannya dengan Syi'ah. Tapi karena basisnya masih rendah, disapu bersih oleh gerakan

fiqih. Dia katakan: yang memperoleh keabsahan absolut adalah yang datang dari Makkah.

Waktu saya di Iran, salah satu acaranya mengikuti seminar tentang pendekatan antara mazhab Ja'fari (Syi'ah) dan mazhab Syafi'i, tempatnya di Kurdistan. Karena orang-orang Kurdi itu Sunni semua. Menarik sekali dibahas oleh ulama di sana. Ternyata di antara empat imam mazhab itu, yang paling mendekati Syi'ah adalah mazhab Syafi'i. Jadi kecenderungan mengagungkan *ahl al-bayt* lebih besar pada mazhab Syafi'i dibandingkan dengan mazhab lain. Dan menyangkut riwayat Syafi'i sendiri, ketika dia menjadi professor di Yaman, ia pernah menggubah syair-syair yang mengagungkan *ahl al-bayt*. Tapi kemudian dipanggil untuk diadili. Syafi'i menjawab, "Saya tidak menganut Syi'ah tapi Sunni. Tapi kalau yang disebut Syi'ah itu yang mencintai *ahl al-bayt*, maka sebutlah saya Syi'ah". Kemudian dia dibebaskan oleh Harun al-Rasyid. Bahkan dia tinggal di Baghdad untuk menciptakan kesempatan baru bagi dia agar belajar lebih lanjut. Maka bagi Gus Dur, Syi'ah itu tidak apa-apa. Bayangkan, di antara kelompok-kelompok di Indonesia yang suka menggunakan jargon Ahli Sunnah wal Jamaah adalah NU. Tetapi Gus Dur *kan* kelas tokoh Islam formal yang tinggi yang bisa menerima kedatangan orang Syi'ah dari Iran, diskusi di NU.

Padahal banyak syair-syair populer yang sering dibacakan sebagai shalawat di masjid-masjid (khususnya NU), kelihatan sekali pengaruh Syi'ahnya. Seperti di Jombang, kalau maghrib itu didendangkan syair Arab, yang artinya begini, "*Saya punya lima tokoh yang dengan lima tokoh itu saya bisa menolak bencana bahkan memadamkan kebakaran yaitu Nabi Muhammad, Ali, Fathimah, kedua anaknya*". Itu dinyanyikan. Saya hafal. Jadi sebetulnya ada kedekatan antara Syafi'i dan Syi'ah. Tapi karena paham yang lebih keras masuk lewat Persis, maka terjadilah kampanye anti Syi'ah dari mereka. NU tidak pernah.

Ada yang menarik dari kritikan mereka, yaitu adanya negasi terhadap pluralisme. *Frame* atau kerangka yang digunakan itu kembali kepada teks-teks al-Qur'an itu sendiri dalam pengertian yang sangat skripturalis. Misalnya dalam hal pandangan tentang Ahli Kitab. Kita tahu padahal ini adalah hal yang kompleks dan antar agama-agama itu mempunyai keterkaitan sejarah maupun teologis.

Pertama, mungkin mereka tidak punya akses terhadap bacaan-bacaan itu. *Kedua*, ada aspek psikologisnya kenapa mereka tidak mau membaca itu. Karena memang pada dasarnya tidak tertarik, mungkin juga sampai tidak setuju. *Ketiga*, barangkali mereka khawatir pada diri sendiri. Dengan kata lain, mereka sebetulnya tidak percaya pada diri sendiri. Mungkin mereka beranggapan: Kalau kita toleran terhadap orang, meskipun sesama Muslim, itu akan menghilangkan eksistensi diri sendiri. Ada istilah untuk menegaskan diri sendiri: Saya ini orang Islam. Ini akibat dari ketidakmantapan. Takut terancam bila memberikan konsesi kepada orang lain, yang berarti merongrong eksistensi diri. Padahal kalau kita bisa menerima orang lain justru karena kita percaya diri sendiri yang tinggi. Misalnya, gejala xenophobia, gejala takut kalah pada orang asing, itu gejala psikologi.

Jadi, orang-orang itu memang dasarnya tidak mantap dengan dirinya sendiri. Coba, jangankan dengan agama lain, intern Islam saja sudah begitu. Coba perhatikan jika kita berbicara tentang persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), yang dimaksud oleh mereka dengan "persaudaraan" adalah persatuan yang monolitik. Padahal al-Qur'an sendiri berkata, setelah ditegaskan prinsip bahwa semua kaum beriman itu bersaudara, kemudian ayat berikutnya adalah, "*lâ yaskhar qawm min qawm*", dan seterusnya. Janganlah ada di antara kamu golongan yang merendahkan golongan lain. Tapi kita tidak bisa melakukannya karena takut kalah. Misalnya Islam versi Bangil itu *kan* Islam fiqih, sedangkan kita Islam peradaban. Mereka merasa akan masuk surga karena berhasil meluruskan bagaimana

berwudu yang benar, tapi tidak segan-segan memfitnah orang lain. Justru yang prinsip tidak diperhatikan. Lantas apa gunanya shalat, wudu yang benar, tapi... itulah yang disebut dengan simbolisme. Orang berhenti kepada simbol dan menyembah simbol tersebut. Tentu saja kritik ini terlalu keras.

Setelah melihat format polemik itu sendiri, ada yang berpendapat bahwa polemik pembaruan yang sekarang ini ada penurunan mutu intelektual. Ketika tahun 70-an, terlihat kadar intelektual yang seimbang dan lebih bermutu daripada sekarang. Tampaknya argumen-argumen mereka disusun atas dasar ilusi atau istilah tadi ketakutan akan suatu “bayang-bayang”....

Mereka marah-marah, karena di bawah sadarnya, merasa tidak mempunyai argumen. Coba bandingkan *Media Dakwah* dengan misalnya *UQ* atau *Islamika*, kan kualitasnya jauh, misalnya dalam elaborasi argumentasi, penguasaan idiom, cara mensosialisasikan ide-idenya, itu semua tidak terbayang pada mereka. Maksud saya tidak terbayang kalau mereka bisa membahas tema-tema seperti yang ada di *UQ* atau *Islamika* itu. Jadi ada situasi keterpisahan. Kalau pada 1970-an, masih seimbang karena itu masih ada harapan untuk mengembangkan ide-ide. Artinya masih ada diskusi-diskusi di antara kita yang berpolemik. Kalau sekarang sama sekali tidak. Kita ajak mereka berdiskusi, mereka tidak mau. Tapi tiba-tiba saja misalnya saya “dijebak” di Medan, melawan tiga panelis lain dalam suatu diskusi yang memang sejak awal — termasuk panitia sewaktu mengantarkan acara tersebut — sudah memojokkan saya. Tapi saya ditolong sedikit oleh moderatornya. Mungkin karena ia pernah simpati pada Syi’ah sehingga dia sempat membuat jarak. Ada beberapa orang IAIN yang juga simpatik pada saya. Kemudian ikut mengantar saya ke airport. Mereka berkata, “bagus sekali datang ke sini, biar mereka tahu.” Dan menurut mereka *score*-nya itu ada pada saya. Saya katakan: kita ini manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Di mana-mana juga saya mengatakan begitu. Justru

itu adalah inti dari ide saya. Tapi rupanya dari situ kata-kata saya diambil dan dimanipulasikan, kemudian di *Media Dakwah*, saya disebut “mengaku salah”. Itu *kan* ketakutan, sampai memberitakan apa kejadian yang sebenarnya saja tidak berani.

Bagaimana tentang orientalisme? Misalnya Anda atau — siapa pun yang pernah belajar di Barat — selalu disebut-sebut sebagai “dipengaruhi oleh orientalisme”.

Orientalisme yang terbayang pada mereka adalah Barat. Nah itu *stereotype*-nya. Apa saja yang kritis, dan mengandung *comparative perspective* atau pandangan historis, menurut mereka itu Barat. Ini sebenarnya hanya karena mereka tidak percaya diri saja.

Sekarang ini kaum orientalis itu — misalnya seperti yang dikatakan Edward Said, dalam bukunya *Orientalism* — jelas masih ada satu-dua. Tapi sebetulnya, sudah tidak ada orang yang mau menyebut dirinya bahwa ia seorang orientalis. Sekarang yang ada adalah *regional studies* misalnya Iranis, Arabis, Indonesianis, dan sebagainya.

Juga Islamisis (ahli Islam) dan sebagainya. Kalau Yahudi? Anda disebut sebagai “masuk dalam konspirasi Yahudi untuk menghancurkan Islam”. Nyatanya orang-orang Yahudi, *tob* juga tidak satu. Bahkan ada orang Yahudi yang anti pada zionisme.

Al-Qur’an sendiri bilang begitu: *lays-û sawa’an*, mereka itu tidak sama. Mereka tidak tahan melihat ayat seperti itu.

Islam mengajarkan semangat egaliter, toleransi, termasuk kepada orang Yahudi sendiri. Islam itu sendiri secara teologi *kan* lebih dekat kepada Yahudi daripada Kristen, misalnya.

Mereka tidak paham soal itu. Misalnya Yasser Arafat itu, jarang ia menggunakan terma Yahudi tapi zionisme. Jadi mereka

dikuasai *stereotype*-nya sendiri. Memang ada ayat, “*wa-lan tardlâ ‘anka al-yahûd-u wa la al-nashâr-a*”. Tapi dalam ayat lain al-Qur’an memuji orang Kristen, mereka adalah sedekat-dekatnya dengan Islam. Ketika itu disebut, mereka tidak tahan padahal sama-sama al-Qur’an. Jadi karena mereka itu guncang dengan kenyataan ini, mereka persis seperti yang dikatakan al-Qur’an: “*menerima sebagian dan menolak sebagian*”.

Mungkin para pengkritik Anda melihat pandangan seperti ini sangat liberal dan bertentangan dengan al-Qur’an? Dalam pandangan mereka yang liberal itu jelek.

Kalau begitu memang al-Qur’an itu liberal. Jadi untuk menjadi liberal, orang harus Qur’anik. Lihat saja komentar-komentar dari tafsirnya A. Yusuf Ali, Muhammad Asad, mazhab yang paling modern itu. Tidak usahlah Muhammad Ali, riskan karena ia Ahmadiyah. Jadi kalau kita mendapat reaksi, itu wajarlah. Kita berbuat sesuatu, pasti akan punya dampak. Sungguh aneh kalau tidak ada reaksi. Sedangkan Ahmad Hasan yang menghalalkan kodok saja, reaksinya nggak karuan. Tapi kesalahpahaman yang gawat itu — menurut mereka — karena kita tidak pernah bicara masalah fiqih. Disangkanya kita mengabaikan syariat.

Anda sering dihubung-hubungkan dengan Syi’ah. Atau sering dikatakan oleh mereka bahwa Syi’ah mendapatkan tempat dalam pengajian-pengajian Paramadina. Sehingga ada yang menganggap ada “konspirasi” antara Paramadina dan Syi’ah. Sejauh mana Anda melihat pentingnya kehadiran Syi’ah di Indonesia ini?

Kehadiran Syi’ah itu penting, ia akan membawa kita pada level pemikiran yang lebih tinggi, misalnya filsafat itu tadi. Selain Syi’ah, Ahmadiyah juga sudah berkembang pemikirannya, sayangnya mereka tidak konvensional. *Nah*, kehadiran Syi’ah itu menguntungkan sekali bagi kita, karena kita diperkenalkan pada

dimensi lain. Saya kira Islam zaman modern ini, letaknya pada bidang pemikiran.

Maksud saya begini. Kita tidak usah merasa perlu kalau kita sembahyang orang harus lihat. Kita menikmati sembahyang kita, puasa kita, tapi penikmatan itu dalam level yang lebih tinggi yaitu sebagai olah spiritual. Bukan sekadar memenuhi syarat-syarat lahiriah semata.

**“Keberagaman yang *hanîf*” itu sebagai titik-temu agama-agama
....**

Betul seperti ada dalam al-Qur’an: “*Aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim itu yang hanîf,*” (Q 16:123). Itu agama kerukunan. Selalu diterangkan *hanîf*. Tetapi orang-orang itu tetap tidak tahu maksud idiom itu. Ada uraian dari Muhammad Assad tentang yang *hanîf* itu. Selama ini, menurut saya dalam beragama kita salah dalam penekanan. Dalam rangka itu Idul Fitri (*’id al-fithr*), misalnya, kita seharusnya memahami fitri itu sebanding dengan bagaimana orang Kristen memahami Natal. Itu sentral sekali.

Misalnya soal *ahl al-Kitâb*. Sebenarnya antara Islam dan Kristen, itu *kan* berbeda. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa dalam semua agama itu ada *hanafiyah* sebagai suatu ajakan, lantas bagaimana kita harus melihat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara Islam-Kristen misalnya?

Dalam kasus Kristen, perihal ketuhanan Yesus, kebanyakan orang Islam menganggap itu sebagai persoalan perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Jadi seruan untuk kembali kepada yang *hanîf* itu, bagi orang Kristen memang memiliki implikasi teologis. Karena dalam agama Kristen memang begitu. Sehingga dalam Kristen muncul kelompok-kelompok, tapi lebih dari itu — khususnya soal yang bersifat syariat itu — ya masing-masing saja. Dengan

Yahudi dari segi akidah, kita banyak mempunyai persamaan. Karena itu, al-Qur'an tidak pernah mengkritik orang Yahudi dari segi akidah, kecuali yang menyangkut Uzair — yang orang Yahudi menganggapnya sebagai “anak Tuhan”. Uzair ini yang memimpin orang Yahudi kembali ke Palestina dari Babilonia. Lebih dari itu juga tidak ada. Yang dikritik dari orang Yahudi itu *kan* karena mereka sombong. Kesombongannya itu memang berkaitan dengan klaim mereka sebagai kelompok yang mengaku bahwa “Kami adalah putra Allah”, “*nahn-u abnâ' Allâh*”. Dan mereka mengaku sebagai pemegang sebenarnya perjanjian antara mereka dengan Tuhan, atau kaum pendukung perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kesombongan mereka.

Saya punya buku, judulnya, *New Nation*. Itu suatu kultus terhadap Nazi di Amerika, yang banyak membunuh orang-orang Yahudi. Termasuk salah seorang penyiar Yahudi yang sangat terkenal di California. Tapi lama-kelamaan ada seorang pelaku pembunuhan ini sadar, merasa berdosa dan lari ke B'nai Brith, yaitu organisasi orang Yahudi. Ternyata, dilindungi oleh orang-orang B'nai Brith. Lalu ditanya, apakah kamu tidak berusaha melarang organisasi itu. Oh ...tidak! Tapi kalau mereka melakukan tindakan-tindakan anti sosial, ya, kami melawan. Jadi orang Yahudi itu tidak mau melarang organisasi Nazi itu. Mengapa? Karena prinsipnya semua orang harus bebas berorganisasi, termasuk mereka. Kalau memang melarang, malah akan kena pada diri mereka sendiri (sebagai Yahudi). Coba lihat sebagai prinsip sampai sejauh itu. Makanya orang Yahudi di Amerika itu teman-temannya adalah orang Katolik, orang kulit hitam, dan sebagainya. *Nah* nuansa-nuansa seperti ini *kan* tidak dipahami oleh orang-orang di *Media Dakwah*, bahkan mungkin jauh dari imajinasi mereka. [❖]

TIDAK USAH MUNAFIK!¹

Cak Nur, begitu ia biasa dipanggil, memang bisa diibaratkan sebagai sebuah kitab yang unik; di dalamnya terkandung pemikiran-pemikiran Islam klasik dan sekaligus kontemporer. Kemampuan interpretasinya atas ajaran-ajaran Islam dan usaha mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat, membawanya pada gagasan tentang keislaman dan keindonesiaan. Pemikiran bahwa kita harus mampu menampilkan Islam dengan wajah kultural, lahir dari intelektual yang satu ini. Berikut ini petikan perbincangan Nurcholish Madjid dengan Mohamad Sobary wartawan tamu dari *MATRA*.

Begini Cak Nur, saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang Islam yang harus tampil dengan tawaran kultural, produktif, dan konstruktif yang membawa kebaikan bagi semua itu.

Ada beberapa kata kunci sekitar idiom itu. *Pertama*, yang dimaksud dengan tawaran kultural itu tidak semata-mata nenunjuk hal-hal sempit dan partisan. Misalnya politik dan ideologi semata. Tapi kultural dalam suatu format yang meliputi segala-galanya. Itu syarat utamanya.

Yang *kedua*, itu berarti harus responsif terhadap tantangan zaman. Saya kira itu tema yang sering kita kemukakan, yaitu bahwa sebetulnya tidak ada akhir perjalanan, tapi terus-menerus. Dan dalam wujud nyatanya ialah bagaimana kita menampilkan

¹ Majalah *MATRA*, "Tidak Usah Munafik!", No. 77 Desember 1992, Pewawancara Mohamad Sobary.

Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Sebab kalau kita melakukan *flashback*, produk-produk yang paling kreatif dari Islam pun akhirnya merupakan responsi dari tantangan zaman.

Lalu yang *ketiga*, harus merupakan hasil dialog dengan tuntutan-tuntutan ruang dan waktu. Misalnya untuk Indonesia, ya harus merupakan dialog dengan tuntutan di Indonesia. Karena itu, kita katakan adanya semacam kesejajaran, jika tidak kesatuan, antara keislaman dan keindonesiaan. *Islamic values* dengan *Indonesian values* itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan.

Ini bukan berarti mengklaim secara eksklusif Indonesia, tetapi semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sebagian besar mengaku Muslim. Itu berarti bahwa ada potensi untuk menemukan basis kultural yang diilhami Islam. Dan ini sebetulnya sudah menjadi kenyataan nasional kita. Misalnya, nomanklatur perpolitikan itu banyak dari Islam: musyawarah, mufakat, rakyat, dewan, dan sebagainya.

Juga hukum, tertib, aman, masalah, dan macam-macam. Jadi secara tidak terasa, sudah terjadi akulturasi Islam dalam konteks Indonesia. Atau sebaliknya, sudah terjadi semacam pengndonesiaan terhadap nilai-nilai Islam. *Lho*, Gus Dur punya kata-kata kunci untuk itu, yaitu mempribumisasikan Islam, atau Pak Munawir: mengaktualkan Islam. Itu yang *ketiga*. Yang *keempat*, eksklusivisme itu harus diakhiri, diganti dengan inklusivisme, serba-meliputi siapa saja.

Caranya?

Seperti yang sering saya ajukan, di intern Islam harus terjadi semacam relativisme internal. Bahwa umat Islam itu tidak boleh memandang satu sama lain dalam pola-pola yang absolutistik. Malahan bisa kita ekstensi ke golongan-golongan yang lain, ke agama-agama yang lain, yaitu adanya suatu ajaran dalam agama Islam, bahwa agama-agama lain itu berhak untuk hidup, malah harus dilindungi.

Tidak berarti pengakuan bahwa agama-agama lain itu benar, seperti yang sering ditonjolkan orang bahwa semua agama benar. Tetapi yang dimaksud adalah pengakuan akan hak dari setiap agama untuk eksis di dalam suatu hubungan sosial yang toleran, saling menghargai, saling membantu, menghormati, dan sebagainya.

Selain gagasan itu merupakan bagian dari prinsip toleransi, ada juga dalam pikiran Anda agar kita mengakhiri corak-corak pengalaman sejarah kita yang lalu? Atau mungkin karena Indonesia harus menyongsong era baru, yang lain sama sekali dari Indonesia masa lalu?

Betul. Jadi di sini ada sedikit kesalahpahaman, dikira kita menyesali apa yang sudah terjadi. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk menyesali, misalnya saja, perjuangan partai-partai Islam sekitar tahun 1945 sampai tahun 1950-an untuk membuat negara Islam. Kita tidak menyesali. Artinya, kita menyadari bahwa menurut proses-proses kultural historis pada waktu itu, barangkali mereka memang harus berbuat seperti itu. Meskipun tidak usah percaya kepada semacam determinisme sejarah.

Tetapi jelas hal-hal itu ditentukan atau digiring oleh faktor-faktor obyektif. Maka dari itu kita tidak berhak menyesali. Tapi kita berhak menilai bahwa itu tidak usah diteruskan. Keadaan sudah berubah. *Nah*, orang-orang lama, seperti orang Masyumi dan sebagainya, mengira kita itu menyesali sejarah. Tidak. Itu kita harus lihat sebagai bagian dari sejarah. Tetapi kalau pikiran untuk bertahan dengan pola-pola seperti itu, *nah* kita menyesali. Dalam arti kita tidak setuju.

Dan tidak responsif terhadap tuntutan zarnan?

Ya. Karena zaman juga berubah. Di samping itu, kita juga mempertanyakan substansi dari keabsahan ide-ide dulu itu.

Lalu bagaimana agar kaum Muslim mampu mengembangkan paham kemajemukan itu?

Sebetulnya begini. Ketika orang mengatakan di Indonesia terjadi toleransi agama berkat Pancasila, itu mungkin betul. Tetapi mengapa Pancasila bisa melahirkan suatu sikap toleransi positif terhadap agama-agama, itu sebetulnya karena mayoritas bangsa Indonesia Islam. Sebab kalau dibalik, misalnya Islam itu minoritas di sini, itu kita bisa melihat apa yang terjadi di Filipina, Thailand dan sebagainya. Yaitu tidak ada toleransi. Jadi, Islam dan toleransi itu sudah merupakan suatu kesatuan organik.

Secara retorika politik, boleh saja orang mengatakan begitu, kita ada toleransi agama berkat Pancasila. Tapi kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke Mesir, Syiria, Irak, mereka jauh lebih terlatih untuk hidup berdampingan dengan agama-agama lain, yang non-Islam. Jauh lebih terlatih. Karena itu memang merupakan *policy* dari para khalifah dahulu. Oleh karena itu, sampai sekarang di Mesir masih banyak orang Kristen, di Syiria itu — yang juga pusat Islam — sampai sekarang Islamnya hanya 80 persen, artinya yang 20 persen itu masih bukan Muslim, dan itu tidak pernah menjadi halangan.

Sebetulnya ada hal yang semu: Apakah betul kita lebih toleran dibanding orang Arab. Kalau saya bilang, orang Arab lebih toleran terhadap agama-agama lain. Cuma sekarang orang Arab itu terganggu akibat dari kompleksnya menghadapi Barat. Terutama disebabkan oleh kenyataan historis yang sangat pahit, yaitu dipaksakannya Israel.

Karena itu, kalau kita sekarang bicara pluralisme Islam, maka sesungguhnya bukan hal baru. Banyak kutipan yang bisa kita buat dari para ahli, misalnya mengenai Spanyol Islam. Spanyol Islam itu sebetulnya Spanyol tiga agama. Yang berkuasa Islam, yang mengambil inisiatif Islam, tetapi yang *share* dan yang *support* pola-pola budaya Spanyol Islam, itu adalah orang Kristen, orang Yahudi, dengan hak yang sama dan pergaulan yang bebas.

Jadi *Spain of three religions* itu adalah Spanyol dengan tiga agama: Islam, Yahudi dan Kristen. Barulah setelah terjadi *reconquesta*, orang Islam dan orang Yahudi dibersihkan, sehingga akhirnya menjadi Katolik saja.

Dan Spanyol yang *multi-religion* seperti itu dipuji oleh orang seperti Ibn Taimiyah. Belum lagi kalau kita kembali kepada hal-hal yang *rada* normatif seperti apa yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai masyarakat manusia. Bahwa masyarakat manusia itu memang plural.

Apakah gagasan-gagasan Anda tadi itu, sedikit-banyaknya terkait dengan satu konsep bahwa Islam itu menyelamatkan, damai, dan lain-lain?

Ya, saya kira memang persis itu. Apalagi kata-kata sekitar itu sudah menjadi bahasa Indonesia, terutama selamat dan salam. Kalau bahasa Inggrisnya itu *safe and sound*, walaupun dalam bahasa Indonesia itu salam artinya menjadi *greeting*.

Tapi sebetulnya salam itu *kan* damai, mengucapkan salam artinya menyatakan damai. Dan sudah merupakan pembahasan yang baku, yang standar di kalangan para ahli bahwa memang Islam itu ada kaitannya dengan cita-cita menciptakan alam kedamaian dan menciptakan keselamatan, *salvation*.

Sekarang mengenai aktualisasi nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat kita. Apakah ada semacam hambatan ideologis yang dijumpai dalam melaksanakan gagasan itu? Misalnya, Islam kita punya klaim tentang universalitas, tetapi agama lain juga punya klaim tentang universalitas. Bagaimana ini?

Memang semua agama mengklaim universalitas, kecuali barangkali orang Yahudi, yang memang tidak mau orang beragama Yahudi. Jadi nasionalis sekali. Agama Kristen, Budha, dan yang lain itu universalistik dalam pendekatannya mengenai kosmologi,

mengenai manusia, dan sebagainya. Maka mereka pun ya berhak untuk mengaku sebagai universal.

Lalu bagaimana penyelesaiannya? Begini. Seperti al-Qur'an sendiri bilang, sebetulnya kita itu diperintahkan untuk menemukan suatu titik-kesamaan. Di dalam bahasa Arab disebut *kalimat-un sawâ'*, itu merupakan perintah kepada Nabi supaya Nabi mencari titik-persamaan dengan golongan-golongan penganut Kitab Suci terdahulu.

Berarti dalam waktu sekarang ini kita bisa ketemu pada dataran ide yang mengalami cukup generalisasi. Sehingga tidak lagi terkait dengan konteks-konteks komunalnya.

Jadi tidak lagi harus dikenali: Ini adalah ide Islam, Kristen. Tapi ini adalah ide universal dan itu yang harus kita dukung. Contohnya seperti saya sebut tadi, orang Kristen pun senang Indonesia. Juga menganut, menghargai, dan ingin menghargai nilai musyawarah. Padahal musyawarah itu, dilihat dari segi bahasanya saja, Arab. Dan itu berarti Islam. Begitu juga tertib hukum, aman, dan segala macam itu.

Nah, karena nilai-nilai ini, di luar soal bahasa itu universal, maka bisa diterima oleh semuanya. Yang agak eksklusif *kan* bahasanya, tapi karena bahasanya sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, akhirnya tidak terasa lagi. Maka begitu juga mengaktualkan nilai-nilai Islam di masyarakat Indonesia, itu begitu. Jadi tidak perlu lagi bungkus-bungkus formal yang sangat merepotkan karena eksklusivismenya itu.

Kalau begitu apa kemudian dipandang perlu dialog antaragama di mana kita mencoba mencari titik-temu. Kalau ini perlu, itu pada dataran yang mana?

Jadi pada tataran praksis amal. Kita tidak usah intervensi dalam soal iman agama lain. Itu tidak boleh. Kita sudah diajari dalam al-Qur'an sendiri, "*la-kum dîn-ukum wa liy-a al-dîn*". Tapi kita bisa bersatu dalam program-program yang lebih amaliah, yang lebih

praksis, sejak dari yang nilainya tinggi seperti negara. Negara itu bisa menjadi proyek bersama.

Ini lebih menyangkut atau diharapkan dari kalangan elit saja ya?

Ya, ya. Dan segi sosiologis, memang tidak bisa dihindari. Bahwa apa yang disebut *trend maker*, kemudian juga disebut *opinion maker*, itu *kan* memang orang yang sanggup mengutarakan pemikirannya.

Tetapi kita juga berharap ini mengundang partisipasi dari bawah. Meminjam istilah para ekonom, terjadi semacam *trickling down*. Persoalannya ialah apakah *trickling down* itu kita biarkan terjadi secara *accidental*, secara kebetulan saja, ataukah seharusnya kita dorong secara sengaja, dengan *deliberation*. Nah, menurut saya itu harus ada kesengajaan. Tidak boleh dibiarkan terjadi menurut hukum perkembangan masyarakat saja.

Gagasan tentang perlunya Islam tampil dengan tawaran kultural dan Muslim harus mampu mengembangkan paham pluralisme itu, apa sudah tercapai? Dan sejauh mana ia sudah bergulir di masyarakat kita?

Tentu ada segi pesimis dan segi optimisnya. Pesimisnya kita masih melihat adanya orang-orang yang tidak bisa memahami masalah itu. Segi optimisnya, jelas tumbuh orang-orang yang bisa memahami masalah itu. Dan itu tampaknya ada kaitannya dengan masalah pendidikan.

Orang Masyumi dulu lancar saja bergaul dengan orang-orang Kristen, Sosialis, Katolik dan sebagainya, sehingga pergaulan politiknya itu tidak hanya dengan NU, PSII, Perti. Tetapi dengan PSI (Sosialis), Parkindo dan Partai Katolik. Sampai membentuk Liga Demokrasi pun sesama mereka. Meskipun ada beberapa orang unsur dari NU, tapi secara institusional itu dengan mereka-mereka ini.

Jadi kalau kita lihat eksperimen Masyumi, meskipun umurnya pendek, itu menunjukkan suatu kemungkinan yang positif: bahwa pergaulan yang lebih produktif antara berbagai kelompok agama bisa diwujudkan. Asal didasarkan pada pengalaman dan cita-cita yang sama. Dalam hal Masyumi tahun 50-an, pengalaman yang sama itu ialah pendidikan Barat, dan cita-cita yang sama ialah demokrasi.

Lalu, pada mereka yang pesimistis?

Mungkin karena ada kecemburuan, atau semacam “fanatisme”. Makanya itu bisa merupakan ideologi kelompok. Misalnya ada suatu kelompok yang mengaku merekalah penganut paham Islam yang sebenarnya. Oleh karena ini, dengan mengutip firman Tuhan, bahwa mereka harus keras terhadap orang kafir, tidak suka orang kafir. Itu kan semacam ideologi.

Itu adalah pembenaran dari suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu perasaan tidak suka itu sebetulnya terkait dengan *setting* sosiologis. Seperti misalnya karena orang lain ini kebetulan dari dulu menikmati *privilege* dan mereka sedang “naik”. Oleh karena itu pergeseran ini menimbulkan retorika-retorika yang keras itu.

Sebenarnya kalau kita mau merealisasi ajaran-ajaran mulia dalam Kitab Suci dan Hadis, apa ada hambatan ideologis maupun sosiologis?

Di sini tidak ada. Jadi Republik Indonesia dengan perangkat lunak (dasar dan konstitusinya) dan kerasnya (wujud atau sosok geografis dari negara kita), itu tidak menjadi hambatan sama sekali. Malahan banyak orang berpendapat, di antara negara-negara di mana Islam itu mayoritas, konon Indonesia adalah yang paling baik dalam soal pelaksanaannya.

Ada kelompok-kelompok tertentu dalam usaha mereaktualisasi atau mengaktualisasi cara-cara hidup Nabi dengan mencari rujukannya pada cerita-cerita di zaman Nabi. Apa itu cocok untuk kondisi kini?

Itu yang dimaksudkan oleh Pak Munawir sisi lain dari pemahaman kontekstual itu. Jadi, hal-hal yang sekarang dianggap sebagai nilai keagamaan Islam, sebetulnya besar sekali kemungkinan itu semata-mata nilai kultural Arab saja. Misalnya pakaian. Itu jadi *absurd* kalau kita menganggap bahwa pakaian itu bagian faktor yang menentukan orang itu bahagia. Itu *kan* susah.

Artinya pakaian itu cuma simbol?

Ya, itu simbol. Dan akan sangat berbahaya kalau sudah sampai pada tingkat menganggap simbol itu mutlak. Itu artinya memutuskan simbol, bisa jadi menyembahnya. Maksudnya tidak lagi menyembah Tuhan yang tidak tertangkap itu, tapi menyembah simbol. Oleh karena ada suatu keyakinan, bahwa semata-mata dengan simbol itu orang akan memperoleh keselamatan.

Jadi kita tidak bisa menerapkan begitu saja apa yang ada pada zaman itu, terutama hal-hal yang jelas-jelas bersifat kultural. Pakaian itu kultural sekali. Ada ide yang universal mengenai pakaian, yaitu menutup aurat. Tapi bagaimana caranya menutup aurat, itu yang jadi persoalan. Dan itu adalah persoalan budaya.

Kita tidak harus meniru yang datang dari Arab. Dulu orang Indonesia sarungan dan sarung itu sempat menjadi semacam *trade mark* untuk santri. Padahal, kalau kita pergi ke Birma, itu *kan* pakaian orang Birma. India juga begitu. Jadi konteks kultural itu harus dipahami. Dan memerlukan kajian yang tidak mudah.

Lalu yang disebut aurat wanita itu bagian mana saja, dan kewajiban wanita Islam itu bagaimana?

Dulu, sebelum saya meneliti lebih lanjut, saya juga menduga — bahkan sempat menulis — bahwa aurat wanita itu sekujur badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ternyata saya disalahkan oleh almarhum Syaifudin Zuhri. Dan setelah kita teliti, ternyata itu memang problem. Menurut Syaifudin Zuhri, aurat wanita itu memang sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, kalau sembahyang. Di luar sembahyang, rambut itu bukan aurat. Dan mengenai telapak tangan itu masih berselisih. Apalagi wanita pekerja. Itu ternyata variasinya banyak sekali. Sekarang saja ada polemik antara Saudi dan Iran. Orang Iran mengatakan wajah itu bukan aurat, orang Saudi mengatakan bahwa ini masih polemis, khilafiyah.

Saya berpendapat bahwa ide mengenai perintah berpakaian tertentu itu adalah soal kepantasan. Dan kepantasan itu bisa bervariasi menurut satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin orang Saudi, karena budayanya, ya kepantasannya itu mengharuskan mereka berpakaian seperti itu. Di Iran juga begitu. Tapi di Indonesia nggak perlu. Buktinya orang-orang di NU, ulama-ulama perempuannya berpakaianya ya seperti itu, berkebaya, kerudung yang tidak seperti jilbab. Itu sebetulnya akibat dari perubahan sosial yang terlalu cepat dan sebagainya. Maka, menurut saya, tidak harus pakai jilbab.

Jadi itu tidak ada kaitan misalnya dengan kebangkitan Islam yang lebih militan, begitu?

Ya, orang mengira itu kebangkitan. Tapi menurut saya itu bukan kebangkitan. Tapi pertumbuhan yang masih kritis, merupakan *critical growth*, untuk menuju pertumbuhan yang sebenarnya. Ini *kan* puber.

Apalagi memang dalam al-Qur'an isu jilbab dan kerudung itu kaitannya dengan dada. Bukan dengan rambut. Jilbab itu sebetulnya

bukan kerudung tapi baju mantel. Kurang lebih perintahnya adalah pakailah mantelmu itu untuk menutupi dadamu, begitu. Bukan untuk menutupi rambutmu.

Ini simbolisme. Tidak ada urusannya dengan nilai, tidak ada urusannya dengan masalah menjalankan syariat. Kalau menjalankan syariat mestinya orang lebih tahu bahwa menutup lutut jauh lebih penting daripada menutup rambut. Menutup dada jauh lebih penting daripada menutup rambut.

Tapi kalau mereka mau begitu ya sudahlah. Itu hak mereka. Itu bagian dari keagamaan mereka. Dan setiap orang berhak untuk memilih idiom agama mereka sendiri-sendiri. Tapi kita memilih tidak begitu, dan mereka harus toleran terhadap kita.

Kelompok-kelompok tertentu menampilkan Islam dengan lambang-lambang yang jelas, corak komunikasi yang jelas. Lepas dari setuju atau tidak, apakah itu ada semacam keharusan ideologis yang jadi rujukan?

Pertama harus kita sadari kelompok seperti itu tidak hanya di kalangan Islam, tapi juga di kalangan orang Kristen. Justru fundamentalisme itu munculnya di kalangan orang Kristen. Kalau di Amerika, orang seperti Southern Baptists, Amish, itu adalah golongan fundamentalis.

Jadi pada orang Kristen sebetulnya lebih parah lagi. Sebab *denomination* di Amerika itu ratusan dan masing-masing mengklaim sebagai yang paling benar. Bagaimana menafsirkan persoalan ini, salah satunya adalah bahwa itu gejala-gejala yang timbul dari suatu masyarakat yang berubah dengan cepat.

Jadi gejala orang bingung, kemudian mencari pegangan. *Nah*, pegangan yang diperlukan dalam situasi kritis itu biasanya makin sederhana semakin baik. Semakin pasti semakin baik. Jadi, kalau misalnya ada seorang guru mengatakan: “Ikut saya kamu akan selamat. Yang lain itu semuanya celaka,” itu sangat menarik.

Dan itu terjadi di mana-mana, dengan wujud yang kadang-kadang bertentangan. Taruhlah misalnya di Indonesia. Ada kelompok yang namanya Islam Jamaah. Ini juga cukup eksklusif tapi pembawaannya toleran sekali. Mereka membawakan dirinya itu bersahabat. Pakaiannya juga lebih rileks. Pakai celana, pakai jeans ke masjid juga nggak apa-apa.

Nah, sekarang Darul Arqam sebagai kelanjutannya. *Platform*-nya sama, dalam arti bahwa dua-duanya mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, paling selamat. Tapi kalau Islam Jamaah, membiarkan orang memakai jeans, Darul Arqam harus pakai jubah, pakaian Arab, dan lain-lain.

Dua contoh ini *kan* bertentangan. Tapi intinya sama, yaitu *cultic system*. Sekarang ini banyak muncul seperti itu, karena masyarakat kita sedang mengalami pembangunan yang sangat cepat, dan efek perubahan yang cepat itu kita ketahui dalam *sociology of social change*.

Perubahan itu selalu menimbulkan kecurigaan pada orang-orang yang tidak bisa terbawa. Jadi menimbulkan apa yang disebut disorientasi, tidak tahu lagi apa pandangan hidup yang benar; dislokasi, orang tak tahu lagi tempatnya dalam skema sosial. Dislokasi bisa juga sangat fisik, seperti urbanisasi itu termasuk proses-proses dislokasi dengan efek yang sama. Dan juga deprivasi relatif, merasa ditinggalkan, merasa haknya dirampas. Orang mungkin tidak mengalami dislokasi secara keseluruhan, tapi hanya satu bidang saja.

Orang bisa saja sukses dalam bidang material seperti jadi pemborong yang besar dan sebagainya, tapi dari segi sosio-kultural dan sosio-politik tidak mengalami kebebasan. Itu semuanya menjadi bibit-bibit *disappointment* dan kekecewaan yang kalau disuarakan akan menghasilkan retorika-retorika keras. Kalau dikumpulkan satu sama lain akan menimbulkan suatu kelompok dan yang menyatukan itu menjadi kultus.

Corak penampilan yang serba ingin eksklusif itu menjadi gambaran dari apa? Puritanisme? Fundamentalisme?

Mungkin lebih tepat kalau puritanisme. Mau suci, mau bersih. Tapi karena penampilannya itu sangat asertif, sangat menegaskan bahwa kami ada di sini, kamilah yang benar dan sebagainya, memang patut juga disebut fundamentalisme.

Kalau melihat pemikiran Anda seperti itu, apakah kemudian masih bisa dibedakan antara seorang nasionalis dan seorang Muslim?

Dari satu arah, seorang Muslim itu bisa menjadi nasionalis. Tapi nasionalisme dalam Islam itu adalah suatu nasionalisme, suatu paham kebangsaan yang diletakkan dalam kerangka kemanusiaan yang universal. Jadi tidak boleh menjurus kepada chauvinisme. Ini memang suatu perdebatan klasik di kalangan para pendiri republik, tapi perlu kita tegaskan bahwa dalam rumusan Pancasila, Persatuan Indonesia disebut sebagai ganti kebangsaan atau nasionalisme. Berarti titik-berat nilainya pun nilai persatuan. Dan kalau nilai persatuan, itu sudah jelas sangat Islami.

Sekarang apakah masih ada ruang bagi nasionalisme seperti yang kita cari. Menurut saya masih ada. Tuhan itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka bisa saling mengenal dan menghormati. Seorang Muslim seharusnya juga seorang nasionalis, meskipun tidak semua nasionalis itu harus Islam.

Dalam meniti jalur untuk menunjukkan cinta negara atau masyarakat di satu pihak, dan cita-cita mengaktualisasikan kembali ajaran al-Qur'an pada pihak lain, adakah saat-saat kita harus lebih mengutamakan satu dan agak mengabaikan yang lain, atau harus selalu bisa kita temukan paralelisme yang harmonis?

Kalau menurut saya, seharusnya tidak pernah terjadi persoalan alternatif, ini atau itu. Tapi sekaligus *all at once* begitu. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan ajaran agamanya, maka pada

waktu yang sama ia juga mendukung nilai-nilai yang baik, yang menguntungkan bagi bangsanya.

Taruhlah misalnya begini. Misalnya, ada seorang pekerja yang produktif. Lalu, apakah harus dilihat sebagai suatu tindakan kenasionalan, karena *concern* kita mempunyai keprihatinan terhadap pergerakan produktivitas bangsa, ataukah sebetulnya itu merupakan nilai keagamaan, karena kita ingin melaksanakan ajaran agama bahwa manusia itu harus produktif, harus beramal?

Seharusnya tidak bisa dilihat seperti itu. Ketika dia menjadi produktif, maka dia sekaligus menjalankan ajaran agama dan menunjukkan komitmen kepada nilai kebangsaan. Contoh seperti itu banyak sekali. Jujur, tidak korupsi, taat hukum, dan sebagainya.

Apa Anda merasa was-was bila di sini tidak ada “warnawarna” lain, termasuk hadirnya Paramadina, menghadapi “warna” tertentu yang cenderung eksklusif?

Persis. Kita tak mau pengalaman Sarikat Islam (SI) terulang. SI itu dulu hebat sekali, maka orang banyak berharap. Ada suatu peningkatan harapan yang melambung tinggi sekali. Oleh karena itu, SI dalam mobilisasi massanya itu berhasil. Tapi, ketika harapan yang sangat emosional ini sudah mulai jenuh dan orang menuntut hal yang lebih tinggi, ternyata pemimpin SI tidak siap. SI kemudian pecah: merah dan putih. Yang ironis, merahnya terus berkembang, putihnya tidak. Jadi saya khawatir akan terulang dalam skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih sulit. Karena itu, kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu dan tidak bisa mengantisipasi perkembangan ini, jangan heran kalau nanti yang bakal anti Islam adalah orang-orang yang sekarang fanatik Islam. Karena fanatisme itu adalah suatu wujud dari harapan. Kalau harapan itu begitu tinggi dan tidak terwujud, karena tak bisa di-*follow up* oleh intelektual, orang kecewa.

Kami dengar Paramadina itu menanamkan sifat nonsektarianisme dan Ukhuwah Islamiyah pada saat yang bersamaan. Bagaimana penjelasannya?

Ya, non-sektarianisme itu persis ukhuwah Islamiyah. Itu suatu paham bahwa bukan aliran sendiri yang benar. Sektarianisme itu artinya suatu paham bahwa aliran sendiri yang paling benar. Itu yang tidak dikehendaki oleh agama.

Apa dalam Islam ada gagasan tentang corak kolaborasi antara umat dengan penguasa?

Sebetulnya tidak ada konsep yang jelas. Itu diserahkan sebagai bagian dari perkembangan kultural saja. Jadi tidak ada doktrin yang langsung mengenai hal itu. Hanya ada dikesankan pemerintah itu harus menjalankan amar makruf nahi munkar. Yaitu memelihara moralitas masyarakat dan sebagainya.

Di Islam ada ide tentang kekuasaan?

Ya tentu ada. Meskipun tidak berarti bahwa Islam itu mengajarkan untuk berkuasa. Tapi mengajarkan supaya siapa saja yang melakukan kekuasaan itu menjalankan keadilan.

Di Indonesia partai Islam kehilangan isu pokok karena sejumlah klaim diambil oleh Golkar. Misalnya, Islam agamaku, Golkar pilihanku. Atau, Golkar menang Islam berkembang. Bagaimana menurut Anda?

Ya, jelas partai PPP misinya *pre emted*, direbut dan diduduki. Sebetulnya, kalau orang PPP itu berbesar jiwa, harus bisa melihat bahwa cita-citanya telah diambil partai lain. Dan mestinya mereka mendukung.

Atau....

Kalau mau, membubarkan diri. Atau kalau masih melihat ada hal-hal yang belum tergarap dan mereka merasa bisa, tunjukkan kemampuan itu. Jangan mengulang-ulang hal-hal yang sekarang sudah menjadi milik umum.

Jadi tidak perlu ada rasa jengkel?

Sama sekali tidak. Islam itu memang harus dibuat sebagai sesuatu yang gratis untuk semuanya.

Gratis bagaimana?

Ya artinya *available to all* justru karena berharga. Sama seperti udara yang masuk ke tubuh kita. Tanpa udara kita bisa mati. Tapi Tuhan menjadikannya *available to all*, gratis untuk semuanya. Air masih harus bayar, dan kita masih bisa sehari tidak minum. Tapi tanpa udara bagaimana? Jadi sesuatu yang betul-betul *precious*, betul-betul berharga, betul-betul dibutuhkan, itu harus dibikin gratis untuk semuanya.

Dengan kata lain Anda melihat proses klaim-klaim yang dilakukan partai non-Islam terhadap Islam, sebenarnya cara positif sekali? Tapi bagaimana kalau di dalam sikap itu sebenarnya terselip tujuan-tujuan yang sangat politis?

Itu cara positif, tapi kalau ada sikap oportunisme di dalamnya, kita tidak usah peduli. Karena efek sosialnya tidak bisa mereka kontrol. Itu sama saja dengan ketika orang Masyumi mengkritik Bung Karno naik haji segala, dan itu sebagai tindakan politik. Kalau memang dia naik haji tidak ikhlas, dengan pamrih, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kenyataan bahwa ia naik haji itu punya efek sosial yang tidak dikuasai oleh Bung Karno sendiri.

Bagaimana Anda merenungkan kembali statemen Anda tahun 70-an; Islam yes, Partai Islam no, setelah rentang waktu puluhan tahun ini?

Saya kira masih relevan, masih bisa diteruskan.

Atau itu makin mengeras, seperti gagasan Islam dan keindonesiaan itu?

Ya, saya kira begitu.

Anda pernah khawatir tentang etnisitas dan agama dijadikan senjata untuk segala macam, yang bisa merugikan banyak pihak?

Saya cenderung begitu. Oleh karena itu saya termasuk yang menghargai ABRI, antara lain Pak Try. Ketika terjadi keonaran di Lampung, dan mereka mengklaim itu sebagai Islam, tapi Pak Try melihatnya sebagai GPK saja. Seperti Aceh juga. Jadi jangan seperti dulu, malah aspek Islamnya dibesar-besarkan.

Sering secara sosiologis Islam itu hanya dipakai sebagai pembenar untuk aspek-aspek yang menjadi *concern* mereka di suatu tempat. Setempat. Maka kalau kita melihat hanya Islam dan lupa pada persoalan yang sebenarnya, ya kita luput.

Lalu bagaimana agar hal-hal itu bisa dicegah?

Itu menyangkut reformasi politik yang cukup penting. Saya percaya dengan konstitusi. Oleh karena itu semuanya harus konstitusional. Termasuk reformasi itu harus konstitusional, ada otonomisasi daerah yang lebih besar, ada pemerataan dan sebagainya.

Anda juga pernah menyebutkan bahwa semua agama yang intinya berserah kepada Tuhan itu Islam. Maksudnya?

Begini. Menurut al-Qur'an semua agama yang intinya mengajarkan pasrah kepada Tuhan, disebut Islam. Dan Islam itu artinya berserah diri pada Tuhan. Oleh karena itu orang yang beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan itu ditolak, meskipun dia secara KTP mengaku sebagai seorang Islam. Itu maksud saya. Jadi Islam dalam arti yang lebih generik, bukan dalam arti yang sosiologis sebagai nama agama.

Sebagai pembaru, Anda sering disalahpahami. Bagaimana Anda melihat atau menilai reaksi seperti itu?

Tentu kita semuanya sudahantisipasi. Saya dan teman-teman sudahantisipasi. Bahwa pasti akan ada reaksi-reaksi, baik reaksi itu memang tidak setuju atau memang salah paham. Umumnya karena salah paham. Memang sebagai manusia tentunya kesalahpahaman seperti itu sangat membikin kita sesak nafas.

Dalam al-Qur'an saja Nabi Muhammad diingatkan oleh Tuhan: kamu jangan menjadi sempit dadamu, sesak nafasmu hanya karena perlawanan mereka. Itu artinya Nabi saja mengalami hal itu, apalagi kita. Dan karena jangkauan kita lebih jauh ke depan, kita yakin bahwa kita, *on the right track*. Apalagi kita melengkapi diri dengan pengetahuan dan bahan-bahan. Dan karena bahan itu banyak sekali, maka sulit untuk dikatakan dalam waktu yang singkat.

Pada saat-saat menjelang akhir hayatnya, Soedjatmoko bicara tentang perlunya agama atau para agamawan lebih berperan aktif lagi dalam proses pembangunan. Bagaimana Anda sendiri melihat peran agama di masa depan, khususnya dalam politik?

Kembali kepada *common platform* tadi. Juga kembali lagi kepada makna Islam yang generik tadi itu. Jadi agama yang bisa berfungsi itu hanya agama Islam, dalam arti Islam pasrah kepada Tuhan itu. Bukan Islam sebagai nama agama. Dan kita harus menarik

semuanya kepada ini: sikap pasrah kepada Tuhan ini, secara tulus, secara hanif itu.

Ketika masih kuliah di IAIN Jakarta, Cak Nur terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI, September 1966-1969. Bahkan setelah ia menamatkan kuliahnya di IAIN (1968), ia masih diminta lagi untuk menjabat ketua periode kedua: 1969-1971 — (penjelasan ed.)

Posisi politis HMI sekarang ini bagaimana, *sih*?

Menurut saya, HMI sekarang ini memang dalam keadaan sulit. Tapi kesulitan itu sebetulnya umum dari organisasi ekstra. Tapi HMI itu, mungkin karena volumenya yang besar, masih tetap yang paling lumayan. Artinya HMI jelas eksis. Eksistensinya riil. Yang lain itu *kan* banyak yang tinggal papan nama. Banyak organisasi yang proses pergantian kepemimpinannya pun tidak jelas. Ada yang sudah bapak-bapak masih menjadi ketua organisasinya. Dalam soal itu HMI paling baik. Metabolisme kepemimpinan itu cepat sekali. Rata-rata dua tiga tahun sudah diganti.

Cuma, dalam situasi di mana orang dituntut untuk berjuang dalam tema-tema proaktif, bukan reaktif, maka usaha meneguhkan eksistensi itu lebih sulit. Kalau dalam perjuangan reaktif itu *kan* gampang saja. Dengan pidato, retorika, sudah bisa.

Apa karena itu pula, maka sekarang HMI terasa agak lebih kecil dibanding dulu?

O, ya dengan sendirinya. Tapi tidak berarti bahwa dulu lebih hebat dari sekarang. Menurut saya, dulu itu besar karena faktor-faktor demografis-sosiologis. Faktor demografis-sosiologis yang saya maksud itu, ialah saat-saat tahun 60-an itu *kan* tahun-tahun pertama para santri terwakili dengan jumlah yang banyak sekali di perguruan tinggi, di universitas. Sekitar tahun 60-an awal.

Tapi kabarnya anak kota agak kurang tertarik, apa benar begitu?

Nah, di situ sayangnya. Kalau tahun 60-an, HMI itu adalah organisasi tengahan! Artinya di tengah persoalan betul. Di tengah persoalan universitas. Sekarang itu HMI periferi. Jadi marginal. Makin terdesak ke pinggir. Jadi, secara politis tidak lagi berada di pusat-pusat pengambilan keputusan gerakan mahasiswa di universitas besar. Secara fisik, ada gejala HMI sekarang menjadi organisasi perguruan tinggi kecil, marginal.

Mungkin ada alasan tertentu, Anda tidak menyekolahkan anak-anak di pesantren?

Pesantren itu memang ada plus-minusnya. Plusnya sudah jelas. Minusnya ialah, dari segi metodologi itu tidak begitu efisien. Misalnya, menurut saya, yang paling penting yang bisa diperoleh dari pesantren, itu sebetulnya bahasa Arab. Biar pun suasana keagamaan itu juga penting. Tapi sebetulnya di rumah tangga itu lebih baik. Saya ingin anak saya itu, kalau rasa keagamaan, bisa diperoleh di rumah tangga. Kemudian saya ingin dia tahu bahasa Arab. Ini ada cara-caranya yang lebih cepat. Misalnya di Lembaga Bahasa Arab Saudi, Menteng. Dulu memang kita panggilkan juga guru bahasa Arab.

Kemudian paham keagamaan. Di pesantren itu saya melihat ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi ditekankan. Misalnya, fiqih untuk apa? Padahal itu memakan energi, memakan waktu. Di Gontor misalnya, banyak hal-hal yang tidak perlu. Kalau masalahnya ialah menjadi Muslim yang baik dan mengerti hal-hal keislaman, menurut saya keahlian dalam keislaman itu tidak lagi dalam arti hanya tahu soal halal dan haram dan sebagainya itu, tapi pikiran dan ajaran etis yang bisa mempengaruhi tingkah laku kita sehari-hari. Maka berkaitan dengan itu saya terpikir memang, pelajaran agama di pesantren dan di sekolah pun sebetulnya harus direvisi. Sekarang ini *kan* titik beratnya adalah fiqih.

Oleh karena itu tidak menarik. Maka saya dengar banyak orang-orang Islam sendiri yang lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran agama-agama lain, karena di sana ada filsafat dan sebagainya. Lihat saja karangan-karangan siapa saja yang biasa disebut sebagai ahli keagamaan, apa yang mereka maksudkan sebagai agama? Itu masih cerminan dari pesantren. Karena itu saya agak memberontak. Saya tidak tahu bagaimana, tapi tanpa pretensi yang terlalu tinggi kita mencoba untuk memberikan suatu alternatif. Ya, itu termasuk yang kita salurkan lewat Paramadina ini.

Jadi itu alasan saya. Menyangkut soal yang sangat prinsipil. Karena pengalaman saya di pesantren, maka tentu saya tidak akan mengingkari jasa-jasa pesantren. Tapi dalam suatu tinjauan kembali secara kritis, sebetulnya ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Sementara hal itu belum bisa diperbaiki, saya melihat cara lain.

Sebentar, ini soal lain. Bagaimana keluarga bahagia itu menurut Anda? Apa ukuran-ukurannya?

Tentu intinya adalah sebuah keluarga yang terdiri dari orangtua dan anak, yang tinggal di satu rumah; artinya tidak terpisah, dan banyak bertemu, banyak punya waktu untuk keluarga. Bisa sembahyang bersama, meski tidak selalu tapi sering sembahyang bersama. Ngomong-ngomong dan punya acara ekstra bersama. Itu menurut saya. Ya tertanam rasa cinta kasih. Maksud saya, cinta kasih yang secara psikologis benar. Artinya tidak perlu kepada sikap-sikap posesif dari orangtua kepada anak. Mau menguasai. Jadi ada semacam kebebasan, ada kekraban dalam rumah tangga itu. Dan tidak perlu struktur atas-bawah bapak-anak itu terlalu tegas. Jadi demokrasilah, begitu.

Anda tidak punya semacam kompleks Barat dan Islam. Juga Anda tidak ada rasa ketakutan bahwa modernisasi akan mengancam kehidupan agama dalam keluarga-keluarga?

Sama sekali tidak. Saya pernah mendengarkan ceramah di Montreal oleh Profesor Abdul Azis Sachedina dari North Carolina. Dan ini orang Syi'ah, *he is very intelligent person*, sangat tinggi reputasinya. Dia memberikan ceramah kepada kita mengenai Syi'ah. Juga pengalaman dia sebagai guru di Universitas Jordan di Aman, bagaimana dia merasa dihalang-halangi oleh korps dosen di sana, karena dia orang Amerika. Memang dia sudah menjadi warga negara Amerika. Atau datang dari Amerika. Lalu karena dia Syi'ah. Kemudian dia memberikan ceramah yang bagus sekali. Tapi kemudian saya tanyakan. Ya, saya setuju dengan isi ceramah Anda, tapi saya selalu bertanya-tanya dalam hati, mengapa slogan Republik Islam Iran itu kutipan al-Qur'an yang menyangkut masalah Barat dan Timur dan rumusannya negatif, yaitu: tidak Barat dan tidak Timur?

Ada suatu ilustrasi bahwa Tuhan itu adalah cahaya dari langit dan bumi. Cahaya itu ibarat sebuah lampu dalam gelas kristal yang bening, yang dinyalakan dengan minyak zaitun yang tidak berasal dari Timur dan tidak dari Barat. Mengapa itu yang diambil? Mengapa tidak diambil yang positif. Di al-Qur'an itu banyak sekali statemen bahwa Barat ataupun Timur itu milik Tuhan. *Nah*, Pakistan dulu menggunakan yang positif: Kepunyaan Tuhanlah Barat dan Timur. Meskipun waktu itu maksud orang Pakistan adalah Pakistan bagian barat dan bagian timur itu kepunyaan Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya diambil yang positif.

Saya berpendapat, umat Islam sekarang menderita kompleks anti-Barat oleh karena pengalaman sejarahnya, baik yang lama maupun yang baru; tapi terutama yang baru yaitu pengalaman kolonialisme-imperialisme. Tapi sebetulnya kita ya harus adil dan harus obyektif. Al-Qur'an sendiri mengatakan; janganlah kebencian suatu kaum, membuat kamu tidak adil. Begitu juga terhadap Barat. Yang jelas, lihat saja Khomeini pun berhasil melancarkan revolusinya juga setelah dia pindah ke Barat, ke Prancis. Jadi kita tidak usah munafiklah. Bagaimanapun juga di Barat lebih banyak kebebasan daripada di negeri-negeri Timur. Oleh karena itu saya

sangat tidak suka dengan retorika-retorika anti-Barat. Menurut saya itu *nonsense*.

Orang yang mempunyai retorika seperti itu, apakah karena pemahaman keislamannya kurang menyeluruh, kurang mendalam, atau karena faktor lain?

Saya cenderung mengatakan karena faktor kungkungan psikologis. Karena dia itu mewarisi suatu pengalaman yang kurang menyenangkan dengan Barat, lalu dia tumbuh dalam suasana menghukum Barat. Jadi tidak obyektif.

Kalau Anda melihat kelompok dalam Islam yang cenderung eksklusif, ini yang benar dan itu yang tidak benar, dilihat dalam kerangka politik secara agak besar, apa Anda lihat sebagai hambatan?

Di satu pihak, kita bisa melihat sebagai gejala akibat perubahan sosial. Tapi di lain pihak, pertumbuhan itu tetap negatif, karena eksklusivisme bagaimanapun juga bersifat memecah-belah. Dan orang mestinya tidak boleh begitu. Islam mestinya tidak mengizinkan adanya *cultic-system*. *Pertama*, karena agama kita sejak semula ditegaskan tidak ada sistem kependetaan. Itu artinya tidak ada otoritas keagamaan pada seorang manusia. Semua orang itu langsung berhubungan dengan Tuhan. *Kedua*, pencarian kebenaran itu harus dengan suatu pemihakan kepada yang baik dan benar secara terbuka. Dari siapa saja, harus begitu. Oleh karena itu, sebetulnya agama Islam itu agama yang tidak pakai nama. Islam itu menjadi nama sebagai perkembangan kemudian. Kalau kita lihat al-Qur'an, panggilan kepada kelompok yang mengikuti Nabi itu orang-orang yang beriman, kaum beriman.

Jadi bukan: Hai orang-orang Islam?

Bukan. Nggak ada itu. Jadi mengapa ada perkataan Islam di situ, karena menurut al-Qur'an, agama itu dalam bahasa Arab disebut *din*, artinya sikap tunduk. Sikap tunduk yang sah bagi Tuhan adalah sikap pasrah kepada Tuhan. Sekarang pasrah kepada Tuhan itu disebut Islam. Jadi karena agama ini mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan, maka perkataan Islam digunakan. Tapi perkataan Islam itu juga bisa digunakan kepada semua agama yang lain, terutama yang datang dari nabi-nabi. Itu semuanya Islam. Tapi tidak dalam arti-nama agama.

Apa di kitab-kitab terdahulu ada kata islam?

Dalam kitab-kitab terdahulu dengan sendirinya ada perkataan islam, tapi untuk orang Arab, Islam waktu itu tidak diartikan sebagai nama agama secara eksklusif. Karena itu orang Arab sampai sekarang berbeda persepsinya mengenai Islam dengan orang yang bukan Arab. Orang yang bukan Arab, seperti Indonesia dan sebagainya cenderung menganggap Islam itu nama eksklusif sebuah agama. Tapi kalau orang Arab, islam itu adalah sikap batin tunduk kepada Tuhan. Karena itu tidak mengizinkan adanya kultus, *cultic system* itu.

Hadirnya kelompok-kelompok seperti Forum Demokrasi atau Majelis Reboan, menurut Anda apa punya makna politis? Artinya, ada kaitan dengan desakan untuk mempercepat proses demokratisasi dalam masyarakat kita?

Salah satu yang kita perlukan adalah adanya alternatif-alternatif. Kalau kita tidak mau menuju masyarakat yang monolitik, berarti kita memerlukan alternatif-alternatif itu. Oleh karena itu, dalam hal ini, Forum Demorkasi itu adalah suatu tawaran mengenai alternatif.

Jadi bukan suatu permintaan akan perlunya demokratisasi dipercepat?

Begini. Suara mereka memang menuntut semakin dilakukannya demokratisasi. Tapi itu *kan* jadinya suatu alternatif. Dan semakin banyak semakin baik. Tapi di kita masih kurang sekali alternatif semacam itu.

Apakah menurut Anda partai-partai politik cukup handal untuk dijadikan wahana mendorong proses demokratisasi itu?

Sebenarnya orang-orang parpol itu banyak yang masih terjerat oleh *vested interest*. Karena, sudah bukan rahasia lagi, bahwa menjadi anggota parpol dan memperoleh posisi tertentu dianggap *nyambut gawe* (bekerja). Karena itu mereka terus jadi tawanan bagi *vested interest*-nya sendiri. Kalau mereka diajak bicara hal-hal yang kemungkinannya bisa membawa perubahan, dan perubahan itu kemungkinan akan membawa diri mereka pada kesulitan, mereka jelas tidak mau. Adanya parpol itu tidak perlu digugat-gugat. Tetapi mereka itu didorong untuk lebih mandiri. Ini terutama sekali relevan untuk Golkar. Golkar itu harus dinyatakan sebagai partai. Sama dengan PDI dan PPP dan harus bebas ikatannya dengan militer dan birokrasi, dan harus berdiri di atas *platform* yang sama dengan semua partai yang lain. Mungkin lebih tepat berdiri di bawah semua golongan.

Oleh karena itu, dalam pemilu yang akan datang, agar wakil rakyat benar-benar mempunyai basis pemilih yang jelas, perlu pemilu dilaksanakan secara distrik. Dengan begitu calon itu benar-benar dikenal oleh rakyat yang memilih. Dengan begitu seorang calon benar-benar merupakan wakil rakyat. Tidak seperti sekarang, yang benar-benar wakil pimpinan partai. Itu yang paling menjengkelkan dari segi pemilu. Sekarang orang memilih partai atau golongan lebih banyak merupakan penyalur dari *vested interest* dan kemudian menjadi kumpulan orang-orang yang sebetulnya sedikit sekali memiliki dasar bahwa mereka dipilih rakyat. Rakyat itu memilih dengan terpaksa. Belum tentu rakyat menghendaki mereka. Mengapa disebut terpaksa? Karena itulah satu-satunya

sistem yang ada. Karena itu sistem yang ada sekarang cukup sekian saja. Di masa yang akan datang, sistem harus diubah. Apalagi kita menghadapi masa tinggal landas. Kita menghendaki sistem politik yang mampu menopang tinggal landas.

Anda melihat perlunya ada partai keempat dalam sistem politik kita?

Tidak. Menurut saya, asal sistem distrik itu dijalankan, partai keempat atau keberapa tidak perlu. Bahkan partai yang sekarang ada ini malah bisa juga menciut. Kemudian yang berkaitan dengan itu, saya kira kita harus melembagakan oposisi. Oposisi itu tidak negatif. Bangsa Indonesia itu, mungkin karena nilai-nilainya menganggap oposisi negatif. Oposisi itu positif, yaitu sebagai cara pengendalian kekuasaan secara damai. Kudeta yang damai. Dengan adanya oposisi, rakyat kita dididik selalu ada alternatif dengan mendukung oposisi itu. Dan itu harus sudah dimulai, dan jelas memperjuangkan apa, harus sudah jelas. Termasuk orang pertama dan keduanya. Yaitu presiden dan wakil presiden. Keduanya harus kampanye supaya bisa dites oleh rakyat. Yang akan datang harus begitu.

Pola perimbangan sipil-ABRI yang ideal menurut Anda bagaimana?

Agak susah, karena ini menyangkut sejarah yang amat khusus mengenai bangsa kita. Yang sekarang disebut ABRI itu sebetulnya aspiran-aspiran politik, orang-orang yang mempunyai cita-cita politik, di zaman tahun 45 itu, lalu bersenjata. Karena mereka itu kebetulan masih muda waktu itu. Artinya bukan tentara profesional. Karena itu ada juga benarnya kalau mereka mengklaim bahwa mereka selalu *concerned* dengan masalah-masalah kebangsaan dan merasa lebih tahu. Tapi, situasi itu *kan* ada kaitannya dengan pengalaman tahun 45. Maka tepat sekali kalau mereka disebut Generasi 45. Artinya tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Suatu saat

kita harus kembali pada tatanan yang lebih formal. Dan ABRI, dalam kaitannya dengan persoalan kenegaraan tadi, harus netral. Artinya harus berdiri di atas semua golongan atau — sebenarnya — di bawah semua golongan. Bukan di atas. Berdiri di bawah semua golongan, kemudian menjaga keamanan, menjaga keutuhan republik.

Akhir-akhir ini banyak orang bicara tentang pola kepemimpinan masa depan, dalam menghadapi situasi baru dan perubahan-perubahan sosial. Orang bilang akan diperlukan *expertise*, keterampilan lebih canggih dan lain-lain.

Jelas itu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Di masa yang akan datang, kalau orang tidak punya keahlian, ya susah. Karena itu para pemimpin, katakanlah pemimpin politik, ya harus profesional dalam soal politik. Mereka harus baca semua literatur mengenai politik. Apalagi negara ini didirikan oleh para intelektual. Mereka berpolemik, tukar pikiran, berdebat, dan menghasilkan nilai-nilai kenegaraan yang sekarang kita warisi, apakah itu UUD 1945, Pancasila dan sebagainya. Maka akan menjadi suatu kesedihan, suatu ironi, kalau kemudian diteruskan oleh mereka yang tidak mau baca. Sebab mau tidak mau, kita ini adalah bangsa yang hidup di zaman modern, dengan nilai-nilai kemodernan. Tidak bisa kita mengisolir diri, misalnya kita hanya hidup dalam nilai-nilai khas Indonesia. Itu *nonsense*.

Sekadar perbandingan saja, di Amerika itu seorang anggota kongres di-*back up* oleh suatu tim yang kuat sekali, yang kerjanya mensuplai bahan-bahan dan pikiran-pikiran. Oleh karena itu perpustakaan yang terbesar di dunia itu perpustakaan kongres. Karena mereka itu membaca. Jadi semua pikiran yang mereka kemukakan itu, tidaklah sesuatu yang diambil dari angkasa. Itu betul-betul berdasarkan bahan-bahan bacaan oleh tim ekspert. Mereka menyewa ahli-ahli, karena memang ada biaya untuk itu. Kalau perlu keluar uang sendiri. *Nah*, orang DPR sini mana yang baca? Kalau saya lihat pidatonya, waduh ini orang tidak pernah baca. Padahal, di situ sudah mulai ada perpustakaanya. [✧]

NEGARA ISLAM: PRODUK ISU MODERN¹

Dalam suatu pertemuan di Los Angeles, Amerika Serikat, oleh sebagian peserta Nurcholish Madjid diberi julukan *The Living Legend*. Ia memang menampik sebutan itu, “Wah saya malu dengan sebutan itu,” ujarnya. Tetapi sebagai pemikir Islam, atau Muslim pembaru, namanya makin terangkat setelah melemparkan pemikirannya mengenai sekularisasi, yang menimbulkan polemik dengan Prof. Dr. H.M. Rasjidi. Rasyidi menulis sampai enam buah tanggapan, “Suatu Koreksi Lagi bagi Drs. Nurcholish Madjid,” di Harian ABADI. Pertempuran antara seorang profesor yang juga doktor, melawan doktorandus IAIN Jakarta itulah, yang ikut serta mewarnai peta pemikiran Islam di tahun 1970-an.

Percakapan wartawan *Kompas*, Sudirman Tebba, Budiarto Danujaya, dan H. Azkarmin Zaini, di rumah Nurcholish Madjid yang sederhana di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, diawali dengan persoalan tentang perdebatan dengan Pak Rasjidi.

Anda tampak tidak seradikal dulu. Pengamat bahkan ada yang menilai Anda kembali ke alam pikiran lima tahun sebelum melancarkan pembaruan pemikiran Islam dulu.

¹ Harian *KOMPAS*, “Lebih Jauh dengan Nurcholish Madjid”, 3 November 1985. Pewawancara Sudirman Tebba, Budiarto Danujaya dan H. Azkarmin Zaini.

Penguasaan orang terhadap istilah berbeda-beda. Pengungkapan ide dengan keterangan eksklusif, mungkin membuat orang yang tidak terlatih dengan istilah itu menjadi tak paham. Banyak salah paham karena perbedaan istilah ini. Karena itu, ketika menyusun NDP (Nilai Dasar Perjuangan; sebuah dokumen tentang ajaran dasar Islam yang dikembangkan Himpunan Mahasiswa Islam) tak ada istilah eksklusif, sebagai antisipasi terhadap pembacanya, anggota HMI yang mempunyai spektrum pengalaman dan latar belakang pendidikan yang beragam.

Di samping itu, salah paham juga bisa karena perbedaan latihan pendekatan persoalan. Misalnya, ketika menulis Empat Belas Abad Pelaksanaan Cetak Biru Tuhan (TEMPO, Desember 1979), yang membuat orang bertanya-tanya. Itu bukan keinginan saya, tetapi deskripsi tentang persepsi kebanyakan umat Islam, bahwa Islam suatu *blueprint* dari Tuhan yang implementasinya politik. Itu tanggapan terhadap Iran; contoh terakhir yang melihat Islam sebagai cetak biru dalam arti ideologis-politis. Itu hanya percobaan membuat deskripsi. Jadi jelas, tidak benar anggapan bahwa saya telah kembali ke alam pikiran seperti 5 tahun sebelum melancarkan pembaruan pikiran Islam. Kalau saya kelihatan kalem, itu karena faktor umur yang secara biologis membawa kita lebih tenang. Dan saya bisa mengklaim bahwa saya lebih mantap. Dengan bahan yang lebih banyak, kita kurang khawatir dan dibawa pada ketenangan pemahaman.

Setelah dikoreksi Pak Rasjidi, dan Anda kelihatan surut dari pembaruan itu, lalu pengamat menilai pembaruan Anda kurang punya dasar teoretis.

Pak Rasjidi sendiri sekarang makin kalem dan moderat. Saya tidak tahu sebabnya. Dia tak sepenuhnya lagi berpegang pada kritik terhadap saya dulu. Saya memang belum pernah memberi jawaban tuntas. Persoalannya banyak sekali. Antara lain sampai pada saya kabar bahwa pemerintah tak mau ada ribut-ribut yang

sampai mengganggu keamanan, meski hanya menyangkut pemikiran keagamaan.

Menjawab Pak Rasjidi juga tak bisa pendek. Misalnya, semangat anti gambar dalam Islam. Agama monoteis, khususnya Islam anti mitologi terhadap alam. Alam dilihat sebagai subyek yang tidak sakral. Karena itu, agama monoteis membawa efek desakralisasi terhadap alam. Itu sekularisasi. Talcott Parsons sendiri berpendapat, semua agama monoteis membawa akibat sekularisasi besar-besaran. Karena itu, pembaruan saya 15 tahun yang lalu, saya hubungkan dengan desakralisasi dan demitologisasi, suatu sikap tak mentabukan alam.

Kalau begitu polemik itu lebih pada pengertian istilah, dan bukan sernangat?

Bisa direduksi begitu. Antara lain karena Pak Rasjidi selalu melihat sekularisasi sebagai pemisahan agama dan negara. Beliau tunduk pada lingkungannya sendiri, yang memperjuangkan orang dijajah dan mendorong adanya identitas yang ditemukan pada persepsi agama atau Islam sebagai ideologi politik. Muaranya negara Islam. Karena itu, salah satu hal yang sangat dikhawatirkannya adalah sekularisasi dengan pengertian pemisahan agama dengan negara.

Anda pernah mengatakan paradigma negara Islam baru muncul setelah Pakistan lahir.

Istilah “negara Islam” seperti Republik Islam memang baru muncul setelah Pakistan. Tak ada spontanitas penamaan begitu dari umat Islam sejak awal. Yang secara spontan ada ialah negara Umawiyah, Abbasiyah. Itu rezim. Tapi Islam itu *taken for granted* sebagai sumber nilai dan etik. Sama seperti tak ada sebutan kerajaan Hindu Majapahit, tapi Majapahit saja, walaupun didirikannya oleh orang Hindu dengan etika Hindu. Jadi, walaupun ada sebutan

negara Islam, itu lebih dalam pengertian bahwa penunjangnya masyarakat Islam.

Penggunaan istilah negara Islam bagi Pakistan merupakan jawaban terhadap kebutuhan. Dulu *Subcontinent* (India) dikuasai orang Islam, padahal mayoritas penduduknya Hindu. Maksud saya, kekuasaan Mogul. Ketika Inggris datang, logis jika sebagai *ruling elite* orang Islam melawan. Orang Hindu tidak begitu kuat resistensinya, bahkan bekerja bagi mereka tak ada bedanya dikuasai orang Islam atau Inggris.

Ketika India merdeka tahun 1947, orang Islam sadar bahwa tak mungkin lagi berkuasa, karena dari segi pendidikan saja kalah dari orang Hindu. Secara psikologis bisa dimengerti kalau mereka akhirnya merasa perlu mendirikan negara sendiri. Islam lalu dipakai sebagai wujud identifikasi nasional, sehingga Pakistan kemudian disebut sebagai negara Islam. Waktu itu sedang berkecamuk perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, dan di mana-mana muncul identifikasi kenasionalan secara Islam, termasuk di Indonesia.

Di Arab sendiri tak muncul, sebab Islam sudah *taken for granted*. Kenasionalan di sana adalah daerah, seperti Mesir atau Arab Saudi. Jadi konsep negara Islam adalah gejala modern.

Tapi agama, seperti ideologi apa pun, tentu membicarakan soal masyarakat, yang secara tak langsung merupakan teori dasar negara.

Itu betul. Saya bisa klaim bahwa NDP yang dijadikan obyek pembahasan Victor Tanja juga semacam teori dasar itu. Tapi bedanya, sekarang perjuangan tak lagi dibatasi secara eksklusivistik. Karenanya, teori yang bertahan ialah yang inklusivistik. Tentang ada-tidaknya dasar agama, itu soal lain. Yang jadi persoalan bukanlah Islam punya kehendak tertentu mengenai paradigma masyarakat, melainkan apakah kehendak itu harus diwujudkan secara eksklusivistik.

Setelah 15 tahun, apakah pembaruan Anda masih sepenuhnya relevan?

Saya kira konsep dasarnya tetap benar. Sebetulnya itu saya buat tahun 1970, sedangkan NDP tahun 1969. Waktu membuat NDP saya sadar rumusannya harus senetral mungkin, tidak menggunakan istilah eksklusif. Tahun 1970-an merupakan masa penajaman terhadap apa yang saya kemukakan dalam NDP. Maka nilainya seperi NDP.

Menurut pengamat, pembaruan Anda berkaitan dengan isu modernisasi waktu itu, sedangkan kini soalnya sudah berbeda.

Tak tahu bagaimana orang lain melihatnya. Seperti Kamal Hasan yang membicarakan tesis PhD-nya, langsung mengaitkannya dengan politik. Tapi saya sendiri saat itu secara sadar tak menyangkutkannya, seperti isu modernisasi juga. Kamal Hasan melihat inilah betuk responsi intelektual Islam. Tapi waktu membuat konsep Islam itu, persoalannya bukan memberikan responsi pada politik kontemporer, melainkan lebih sebagai dialog intern Islam mengenai negara Islam itu, yang sudah berlangsung sejak Mas Dachlan Ranuwihardjo menjadi ketua umum PB HMI tahun 1953. Kita sadar, isu negara Islam adalah produk zaman modern. Kita persoalkan itu. Kalau benar negara Islam, mengapa dari dulu tidak pernah ada negara Islam?

Pembaruan Anda bertujuan mendorong umat untuk memahami agamanya secara lebih intelektual. Tapi kini muncul antusiasme agama yang cenderung tak memahami agama secara intelektual.

Antusiasme itu berkait dengan faktor demografis pendidikan orang Islam. Di zaman kolonial orang Islam tak dapat berpartisipasi dalam pendidikan modern, baik karena politik diskriminasi

Belanda, maupun sikap non-kooperatif para ulama. Pendidikan modern baru terbuka bagi mereka tahun 1950, dengan didahului gerakan semacam Muhammadiyah, al-Irsyad, yang mengintrodusir pendidikan modern.

Kalau orang Islam, khususnya yang dikelompokkan Clifford Geertz sebagai Santri, dianggap sebagai pribadi, maka tahun 1956 tingkat intelektual rata-rata mereka baru tamat SD. 1959 tamat SMP, dan tahun 1962 masuk universitas. Karena itu, ketika saya jadi Ketua Umum PB HMI tahun 1966, semarak sekali, sebab antusiasme ini antara lain diwujudkan dengan afiliasi ke HMI. Aktivistis HMI waktu itu hampir semua merupakan generasi pertama yang berpendidikan di keluarga mereka. Ayah-ibu mereka masih buta huruf, kecuali dari Padang.

Tahun 1970-an, golongan santri panen sarjana. Karena Masyumi telah dibubarkan Bung Karno, HMI ibarat rumpun bambu tanpa penolong. Maksud saya ketika mereka lulus sekolah, mereka mencari kerja sendiri-sendiri. Karena itu, tahap berikutnya adalah orientasi domestik.

Baru setelah tahun 1980-an, mereka mulai melihat ke luar. Kehadiran mereka tak lagi dirasakan secara individual, tapi sistemik, berbentuk jaringan sosial. Jika semula di tempat pekerjaan mereka mengerjakan sembahyang secara sembunyi-sembunyi, tapi setelah menyusun jaringan, mereka mulai merintis mushalla, dan bersama-sama merayakan hari-hari besar Islam. Ini terjadi di mana-mana. Tapi memang hanya antusiasme, semangat yang bersifat sentimental. Yang melanda umat saat ini, yang sering disebut kebangkitan agama, sebetulnya baru pada tahap antusiasme. Ini tak dapat bertahan lama. Suatu saat diperlukan orang-orang yang berani melihat persoalan sebagaimana adanya dan mencari pemecahannya.

Ada yang berpendapat bahwa antusiasme agama berkait dengan cara menghayati agama secara kurang tepat. Lalu, apakah cara penghayatan ini perlu ditinjau kembali?

Mengatakan kurang tepat akan polemis sekali. Tapi kita bisa persoalkan mana lebih dahulu, antusiasme sebagai gejala psikologis sosial atautkah pemahaman itu sendiri. Tampaknya lebih dulu antusiasme, yang lalu menggiring mereka pada pola pemahaman tertentu tentang agama. Karena antusiasme, misalnya, cenderung dipilih ayat al-Qur'an yang keras, padahal ratusan ayat yang lunak tak dikutip.

Memang persepsi terhadap agama terkadang soal pilihan juga. Karena itu, saya sering anjurkan mempelajari tasawuf supaya tahu ikhlas. Antusiasme agama ini bisa jadi bumerang kalau tidak ditingkatkan lebih tinggi, tahap ontologis, yakni pencarian hakikat itu sendiri.

Anda pernah mengatakan, antusiasme ini jika diarahkan, dapat berbalik menjadi Marxisme-esktrim. Bagaimana maksud Anda?

Kalau kita buat asumsi Marxisme tidak dilarang di Indonesia, belum tentu mana yang ramai di universitas; Islam atautkah Marxisme. Kita mungkin akan mengalami pengalaman Amerika tahun 1960-an, ketika semua mahasiswa jadi Marxis. Entah Marxisme beneran atau cuma jadi mode, itu soal lain. Tapi pengaruhnya paling tidak bisa seimbang, karena bahan Marxisme lebih banyak dan canggih daripada bahan tentang Islam.

Anda katakan sikap beragama mungkin soal pilihan. Bagi Anda sendiri, apa yang kira-kira sangat mempengaruhi pilihan Anda?

Pengalaman. Yang paling mempengaruhi adalah ayah saya. Dia seorang alim, tamat Pesantren Tebuireng, yang dekat sekali dengan kakeknya Abdurrahman Wahid, K.H. Hasyim Asy'ari, Rais Akbar NU. Ibu saya adalah adik murid K.H. Hasyim Asy'ari, yang ayahnya aktivis Serikat Dagang Islam (SDI) di Kediri. Waktu itu, SDI banyak dipegang kiai. Ayah ibu secara kultural dari kalangan NU, tapi ketika NU bergabung dengan Masyumi November 1945, ayah

jadi orang Masyumi. Dan waktu NU keluar dari Masyumi tahun 1952, Ayah tak kembali ke NU dan tetap bertahan pada Masyumi, karena berpegang pada semacam fatwa K.H. Hasyim Asy'ari bahwa Masyumi satu-satunya partai Islam Indonesia yang sah.

Tamat SD, sesuai tradisi keluarga, saya masuk Pesantren Darul Ulum, Jombang. Waktu itu NU cakar-cakaran dengan Masyumi (1955), saya masuk pesantren NU, sehingga jadi ejekan santri lain. "Ini anak Masyumi kesasar," begitu kata mereka. Saya sedih sekali.

Waktu pulang ke rumah saya ceritakan ke ayah, bahwa saya tadi juara kelas tapi selalu diejek sebagai anak Masyumi kesasar. Saya minta ayah masuk NU. Tak saya duga, ayah ternyata marah. Lalu ia memanggil ibu, yang waktu itu aktif di Muslimat Masyumi, agar menerangkan mengapa ayah tetap di Masyumi. Saya lalu bilang kalau tak mau masuk NU, saya tak mau kembali ke pesantren. Ayah saya bilang, mungkin ada pesantren Masyumi. Akhirnya saya dibawa ke pesantren Gontor di Ponorogo.

Konflik itu terus menghantui saya. Saya berpikir, mengapa masih mungkin orang seperti ayah saya, yang dalam soal agama berkiblat pada ulama pesantren, tapi dalam soal politik berkiblat pada orang sekolahan (Masyumi).

Waktu di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, saya perhatikan ceramah anggota HMI yang lebih senior, yang selalu merujuk pada pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, terutama Islam dan Sosialisme, dan pemikiran H. Agus Salim.

Saya lihat pikiran Tjokroaminoto sudah kurang relevan karena semacam apologia. Islam dan sosialisme ditulis ketika SI dianggap tidak relevan lagi oleh unsur SI Merah. Saya pikir ada sesuatu yang lebih prinsipil, dan menulis *Fundamentals of Islamism* lebih dari 100 halaman. Sejak saya ceramahkan dalam sebuah pertemuan nasional di HMI, saya diminta menceramahkan pula di tempat-tempat lain. Untuk itu, tahun 1965, saya diangkat menjadi salah satu ketua PB HMI. Pada kongres HMI tahun 1966 di Solo, saya dipilih sebagai ketua umum. Dan begitulah perkembangan logis pengalaman itu berakhir dengan berbagai macam.

Anda bilang, agama harus terbuka untuk dikaji secara ilmiah. Bagaimana itu mungkin di negara kita sekarang, misalnya saja dengan adanya istilah SARA?

Supaya aman dan gampang, kita ambil contoh agama sudah mati, misalnya agama Mesir kuno. Hidupnya ribuan tahun, 3000 tahun lebih. Waktu masih hidup, orang tak membayangkan agama tersebut akan mati. Ini bukti bahwa agama kalau tak dapat bertahan terhadap ilmu, akan hancur dan akan tersisa sebagai dongeng saja.

Dulu Mesir disebut sebagai tempat buaian peradaban manusia. Bangunan kuburan macam piramid, lahir dari keyakinan bahwa orang yang dikubur di bawah bangunan meruncing demikian akan mudah masuk surga. Keyakinan ini akan melahirkan dimensi moral, yang menegaskan penguburan semacam ini baik. Dan upaya membentuknya, dengan pelbagai kerumitan pembangunannya, melahirkan berbagai ilmu, misalnya mekanika, bangunan, dan lain-lain. Pengawetan mayat atau mummy, melahirkan ilmu kimia.

Maka hubungan erat antara pengetahuan dan keyakinan yang berlangsung ribuan tahun itu melahirkan sebuah peradaban. Tapi kepercayaan ini lalu ditinggalkan, dan dengan ini juga motif religius untuk membangun peradaban ini. Maka hancurlah kebudayaan Mesir yang pernah besar itu. Sekarang, kita dengan mudah mengatakan semua agama Mesir Kuno itu cuma dongeng. Tapi juga semua agama terancam jadi dongeng, jika tak dapat bertahan di hadapan ilmu. Jangan terkecoh oleh ribuan tahun hidupnya.

Apakah pada tahapan ini, ilmu semacam sosiologi agama itu dapat membantu memahami agama lebih netral?

Ya. Karena itu, sosiologi agama itu penting. Lihat, dengan Muhammadiyah saja orang dapat melihat bahwa Syeh Abdul Qadir Jaelani sebagai kutub wali jadi sekadar mitos. Dan banyak lainnya. Itu baru Muhammadiyah, yang belum juga selesai.

Di samping itu, apakah manfaat kajian ilmiah terhadap kehidupan kepercayaan?

Kepercayaan berkaitan dengan alternatif. Karena itu orang Islam harus mempelajari pelbagai kemungkinan dan ajaran yang pernah tumbuh untuk memperkaya alternatif ini. Perluasan alternatif.

Banyak orang yang sibuk mempersoalkan hubungan yang tepat antara agama dan Pancasila. Bagaimana menurut Anda?

Agama di atas atau di bawah Pancasila, tergantung dari perspektifnya saja. Dari perspektif individual, agama primer dan Pancasila sekunder. Orang menerima Pancasila justru karena motif agama. Pada level negara, Pancasila primer karena merupakan milik bersama.

Karena itu, saya pernah membandingkan Pancasila dengan Konstitusi Madinah, sebab sama-sama berlaku sebagai *common platform*, sebagai titik-pertemuan di antara kelompok-kelompok yang ada. Waktu itu Nabi mencoba mempersatukan masyarakat Islam, Yahudi, dan orang lain yang disebut belum Islam. Dan dengan konstitusi ini lalu terciptalah yang disebut umat yang satu. Sebab itu, upaya mencari titik-persatuanlah yang harus dipersoalkan.

Untuk orang yang memahami agama sebagai ideologi, Pancasila sebagai saingan. Tapi bagi yang memahami agama sebagai sumber etik, maka Pancasila lebih merupakan kelanjutannya. Untuk orang yang mengerti persoalannya, mempermasalahkan kedudukan dan hubungan agama dan Pancasila adalah mempersoalkan suatu hal yang terlalu jelas dan bahkan jadi *superfluous*, berlebih-lebihan.

Apa yang harus dilakukan kelompok-kelompok agama yang begitu banyak di Indonesia?

Pertama, menyadari hak mereka sebagai pemeluk agama harus diinsafi dulu. *Kedua*, seperti halnya pada Pancasila sebagai *common*

platform, agama-agama juga harus mencari titik-temu. Berbagai cita-cita kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan sebagainya didukung semua agama, karena itu sudah seharusnya dicari titik-temu sebanyak mungkin.

Perlu diingat, semua agama lahir pada zaman pra-modern. Dulu mungkin tak ada pilihan selain hidup secara eksklusif. Tapi bagi masyarakat modern, yang telah jadi masyarakat planet ini, kelompok-kelompok tak lagi terisolir satu sama lain. Maka tekanan untuk mencari titik-pertemuan makin besar.

Betulkah kemodernan cenderung meninggalkan agama? Di Barat, misalnya?

Jika dilihat dari statistik kunjungan orang ke gereja, di Eropa misalnya, memang terasa. Tapi tumbuhnya pelbagai kultus di sana membuktikan masih ada kebutuhan penyelesaian secara spiritual. Seperti diungkapkan dalam buku *Hero with the Thousand Faces*, banyak persoalan yang timbul di zaman modern ini tetap membutuhkan penyelesaian spiritual. Sementara ini belum ketemu, maka kultus-kultus menjadi laku.

Jadi, jika orang lebih melihat bagaimana orang Barat mencari alternatif jawaban spiritual, misalnya seperti diungkapkan dalam buku *Turning East*, berarti agama di Barat tetap hidup. Dan ingat, di Barat tetap Bibel merupakan buku yang dicetak terbanyak setiap tahun. Jadi pembacanya mungkin juga paling tinggi. Ingat, pergi ke gereja lebih antusiasitik, lebih eksternal, sedang yang ontologis dilakukan dengan lebih diam-diam dengan kajian sendiri.

Adakah pengaruh kesempatan ini pada perkembangan diri Anda?

Terlihat spektrum pilihan-pilihan lebih luas. Mungkin ini yang menimbulkan kesan pada orang bahwa saya semakin kurang radikal.

Koleksi buku Anda banyak sekali. Kira-kira berapa jumlahnya?

Sekitar empat sampai lima ribu.

Yang terbanyak?

Ilmu-ilmu sosial dan keislaman.

Kira-kira berapa lama Anda membaca buku dalam sehari? Bagaimana caranya?

Sekitar dua atau tiga jam. Itu juga sambil menulis. Sekarang ini, buku *kan* ada indeksnyanya. Jadi kalau kita kuasai persoalan secara garis besar, nanti detailnya cukup kita konsultasikan dengan indeksnyanya saja. Saya kira begitu cara membaca buku sekarang. Kalau satu persatu, susah sekali. Jadi, lebih tematik saja.

Apa rencana kerja Anda dalam jangka pendek?

Cita-cita saya menulis sebanyak-banyaknya, sampai sekarang belum juga terlaksana, karena macam-macam kesibukan. Terseret ke kanan ke kiri.

Masalah apa yang Anda ingin tulis?

Politik dan keagamaan. Tapi lebih banyak keagamaan. Karena kebanyakan orang Indonesia beragama Islam, berarti banyak yang harus saya kerjakan.

Lalu menurut Anda, masalah apa yang paling mendesak di Indonesia?

Belajar. Dan yang paling mendesak belajar menggunakan kebebasan. Kita jangan mempersoalkan seberapa jauh kita bebas,

tapi bagaimana menggunakan kebebasan yang tersisa itu secara bertanggung jawab dan konstruktif, yang nanti akan punya dampak bagi pelebaran wilayah kebebasan itu sendiri. Sebab, seperti disinyalir Bung Hatta ketika melihat Soekarno, kebebasan itu bisa memakan orang bebas kalau ia mempergunakannya tidak benar.

Seandainya kebebasan ada tapi tidak digunakan dengan tak bertanggung jawab, maka akan mengundang pembatasan terhadap kebebasan itu. Sebaliknya jika kita menggunakan dengan bertanggung jawab, maka akan mengundang orang memperluas kebebasan itu.

Jika kebebasan diberikan, atau proses belajar menggunakan kebebasan ini berlangsung baik, masyarakat macam apa yang Anda harapkan dapat muncul?

Kalau dari segi cita-cita, yang diharapkan hadir sebuah masyarakat yang terbuka, adil, dan demokratis. Dalam hal ini ketiganya saling berkait. Dan ini harus disadari sebagai hasil suatu proses panjang, bukan seketika macam *instant coffee* saja, seperti terkesan pada perjuangan teman-teman yang sekarang lagi ramai-ramai di pengadilan.

Jadi, yang penting apa yang tersisa dari kebebasan ini harus dipergunakan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, sehingga secara alamiah akan terus melebar. [❖]

APATISME PEMBICARAAN NEGARA ISLAM¹

Dengan memperhitungkan mayoritas orang Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling baik mewarnai adalah nilai Islam. Tapi nilai Islam yang dapat berlaku pada dataran nasional itu, hanyalah nilai Islam yang bisa diterima oleh semua pihak, dan orang Islam sanggup merumuskannya secara universal serta inklusivistik. Oleh karena itu, orang tidak lagi bicara tentang negara Islam, sebagai satu orientasi untuk membangun negara. Pikiran tersebut disuguhkan Nurcholish Madjid, seusai memberikan ceramah tentang Etika Islam dalam Musyawarah Nasional MUI ke-3 (20-23 Juli 1985). Lebih jauh, Nurcholish Madjid memaparkan pikirannya dalam percakapannya dengan Muhammad Ridlo Esisy dari Harian *Pikiran Rakyat*, Bandung.

Apakah sekarang ini masih ada aspirasi untuk membentuk suatu negara Islam?

Aspirasi negara Islam yang didukung oleh partai-partai Islam dahulu, tidak ada lagi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan adanya sebuah negara yang dijiwai oleh ajaran-ajaran agama yang lain.

Misalnya Amerika Serikat, meskipun dikatakan sebagai negara sekular demokratik, tetapi kalau dipandang dari segi etisnya, AS

¹ Harian *Pikiran Rakyat*, “Orang Tidak Bicara tentang Negara Islam Lagi”, 20 Juli 1985. Pewawancara Muhammad Ridlo ‘Eisy.

itu adalah negara Kristen. Jadi tidak mustahil sebuah negara itu dijiwai oleh agama Hindu, Budha, Shinto, atau yang lain.

Cuma, sekarang ini tantangannya adalah, apakah tidak mungkin agama itu diekspresikan dalam ungkapan yang lebih universalistik, artinya tidak secara khusus dan esoterik, hanya menggunakan simbol-simbolnya sendiri, dan diganti dengan simbol-simbol yang bisa dipahami oleh semua orang.

AS adalah negara yang dipandang dari segi etisnya adalah negara Kristen yang Protestan. Malahan bisa disebut Protestan Putih dari kalangan Anglo Saxon. Tapi meskipun AS itu secara etis itu sebuah negara Kristen, namun pada tingkat nasional, nilai-nilai dari Kristen itu diungkapkan dalam rumusan-rumusan universal, sehingga tidak lagi khusus dimengerti oleh orang Kristen, tetapi menjadi rumusan yang bisa disertai oleh orang lain. Artinya, walaupun itu diambil dari etika Kristen, tetapi ketika dijadikan nilai yang umum, maka orang Yahudi atau orang Katolik, atau orang Islam dapat turut menikmati. Misalnya kebebasan, hak pribadi, hak asasi, tertib hukum. Itu semua adalah pemunculan ke atas dari nilai-nilai khusus yang lahir dari agama.

Hal itu diterangkan oleh banyak sosiolog, antara lain Robert N. Bellah yang memperkenalkan suatu istilah yang masih kontroversial, yaitu “Agama Sipil”. Paham agar tertib hukum harus ditegakkan misalnya, menumbuhkan komitmen seperti komitmen terhadap agama, dan itu memang semacam agama.

Karena hal itu bisa dinikmati oleh semua orang, dan berkenaan dengan negara, disebut agama sipil, namun hal itu juga berakar dari agama kenabian. Pada tingkat pribadi orang bisa mengatakan, “Saya mendukung demokrasi, hak asasi manusia dan lain-lain, adalah karena dorongan agama saya”. Jadi sumber motivasinya adalah agama kenabian, tetapi pemikiran ke atasnya menjadi agama sipil.

Jadi di Indonesia pun tidak mustahil terjadi. Karena semata-mata dengan memperhitungkan mayoritas orang Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling baik mewarnai adalah nilai

Islam. Tetapi nilai Islam yang dapat berlaku pada dataran nasional itu hanyalah nilai Islam yang bisa, dan orang Islam sanggup merumuskannya secara universal dan inklusivistik. Karena itu orang tidak bicara tentang negara Islam lagi. Negara Islam itu eksklusif, tidak inklusif. Tetapi orang Islam sekarang bicara tentang keadilan, persamaan antarmanusia, hak pribadi, yang semuanya ada dalam ajaran Islam namun inklusif.

Di situ perbedaan tahap pengembangan Islam yang sekarang dengan tahap pengembangan yang dahulu. Waktu itu orang belum merasa memperjuangkan Islam sebelum dia menyebut negara Islam, Republik Islam, Konstitusi Islam, yang serba-eksklusif. Tapi akhirnya ungkapan semacam itu hanyalah penemuan manusia. Dulu waktu zaman Umayyah dan Abbasiyah tidak ada ekspresi semacam itu. Negara Umayyah disebut Daulah Umawiyah, zaman Abbasiyah disebut Daulah Abbasiyah. Tidak mungkin kita mengatakan Daulah Umawiyah dan Abbasiyah itu lepas dari Islam. Sampai sekarang pun ahli sejarah mengatakan bahwa daulah Umawiyah itu dijiwai oleh Islam atau katakan negara Islam tapi dalam makna negara yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.

Jadi Indonesia dengan UUD 1945 dan Pancasila tidak mustahil berkembang seperti itu, menjadi suatu bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang berasal dari Islam. Tapi nilai-nilai seperti itu harus merupakan nilai-nilai yang sudah diuniversalkan, sekurang-kurangnya dalam ungkapannya. Sesungguhnya Islam selalu mengungkapkan bahwa Islam adalah untuk semesta alam, untuk kebaikan semua orang. *Rahmat-an li al-'alamîn*. Jadi bukan untuk kebaikan orang Islam itu sendiri. Itu berarti nilai-nilai Islam bisa dilaksanakan bagi seluruh manusia, sehingga yang memanfaatkannya tidak hanya orang Islam itu sendiri, tapi semua orang. Misalnya menciptakan kemakmuran itu suatu nilai, disebut Islam atau tidak, nilai itu adalah suatu kebaikan, dan semua orang akan merasakan kebaikan nilai itu. Menciptakan keadilan, demokrasi juga demikian.

Tentang memasyarakatkan nilai-nilai Islam itu, apakah tergantung dari banyaknya umat, atau adakah potensi lain yang bisa memberikan jiwa Islam kepada Indonesia?

Umat yang banyak itu tidak selalu menentukan. Yang lebih menentukan adalah adanya kreativitas, terutama kreativitas intelektual. Kalau melihat ini, kita boleh berpengharapan. Oleh karena banyak orang Islam yang menerima pendidikan, semakin banyak yang intelek, dan ini merupakan dampak mobilitas vertikal dan horizontal. Orang berpendidikan bergerak lebih *mobil* secara horizontal dan vertikal. Kesempatan untuk mendapatkan promosi sosial-ekonomi lebih besar. Ini berarti bahwa kelompok-kelompok ini akan semakin lebih banyak mengambil bagian dalam kehidupan negara yang modern. Itu mempunyai dampak pemupukan kemandirian pada diri sendiri, sehingga tidak ada kekhawatiran terlalu banyak, yang kemudian menjadi pangkal tolak dari unsur-unsur yang lebih sehat, positif dan tidak negatif.

Jadi sifatnya akan menjadi lebih pro-aktif dan tidak reaktif. Salah satu sebab dari tindakan reaktif ialah deprivasi, perasaan tidak diikutsertakan, terabaikan, tidak dihargai dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi lingkaran setan sendiri. Karena orang tidak merasa diikutsertakan, maka mengalami deprivasi, dan menunjukkan sikap-sikap agresif yang negatif. Sikap ini semakin besar mendorong orang itu mengalami deprivasi. Permulaan masalah ini adalah tiga hal. *Pertama*, mungkin sebab individual, orangnya tidak kooperatif. *Kedua*, orang yang sangat ideal, karena menuntut ukuran yang terlalu tinggi bagi masyarakat untuk memenuhi standar itu. Ada juga yang terseret oleh lingkungan teman. Jadi spektrum kemungkinan itu ada semua.

Kalau kita mengambil kecenderungan yang lebih besar, yang cocok dengan orang banyak yang semakin berpendidikan, maka makin banyak kemampuan untuk berpartisipasi. Hal itu memperkecil deprivasi. Itu permulaan sikap yang lebih positif, seperti memberikan kontribusi yang aktif. Kalau hal itu sekarang

belum kelihatan, karena Islam Indonesia masih relatif baru dalam pendidikan. Zaman Belanda kita tidak bisa mendapatkan pendidikan, karena sikap orang Islam itu sendiri yang mengharamkan orang masuk sekolah Belanda. Dan politik Belanda yang mempersulit orang Islam mendapatkan pendidikan.

Baru setelah kemerdekaan kesempatan terbuka. Tahun 1950 mulailah orang Islam masuk sekolah umum, selain madrasah. Kalau kita menghitung dan mengandaikan umat Islam itu suatu pribadi, maka pada tahun 1950 masuk SD, tahun 1955 lulus SD, tahun 1959 tamat SMP, tahun 1962 tamat SMA, tahun 1965-66 sarjana muda, dan tahun 1970 sarjana lengkap. Mereka kemudian menyerbu pasaran kerja yaitu pemerintah. Pada waktu itu karena mereka belum tersusun sebagai institusi, tapi masih sebagai pribadi, maka mencari kerja pun dilakukan secara pribadi. Secara psikologis pada tahap pertama orang akan mengurus diri sendiri, tapi setelah itu selesai kurang lebih 10 tahunan. Maka pada awal 1980, orang-orang mulai punya perhatian keluar.

Dampak kehadiran mereka sudah mulai tampak sebagai suatu sistem. Di mana-mana ada jaringan yang tidak formal. Dampaknya bukan saja horizontal, tapi juga vertikal. Atasan mulai menyesuaikan diri pada kecenderungan-kecenderungan yang ada. Yang tidak bisa sembahyang Jumat, turut sembahyang Jumat. Sedangkan bawahan yang dulunya tidak mempunyai perlindungan kalau menyatakan diri, sekarang bisa karena ada pelindung. Jadi itu yang membikin optimis, karena orang Islam lebih banyak yang terpelajar. Mereka tersebar di mana-mana, di semua bidang. Itu bukan hasil *engineering*, tapi semata-mata karena besarnya *manpower*, karena Islam merupakan mayoritas. Yang kita harapkan adalah orang-orang ini, dengan intelektualitasnya akan semakin mampu mengungkapkan diri dan pikirannya secara lebih inklusivistik.

Kalau dikaitkan dengan ormas-ormas Islam, kira-kira apakah orang-orang Islam dalam ormas ini bisa mensuplai ide-ide yang

kreatif bagi lapisan menengah ke atas. Jilia bisa, pembinaannya seperti apa?

Mestinya pertumbuhan organisasi itu atas inisiatifnya sendiri, dan itu kadang-kadang mempunyai efek mengungkung, orang menjadi tawanan. Di lain pihak norma intelektual juga tumbuh dalam organisasi ini. Kelompok intelektual ini kadang-kadang diibaratkan sebagai penerobos cungkup organisasi. Contoh paling konkret adalah Abdurrahman Wahid di NU. Di Muhammadiyah belum terjadi, karena Muhammadiyah relatif lebih luas. Oleh karena itu untuk menembus cakrawala Muhammadiyah itu, tuntutannya lebih besar.

Ada juga harapan organisasi-organisasi itu akan mengambil bagian dalam peristiwa semacam ini, tetapi juga ada kekhawatiran bahwa dari penemuan historis dari organisasi-organisasi itu ternyata menimbulkan berbagai *vested interest* dari pimpinan dan tokoh-tokohnya. Kalau sudah begitu sulit untuk memberikan kontribusi. Oleh karena itu kontribusi yang paling bebas dan kreatif adalah dari kelompok-kelompok pinggiran. Jadi orang-orang yang tidak terorganisasikan, atau yang pengorganisasiannya sangat longgar, tidak ada hirarki, sangat horizontal.

Kira-kira arah seperti apa dan bentuknya bagaimana pembinaannya, agar ormas-ormas itu memberi kontribusi lebih banyak dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia, sehingga katakanlah negara Pancasila tetapi etis Islam itulah yang paling tampil dalam masyarakat?

Kita perlu luruskan dulu istilah yang bisa menimbulkan salah paham. Jadi kalau kita katakan negara Indonesia adalah negara Pancasila tapi beretiskan ajaran Islam, itu tidak perlu dikonstraskan sedemikian rupa, karena Pancasila, akan begitu tumbuhnya. Pancasila itu akan tumbuh secara alami berdasarkan nilai-nilai Islam, karena itu tidak usah ada pertentangan dan ketegangan

antara nilai-nilai Islam dengan Pancasila. Itu sudah menjadi satu. Seorang Muslim yang baik adalah seorang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Saya tidak suka mempergunakan kata, seorang Muslim yang baik adalah seorang Pancasilais sejati. Saya tidak suka jargon-jargon politik seperti itu.

Seorang Muslim yang baik adalah seorang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila, artinya dia berketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang demokratis dan yang mempunyai pandangan egaliter, itu semua langsung merupakan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri.

Bagaimana caranya untuk menumbuhkan ini di kalangan ormas Islam? Dalam setiap organisasi itu juga tumbuh kelompok intelektual. Intelektual ini lebih banyak mempunyai kesamaan dengan kelompok intelektual di luar organisasi itu, daripada dengan orang satu organisasi yang tidak intelektual. Jadi ada hubungan *cross cultural* yang tidak bisa dibatasi oleh lingkungan organisasi formal, akan tetapi terjadi suatu pergaulan intelektual yang lebih inklusivistik, lebih diikuti banyak orang dari berbagai sektor. Karena itu baik sekali adanya pertemuan-pertemuan antar-intelektual dari berbagai organisasi. Itu sudah sering terjadi. Ternyata dari pertemuan antar-kelompok ini kita mendukung nilai-nilai yang sama.

Bagaimana gambaran formal ormas Islam yang bisa mengangkat nilai-nilai Islam di Indonesia, bentuknya seperti apa? Secara praktis, apakah UU keormasan memadai untuk itu?

Sesungguhnya tidak relevan untuk membicarakan UU keormasan itu memadai atau tidak. Memadai atau tidak itu tergantung dari pengisian. Jadi kita tidak bicara hal-hal yang formal, yang formalistik. Masalahnya terletak pada penyebaran ide dan pengisian. Dan berhadapan dengan ide yang telah menjalar seperti ini, bentuk formal apa pun tidak akan berdaya. Dengan perkataan lain, boleh saja ada keputusan-keputusan resmi, kalau tidak relevan dengan

ide yang dominan dalam masyarakat, maka keputusan itu tidak akan berlaku sama sekali. Atau sebaliknya keputusan apa pun dalam pelaksanaannya akan mengalami perumusan kembali atau pengisian oleh ide yang dominan.

Bagaimana pendapat Anda tentang agama sebagai ideologi primer, sedangkan Pancasila sebagai ideologi sekunder?

Yang dimaksudkan adalah, misalnya saya Islam, ideologi primer adalah Islam. Pancasila adalah ideologi sekunder. Hubungannya begini, seorang Muslim menjadi Pancasila-lais karena dorongan Islam. Seorang Kristen menjadi Pancasila-lais karena dorongan agama Kristen. Tapi dorongan-dorongan itu milik pribadi, dalam arti bahwa kita tidak bisa memaksakan kepada orang, “Kamu boleh Pancasila-lais tapi motifnya adalah Islam!” Ini tidak bisa. [❖]

TARIK-MENARIK ANTARA KEKUASAAN DAN ISLAM¹

Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa, yang *notabene* Indonesia sangat lembek sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin *tough*, seperti Korea Selatan. Karena produktivitas terdorong dengan *high predictability*. Pikiran tersebut lahir dari cendekiawan Nurcholish Madjid dalam perbincangannya dengan wartawan Majalah *Forum Keadilan*, Wahyu Muryadi, Yusi A. Pareanom, dan Tony Hasyim. Ia juga menyorot perihal suksesi, bahwa presiden mendatang hanya *primus inter pares*, orang yang pertama dari yang sama. Untuk itu, pembenahan struktur harus diprioritaskan, terutama perihal kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk di antaranya kebebasan pers, sebagai kontrol sosial dari masyarakat. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apa motivasi Anda masuk sebagai anggota KIPP itu?

Motivasi saya singkat saja; untuk menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Memangnya, sekarang belum demokratis?

¹ Majalah *Forum Keadilan*, “Presiden Mendatang Tidak Akan Mampu Menjadi Pilot”, Nomor 26, Tahun IV, 8 April 1996. Pewawancara Wahyu Muryadi, Yusi A. Pareanom, dan Tony Hasyim.

Bukan begitu. Sekarang sudah banyak kemajuan, tapi kita masih bisa mengisi lebih baik.

Contoh kemajuannya apa?

Misalnya, kebebasan berpendapat sudah cukup maju. Kemarin saya menjadi pembicara di Sesko-ABRI. Saya lihat bukan main majunya ABRI mengembangkan kehidupan demokrasi. Para perwira ABRI bisa berbicara terbuka dengan sesamanya, walau itu tentang hal-hal konfidensial, yang tidak bisa didengar orang luar. Tapi paling tidak, kebebasan berbicara itu sudah ada di lingkungan mereka. Itu bagi saya merupakan suatu tolok ukur kemajuan kehidupan demokratis.

Kalau di luar ABRI *kan* belum?

Justru karena itu terjadi di ABRI, itu merupakan gejala menarik. Mengingat posisi ABRI sangat dominan di masyarakat, saya kira dalam waktu tidak lama lagi iklim tersebut akan menular ke masyarakat luas.

Dalam soal pers, mengapa pemerintah selalu reaktif

Saya kira, pers sekarang juga sudah cukup bebas menulis.

Tapi, *kan* ada pembredelan.

Jelas itu suatu kemunduran. Saya tidak bisa mengatakan lain, itu adalah suatu kemunduran. Tapi, dari sisi yang lain, saya lihat kehidupan demokrasi kita secara umum sudah ada kemajuan ketimbang lima tahun yang lalu atau sebelumnya. Tapi itu memang kembali lagi ke pribadi. Yang berbicara lantas masalah kepentingan. Yang lebih ringan mungkin masalah perbedaan wawasan atau kemampuan memahami wawasan. Jadi orang itu tidak punya akses

pada informasi yang lebih besar. Seperti Pak Harto itu *kan* mulainya begitu. Tapi, karena dengan tulus beliau bersedia dikelilingi orang banyak, akhirnya selamat. Apalagi karena pada dasarnya Pak Harto itu cerdas, ilmu yang diperolehnya luar biasa sekali. Itu sudah diakui oleh para ekonom. Mereka bilang, dulu mereka datang untuk menggurui Pak Harto, sekarang mereka datang untuk digurui.

Lalu, kenapa Anda masih masuk KIPP? Itu *kan* seolah-olah Anda tidak percaya pemerintah akan melaksanakan pemilu secara demokratis?

Bukan begitu. Kita bisa mengkondisikan agar kehidupan demokratis itu lebih baik. Saya akan mengisi itu dengan segala kemampuan saya, misalnya dengan menulis atau melalui ceramah. Jadi sebenarnya banyak pintu untuk masuk menuju itu. Salah satunya adalah melalui KIPP itu.

Siapa yang pertama kali melontarkan ide KIPP itu?

Sebenarnya, sudah dari dulu banyak yang ingin membentuk lembaga semacam itu, cuma tidak pernah kesampaian. *Nah*, kebetulan Goenawan Mohamad dan orang-orang sekitarnya beberapa waktu lalu, kembali melontarkan ide tersebut. Karena dirasakan sudah mendesak dan cukup banyak, orang yang ingin terlibat, jadilah. Lalu saya diajak ikut, ya saya ikut.

Kenapa tidak ikut salah satu orsospol saja, *kan* lebih efektif?

Saya rasa, lebih baik orang seperti saya aktif dalam gerakan moral. Dulu, saya memang pernah ditarik untuk menjadi anggota P, tapi saya sadari bahwa saya lebih baik bergerak di bidang moral. Karena itulah saya bersedia masuk KIPP. Karena KIPP tidak bertujuan menjadi kekuatan politik, melainkan sebagai kekuatan moral.

Sebagai tokoh Islam, kenapa Anda tidak mendukung PPP, yang sekarang sudah (kembali) menegaskan sebagai partai Islam?

Saya tidak setuju itu. Saya yakin, PPP bisa menjadi besar tanpa menjadi partai Islam. Yang penting, bagaimana PPP menjadi partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saya kira, kalau itu sudah sungguh-sungguh dilakukan, PPP akan menjadi besar dengan sendirinya.

Lalu, bagaimana dengan langkah-langkah Buya Ismail dengan PPP-nya yang cukup kontroversial belakangan ini?

Itu harus didukung. Bukan untuk kepentingan Buya *an sich*, tetapi untuk penciptaan iklim yang lebih seimbang. Kalau kita mendukung satu kelompok, itu karena ada satu sistem yang kita perjuangkan. Yang saya lakukan untuk pemilu tahun 1977 juga untuk sistem itu, bukan untuk PPP-nya. Karena sistem lebih awet. Negara kita arahkan ke situ. Sebab selama 50 tahun kemerdekaan, kondisinya seperti naik pesawat. Selama ini kita hanya punya dua pilot. Untungnya pilot itu punya iktikad baik, sekalipun di tengah jalan ada beberapa gangguan. Kalau pilotnya ngawur, bagaimana? Bisa kacau negara ini. Karena itu, untuk yang mendatang tidak bisa begitu lagi. Karena presiden mendatang pasti tidak akan mampu menjadi pilot.

Siapa bilang?

Semua orang. Presiden mendatang hanya *primus inter pares*, orang yang pertama dari yang sama. Kita harus belajar menerima orang seperti itu. Sebab kalau tidak, nasib kita bisa seperti Yugoslavia yang sangat mengerikan. Mungkin kita lebih baik prasarananya dari Yugoslavia dalam arti kita punya falsafah. Sekalipun dalam rangka penyucian Pancasila ada beberapa ekses, tetapi Pancasila sebagai *presumed truth* harus diterima. Sebab kalau tidak begitu, negara tidak akan berjalan. Jadi kita sudah dilengkapi perangkat

lunak falsafah itu dan dilengkapi bahasa. Bahasa nasional itu suatu sukses yang luar biasa. Jadi sekalipun kita punya modal dasar, *toh* kesiapan perlu dijaga: struktur.

Apa tujuan pembenahan struktur itu?

Yang paling penting, ya kebebasan. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk di antaranya kebebasan pers, sebagai kontrol sosial dan masyarakat. Jadi, persoalan tidak semata-mata tergantung pribadi pemimpin, melainkan pada dinamika masyarakat. *Check and balance* berfungsi. Ambil contoh korupsi. Itu bukan masalah pribadi, tetapi lebih pada masalah pengawasan. Misalnya, Indonesia disinyalir sebagai salah satu negara yang paling korup. Gambarnya *kan* seolah-olah, semua orang Indonesia itu korup dan jahat.

Sekarang bagaimana dengan maraknya ormas baru itu?

Saya tidak tahu, karena saya bukan mereka. Tapi kesan yang saya tangkap, adanya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan iklim keterbukaan. Lima tahun lalu, tidak ada orang yang akan berpikir untuk mendirikan Masyumi Baru ataupun PNI Baru, karena pasti akan langsung ditangkap. Sekalipun tidak setuju dengan organisasi baru itu, saya menganggap itu sebagai indikasi positif dari dinamika masyarakat. Masalah mereka tidak puas dengan ICMI, itu *kan* upaya merasionalisasi keadaan.

Gejala itu disebut apa?

Ya, macam-macam. Ada yang menyebut politik aliran. Politik aliran itu akan selalu ada. Di Amerika saja masih ada. Partai Demokrat dan Republik masing-masing punya kantong pendukung. Orang Katolik, Yahudi, kulit hitam, kaum minoritas lainnya, serta kulit putih di pantai timur Amerika, cenderung Demokrat. Sedangkan yang Protestan, dan yang berada di daerah selatan serta

barat, cenderung Republik. Kemudian di Inggris dan Jerman juga ada. Jadi, untuk mengharamkan politik aliran, itu *nonsense*. Jadi, yang diharapkan, ya jangan sampai merusak.

Apakah sekarang agama sudah berada di posisi yang selayaknya?

Saya kira ya, sekalipun belum sempurna. Seperti kata Pangab Feisal Tanjung, memang seharusnya agama ditempatkan sebagai sumber inspirasi moral dan etika. Jadi bukan seperti idiom tempo dulu yang menginginkan negara Islam. Sama seperti agama Kristen di Amerika. Orang Amerika tidak bisa menerima calon presiden yang bercerai, berselingkuh seperti Gary Hart. Sebab itu, sulit sekali jadi pemimpin. Sehingga orang keliru kalau menganggap Amerika sebagai negara sekular yang tidak mengindahkan agama. Etika moral Kristen sangat terpegang kuat. Di negara kita, yang Muslimnya terbesar di dunia, korupsi terjadi luar biasa. Ha-ha-ha.... itu menunjukkan etika Islam belum menjadi sikap keseharian. Masalahnya, umat Islam masih terpaku pada simbol, yaitu harus mendirikan masjid, naik haji, dan simbol yang lain.

Kekhawatiran penguasa terhadap Islam berkurang. Apa bahayanya?

Itu masalah tafsiran. Menegaskan diri sebagai umat Islam itu *kan* sebagai kemampuan diri. Tetapi sayangnya, dalam retorika khutbah, yang muncul adalah ajakan agresivitas. Sikap agresi itu justru indikasi orang yang tidak percaya diri. Kalau orang punya *confidence*, pasti tidak akan begitu, ia akan toleran. Jadi, sayang bila khatib berseru: “*isyhadû bi-annâ min al-muslimîn*” tetapi belum tuntas identitasnya, karena yang muncul sikap agresif. Ia selalu melihat orang lain akan mengancamnya.

Lalu, bagaimana agar kita semua merasa aman?

Kelompok non-Islam itu harus diingatkan, bahwa umat Islam itu 90 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Jadi, banyak sekali. Sehingga konyol sekali jika mengharap semua bersikap sama. Misalnya, kita tidak bisa membuat *collective judgement* terhadap umat Kristen hanya karena HKBP, yang memperebutkan gereja, sampai bunuh-bunuhan. Itu *kan* tidak boleh. Demikian juga untuk Islam. Dalam sejarah ada contoh tahun 1950-an. Saat itu kepercayaan diri Masyumi sangat besar, sehingga yang digandeng bukan dari NU tetapi malah PSI, Parkindo, dan Katolik, untuk bergabung di Liga Demokrasi, yang lantas ditandingi dengan Liga Muslimin. Karena itu saya selalu bilang, orang seperti Gus Dur perlu didukung. Ia sangat berjasa dalam proses perataan jalan agar orang menjadi punya *confidence* pada dirinya. Kalau saya bilang pada Romo Mangun, tampilnya Gus Dur itu bagai mukjizat.

Gus Dur mengkhawatirkan semakin menguatnya fundamentalisme dan semakin solidnya kelompok ICMI garis keras.

Maka, saya selalu berpendapat, kritik terhadap ICMI itu sangat diperlukan. Karena itu kami selalu berterima kasih terhadap Gus Dur, sekalipun ada kritiknya yang bisa dibantah, seperti masalah sektarian. Tetapi sebagai *warning*, itu bagus, meskipun secara sadar ICMI dirancang untuk tidak menjadi sektarianis. Secara intern juga tidak ada aliran apa yang harus diperjuangkan. Hanya, karena sudah terlanjur dikhawatiri, dicurigai, mekanisme pertahanan psikologisnya jadi agresif. Sebetulnya, tidak perlu takut terhadap ICMI. Apalagi bila figur yang dilihat adalah Habibie dan Wardiman. Liberal betul dia. Wardiman itu berkali-kali bilang pada saya, untung kita ini ada Gus Dur, sekalipun ia tidak bisa terbuka. Keberatan terhadap Habibie sebenarnya pada politik industrinya. Ketidacocokannya dengan beberapa kalangan *kan* soal itu.

Tapi di ICMI, NU kalah peran dibanding Muhammadiyah

Sebenarnya dari dulu kelompok Habibie berusaha untuk menarik NU agar masuk, dengan membujuk Gus Dur untuk ikut. Tapi Gus Dur menolak dengan segala alasannya. Meskipun demikian, Muhamad Thaher masuk karena usul Gus Dur sendiri. Menurut saya, NU tak perlu gusar, karena apa yang dilakukan ICMI adalah suatu tahap yang juga merupakan tahap yang dijalani bangsa Indonesia. Sekarang ini baru tahap munculnya intelektual dengan latar belakang keagamaan yang disebut “kaum modernis”. Seperti langkah modernisasi NU yang dilakukan Wahid Hasjim, yang hasilnya baru bisa terlihat 20 tahun sesudahnya. Maka, sama juga dengan ICMI, pencapaian sesungguhnya baru bisa terlihat 20 tahun lagi.

Sebetulnya, apa dan bagaimana idealisme ICMI?

Yang *pertama*, tidak ada pikiran untuk mendirikan negara Islam. *Kedua*, tidak ada semacam *catering* terhadap kelompok fundamentalis. Habibie tidak percaya itu, juga Adi Sasono. Jadi ICMI itu suatu organisasi yang Indonesia betul, hanya labelnya Islam. Namun artikulasinya belum sempurna, sehingga yang muncul semacam itu. Tapi *mainstream kan* tidak. Tadi malam saya buktikan. *Khiththah* yang dipercayakan penulisannya pada saya, terbukti disetujui secara aklamasi.

Kok, perlu bikin *khiththah* segala, seperti NDP HMI?

Mungkin yang lain-lain juga punya *khiththah*, ICMI juga ingin punya. Memang lucu, tadi malam, *kok* seperti NDP (Nilai Dasar Perjuangan). Begitu ICMI terbentuk, sebetulnya keinginan untuk itu sudah ada. Hanya belum sempat terbentuk karena dirembuk ramai-ramai. Padahal dari dulu *khiththah* selalu ditulis satu orang. Saat terbentuk dulu, proses perataan jalan ICMI, sehingga tarik ulurnya luar biasa. Saya biarkan saja. Semua mencoba membuat *khiththah* tetapi macet. Akhirnya diserahkan pada saya dengan *blank check*.

Apa pun yang saya tulis akan diterima, akhirnya ya diterima betul, ha-ha-ha.... Meskipun saya gunakan bahan-bahan yang lama juga.

Dengan terpilihnya lagi Habibie, itu mempertegas bahwa ICMI memang bergantung kepada kekuasaan?

Itu memang dilematis sekali. Di satu sisi, ada resistensi yang luar biasa terhadap ICMI. Sebagai satu simbol pergerakan umat Islam, yang bergerak ke atas, ICMI merisaukan satu golongan di atas yang sudah lama menikmati posisinya. Dengan sendirinya terjadi pergesekan. Ada yang lancar, ada pula yang sebaliknya. Karena yang di atas memiliki *upper hand*, tangan yang lebih dominan, dalam *showdown* seperti itu memiliki potensi untuk menang yang lebih besar. Karena itu orang ICMI merasa harus ada yang mewakili golongan atas itu. Tapi harganya yang dibayar ya itu, yang sekarang menjadi bahan kritik banyak orang, menyatu dengan birokrasi ini. Amien Rais, yang dulu oposan, sekarang juga masuk, karena sering seseorang tidak menyadari persoalan sebelum terlibat di dalam.

Tapi di lain pihak, kalau terus-menerus begini, ICMI akan kehilangan legitimasinya, karena ICMI mengklaim diri sebagai gerakan intelektual. Kalau saat ini, boleh dikatakan karena suasana daruratlah. Untuk itu, tidak permanen betul, sebab yang permanen yang independen betul, yang tidak tergantung. Sebetulnya ini masih merupakan kelanjutan dari kultur politik Indonesia. Mengenai beberapa orang NU yang risau karena sampai sekarang masih belum diterima Presiden? Tumbuhkanlah mental bahwa kita tidak perlu diterima Presiden. Jangan seolah-olah kurang *afdlal* ataupun kurang sah bila tidak diterima Presiden. Jadi satu organisasi yang disebut *civil society* dalam bahasa kasarnya harus cukup angkuh, atau halusnyanya punya *dignity*. Jadi ICMI juga harus begitu.

Apa bisa ICMI melepaskan diri dari ketergantungan itu?

Harus bisa.

Tapi banyaknya ICMI di birokrasi, itu yang menyulitkan?

Ya, memang itu ongkosnya tadi, karena memang tidak bisa gratis. Pengorbanan itu harus diperhitungkan secara rasional *cost benefit*-nya. Jangan membayar terlalu banyak ongkos, tetapi bagaimana *benefit* itu teraih. Kompromi itu tak terelakkan dalam budaya politik kita. Tentang itu, di ICMI ada yang bagus juga dengan pembagian kerja, sehingga tidak semua tenaga tersita untuk itu. Jadi ada *outside-insider* dan *inside-outsider* yang berfungsi menjaga gawang.

Karena banyak birokrat, ICMI dituduh sebagai kendaraan politik.

Itu sekadar ekses dan nilainya sekunder, sekalipun mungkin secara jumlah banyak. Tapi tetap disebut ekses. Bisa juga dibalik sebagai sinyalemen alat politik yang dipakai oleh atas, untuk mengatur yang bawah. Jadi semacam tumbu oleh tutup. Klop, karena masing-masing sama-sama berkepentingan. Jadi, sinyalemen tadi ekses. Tapi setiap anggota punya potensi laten cendekiawan, yang nantinya pasti akan bertanya, “*Lho*, kita ini intelektual, *kok* begini?” Kira-kira dalam bahasa yang sederhana *kan* begitu. Sekarang saja sudah mulai muncul, sekalipun tidak spektakuler, karena semua orang menyadari dilema itu. Itu salahnya orang Kristen tentang ICMI. Dulu bila sambutannya tidak semacam itu mungkin lain ceritanya. Karena begitu lahir sudah dipojokkan dengan kecurigaan, ya sudah sekalian saja begini. Mekanisme pertahanan diri *kan* begitu.

Tapi, kenapa ICMI tak pernah menyentuh masalah kerakyatan seperti kasus perburuhan atau demokratisasi?

Sebetulnya kalau kita lihat tema-tema yang ada di *Republika* sudah mengarah ke sana, bahkan dianggap cukup berani. Tetapi memang tidak sampai menggunakan jargon-jargon demokratisasi

seperti yang diungkapkan LSM independen, karena ada dilema-dilema tadi. *Republika kan* menghadapi dilema: ke atas seperti yang sudah kita tahu, ke bawah ia dianggap terlalu liberal, bahkan pernah didemo pembacanya. Karena itu ia harus pandai meniti buih, agar perahu tak terbalik, karena jalurnya sempit sekali. Tetapi memang di ICMI ada orang-orang yang berharap banyak untuk meluncur ke atas, bahkan untuk tingkat yang lebih bawah pun semua punya *vested interested*.

Apakah tuntutan itu terlalu berlebihan?

Begini. Kalau LSM yang kecil mereka itu *kan nothing to lose*. Sedangkan ICMI besar sekali taruhannya. Jadi, karena itu harus diletakkan dalam kerangka kalkulasi yang rasional sekali.

Hanya cari aman?

Ya, tidak salah kesan itu. Tapi sekarang ICMI perlu *the secure area for freedom of action*, wilayah yang aman untuk bergerak. Sebab kalau tidak aman, tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Jadi, ICMI pro *status quo*?

Kalau langsung pro *status quo* sih, tidak. Itu eksekusi dari dilema. Kalau sekarang ICMI langsung menyuarakan tuntutan demokratisasi sebagaimana lazimnya organisasi intelektual yang bersifat mengimbangi pemerintah, saat itu juga ICMI akan kehilangan banyak hal, dan tidak dapat berbuat banyak. Jadi bisa habis-habisan betul.

Apa dulu arahnya memang begitu?

Tidak, kami dulu merangkul Habibie untuk proteksi politis. Tetapi sekarang jadi semacam *political positioning*.

Itu tidak memperburuk situasi berbangsa?

Ya, bisa. Lagi-lagi Pak Harto saya lihat *outsmart*, karena beliau telah memperingatkan untuk tidak menggunakan agama sebagai kepentingan politis. Itu juga terucap dari Jenderal Feisal Tanjung.

Kini banyak jenderal santri di ABRI. Apa artinya buat umat Islam?

Kalau dari perspektif saya, Islam itu menjadi *national concern*. Tidak dalam arti untuk kepentingan orang Islam sendiri seperti dulu. Tetapi Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa, yang *notabene* Indonesia sangat lembek sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin *tough*, seperti Korea Selatan itu. Satu saat kita harus begitu kalau mau maju. Karena produktivitas terdorong dengan *high predictability*. Artinya, ada kepastian bahwa bila saya melakukan begini, yang saya terima akan begini. Sekarang tidak tentu, sehingga motivasi orang bekerja jadi lembek. Sebab yang dominan relasi, taruhannya bukan etika moral. Itu pentingnya Islam menjadi *national concern* tadi, tanpa mengesampingkan agama lain. Sebab bila masalahnya etika dan moral, itu merupakan titik-temu dari agama-agama.

Itu berkaitan dengan pidato Anda di TIM, tentang *al-hanîfiyah al-sambah*?

Persis. *Hanîfiyah* itu kecenderungan untuk mendapatkan kebenaran tanpa embel-embel, tanpa komunalisme, tanpa saya ini Muslim, saya ini Yahudi, atau Kristen. Sedangkan perkataan Islam itu sendiri *kan* dikaitkan dengan pemihakan kebenaran tanpa label. Jadi artinya universal, sehingga umat Islam ini harus mengembangkan lebih jauh bagaimana implikasi keimanannya terhadap semua nabi dan kitab suci.

Tapi, akhir-akhir ini muncul kerusuhan dengan implikasi SARA. Orang gampang mengamuk dan membakar.

Itu karena kekhawatiran seperti yang saya bilang tadi. Orang-orang Katolik di Timor Timur merasa tidak aman. Selain faktor agama, faktor kesukuan juga memegang peranan penting. Orang Islam relatif lebih terbebas dari faktor kesukuan itu. Misalnya HKBP, itu *kan* kesukuan yang muncul. Orang Islam, sekeras-kerasnya dia, tidak akan bunuh-bunuhan untuk berebut masjid. Jadi, bila orang Kristen saling bunuh-bunuhan untuk gereja, itu hanya bisa diterangkan dengan faktor suku, bukan faktor agamanya. Karena sekte-sekte itu mengikuti suku, sehingga liturginya sendiri-sendiri.

Kalau kerusuhan di Timor Timur?

Itu sebenarnya lebih merupakan efek keterkejutan dari pendidikan yang mereka terima. “Akibat tak sengaja” dari pendidikan lebih penting dari “akibat sengaja”-nya. Misalnya, satu orang dididik menjadi insinyur, tetapi akibat tak sengaja ia jadi terpelajar. Lalu muncul kesadaran baru, termasuk politik. Jadi faktor agama hanya bumbu. Sebenarnya bila mau menerapkan cara Machiavelis, dulu, begitu integrasi, orang-orang Timtim itu dibiarkan bodoh saja. Tapi itu tidak mungkin, karena kita berpancasila. Akhirnya kita didik, setelah pintar, mereka jadi tukang protes ha-ha-ha.... Hal yang sama terjadi ketika Belanda mendidik bumiputra, yang akhirnya melahirkan tokoh Soekarno, Hatta, dan tokoh yang lain.

Pemerintah telah memberi penghargaan bagi tokoh Masyumi. Itu rehabilitasi atau apa?

Secara obyektif, Prawoto dan kawan-kawannya itu sangat berjasa. Namun hal itu juga menunjukkan hilangnya trauma terhadap umat Islam. Pak Natsir belum bisa, karena dulu pernah berontak. Meski demikian, orang Masyumi optimistis. Hanya masalah waktu.

Sebenarnya, apakah itu fenomena umat Islam yang memanfaatkan momentum, atau Pak Harto ingin memainkan kartu Islam, atau simbiose mutualistis?

Saya kira begitu. Tapi kalau kita percaya pada tesis Harry J. Benda tentang siapa yang akan menggunakan siapa, pada akhirnya Islam yang akan menggunakan lawannya. Tapi Islam di sini bukan orang tetapi ide keislaman itu sendiri. Jadi orang semakin Islam sekalipun bukan orang Islam. Artinya ia semakin *committed* pada Islam. Misalnya Muhammadiyah, dulu Snouck Hurgronje memberi advis pada pemerintah kolonial agar Islam politik ditekan dan Islam budaya saja yang dikembangkan, maka Muhammadiyah masuk, *jlek*, begitu. Apa yang terjadi?

Benda menggambarkan seolah-olah api Muhammadiyah itu membakar ilalang yang sudah kering. Akibatnya, keinginan Hurgronje jadi pupus. Padahal, dulu Muhammadiyah itu musuhnya bukan NU. Kalau dengan NU, sekadar masalah khilafiyah. Tapi yang lebih gawat dengan orang Sarekat Islam, karena Muhammadiyah menerima subsidi dari Belanda, sementara sekolah-sekolahnya sendiri juga dinamai dengan nama Belanda, seperti HIS, MULO. Sehingga ada semacam konsepsi bahwa itu mendukung kolonialisme. Tapi yang terjadi tidak begitu. ICMI bisa begitu, asal dirinya sendiri kuat. Tapi kalau lemah, dengan sendirinya, ya terkurung. Salah satu kekuatannya, peningkatan wawasan tadi. Itu sebenarnya pentingnya *khiththah* itu, untuk mengetahui siapa, *sih*, kita ini. Bila sudah ada, ini menjadi *mood of life*-nya ICMI. Saya hidup karena ini. Seperti kata Descartes, *cogito ergo sum*, saya ada karena berpikir. *Nah*, saya ada karena saya punya wawasan. Sehingga ibarat ikan yang hidup di laut, yang harus kerendam di air asin, tetapi tidak menjadi asin. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. [❖]

ISLAM INDONESIA BISA DIBENTUK¹

Berkembangnya varian Islam, selaras dengan semakin luasnya penganut Islam. Konteks sosio-kultural menjadikan Islam memiliki berbagai warna yang pada akhirnya menjadi kekayaan Islam. Nurcholish Madjid, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pembaru Islam Indonesia, coba memandang perkembangan Islam di tanah air. Di bawah ini petikan wawancara Nurcholish Madjid dengan wartawan *TIRAS*, A. Dhomiri.

Bisakah Islam Indonesia, suatu saat dijadikan mode alternatif?

Bisa. Saya katakan bahwa Islam Indonesia sekarang ini masih segar. Karena itu, masih bisa dibentuk. Kalau cara membentuknya benar, Islam Indonesia bisa merupakan alternatif. Atau kalau tidak mau dikatakan alternatif, ya semacam tambahan varian, terhadap varian yang sudah ada, yaitu varian Arab dan varian Persia. Jadi Islam kita ini bisa menampilkan tambahan Asia Tenggara atau varian Melayu.

Anda optimis Islam Indonesia bisa menjadi alternatif?

Saya khawatir betul harapan itu tidak terwujud, karena kemampuan intelektual kita masih sangat rendah. Islam di Indonesia

¹ Majalah *TIRAS*, "Islam Indonesia bisa Dibentuk", No. 6/Tahun 1/9 Maret 95. Pewawancara A. Dhomiri.

adalah Islam yang paling sedikit memberikan kontribusi kultural dan intelektual. Boleh dikata sampai sekarang masih konsumen. Belum pernah menjadi produsen. Sementara Islam India, meskipun hanya minoritas, mereka jauh lebih produktif dibandingkan dengan Indonesia. Lihat saja kitab yang mereka karang berjumlah puluhan ribu. Contoh lain, orang Iran misalnya, kalau menulis buku berjilid-jilid.

Di Indonesia sendiri?

Mana ada orang Indonesia seperti itu. Hanya satu dua saja. Seperti Buya Hamka. Dan Anda bisa lihat, tingkat orisinalnya itu tidak setinggi orisinalnya orang Iran. Di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Jadi Indonesia itu Islamnya masih muda. Karena masih muda, belum diakui mempunyai eksistensi sendiri. Contoh, di Barat studi Islam selama ini selalu dibagi dua. *Pertama*, Islam dalam lingkungan budaya Arab. *Kedua*, Islam dalam lingkungan budaya Persia. Yang masuk budaya Arab, adalah negara-negara sejak dari Maroko hingga Bahrain. Sedangkan yang masuk budaya Persia adalah Islam yang masuk kategori kontinental, mulai dari Turki hingga Bangladesh. Masuk kontinental karena pengaruh yang terbesar adalah budaya Persianya.

Mengapa dunia Barat bila menengok Islam di kawasan Timur Tengah selalu dengan wajah yang kurang ramah. Sementara, jika melihat Islam Indonesia, dianggapnya lebih bisa berdialog?

Asumsi itu sendiri patut ditanyakan karena anggapan itu simplisistis. *Pertama*, Islam di kawasan Timur Tengah sendiri penduduknya ratusan juta, dan 99,9% bukan teroris. Oleh karena itu stereotip. Dan yang mengatakan itu teroris, ia sendiri sebenarnya teroris. Teror terhadap Islam. Karena itu harus dilawan sekuat-kuatnya.

Maksudnya?

Itu cara orang Barat menakut-nakuti orang Islam, bahwa orang Islam teroris. *Nah*, soal Islam Indonesia bisa berdialog dengan Barat, itu pun cuma kesan saja. Sebenarnya, semua Islam bisa berdialog dengan Barat. Di antara negara Islam yang paling erat berdialog dengan Barat, itu *kan* Arab Saudi. Tidak ada negara Islam lainnya, termasuk Indonesia, yang lebih dekat dengan AS, kecuali Arab Saudi. Kemudian, kalau soal Islam Indonesia bisa ditawarkan kepada yang lainnya, sebenarnya semua model Islam itu bisa ditawarkan. Termasuk pemahaman Islam model Indonesia. Kalau Indonesia sering disebut begitu cukup menarik, karena memang selama ini belum berperan.

Mengapa?

Asia Tenggara ini belum diakui karena masih sedikit kontribusi kultural dan intelektualnya. Anda bisa bandingkan, meski Indonesia mayoritas Islam, tetapi kalau orang luar masuk Indonesia datang sebagai turis yang mau dilihat itu budaya-budaya Hindu dan Budha, seperti Borobudur, Prambanan, Bali, dan sebagainya. Kalau India lain, meski Islamnya minoritas, tetapi kalau datang ke India sebagai turis, yang dilihat bangunan Islam. Itu suatu contoh. ^[❖]

RINDU KEHIDUPAN ZAMAN MASYUMI¹

Nurcholish Madjid sangat merindukan demokrasi. Ia juga mendambakan kehidupan umat Islam seperti di zaman Masyumi, tapi bukan untuk mendirikan negara Islam. Gagasan-gagasannya dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat selalu mengundang perhatian dan sering pula melahirkan sikap kontroversial. Baginya pembaruan pemikiran Islam merupakan keharusan. Tetapi pikiran-pikiran yang digulirkan Cak Nur, selalu mengundang pro dan kontra, karena jalan yang ditawarkan dianggap terlalu progresif, seperti tawaran sekularisasi dan penolakan terhadap negara Islam.

Gagasannya banyak ia salurkan dalam forum pengajian Paramadina. Kepada wartawan *AMANAHAH*, Ahmad Muzani dan Sholihul Hadi, Cak Nur menceritakan banyak hal. Berikut ini petikan wawancaranya.

Banyak warga masyarakat yang menuduh MPR hasil pemilu 1992 didominasi kelompok hijau (Islam). Mereka menyebutkan dengan “*ijo royo-royo*”. Dan Anda kini adalah salah satu anggota MPR. Bagaimana Anda merasakan hal itu.

Tuduhan itu benar dilihat dari segi lahiriah, sebab mereka teman-teman saya. Tapi itu sangat wajar karena bertemunya a kondisi

¹ Majalah *Amanah*, “Rindu Kehidupan Zaman Masyumi”, 11-24 Januari 1993. Pewawancara Ahmad Muzani dan Sholihul Hadi.

obyektif dan keinginan subyektif. Jelasnya, ada faktor Pak Harto dan ada keinginan masyarakat. Dan itu hasil dari sebuah proses panjang yang merupakan efek dari kesepakatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan di tahun 1950. Ketika itu dinyatakan bahwa sekolah agama akan mendapatkan pendidikan umum dan sekolah umum akan mendapatkan pendidikan agama. Sehingga banyak orangtua yang santri memasukkan anaknya di SD, karena mereka tidak mempunyai beban psikologis lagi.

Efeknya pada tahun 1960 jumlah BA (*Bachelor of Art*) berlimpah, dan pada tahun 1970 jumlah sarjana banjir. Tetapi ketika itu mereka disibukkan dengan urusan pribadi. Ada yang mencari kerja, ada yang mau kawin dan sebagainya. Pada tahun 1980-an, mereka mulai menoleh keluar, sehingga di mana-mana terjadi gejala Islam, baik di kantor, hotel dan lain-lain. Tapi gejala itu masih bersifat sosial. Baru pada tahun 1990 terasa adanya nuansa politis. Dan itu merupakan pertumbuhan yang sangat wajar. Bila dibendung maka akan sangat berbahaya, karena hal itu merupakan tindakan melawan arus. Pak Harto sebagai orang yang terlibat dalam proses pembangunan cukup mengerti, sehingga beliau pun setuju berdirinya ICMI, selain beliau merasa cukup aman bergaul dengan umat Islam. Oleh karena itu apa yang disebut “hijau” merupakan sesuatu yang sangat wajar, dan itu akan terus berlanjut menuju kepada keseimbangan baru. Sebab sekarang keadaan memang belum cukup berimbang.

Apa karena kondisi obyektif itu Anda terlalu terlibat dalam proses berdirinya ICMI?

Saya termasuk perintis, oleh karena itu saya paling sakit hati, jika dibilang ICMI adalah organisasi hasil rekayasa dari atas. Dan mana kesimpulan itu? Kita bertahun-tahun merintis hal itu tapi selalu gagal. Pernah dicoba dengan pertemuan di Yogya, tapi di tengah jalan dibubarkan polisi. Kalau kemudian anak-anak Malang mendekati Habibie, dan kemudian didukung teman-teman, itu

faktor kebetulan saja. Kalau seandainya tidak mendapat dukungan dari atas pun tidak berarti hal itu tidak terjadi, namun hanya akan tertunda satu atau dua tahun.

Tapi keterlibatan Anda dalam ICMI apa tidak bertentangan dengan ide-ide Anda, yang ingin menisbikan simbol-simbol keagamaan dengan “Islam yes dan Partai Islam no”, misalnya?

Tidak *dong*, karena kita melihatnya dari segi institusionalisasi. Dan efek yang diharapkan adalah transformasi mental dari sikap oposisi kepada sikap yang lebih positif. Ibarat permainan bola, penonton *kan* suaranya seringkali lebih keras ketimbang pemain. Tapi coba penonton disuruh main, pasti mereka akan diam. Seberat-berat mata memandang masih berat bahu memikul. Dengan kata lain, selama orang masih menderita mentalitas luar pagar, maka mereka akan mempergunakan retorika. Dan hal itu, akan semakin menarik apabila disertai dengan kecaman, sebab yang digugah adalah emosi.

Jadi Anda melihat ada pertemuan ide, antara gagasan yang selama ini Anda pikirkan dengan ICMI?

Ya, tapi titik fokusnya tetap pada relativitas kehidupan politik. Artinya, dengan adanya ICMI orang-orang yang tadinya di luar pagar kini mereka masuk semua. Bahkan mereka kini mengerti tentang problem negara, karena dekat dengan kekuasaan. Dengan begitu dalam menilai sesuatu menjadi relatif dan selalu dalam konteks. Kondisi seperti itu penting, karena problem kita adalah pengalihan kekuasaan secara damai dan konstitusional. Ini belum pernah kita alami.

Sebab jika dalam lima tahun mendatang terjadi peralihan kekuasaan secara tidak damai dan terjadi pertumpahan darah, hal itu sangat berbahaya. Sebab kita akan terjebak dalam eksperimen terus entah sampai kapan. Sehingga apa yang dikatakan Simatupang,

yakni Amerika Latin sebagai deretan peralihan kekuasaan berdarah, akan juga benar. Untuk menghindari hal itu, maka masyarakat harus terlatih untuk berpikir bahwa siapa pun boleh menjabat presiden asal memenuhi syarat. Karena itu perlu relativitas atau penisbian politik. Jadi politik tidak totaliter, yakni perasaan bahwa dirinya yang paling benar. Sebab inilah pangkal terjadinya *clash*.

Tapi Gus Dur, sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada ICMI, akan perlunya kesamaan dalam alam demokrasi dan dihormatinya pluralisme. Dan ICMI dalam pandangan Gus Dur arahnya sektarian.

Secara makro Gus Dur itu banyak sekali berbuat untuk masyarakat, oleh sebab itu baik di dalam atau di luar negeri saya selalu membelanya. Tapi secara mikro, banyak sekali yang saya tidak sependapat. Misalnya ketika dia menuduh ICMI cenderung sektarian. Tapi walau begitu, sikapnya yang oposisi terhadap ICMI saya kira bagus. Karena ICMI memang perlu oposisi, lepas dari motifnya. Apakah dia melakukan itu betul-betul dalam kerangka demokrasi, atau karena sentimen lainnya. Bagi saya itu tidak penting, tapi yang perlu adalah hasil akhirnya.

Oleh karena itu saya tidak pernah memperdulikan kalau ada yang mengatakan bahwa Gus Dur terus-menerus mengkritik ICMI karena dia tidak dilibatkan sejak awal. Terserah saja, saya tidak menghiraukannya. Yang pasti ada orang yang berperan sebagai oposisi, dan itu harus dihormati. Bila sejak awal kita tidak bersikap seperti itu, maka kita tidak akan bisa berlaku demokratis.

Tapi bagaimana dengan tuduhan Gus Dur yang menyebutkan bahwa para pengurus ICMI adalah orang-orang yang mempunyai ambisi.

Kalau saya rileks saja. Biarin saja kalau memang dalam proses mengharuskan tampilnya orang-orang semacam itu. Saya sendiri

sedikit menjauh dari ICMI, sebab bagi saya ICMI tidak lagi berkaitan dengan persoalan “luar pagar”, karena saya telah terlatih hal itu sejak dulu. Tapi bagi mereka yang belum terbiasa dengan persoalan “luar pagar” atau teman-teman menyebutnya “hijrah mental” yang penting masuk dulu. Sebab dari situ mereka akan tahu arti penisbian, di mana kalau benar kita dapat mengatakan dengan bebas bahwa hal itu memang benar, demikian juga kalau salah.

Sikap seperti itu akan terbentuk apabila kita mengakui adanya oposisi, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan pers. Karena itu sistem pemilu harus diubah, saya tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas, sistem sekarang ini harus diarahkan kepada cara yang memungkinkan seorang wakil rakyat tahu betul-betul rakyatnya. Artinya, dia tahu daerah pemilihannya dengan jelas, dia mewakili siapa. Sehingga kalau ada rakyat bertanya, apa yang dapat dia perbuat selama menjadi wakil rakyat, jawabannya cukup jelas. Sistem distrik itu jelas sekali. Misalnya saya dipilih oleh orang Jombang, ketika reses saya pulang ke Jombang. Di situ saya dapat sampaikan hasil kerja saya selama di parlemen. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, saya bisa bawa masalah itu ke dewan.

Tapi kalau sekarang mereka wakil siapa? Kalau pimpinan partai bilang begini, mereka nurut begini. Ini yang menjadi sumber banyaknya tuduhan bahwa DPR kurang berfungsi. Sebagai misal, lima tahun yang lalu saya menjadi anggota badan pekerja MPR. Masya Allah, ada juru bicara dari salah satu fraksi yang kualitasnya sangat rendah sekali. Saya sendiri mendengarnya malu, sebab dengan juru dakwah di kampung sini saja belum tentu dia lebih baik. Soalnya mereka itu nama-nama yang didrop dari pimpinan, sehingga belum tentu memahami persoalan di daerah pemilihannya, sebab rakyat memilih tanda gambar, bukan memilih orang yang benar-benar dianggap dapat menjadi wakilnya.

Maka ketika Naro lima tahun yang lalu dicalonkan menjadi wakil presiden, saya mendukung. Tapi sejak awal sudah saya beri tahu. “Jika terjadi pemilihan maka saya tidak akan pilih Anda.”

Tapi keberanian itu menurut saya bagus, meski sebenarnya hal itu sudah dilontarkan sejak awal (kampanye), agar rakyat terbiasa dengan pilihan alternatif. Tapi untuk sekarang karena pertumbuhan masyarakat mengharuskan begini, maka kita tolerir saja dulu. Sebab mempertimbangkan ongkos yang harus kita bayar. Kita menghendaki stabilitas, berlangsungnya pemangunan, maka semua itu harus mempertimbangkan ongkos.

Jadi Anda tidak mengingkari adanya kepentingan politik tertentu dalam tubuh ICMI, terutama dari para pengurusnya?

Saya tidak mengingkari hal itu. Bahkan orang-orang dalam ICMI sendiri sudah mengatakan hal itu. Misalnya jumlah anggota ICMI yang duduk di parlemen cukup banyak. Tapi semua itu sebenarnya kebetulan, sebab terbentuknya ICMI sendiri sangat anekdotal. Malah Amien Rais justru tidak terlibat sejak awal. Watik Pratiknya juga tidak tahu. Oleh sebab itu jika ada orang yang paling berbahagia dengan terbentuknya ICMI, Imaduddin-lah orangnya. Dan ICMI terbentuk karena adanya keinginan dari bawah dan spontanitas dukungan Pak Harto.

Habibie sendiri sebenarnya ketika diminta oleh anak-anak Malang untuk berbicara dalam seminar, menolak. Bahkan cenderung tersinggung dengan mengatakan, “Kalian ini ada-ada saja, saya *kan* bukan ahli keislaman”. Tapi kemudian diingatkan oleh Pak Alamsjah dan Pak Saleh Afiff. Karena dia sebagai pembantu presiden akhirnya dikonsultasikan masalah itu kepada Pak Harto. Sebelumnya saya diminta untuk menuliskan draft menyiapkan berdirinya ICMI. Sebenarnya saya mengusulkan nama ISMI (Ikatan Sarjana Muslim Indonesia) yang dalam bahasa Arab, berarti “nama saya” atau “inilah saya”. Tapi oleh Pak Habibie diganti dengan cendekiawan, maksudnya agar tidak terikat dengan formalitas. Tapi saya kira itu benar.

Kepada Pak Harto pun dia masih menolak, akhirnya ditunjuk Pak Munawir, Pak Azwar, Pak Rudini, Pak Fuad, Pak Sumintapura,

Pak Baiquni dan saya, untuk membantu. Tapi Habibie masih juga menolak, alasannya kalau menjadi ketua organisasi dia akan terpisah dari Pak Harto dan dia merasa tidak tahu banyak tentang keislaman. “*Lho, kenapa harus berpisah. Kamu tidak sendirian ngurus organisasi,*” jawab Pak Harto seperti ditirukan Pak Habibie, lalu Pak Harto mengatakan, “Kalau kamu masih ragu, maka kamu saya perintah untuk memimpin,” Pak Harto memberi intruksi.

Jadi kelahiran ICMI benar-benar dari bawah. Ketika orang berpikir Habibie yang terkesan adalah teknologinya, bukan politik. Dia menjadi idola di kalangan anak-anak karena kecerdasannya. Oleh sebab itu ketika para wartawan terutama dari luar mengatakan bahwa ini proyek politik, saya marah besar. Mereka menyebutnya ini tingkah laku Soeharto untuk memperoleh karcis Islam (*Islamic ticket*). Kalaupun kemudian sekarang terjadi langkah-langkah politik, menurut saya itu kebetulan saja. Kalau kita tahu akan terjadi begini dan boleh memilih, saya memilih menunda berdirinya ICMI. Tapi itu *kan* berarti akan mentah lagi, karena memang sudah waktunya.

Sampai ada pengurus ICMI pusat yang mengatakan, dulu ICMI ditakuti oleh orang-orang non-Islam karena mereka membayangkan akan menjadi gerakan ilmiah dan intelektual yang besar. Tapi sekarang mereka menertawakan kita karena ternyata itu-itu saja (politik). Saya cuma tertawa. Sebab menurut saya perubahan ke arah politik itu bukan tujuan, namun kebetulan. Oleh karena itu teman saya tadi mengatakan, biarkan saja ICMI berkembang seperti sekarang, sambil menunggu di antara mereka siapa yang menjadi menteri dan lain sebagainya. Baru setelah itu ICMI kita ambil kembali dan kita luruskan sampai betul-betul menakutkan orang.

Ada anggapan, bahwa ICMI sebagai Masyumi muda. Menurut Anda bagaimana?

Kalau yang dimaksud adalah Masyumi tahun 50-an, di mana masih bersifat inklusif dalam pergaulan tidak saja dengan

NU, tapi juga dengan PNI, PSI, Parkindo, Partai Katolik. Sebab pergaulan itu *platform*-nya adalah demokrasi modern. Dalam hal itu justru saya sangat menyesalkan, karena orang Masyumi ternyata tidak menulisnya, sehingga terkesan, kiprahnya dilakukan secara *accident*. Barangkali karena mereka terlibat dalam revolusi, sehingga tidak sempat menulisnya. Padahal kalau itu ditulis akan mudah diwariskan kepada generasi berikutnya.

Rumah Pak Prawoto (almarhum) di Jalan Kertosono IV, itu diperoleh antara lain atas bantuan Pak Kasimo (I.J. Kasimo), tokoh Katolik. Mungkin karena mereka merasa sesama pejuang. Demikian juga Pak Roem. Dia selalu mengadakan ulang tahun tapi yang diundang bukan para kiai, justru orang-orang seperti Simatupang dan sebagainya. Dan beliau melakukan itu tanpa stigma, rintangan batin. Situasi seperti itulah yang saya rindukan. Maka sebenarnya kalau saya boleh mengklaim sayalah Masyumi muda, tapi Masyumi tahun 50-an itu. Anehnya orang-orang Masyumi sendiri tidak suka.

Memang benar kalau dikatakan bahwa saya sedang menghidupkan situasi Masyumi tahun 50-an. Tapi karena *by accident*, sehingga akan sangat rawan. Sebab kita akan dihapus begitu saja oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah. Karena itu yang saya lakukan adalah mengembalikan penalaran intelektual. Maka argumen yang saya pakai sekitar pluralisme, inklusivisme, toleransi, saling menghargai, relativisme politik dan sejenisnya. Semua itu muaranya pada demokrasi. Apalagi kalau dari kaca mata orang-orang Cornell, Masyumi itu *kan* kampiun *western democracy*. Tapi lagi-lagi Masyumi tahun 50-an yang liberal, inklusif dan demokrat. Bukan Masyumi tahun 60-an, yang terobsesi mendirikan negara Islam.

Soalnya halangan saya masalah retorika. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah Masyumi, karena akan banyak rintangan. Apa gunanya saya mengatakan hal itu, padahal saya selalu mengatakan bahwa simbol itu tidak penting. Sebab kalau saya melakukan hal itu berarti saya mementingkan simbol.

Dan kondisi sekarang sudah berbeda. Misalnya 20 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan ceramah sekularisasi di TIM, reaksinya luar biasa. Tapi ketika saya menyampaikan makalah kembali pada bulan Oktober 1992, reaksinya terasa dingin sekali seperti es. Sebab seperti itu dulu saya ladeni, tapi sekarang suasananya sudah jauh sama sekali. Itu artinya apa yang kita cita-citakan kalau tidak besok, mungkin lusa atau minggu depan akan dapat terlaksana. Oleh karena itu dalam masyarakat harus ada orang seperti Gus Dur, yang dalam soal makro dia luar biasa. Dia tidak mempedulikan dirinya sekalipun hancur untuk mementingkan sesuatu yang makro.

Tapi Ridwan Saidi menulis di beberapa media mengkritik Anda secara tajam. Mengapa Anda tidak menanggapi?

Percuma saja, *tob* akhirnya akan menjadi polemik. Mereka sudah berkeinginan begitu *kok*, maka apa pun yang saya katakan mereka akan menanggapi menurut keinginannya. Niatnya *kan* bukan untuk dialog. Tapi penjelasan saya lebih banyak dengan lisan di berbagai kesempatan, misalnya lewat Paramadina, atau dalam buku-buku. Tapi memang susah berbicara kepada orang yang tidak tahu khazanah intelektual, walau yang saya katakan belum tentu benar. Tapi *kan* saya membaca kitab-kitab kuning. Oleh karena itu yang selalu lebih dulu paham adalah para kiai di pesantren, soalnya mereka tahu kitabnya. Dan tanggapan mereka sangat positif.

Tapi tampaknya orang-orang Masyumi tidak bisa menerima pemikiran Anda, bahkan ada kesan oposisi. Apa Anda juga merasakan hal itu?

Ya, mereka adalah Masyumi pasca pemilu tahun 1955, yakni Masyumi yang berobsesi negara Islam. Mereka terkungkung oleh retorikanya sendiri di konstituante. Mestinya ketika mereka gagal memperjuangkan negara Islam, Masyumi segera kembali kepada

awal 50-an, yakni kembali kepada demokrasi. Dan Kabinet Natsir, itu *kan* kabinet yang demokrat betul.

Dulu kita pernah mencoba berdialog dengan Pak Prawoto, tapi pendirian beliau memang beda dengan kita. Misalnya beliau ingin menghidupkan kembali Masyumi, walau hanya sehari sesudah itu dibubarkan kembali. Itu *kan* alasan yang legalistis. Sebab beliau berpendirian pembubaran Masyumi tidak melalui prosedur yang sah. Buat kita tentu saja tidak begitu. Buat apa berdiri kalau hanya untuk dibubarkan, biayanya terlalu mahal. Tapi ya, Pak Prawoto *kan* seorang ahli hukum.

Kepada Pak Natsir kita juga pernah bertemu. Ketika menjadi Perdana Menteri, beliau berkunjung ke Pakistan. Dalam pidato-pidatonya beliau selalu mengatakan bahwa Pakistan dan Indonesia itu sama. Kalau Pakistan didirikan atas dasar Islam, Indonesia didirikan atas dasar Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tauhid. Semua orang tahu karena peristiwa itu direkam dan disebarluaskan. Tetapi setelah sampai di sini (Indonesia) beliau tidak berani mengelaborasi, takut bertentangan dengan teman-temannya sendiri seperti Isa Anshari. Ini yang saya sesalkan. Pernah beliau kita undang untuk berdiskusi soal ini, namun beliau menolaknya. Akibatnya yang tinggal adalah cerita Masyumi dulu, yang tidak ada otentifikasinya. Saya dan teman-teman merasa jalan pikiran Masyumi itu seperti yang sekarang kita kembangkan dalam Paramadina. Dan itu *kan* sah-sah saja. Sebab saya ini anak Masyumi. Bapak saya Masyumi tulen meski ibadahnya NU, dan ibu saya seorang kampanyewati Masyumi.

Tak heran ketika saya tampil di TIM saya dituduh PNI. *Wong* Pak Natsir saja dulu dituduh Pak Roem terpengaruh Syahrir yang PSI. Waktu itu, saya, Pak Roem dan Pak Anwar Haryono satu mobil turun dari Puncak. Sepanjang jalan beliau membicarakan Masyumi, dan yang paling disesalinya adalah Masyumi partai besar tetapi ketuanya dikalahkan oleh partai kecil yaitu PSI. Itu misalnya dapat terbaca dalam surat-surat saya kepada Pak Roem dari Chicago.

Apa sebenarnya obsesi Anda yang hendak dicapai tentang Indonesia dan umat Islam melalui ide-ide yang dianggap orang kontroversial itu?

Indonesia yang akan datang itu seperti sosok santri yang canggih. Kenapa santri? Sebab santri itu egaliter, terbuka, kosmopolit dan demokratis. Dan ini merupakan pola budaya pantai, sebab sekarang kita masih didominasi oleh pola budaya pedalaman (*in land culture*). Dengan kata lain, suatu penampilan Islam di zaman modern yang menyerap secara konstruktif dan positif kehidupan modern, namun semuanya tetap dalam nilai-nilai keislaman. ^[*]

ROMANTISME MASA LALU¹

Berbicara masalah pemikiran Islam klasik saat ini, untuk Indonesia, Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan sebagai satu sandaran referensi. Cak Nur, panggilan akrabnya, mendalami filsafat Islam klasik. Pendalaman terhadap filsafat Islam klasik, didukung oleh pengetahuan yang baik terhadap bahasa Arab, Inggris, Prancis dan Persia. Perangkat kebahasaan yang dimilikinya, sangat membantu untuk menelusuri kitab-kitab penting dari mata air sejarah Islam. Badri Yatim dan Iqbal Abdurrauf Saimima (almarhum), mencoba menguak persoalan tersebut melalui percakapan dengan Nurcholish Madjid, yang oleh majalah *TEMPO* (almarhum), disebut sebagai lokomotif penarik gerbong pembaruan Islam.

Apa perbedaan fundamental antara Ahli Sunnah dan Syi'ah?

Perbedaan terpenting terletak pada konsep *'ishmat al-imâmah*, imam itu ma'shum. Hal itu mempunyai pencabangan (*ramification*) atau *multiplying effects* yang banyak sekali, antara lain, bahwa orang Syi'ah mudah dipimpin oleh seorang imam. Tentu berawal dari persoalan Ali lawan Mu'awiyah. Golongan ini terbagi menjadi beberapa golongan lagi. Yang paling ekstrim adalah golongan Mu'allihah (Menuhankan) yang mengatakan, "Ali itu Tuhan". Ada lagi golongan yang mengatakan "Ali itu Nabi", al-Ghulat. Ada pula golongan yang disebut al-Rafidlah, yang menolak kekhalifahan Abu

¹ Majalah *Panji Masyarakat*, "Ah, Itu Cuma Romantisme Saja", No. 513 Th XXVII 1986. Pewawancara Badri Yatim dan Iqbal Abdurrauf Saimima.

Bakar, Umar, dan Usman. Golongan lain disebut al-Mufadlilah, golongan ini mengutamakan Ali ibn Abi Thalib daripada para sahabat yang lainnya.

Namun, yang umum adalah paham al-Rafidlah. Ajaran agamanya cukup rumit, pokoknya, bahwa tidak ada orang yang dapat menerangkan ajaran Tuhan kecuali orang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Hubungan itu hanya bisa atas dasar wasiat yang terjadi secara turun-temurun dari *ahl al-bayt*. Paham ini membawa implikasi politik, orang Syi'ah menjadi cenderung monolitik.

Sementara itu Sunni terbuka sekali, karena mereka merelatifkan manusia. Apalagi kalau Ibn Taimiyah kita ikuti. Nabi saja menurutnya, bisa salah, kecuali dalam tugas menyampaikan wahyu, "*wa-mâ alayk-a illâ al-balâgh al-mubîn*", tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Nabi bisa salah. Buktinya, Tuhan banyak menegur Nabi Muhammmad. Ibn Taimiyah meskipun ekstrim, adalah Sunni.

Perbedaan yang lain adalah akibat dari perjalanan sejarah golongan Syi'ah sendiri. Secara historis, Syi'ah sedikit sekali mengalami sukses politik, (seperti Safawid dan Fathimiyah). Akibatnya, di kalangan Syi'ah muncul messianisme yang lebih kuat daripada dalam golongan Sunni.

Apakah perbedaan itu berkaitan dengan *ushûl* atau *furû'* ?

Ya, ada perbedaan *ushûl* dan ada pula perbedaan *furû'*. Yang saya sebut tadi, berkenaan dengan *ushûl*, apalagi kalau konsep *'ishmah* itu dihadapkan kepada tauhid, yang salah satu implikasinya adalah bahwa yang mutlak itu hanya Allah. Tapi juga ada perbedaan *furû'* yang tidak usah mengganggu hubungan antara Sunni dan Syi'ah.

Meskipun terdapat perbedaan *ushûl*, namun adalah tidak mungkin bahwa "Syi'ah itu kafir". Mereka membaca al-Qur'an dan sembahyangnya sama dengan kita. Al-Ghazali pernah bilang, "kalau orang sudah percaya kepada Allah, kepada Kitab-Nya dan hari kemudian — termasuk seperti Ibn Sina yang tidak mempercayai

Hari Kebangkitan — maka dia adalah Muslim”. Ibn Sina pada prinsipnya percaya, tetapi persoalannya terletak pada takwil.

Al-Qur’an sendiri — setidaknya-tidaknya menurut tafsir Muhammad Asad — menyebutkan bahwa para pengikut Nabi Muhammad, Yahudi, Kristen, dan Shabi’ah, yang beriman pada Hari Akhir dan berbuat baik, mereka itu mendapat pahala. Oleh karena itu Muhammad Asad berpendapat, “sebetulnya relijiusitas hanya tiga itu; percaya pada Allah, percaya pada Hari Akhir dan berbuat baik”. Tapi umat Islam tidak terbiasa berpendapat demikian, karena Islam sudah lama menjadi parokialistik.

Sekarang tinggal bagaimana kita memahami apa itu ushul. Yang *ushûl* itu: Allah, Hari Kemudian, dan Berbuat Baik. Namun penafsiran terhadap yang tiga itu, juga masih banyak perbedaan, bahkan di kalangan Sunni itu sendiri. Masalahnya kemudian, terletak pada percaya atau tidak?! Kalau tidak, ya kafir. Begitu juga pada Hari Akhir, yang mengimplikasikan tanggung jawab final.

Dalam perjalanan sejarahnya, baik Sunni maupun Syi’ah mengembangkan tradisi intelektual yang berbeda. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi keagamaan dan intelektual Syi’ah? Dan mungkinkah terjadi dialog antara dua golongan ini?

Salah satu ciri tradisi intelektual Syi’ah adalah kuatnya takwil, kuatnya interpretasi metaforis terhadap ajaran agama. Lihat saja pemikiran Ali Syari’ati, itu hanya intelektualisasi, pemikiran deduktif, karena itu orang Syi’ah lebih spekulatif daripada orang Sunni. Dan oleh karena itu, juga lebih abstrak, dan *receptive* kepada filsafat. Itulah sebabnya, pada saat tradisi filsafat telah mati di kalangan Sunni, justru di kalangan Syi’ah terus berkembang. Itu merupakan suatu *mazîyah*, suatu kelebihan yang seharusnya tidak hanya dinikmati Syi’ah saja tetapi juga Ahli Sunnah.

Contoh, Jamaluddin al-Afghani. Ia sebenarnya lahir di Asadabad, Iran. Tetapi dia menggunakan nama al-Afghani, agar diterima oleh pihak Sunni di Mesir. Jadi ia Syi’i. Oleh karena itulah, ia menjadi

seorang reformer, sebab pemikirannya spekulatif, sangat terpengaruh pemikiran filsafat. Pemikirannya ini, kemudian mempengaruhi murid-muridnya, seperti Muhammad Abduh. Artinya, pembaruan Islam di kalangan Sunni, bisa dikembalikan pada tradisi intelektual Syi'ah. Karena itulah Muhammad Abduh pernah menjadi sangat kontroversial. Padahal golongan Sunni pada waktu itu, belum terbiasa dengan hal demikian.

Nah, kita boleh tidak setuju dengan tradisi Syi'ah ini, tetapi jangan melakukan sensor, baik sensor orang, maupun sensor buku, sensor pemikiran. Sebab kita harus punya *confidence* kepada diri sendiri. Karena itu menurut saya, Syi'isme itu sendiri *nothing wrong with it*, yang salah adalah — karena saya tidak setuju — Khomeinisme. Keberatan kita terdapat beberapa faktor, misalnya klaim otoritas mutlaknya.

Menurut sejarahnya yang asli, Sunni itu sebut sajalah akomodatif; semuanya diakomodir. Karena akomodatif itu, semua orang setuju dan menjadi paham mayoritas. Jadi sikap kita sebagai Sunni, juga harus demikian. Gampangnya adalah bahwa Sunnisme itu inklusivistik.

Oleh karena itu, dialog antardua golongan ini sangat mungkin sekali. Dalam Kristen saja ada gerakan Oikumene, padahal perbedaan antara Syi'ah dan Ahli Sunnah tidak seprinsipal antara Katolik dan Protestan. Saya kira rintisan itu, sudah ada, di al-Azhar (Mesir).

Setelah berhasilnya Revolusi Islam Iran, banyak negara Muslim yang khawatir terhadap usaha Iran untuk mengekspor revolusinya, kayaknya termasuk Indonesia. Beralasankah kekhawatiran itu? Bagaimana dengan Indonesia itu sendiri?

Beralasan atau tidak bisa dilihat dari beberapa segi. Misalnya, kalau soal agama kita kesampingkan. Suatu revolusi adalah suatu terobosan untuk mengatasi suatu ketidakadilan. Maka masyarakat yang tidak adil, akan rawan terhadap suatu revolusi. Kalau agama

kita masukkan sebagai faktor yang menentukan, maka ada tesis bahwa Revolusi Iran dimungkinkan karena memang orangnya Syi'i, di mana mobilisasi lebih mudah karena adanya konsep *'ishmat al-imâm*. Sementara di kalangan Sunni, tidak ada. Orang Sunni cenderung mengalami atomisasi. Artinya walaupun terjadi revolusi di tempat lain, saya kira Khomeinisme tidak lantas dibawa ke sana. Misalnya terjadi di Saudi, justru yang muncul mungkin adalah Wahabisme.

Di Indonesia juga demikian. Masyarakat yang tidak adil, selalu terancam revolusi. Oleh karena itu masalah ketidakadilan itu yang harus dijadikan tumpuan reformasi.

Bagaimana tentang pemahaman Syi'ah di Indonesia? Kalau ada, apa indikasinya yang Anda lihat?

Saya tidak tahu persis, apakah Syi'ah ada di Indonesia. Tapi mungkin, dulu ada, karena islamisasi di Indonesia melalui orang-orang Persia atau daerah yang berbudaya Persia, dari Persia ke Timur, termasuk India. Jadi ada unsur-unsur Syi'isme di Indonesia. Buktinya ada perayaan *Tabut* di Sumatera Barat. Ada *Syuroan* di Jawa, yang berasal dari *'âsyûrâ*. Tetapi sekarang ini, walaupun ada, bisa diabaikan, kecil sekali.

Cuma mungkin, ada romantisme anak muda, karena ingin mengidentifikasi dirinya kepada Khomeini, mau *sok* revolusioner. Yang mungkin lebih berarti adalah golongan Alawi, orang-orang Arab ningrat. Tetapi tidak benar bahwa semua habib-habib itu Syi'ah, buktinya Raja Hussein dari Yordania yang keturunan Nabi itu, juga Sunni. Begitu juga Raja Hasan dari Maroko. Kedua raja ini malah moderat. Tetapi memang orang yang mengaku keturunan Nabi, sangat simpati kepada Syi'ah, karena Syi'ah sangat mengagungkan *ahl al-bayt*. Lalu timbul sentimen-sentimen kesyi'ahan. Agaknya sentimen-sentimen itu pun ada, karena mendapat dukungan moril oleh keberhasilan Revolusi Iran.

Melihat perkembangan kultur Sunni di Indonesia dewasa ini, mungkinkah pengaruh Syi'ah, terutama dimensi imamah (politik)-nya, berkembang dan mendominasi masyarakat?

Saya kira susah sekali. Kalaupun ada yang mirip dengan sistem sosial politik Syi'ah itu, ya NU dengan adanya wibawa kiai. Tetapi kiai, tidak pernah dipersepsi tidak bisa salah. Kalau ada sikap seperti itu, bukan terletak pada doktrin, tapi karena faktor sosiologis. Padahal di Syi'ah sama dengan Katolik, meskipun seseorang itu sangat pintar, namun ia harus mengakui bahwa imam itu tidak bisa salah. Jadi menurut saya, dimensi Syi'ah berkembang di sini tidak mungkin.

Saya kira ideologi bangsa, Pancasila, cukup ampuh menangkal dimensi ini, karena adanya musyawarah. Dalam Syi'ah, dulunya tidak ada musyawarah, yang ada *wilâyat al-faqîh*. Padahal di sini, Pancasila sangat menjunjung tinggi musyawarah. Pancasila dengan interpretasi yang benar, yang terbuka, mestinya tidak akan memberi tempat kepada sistem-sistem monolitik dan otoriter, seperti halnya Syi'ah. [❖]

USKUP BELO HANYA TOKOH AGAMA¹

Gejolak yang terjadi di Timor Timur seringkali melibatkan persoalan keagamaan. Tetapi sebenarnya persoalan ekonomi, politik, dan sebagainya, juga menjadi bagian integral dari konflik yang selalu menghantui Timor Timur. Salah satu sebab lahirnya huru-hara yang terjadi di Timor Timur, akibat tak tersengaja (*unintended consequence*) kemajuan Timor Timur di bidang pendidikan dan ekonomi. Berikut ini petikan wawancara Nurcholish Madjid dengan Muarif dari Harian *Republika*.

Apa Komentar Anda soal kasus kerusuhan Timtim? Betulkah itu karena sentimen agama?

Persoalan Timtim jelas tidak semata persoalan agama, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Saya melihat salah satu persoalan itu berasal dari akibat tidak tersengaja (*unintended consequence*) kemajuan Timtim di bidang pendidikan dan ekonomi. Maksudnya, setelah berintegrasi dengan Indonesia, Timtim mengalami pembangunan besar-besaran di bidang ekonomi dan pendidikan. Bagi orang Timtim kemakmuran dan pendidikan yang diberikan Indonesia merupakan loncatan yang luar biasa.

Portugis itu benar-benar zalim. Selama 400 tahun Timtim dibiarkan bodoh, miskin, dan hanya dieksploisir Portugis. Paling-

¹ Harian *Republika*, "Uskup Belo Harus Sadar Dirinya Hanya Tokoh Agama", 13 Oktober 1995. Pewawancara Muarif.

paling Portugis hanya berhasil mengintrodusir agamanya saja secara fanatik. Karena Portugis ketika datang ke Asia Tenggara membawa permusuhan yang kuat terhadap Islam akibat dari sisa-sisa kenangan *reconquista* atau penaklukan kembali Semenanjung Iberia dari Islam ke Kristen.

Karena itu ke mana-mana baik Spanyol atau Portugis, setiap kali bertemu dengan orang Islam, asosiasinya selalu kepada musuh mereka di Semenanjung Iberia, yang biasa mereka sebut orang Moro. Kristen Katolik yang diintrodusir Portugis penuh dengan kefanatikan dan perasaan benci kepada orang Islam. Tidak mustahil stereotip-stereotip terhadap orang Islam juga tertanam kepada orang Timtim.

Kecuali menyebarkan agama, Portugis tidak berbuat apa-apa. Mereka mengeskploitir Timtim dari segi ekonomi dan membiarkan mereka bodoh. Kebetulan Portugis ini bangsa yang sangat terbelakang. Di Eropa Barat, Spanyol dan Portugis masih menunjukkan ciri-ciri Dunia Ketiga, belum memperlihatkan ciri-ciri dunia maju. Di sebuah majalah ditulis, Portugis itu miskin tapi sombong. Oleh karena itu, cara melakukan kolonisasi itu juga cara yang bodoh, primitif. Tidak seperti Belanda dan Inggris yang dikenal sebagai negara pelopor kemajuan. Ini bukan berarti penjajahan tidak jahat, tetap jahat. Tapi, *tob* bekas-bekas jajahan dari dua negara terutama Inggris, maju dari segi pendidikan.

Jadi memang mereka sengaja untuk membodohkan rakyat Timtim?

Betul, karena memang Portugis tidak mampu melakukan itu. Ekonominya saja termasuk negeri paling melarat di Eropa. Tidak banyak beda dengan negara-negara Dunia Ketiga. Barulah setelah integrasi, kita, baik karena rasa wajib sebagai suatu bangsa maupun karena kita lebih beradab dari Portugis, maka kita didik orang Timtim. Meskipun tidak bisa lepas dari pertimbangan politis, namun kenyataannya adalah Timtim kita didik dan kembangkan

ekonominya. Hal ini tampaknya memiliki efek lompatan. Lompatan ini yang menjadi sumber krisis sekarang ini.

Orang-orang Timtim masuk sekolah dengan harapan palsu. Sama dengan pendidikan kolonial dulu yang sampai sekarang belum terhapus sepenuhnya, yaitu bila selesai sekolah akan jadi pegawai negeri, jadi priyayi. Kondisi seperti itulah yang terjadi di Timtim. Maka begitu lulus sekolah mereka mendaftar. Terang saja tidak bisa tertampung semuanya.

Yang menjadi persoalan lebih gawat lagi, ketika ditolak untuk menjadi pegawai negeri — karena memang obyektif tidak ada lowongan — mereka melihat yang menduduki tempat-tempat strategis di kepegawaian bukan orang Timtim. Entah itu dari Jawa atau Sumatera. Mereka *kan* memang diperlukan di sana. Bagaimana mungkin menarik mereka sekaligus dari sana. Bisa berantakan semua. Menjadi pegawai negeri itu tidak bisa lulus sekolah langsung jadi. Itu masalah kejiwaan yang harus ditumbuhkan bersama pengalaman.

Dari segi ekonomi dengan sendirinya orang-orang dari luar itu lebih mapan. Jadi, terjadi kesenjangan ekonomi. Sementara itu, orang-orang dari luar itu berbeda agama dengan orang Timtim, terutama Islam. Tapi jangan lupa dalam proporsi yang ada di sana Kristen Protestan lebih banyak dari orang Islam. Jangan lupa pula orang Katolik lebih bermusuhan dengan orang Protestan ketimbang dengan orang Islam. Dan yang Protestan itu kebanyakan dari Batak, yang sangat agresif.

Oleh karena itu yang perlu diteliti, apakah benar peristiwa-peristiwa keagamaan itu menyangkut orang Islam. Mungkin sebagian besar menyangkut orang Protestan. Misalnya di NTT yang menyangkut roti sakramen, ternyata dari 10 kasus yang terjadi hanya dua dari orang Islam, sisanya dari Protestan. Dari segi retorika dan pemberitaan ambil gampangnya saja, itu orang Islam. Di sini orang Islam kalah propaganda.

Jadi sebetulnya terlalu simplistis kalau dikatakan ini masalah agama murni, apalagi masalah Katolik dengan Islam. Sebetulnya

itu masalah orang Katolik setempat dengan orang dari tempat lain dan agama lain. Jadi tidak hanya dengan orang Islam tapi juga Protestan. Malah dalam sebuah wawancara yang saya tahu sendiri transkripnya, Belo itu sangat keberatan dengan Katolik Jawa. Menurut dia, Katolik di Jawa itu sama dengan Protestan. Jadi rupanya agak kompleks. Orang Katolik Jawa itu *kan* lebih “canggih” dan melihat orang-orang Katolik di sana lebih rendah.

Tampaknya setiap aksi yang terjadi di sana, tidak bisa dilepaskan dari tokoh agama.

Portugis itu agak primitif sehingga tidak memperkenalkan pemerintahan modern di Timtim. Lalu, banyak sekali mereka bersandar kepada tokoh agama. *Nah*, Belo rupanya, dalam sistem Portugis dulu, kekuasaannya itu mirip sekali dengan gubernur. Setelah integrasi dia diturunkan hanya jadi tokoh agama, tanpa kekuasaan politik dan ekonomi. Dari segi ini, sekarang ada gubernur. Jadi Belo melihat ini suatu persaingan atau perebutan kewenangan dari tangan dia ke tangan pemerintah umum.

Maka kalau pendeta-pendeta terlibat dalam banyak aksi, itu sebenarnya dalam rangka persaingan kekuasaan. Di situ logikanya — mesti dibantah habis-habisan — Belo menghendaki Timtim daerah khusus orang Katolik. Maksudnya, tidak usah ada gubernur atau perangkatnya, cukup dialah yang menjadi pemimpin. Lagi-lagi ini pemikiran yang “primitif”. Bayangkan saja kalau provinsi-provinsi lain meniru, orang Islam bilang yang bukan Islam harus keluar, akan banyak menderita.

Menurut Anda solusi terbaik bagi kasus Timtim itu apa?

Saya pikir, pemerintah harus sedikit *heavy handed*. Disangkutkan dengan konsep Islam tentang perang. Membunuh *kan* haram, tapi suatu saat tertentu membunuh itu boleh untuk menegakkan kebenaran. Malahan itu perbuatan yang dinilai tinggi dalam agama.

Kalau orang itu menjadi agresor, demi orang bersangkutan, maka agresor itu harus kita tindas. Itu tidak hanya Islam kepada agama lain, tapi intern sendiri juga begitu. Idealnya harus dicarikan kompromi, harus didamaikan. Tapi kalau salah satu dari kelompok-kelompok itu bersikap agresif terhadap yang lain secara tidak sah, maka al-Qur'an sendiri membenarkan harus kita tindas mereka.

Konkretnya bagaimana?

Mungkin tidak perlu operasi militer. Yang pasti harus *heavy handed*, dalam arti peningkatan proses hukum. Jangan segan-segan menindak orang Timtim yang bersalah. Tindak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tapi cara semacam itu, apa tidak membuat runyam masalah, sehingga memancing keterlibatan pihak luar?

Kalau kita memperhatikan luar, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya baru dari Australia, apa masuk akal setiap harinya konsulat kita di Sidney didemonstrasi orang, hanya untuk Timtim? Kita respek kepada orang Australia yang menjunjung HAM. Tapi sebetulnya kita bisa menggugat mengapa pemerintah Australia diam saja. Padahal apa yang mereka lakukan terhadap kaum Aborigin, jauh lebih biadab dari apa yang terjadi di Timtim. Di Timtim *kan* hanya masalah kesenjangan-kesenjangan, tapi di Australia, justru masalah konsep kemanusiaan. Artinya orang Australia tidak menganggap orang Aborigin itu manusia. Jadi kita menuntut orang Australia punya kewajiban moral untuk memahami situasi di Timtim dan karena itu, ikut mencegah terjadinya hal-hal yang tidak adil, seperti demo setiap hari di konsulat. Staf di sana takut sekali karena khawatir dibunuh.

Memang jelas, lobi-lobi internasional mereka sangat kuat. Di sini lagi-lagi ketidakadilan. Karena Timtim itu Katolik, maka memiliki akses ke Vatikan. Barat karena kesamaan agama menjadi

pendukung dalam masalah ini. Tapi apa yang terjadi dengan orang Islam di Aceh, misalnya, tidak ada lobi internasional dan orang Islam internasional sendiri tidak paham akan persoalan di sana. Artinya kejadian-kejadian di Aceh yang mungkin lebih berat dari kasus Timtim tidak muncul, sedangkan kasus Timtim langsung muncul lewat lobi-lobi internasional tersebut.

Misalnya Belo dan tokoh-tokoh agama lain di Timtim selalu bilang adanya Islamisasi, tapi secara statistik sebetulnya yang masuk Islam itu sedikit sekali, justru yang masuk Katolik lebih banyak. Jadi sebetulnya integrasi itu menghasilkan Katolikisasi. Sementara yang pindah ke Protestan jauh lebih besar dari orang Islam. Tapi mengapa Belo tidak bilang bahaya Protestanisasi. Karena bagi dia tidak relevan untuk politiknya.

Sepertinya tokoh agama memegang peran untuk lancarnya proses kerukunan?

Belo harus menyadari bila dirinya hanya seorang tokoh agama, seperti halnya uskup-uskup di Jawa. Karenanya, keuskupan di Timtim harus cepat-cepat melakukan integrasi dengan keuskupan di Indonesia. Saya kira secepat mungkin Belo sebagai wujud pengakuan dirinya sendiri, bahwa dia tidak anti integrasi, maka ia harus menjadi anggota KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia). Kalau dia berat hati, maka kita bisa tuduh sebagai tidak ikhlas berintegrasi. Jadi ia masih menginginkan *previlege* dan hak istimewanya sebagai pemegang otoritas warisan kolonial Portugis.

Anda punya konsep dalam masalah kerukunan umat beragama?

Wah, bukan hanya konsep tapi keyakinan berdasarkan agama Islam. Ini menyangkut masalah berlapis-lapis. *Pertama*, dari segi doktrin Islam *kan* penerus ajaran yang lalu. Karena itu kita harus percaya kepada kitab suci dan nabi. Implikasi konkretnya, kita akui

hak agama-agama lain untuk hidup. Pengakuan itu diwujudkan dalam sebutan ahli Kitab.

Di zaman Nabi *saw*, mereka diakui. Wujud historisnya ya di masa pemerintahan Madinah. Mereka yang menjadi komponen penduduk Madinah diberi hak partisipasi penuh dalam pertahanan dan dalam pembelanjaan negara. Sayangnya, orang-orang Yahudi kemudian berkhianat. Dalam kondisi umat Islam yang baru menata itu, tidak ada pilihan dari Nabi kecuali menghukum mereka sehingga Madinah menjadi homogen.

Seandainya tidak ada pengkhianatan, kita bisa berhipotesa Madinah itu menjadi negeri dengan multi-agama. Sebab, nyatanya kebijakan yang diletakkan oleh Nabi itu diikuti para sahabat. Paling kentara oleh Umar ketika ia membuat Perjanjian Aelia, Perjanjian Yerusalem. Dalam perjanjian itu, Yerusalem yang sudah di tangan orang Islam dijamin kebebasannya. Malahan lebih yang diduga orang, karena Umar berpendapat orang Yahudi harus boleh tinggal di Yerusalem. Sebelumnya orang Kristen melarang orang Yahudi, sejak zaman Konstantin. Sejak Umar, Yahudi boleh. Orang Kristen menuntut bila orang Yahudi tinggal di Yerusalem, maka tidak boleh bercampur dengan mereka. Akhirnya, dibuatlah kantong-kantong tempat tinggal sesuai dengan keyakinannya.

Jadi konsep kerukunan dari Islam itu tidak omong kosong dan diwujudkan dengan baik dalam sejarah. Dan itu terus-menerus begitu. Hanya saja, orang Barat sendiri yang termakan stereotip, bila Islam disebarluaskan dengan pedang. Kita harus ingat ketika umat Islam meluaskan daerah pengaruh politiknya, mereka tidak pernah menggunakan kata penaklukan. Mereka selalu menggunakan kata pembebasan yang dalam bahasa Arab disebut *fath*. Itu lain sekali maknanya. Dan memang buktinya mereka membawa kebebasan. Yang paling menonjol sesuai dengan zamannya adalah kebebasan beragama.

Oleh karena itu, Amr bin Ashsh bersama pasukannya disambut rakyat Mesir. Mereka berharap dengan dikuasainya oleh Islam, mazhab-mazhab Kristen di Mesir tidak lagi dianiaya oleh pusat

kekuasaan Kristen di Konstantinopel. Dan itu betul. Itu sebabnya di Mesir hingga kini masih ada penganut Kristen Koptik. Seandainya orang Islam dulu seperti orang Kristen, habislah orang Koptik. Di Mesir, Syiria, Lebanon, Palestina, dan di seluruh wilayah-wilayah Islam itu pasti ada pengikut Kristen atau Yahudi. Hanya Saudi Arabia, khususnya komplek Hijaz yang tidak ada.

Maka, orang Islam itu jauh lebih berpengalaman dalam soal kerukunan antaragama dibanding orang Barat. Sebab di Barat itu hanya intra-Kristen, terutama setelah timbulnya Protestan. Baru sekarang ini saja, orang Barat dites, bisakah hidup antaragama setelah masuknya agama-agama lain. Kalau Islam sudah terbukti 1.000 tahun lebih dalam soal ini.

Ada anggapan bila toleransi yang dikembangkan umat Islam itu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingannya?

Betul, dan itu sangat masuk akal karena orang-orang yang melakukan sikap buruk kepada orang Islam mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi dari orang Islam. Ini akibat dari penjajahan Belanda. Jadi, persoalannya adalah kesenjangan sosial-ekonomi. Saya pribadi menyesalkan sekali untuk kasus Timtim, di mana orang Islam yang dirugikan, selalu dengan cepat orang-orang Kristen menyebut itu bukan masalah agama. Tapi, kalau orang mereka dirugikan, selalu disebutkan itu masalah agama, masalah SARA. Memang sepihak, tidak adil. Ini yang membuat umat Islam jengkel. Kita, orang Islam berusaha untuk obyektif karena itu ajaran Islam. Tapi pihak sana selalu, seolah-olah tidak ada masalah agama. Di situ kezalimannya.

Kerukunan menurut Islam, apakah itu hanya untuk kepentingan pemeluknya saja?

Kerukunan itu bukan sekadar koeksistensi, tapi kalau bisa malah kooperasi. Dan itu yang dipraktikkan oleh orang Islam di Spanyol.

Orang Islam di sana, berkuasa selama 800 tahun, 300 tahun krisis macam-macam. Tapi, selama 500 tahun stabil dan menjadi negeri tiga agama. Yang memimpin orang Islam, yang menengahi orang Yahudi, rakyatnya Kristen Katolik. Bayangkan 500 tahun hidup damai. AS sendiri baru 200 tahun. Inilah yang dipuji oleh Ibn Taimiyah sebagai mengikuti mazhab Madinah.

Dalam keseharian dakwah menjadi penting dan hal itu cenderung ekspansif. Apakah hal itu tidak menimbulkan persoalan?

Ya itu hak masing-masing. Semua agama misionaris punya hak untuk berdakwah, kecuali Yahudi dan Hindu (yang tidak misionaris). Tapi hak itu tidak begitu saja berjalan, harus ada etika dalam berdakwah. Misalnya tidak boleh memaksa. Dalam hal ini oleh orang Islam itu bukan masalah kesepakatan kemanusiaan, tapi sudah menjadi doktrin ajaran Allah. Harus diperhatikan bila Timur Tengah menjadi Islam itu ratusan tahun prosesnya. Proses yang gradual dan evolusioner.

Bernard Lewis, salah seorang orientalis menegaskan bila Islam tidak disebarluaskan dengan pedang, namun bersifat persuasif. Ada yang menarik dari tesis Bernard Lewis. Katanya, orang Islam itu makin dekat dengan pusat Islam, makin toleran. Makin jauh, makin tidak toleran. Uraianya banyak sekali. Misalnya, dari segi geografis orang Syiria dan Mesir itu, jauh lebih toleran daripada orang Maroko, Kazakhstan, dan Uzbekhistan.

Kalau menurut saya harus ada tesis yang ketiga. Selain geografis dan waktu, maka sebenarnya makin dekat ke al-Qur'an, maka makin toleran kita. Ini masalah doktrin. Yang bikin orang Islam tidak toleran itu, karena mereka tidak tahu al-Qur'an. Islam itu mereka pahami dari kitab-kitab fiqih yang hanya membicarakan wudu atau *thahârah*. Akhirnya beda wudhu saja sudah berkelahi. juga, makin dekat ke Ka'bah, maka makin toleran umat Islam.

Selain syarat sah shalat dalam kaidah fiqih, Ka'bah harus dihayati sebagai simbolisasi kesatuan ajaran. Coba kita sekarang

shalat di salah satu masjid yang ada, lalu tidak menyilangkan tangan di dada, pasti akan ada yang menegur. Tapi silakan shalat di Masjidil Haram, mau menyilangkan atau tidak, mau pakai qunut atau tidak, tidak ada yang melarang atau menegur. [❖]

SANG PENARIK GERBONG ITU¹

Rumah berukuran 122 m² itu tergolong sederhana. Pekarangan berukuran 600 m². Terletak di bilangan Tanah Kusir, Kebayoran Lama; rumah itu berjarak jauh dari keramaian kota. Di sanalah Dr. Haji Nurcholish Madjid, bersama istri dan dua anaknya berdiam. Tapi, kalau penghuni rumah yang baru dua tahun balik dari Chicago itu berharap punya banyak *privacy*, lantaran letak rumah mereka yang terpencil, mereka boleh kecewa. Tamu yang datang untuk menyampaikan undangan ceramah, atau sekadar ingin kenal, datang tidak henti-hentinya.

Kesibukan Nurcholish sejak datang dari Chicago sebaiknya tidak dibaca sebagai kesibukan Nurcholish sebagai Nurcholish. Ini cuma tanda dari sesuatu yang lebih penting, suatu yang lebih menarik, sesuatu yang sedang berubah, sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi hidup sejumlah besar orang negeri ini. Jika pembicaraan sudah tiba di sini, orang tentu akan mengerti bahwa yang dimaksud adalah keterlibatan Nurcholish Madjid dalam kegiatan pembaruan pemikiran Islam, yang dilancarkannya sejak 1970. Berikut ini cerita Cak Nur, begitu ia biasa disapa, kepada wartawan *TEMPO*, Salim Said dan Musthafa Helmy tentang awal kegiatan penting itu.

Mungkin, Anda bisa ceritakan banyak hal, perihal keterlibatannya dalam pergumulan pemikiran Islam sejak tahun 1970.

¹ Majalah *TEMPO*, “Nurcholish Madjid, Yang Menarik Gerbong”, 14 Juni 1986. Pewawancara Salim Said dan Musthafa Helmy.

Tahun 1970 itu, memang tahun penting. Anak-anak dari keluarga Islam, setelah Indonesia merdeka baru mendapatkan kesempatan sekolah, pada tahun itu sudah jadi sarjana. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik sejumlah anak-anak dari keluarga Islam menjadi sarjana. Orang-orang terdidik ini menuntut banyak dari Islam. Dan muncullah kekecewaan demi kekecewaan terhadap orang-orang tua. Mereka kemudian tiba pada kesimpulan bahwa harus mencari terobosan sendiri.

Waktu itu saya sebagai ketua HMI, dan Utomo Dananjaya menjadi ketua PII. Sebelum kegiatan tahun 1970 itu dimulai, saya kebetulan mendapat undangan ke Amerika. Selama perjalanan, saya berusaha menabung uang saku, yang kemudian saya pakai membiayai perjalanan ke negara-negara Islam di Timur Tengah dan Pakistan.

Tentu yang saya amati dalam perjalanan ini tidak langsung saya cerna. Tapi di kemudian hari amat berpengaruh pada pikiran-pikiran saya. Yang meninggalkan kesan mendalam ialah Arab Saudi, yang oleh orang Wahabi telah dibersihkan dari khurafat. Tidak ada yang sakral di sana, kecuali Allah.

Menjelang 1970, terutama sejak 1966, diskusi tentang perlunya pembaruan dalam pemikiran Islam melanda semua kelompok terpelajar Islam di Indonesia. Di samping itu ada pula usaha, saya ikut di sana, untuk merehabilitir Partai Masyumi. Usaha terakhir gagal. Tapi kegiatan diskusi makin gencar. Pidato saya pada tahun 1970 itu lahir dari kerja sama beberapa ormas Islam, yang dipelopori oleh Utomo.

Tapi, apakah Anda merasa berubah setelah menjadi doktor dalam kajian Islam?

Saya makin tua enam belas tahun, tapi dan segi pemikiran saya makin yakin akan apa yang saya katakan dulu. Ya, tentu saja kita harus memperlunak penyampaiannya. Misalnya, penggunaan

istilah sekularisasi. Istilah itu saya ambil dan Sosiologi Agama dan diperkuat oleh ahli sosiologi terkenal Robert N. Bellah. Tapi orang lebih melihatnya dalam konteks sejarah Eropa. Yang saya maksudkan dengan itu sebenarnya adalah bahwa tidak ada yang sakral, kecuali Allah. Desakralisasi, itulah yang saya maksud dengan sekularisasi. *Nah*, partai Islam itu tidak sakral, karena itu salah argumen yang mengatakan bahwa kalau tidak mencoblos partai Islam dalam pemilu, maka kita bukan Islam. Karena itu, saya dulu berseru, “Islam, Yes. Partai Islam, No”.

Bagaimana Anda sampai menolak pada pemikiran partai Islam dan negara Islam?

Saya menemukan pemikiran saya sendiri setelah saya kenal HMI. Lewat training yang melibatkan Dachlan Ranuwihardjo, Mar’ie Muhammad, dan lain-lain, saya mendapat banyak hal. Pada masa di HMI itulah, terutama dalam periode Orde Lama, ketika kita terpaksa merumuskan diri kita, saya menyusun sebuah naskah yang berjudul Dasar-Dasar Islamisme. Ini semacam usaha mengimbangi pegangan dasar yang dimiliki CGMI (ormas mahasiswa yang bernaung dibawah PKI — *ed.*) waktu itu.

Tapi dalam naskah itu, dan naskah berikutnya, Nilai Dasar Perjuangan, masalah negara Islam belum lagi dibicarakan. Soal itu baru menggoda saya dengan hebat setelah kunjungan saya ke Arab Saudi dan Pakistan pada tahun 1968. Dengan latar belakang persoalan dan perdebatan di tanah air, saya ingin lihat bagaimana negara Islam itu dalam praktik. Sangat mengecewakan. Orang-orang di Arab Saudi lebih senang memasukkan anak-anak mereka bukan ke universitas Madinah yang amat terbelakang. Di sana, waktu itu, koran, radio, dan potret masih diharamkan.

Bagaimana dengan soal negara Islam, yang waktu itu masih menjadi topik kontroversial?

Soal itu sudah dibicarakan dalam HMI sejak zaman Dachlan Ranuwihardjo menyelenggarakan diskusi tentang hal tersebut di UI, menjelang Pemilu 1955. Dan pimpinan HMI waktu itu, memilih bukan negara Islam, tapi negara nasional.

Kritik Anda terhadap ide negara Islam dan penolakan Anda terhadap partai Islam, dulu maupun sekarang, adalah tindak keberanian. Tidak banyak orang yang berani berbeda pendapat dengan umat. Bagaimana Anda menjelaskan sikap ini?

Kalau kita pemimpin, atau mau jadi pemimpin, kita harus seperti lokomotif. Bagian dari kereta api, tapi tidak ditarik oleh gerbong-gerbong yang banyak. Lokomotiflah yang harus menarik gerbong-gerbong. Pemimpin harus menarik umat ke arah yang lebih baik. Sekarang ini jelas keadaannya jauh lebih baik dari masa lalu. Ya itu tadi, angkatan demi angkatan anak-anak dari keluarga Islam terus datang dari berbagai kampus dan sekolah. Umat Islam sekarang jauh lebih maju dari umat di tahun 1970. Dan makin kecil jumlah mereka yang menolak apa yang saya dan teman-teman lontarkan sejak 1970 itu. Keterbukaan di kalangan umat sekarang ini, jauh lebih besar dibandingkan dulu.

Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdatul Ulama itu, kini dinilai banyak orang jauh lebih berani dari Anda dan teman-teman Anda. Apakah bisa juga dikatakan, bahwa Abdurrahman Wahid bisa muncul setelah Anda dan teman-teman Anda melancarkan terbososan di tahun 1970?

Sulit menjawab pertanyaan ini. Tapi kami memang mendukung Abdurrahman Wahid. Karena itu, pada Mukhtamar NU di Situbondo, kami datang dengan kesiapan menjadi sandaran bagi Abdurrahman. Tapi fenomena Abdurrahman di dalam NU ini tidak bisa dilepaskan dari kultur NU, yang masih menilai tinggi hubungan darah antara Abdurrahman sebagai putra Wahid Hasyim

Asy'ari. Ditambah lagi oleh faktor Abdurrahman sebagai cucu Hasyim Asy'ari, orang yang paling dicintai dalam NU. Kalau orang seperti saya melakukan pembaruan dalam NU, besar kemungkinan tidak berhasil. Jadi banyak faktor pribadi yang menguntungkan Abdurrahman Wahid.

Apakah makna meluasnya syiar Islam di Indonesia, antara lain karena gerakan pembaruan itu?

Saya ingin sekali mengakui itu hasil kami. Tapi yang jelas, siapa pun sekarang ini bebas mengekspresikan keislamannya tanpa harus takut dituduh ikut partai tertentu atau bekas partai tertentu. Itu memang usaha kami, yakni menjadikan Islam bukan cuma milik golongan tertentu, yang kelihatan keislamannya karena menaikkan bendera golongan Islam.

Grup-grup sempalan yang sering terpaksa menggunakan kekerasan, apakah mereka sisa-sisa dari kelompok yang menentang usaha Anda?

Begini, Republik Indonesia ini adalah satu negara yang penduduknya mayoritas Islam. Dalam hal demikian secara statistik saja, banyak kejadian, baik atau buruk, dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Apakah gerakan mereka itu sesuai dengan ajaran agamanya, itu soal lain. Di negeri yang penduduknya mayoritas Katolik, grup sempalan juga ada. Lihat saja di Filipina, misalnya, di sana ada pastor Katolik yang ikut angkat senjata melawan pemerintah. Di Korea Selatan, pendeta juga ikut angkat suara. Sedangkan di Amerika Latin kita kenal adanya teologi pembebasan.

Jadi kalau ada istilah ekstrim kanan, jangan lantas menuduh Islam. Sebab Islam sama sekali tidak ekstrim. Tapi harus juga disadari bahwa Islam adalah agama yang paling jelas mengajarkan pengikutnya untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan

dengan ajaran agamanya: selain nahi munkar, ada juga amar makruf, berbuat baik.

Ingin saya tambahkan bahwa sikap seperti itu harus juga dilihat dalam perspektif sejarah. Orang Islam itu pada zaman penjajah selalu memainkan peranan besar dalam perang melawan penjajah. Jadi mereka terbiasa melihat pemerintah pusat sebagai musuh. Sisa-sisa dari sikap lama itu tentu akan berangsur-angsur hilang juga nantinya.

Sebagai orang yang sejak enam belas tahun silam melihat tidak wajibnya ada partai Islam, bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila sebagai asas tunggal?

Sudah lama saya mengajukan argumen-argumen bahwa Pancasila itu adalah titik-pertemuan kita untuk bangsa secara bersama. Mula-mula, saya konsisten dengan pikiran-pikiran yang lahir setelah tumbangny Orla bahwa kita ingin dan harus membangun suatu masyarakat terbuka.

Tapi, perkembangan berikutnya memperlihatkan, berkat usaha-usaha MAWI, DGI, serta orang-orang seperti Lukman Harun, yang menentukan ide permulaan asas tunggal yang bisa membawa kita ke sistem monolitik, akhirnya asas tunggal itu tetap membuka kemungkinan yang besar untuk suatu sistem yang tidak monolitik. Orang Islam masih bisa bergiat dalam NU, Muhammadiyah, al-Washliyah, dan lain-lain. Orang Katolik masih punya MAWI. Orang Kristen masih punya PGI. Dengan demikian, masalah kritis identitas golongan ataupun agama tidak perlu dikhawatirkan. Semua golongan yang telah bersepakat menerima asas tunggal ini masih tetap bisa bergiat, bahkan melakukan lobi untuk kepentingan-kepentingan khusus mereka.

Setelah Anda menolak gagasan negara Islam, bagaimanakah gambaran masyarakat Indonesia yang Anda inginkan?

Yaitu masyarakat yang dijiwai oleh iman, yang menurut Pancasila itu, berketuhanan yang Maha Esa dan dituntun oleh ilmu-ilmu pengetahuan. Masyarakat yang demikian akan menjadi masyarakat yang dinamis. Artinya selalu mampu berbuat lebih baik hari ini daripada kemarin. Dalam masyarakat yang demikian, pemeluk agama Islam yang mayoritas, karena watak aktivisnya, akan memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Kontribusi itu tidak dalam term yang eksklusivistik melainkan inklusivistik. [❖]

ARGUMEN AL-ATTAS SULIT DIPERTAHANKAN¹

Persoalan syariat (hukum) dalam Islam, merupakan interaksi antara Islam dan sejarah. Demikian juga dengan kalam, alias teologi Islam. Keyakinan ini dipertegas oleh Nurcholish Madjid, ketika menolak asumsi yang digulirkan Prof. Dr. Naquib al-Attas, bahwa semua hukum yang tercipta dalam sejarah Islam, adalah Islam itu sendiri. Menurut Nurcholish Madjid, bahwa setiap produk dari pemikiran Islam dilahirkan oleh sejarah. Badri Yatim dari Majalah *Panji Masyarakat*, coba menggali persoalan tersebut melalui perbincangan dengan Nurcholish Madjid.

Sebenarnya, bagaimana latar sejarah reaktualisasi itu bisa muncul ke permukaan? Dan apakah reaktualisasi itu bisa diklaim sebagai ijihad?

Yang memperkenalkan istilah reaktualisasi Pak Munawir. Sebetulnya hanya istilah yang baru. Intinya sudah ada dalam sejarah Islam. Misalnya yang dilakukan Umar ibn al-Khaththab mengenai pembagian tanah hasil rampasan perang. Itu merupakan kasus di mana seorang mujtahid menemukan hukum yang tidak secara langsung tercantum dalam beberapa ayat tertentu, tetapi bisa dipahami dari keseluruhan semangat al-Qur'an. Maksud saya begini. Ketentuan mengenai hasil rampasan perang (*ghanîmah* atau

¹ Majalah *Panji Masyarakat*, "Argumen al-Attas, Sulit Dipertahankan", No 531 Th XXVIII, 12 Februari 1987. Pewawancara Badri Yatim.

anfâl) itu sudah tercantum dalam al-Qur'an. Tetapi di samping itu ada hukum yang tidak begitu jelas bagi banyak orang, tapi bisa dipahami oleh orang semacam Umar. Misalnya tentang keharusan menegakkan keadilan sosial.

Nah, Umar melihat bahwa menegakkan keadilan sosial itu adalah hukum yang lebih prinsipil, sedangkan pembagian terperinci terhadap hasil rampasan perang itu hukum *ad hoc*. Dan dalam hal ini, Umar melihat yang *ad hoc* dikalahkan oleh yang prinsipil, yaitu keadilan sosial tadi. Jadi interpretasinya: "Jika kita menuruti ketentuan *ad hoc* pembagian harta rampasan tersebut, maka ketentuan lebih prinsipil akan terlanggar".

Oleh karena itu, sepintas lalu di mata orang semacam Bilal atau Abdurrahman ibn A'waf, Umar itu seperti melanggar al-Qur'an karena melanggar *ad hoc* tadi. Tapi dalam pandangan Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan dan pembesar lainnya, justru Umar telah mengangkat makna keseluruhan al-Qur'an. Jadi reaktualisasi sebetulnya kata lain dari ijtihad. Tidak lebih dari itu. Cuma istilahnya membuat orang agak trauma.

Bukankah kebutuhan memahami persoalan perihal ijtihad sudah tercipta ketika masa klasik Islam?

Ya. Untuk memahami ijtihad sebagaimana yang dilakukan Umar, penting sekali memahami dan mempersepsi masa klasik Islam yang sering disebut masa salaf. Itu merupakan masa di mana masyarakat yang terbentuk (kala itu) bukan masyarakat hukum, tapi masyarakat etis. Masyarakat macam apa itu? Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memahami betul secara mendalam kehendak agama. Suatu masyarakat yang memahami agama secara keseluruhan, di mana tidak terjadi kompartementalisasi antara aspek esoterik, aspek eksoterik, dan aspek rasional.

Lantas, bagaimana dengan makna syariat itu sendiri?

Perkataan syariat menjadi baku setelah abad kedua Hijri. Sebelum itu, bahkan setelah abad itu pun, masih banyak pemikir Islam memahami syariat tidak sebagai hukum, melainkan sebagai keseluruhan agama. Misalnya Ibn Rusyd di dalam makalah kecilnya, tapi cukup penting, *Fashl al-Maqâl wa al-Taqrîr mâ Bayn al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl*, memahami syariat itu bukan hukum melainkan agama. Jadi tidak sama dengan yang dipahami al-Attas. Pengertian syariat menjadi hukum seperti sekarang ini, adalah relatif datang kemudian.

Orang semacam al-Attas agaknya beranggapan bahwa semua hukum yang tercipta dalam sejarah Islam adalah Islam itu sendiri. Itu tidak betul. Itu merupakan interaksi antara Islam dan sejarah. Begitu pula kalam, alias teologi. Islam yang saya maksud di sini, tentu saja Islam sebagaimana diwakili oleh orang-orang Islam. Bukan Islam abstrak. Sebab Islam yang abstrak itu terletak di tangan Allah sendiri. Yang konkret ya yang diwakili orang Islam.

Wawasan historis semacam itu, penting kita ketahui. Setiap produk dari pemikiran Islam dilahirkan oleh sejarah. Itu otentik, meskipun sekarang mungkin tidak relevan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada persoalan, itu benar atau salah.

Tampaknya al-Attas menentang pemikiran Anda tentang sekularisasi.

Kalau al-Attas melihat wanita berkarir sekarang ini sebagai akibat sekularisasi, dan karenanya ia berpendapat tidak sesuai dengan Islam, lalu bagaimana dengan Aisyah yang memimpin perang dan banyak merawikan hadis? Menurut dimensi waktu itu, itu adalah bentuk karir. Ibn Taimiyah sendiri punya beberapa guru wanita. Saya sengaja menyebut Ibn Taimiyah karena ia sering dirujuk sebagai contoh orang yang sangat puritan. Jadi agak susah argumen al-Attas itu dipertahankan. Dan secara sosiologis, dunia Islam sekarang ini sedang berubah. Termasuk di Saudi Arabia, itu memberikan pendidikan pada kaum wanita sekitar tahun enam

puluhan. Dan pengaruhnya sudah mulai terasa saat sekarang. Apalagi 20 atau 50 tahun mendatang.

Jelas apa yang ada di Barat tidak bisa ditiru semuanya, tapi dalam beberapa hal bisa. Wanita di Barat sekarang ini sudah mulai kembali menjadi ibu rumah tangga, setelah adanya gerakan feminisme dan *women liberation*. Ini terang, nanti akan bertemu pada satu titik yang dianggap paling *balanced*, menemukan keseimbangan baru. Tetapi untuk mengatakan, apakah yang dikehendaki, yang ideal atau yang seharusnya seperti wanita di masyarakat Arab sebelum zaman modern, susah dipertahankan.

Kembali kepada Pak Munawir, ia memang pernah mengutak-atik soal waris. Pak Munawir menunjuk pada pengalamannya sendiri. Menurutnya, anak laki-laknya itu sudah menghabiskan biaya sekian untuk sekolah. Sedangkan anak perempuannya, hanya sekian, karena masa sekolahnya lebih pendek. Kata dia, “Mosok yang sudah dapat banyak akan dapat dua bagian, dan yang dapat sedikit akan dapat satu bagian?” Itu logika Pak Munawir. Saya tidak tahu apakah logika semacam itu bisa diterima. Tetapi ada satu hal yang patut kita renungkan, yaitu ide mengenai *‘illat al-hukm* atau *manâth al-hukm* (alasan adanya hukum atau *reasoning* adanya hukum). Mungkin *reasoning* hukum laki-laki memperoleh bagian melebihi wanita karena ia pencari nafkah.

Sekarang kalau “*al-hukm yadûr-u ma’a al-‘illah wujûd-an wa ‘adam-an*” — hukum itu ada atau tidak tergantung pada *‘illat*-nya maka kalau *‘illat* itu terbalik, hukum akan terbalik pula. Dan di Amerika hal seperti itu sekarang sudah ada.

Dulu dikenal ada *house wife*, istri yang tinggal di rumah dan memomong anak; sekarang ada *house husband*, suami kerjanya mengasuh anak. Dalam kasus semacam itu, maka yang memimpin atau kepala rumah tangga adalah wanita. Memang masih teka-teki, apakah hal seperti itu natural atau tidak. Tapi kalau kita belajar antropologi, mengapa masyarakat Minang itu matrilineal, misalnya? Itu karena yang dominan atau yang memimpin adalah wanita. Jadi

secara historis pernah terjadi. Dan itu tidak hanya di satu atau dua tempat saja.

Yang dimaksud akidah, itu apa sih? Istilah itu tidak ada dalam al-Qur'an. Akidah itu artinya ikatan, sampul iman yang dirumuskan yang diturunkan dalam ilmu kalam, ushuluddin atau ilmu tauhid. Dan itu merupakan hasil persepsi sejarah. Taruhlah, akidah yang sangat dominan saat ini, akidah Asy'ari, misalnya sifat dua puluh (*wujûd, qidâm, baqâ'* dan seterusnya — *ed.*). Itu adalah kreasi kreatif kaum Asya'irah sebagai respon terhadap bahaya membanjirnya Hellenisme. Tetapi sebagaimana halnya al-Attas dalam menghadapi Barat, Asy'ari juga menyerang Hellenisme dengan menggunakan falsafah Hellenisme. Dan untuk itu, Asy'ari berjasa. Akidah Asy'ariyah itu otentik, meskipun perlu dipertanyakan relevansinya untuk saat ini.

Maka, apabila al-Attas mengkhawatirkan perubahan akidah di kalangan umat Islam, maka saya justru khawatir akidah semacam itu kalau tidak berubah, dan dipandang tidak perlu berubah. Coba, menurut kaum Asya'irah mengetahui sifat dua puluh itu wajib. Dari mana ia mengatakan begitu? Itu *kan* dari penalaran saja. Maka itu, kritik terhadap kaum Asya'irah berat sekali. Orang-orang Hanbali malah mengatakan: "Wah, itu sih bid'ah!" *Nah*, ada yang mengatakan konsep teologinya Asy'ari tersebut tidak relevan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, *toh* ia berjasa. Bayangkan, andaikan ia tidak maju dengan konsepnya itu, maka agama Islam akan menjadi agama yang lahir di daerah Semit, tetapi kemudian mengalami hellenisasi dan romanisasi total. Saya khawatir, al-Attas tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan akidah. Kalau ia tahu, akidah itu merupakan hasil ijtihad dalam rangka menghadapi tantangan zaman, maka yang dikhawatirkan mestinya bukan pada perubahan, tetapi justru tidak adanya perubahan itu.

Di kalangan sebagian umat Islam, ada semacam ketakutan terhadap ilmu pengetahuan yang datang dari Barat. Bagaimana komentar Anda?

Bahwa ilmu dan teknologi itu tidak netral, jelas semua orang sudah tahu. Tetapi dalam ketidaknetralannya itu, apakah keduanya tidak bisa ditundukkan pada suatu sistem etika yang lebih kuat? Kalau kita katakan ilmu dan teknologi “tidak netral”, padahal sebagian besar yang kita pelajari sekarang ini berasal dari Barat, itu berarti harus kita tolak. Karena tidak netral, dan *value*-nya *value* Barat *kan*? Tetapi mengapa kita lakukan juga, termasuk oleh al-Attas sendiri? Karena kita yakin meskipun keduanya tidak netral, kita bisa menundukkannya di bawah pandangan etis kita. Perhatikan beberapa hadis seperti, “*Uthlub al-‘ilm wa-law bi al-shîn*”. Hadis itu banyak dikutip orang, meskipun konon *sanad*-nya kurang begitu baik. Kalau hadis itu benar, jelas sekali menunjukkan bahwa ilmu taruhlah tidak netral, tetapi bisa ditundukkan di bawah wawasan etis kita.

Bila hadis di atas tidak benar, masih ada hadis serupa, “*khudz al-hikmah wa-lâ yadlurru-ka min ayy-i wi‘â’ kharajat*”. Artinya ambil hikmah atau ilmu pengetahuan dan tidak berbahaya bagi kamu dari bejana mana pun ilmu itu keluar. Hadis itu memberi petunjuk bahwa kita harus tidak bersikap askriptif, menilai sesuatu dari asalnya. Tetapi harus menilai pada barangnya itu *an sich*. *Nah* di situ sebenarnya ada didikan bahwa kita mesti obyektif. Jadi kalau mendengar orang lain itu, tidak kita lihat siapa yang mengatakan tapi apa yang dikatakan. “*Unzhur ma qâl-a wa-lâ tanzhur man qâl*” (Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan). Begitu semestinya sikap kita terhadap ilmu. Meskipun ilmu itu tidak netral, tetapi terlalu banyak mengatakan seperti itu kalau konsekuen, betapa sedikit sekali ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh. Oleh karena itu mengapa harus takut?

Ada yang berpendapat bahwa sekularisasi melucuti otoritas nabi?

Bahwa sekularisasi akan menghilangkan otoritas nabi, penafsiran semacam itu timbul akibat dominasi hukum terhadap pemahaman agama. Artinya, yang kita persalahkan cuma hukum

melulu. Padahal justru yang lebih prinsipil keharusan bertakwa dan mempersepsi, bahwa Tuhan itu *rahmân*, *rahîm* dan sebagainya. Dan itu memberikan dasar etis. Berdasarkan pertimbangan etis itu, hukum bisa diciptakan. Di sinilah letaknya otoritas nabi. Jelas sekali. Lihat sejarah umat manusia, sekian banyak orang yang memikirkan Tuhan, tapi hasilnya tidak ada yang melebihi Islam. Itu terang otoritas. Jadi tidak bisa dikatakan nabi itu sah sebagai nabi, karena dia mengajari waris segini, segini. Otoritas nabi itu adalah keseluruhan al-Qur'an.

Bukankah kritik al-Attas, kritik Anda Juga?

Kalau al-Attas mengkritik pembaruan di negara kita masih memperkarakan fiqih, itu betul. Itu juga merupakan bagian kritik saya. Lihat misalnya slogan kembali kepada al-Qur'an dan hadis yang secara besar-besaran dicanangkan oleh Muhammadiyah. Tapi ketemuannya *kan* soal qunut, *ushallî*, azan dua, bacaan shalawat dengan "*Sayyidinâ*" dan lain-lain. Itu yang riil? Oleh karena itu, kita tidak mempersoalkan fiqih. Ya, memang kita tidak pernah mempersoalkan fiqih. Kita lebih mentitikberatkan pada *weltanschauung* (pandangan dunia). Kalau reaktualisasi dan segalanya, itu *kan* Pak Munawir. Dan sini, betul al-Attas. Hal itu terjadi bukan tidak kuatnya ulama di luar fiqih tapi karena kuatnya fiqih itu sendiri. Sehingga mendominir pemahaman agama kita. Jadi seolah-olah agama itu fiqih sendiri.

Bagaimana pendapat Anda tentang konsep ketentuan Tuhan: antara adab alam dan Manusia, yang dipaparkan al-Attas?

Konsep adabnya al-Attas itu arbitrer, tidak ada dasarnya. Yang dalam al-Qur'an itu bukan adab semacam yang ia tafsirkan itu, tapi tarbiyah, "*Rabb-i irham-humâ kamâ rabbayâ-nî shaghîr-an*". Siapa yang mendidik kita lebih besar, lebih selektif melebihi orangtua? Itu tarbiyah, dan tarbiyah itu meningkat.

Oke, taruhlah kita setuju dengan konsep bahwa, Allah-lah yang berhasil menciptakan dan menentukan adab itu. Tapi ketentuan mengenai adab manusia, tidak sama dengan ketentuan Tuhan terhadap benda-benda mati. Di sini ada masalah amanah, faktor kesadaran. Jadi beradab kita tidak seperti mesin. Kalau bumi, matahari dan sebagainya mengikuti ketentuan Tuhan bagaikan mesin, karena mereka mati. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah, hanya manusia ada yang bertasbih dan tidak. Karena apa? Karena faktor kesadaran itu. Karena faktor kesadaran, maka ketundukan manusia terhadap Tuhan adalah masalah moral, masalah pilihannya sendiri. Dan itu menyangkut peningkatan. Jadi kalau ketundukan alam itu sekali jadi dan begitu seterusnya, maka ketundukan manusia kepada Allah meningkat terus. Karena itu iman bisa bertambah, juga bisa berkurang, tidak sekali jadi.

Kalau saya kembali ke al-Attas, seolah-olah dia itu bilang, sudahlah jangan dipikirkan, sebagaimana bumi dan matahari kamu ikuti saja. Itu tidak betul. Bumi tidak berpikir, kita berpikir. Saya tidak mengerti konsep adab itu. Katanya referensinya hadis, “*Addahanî Rabbi fa-ahsan-a ta’dibi*”. Kalau soal referensi mengapa tidak al-Qur’an sekalian saja. Kalau dalam al-Qur’an itu tarbiyah, dan itu sama dengan *tanmîyah* atau development dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tumbuh terus. Kalau alam seperti saya katakan tadi ketundukannya sekali jadi, manusia itu ketundukannya pada Allah tumbuh. Sekarang masalahnya adalah bagaimana membikin atau membuat ketentuan Tuhan itu mengaktualisir dan terus relevan.

Apa yang diungkapkan oleh al-Attas adalah suatu ijtihad juga. Kita harus menghargainya. Dan di mata Tuhan, ia mempunyai kredit tersendiri. Kalau benar ia dapat pahala dua, kalau salah dapat satu. Sesuai dengan falsafah ijtihad sebagaimana diajarkan Nabi. [❖]

MENCARI KEBENARAN YANG LAPANG¹

Nurcholish Madjid kembali mengangkat “permenungannya” terhadap sejumlah persoalan. Dengan gaya bicara yang tenang dan teduh, Cak Nur, melalui makalah setebal 33 halaman, memukau sekitar 500 pengunjung yang terdiri dari para ilmuwan, profesional, seniman, budayawan, dan mahasiswa, yang memadati Teater Arena Taman Ismail Marzuki, 21 Oktober 1992,² Jakarta.

Kali ini Nurcholish Madjid mengulas agama, lalu menyinggungkannya ke masalah sosial, tapi kemudian lebih menekankan pada masalah esensi beragama. Yakni bahwa beragama yang benar adalah yang *al-hanîfiyah al-samḥah* — mencari kebenaran yang lapang dan toleran, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa. Berikut cuplikan wawancara wartawan *TEMPO*, Wahyu Muryadi dengan Nurcholish Madjid.

Apa maksud *al-hanîfiyah al-samḥah*?

¹ *TEMPO*, “Mencari Kebenaran yang Lapang”, 31 Oktober 1992. Pewawancara Wahyu Muryadi.

² Hari itu Rabu, 21 Oktober 1992, pukul 20.00 WIB, peserta diskusi membanjiri Teater Arena. Ceramah Kebudayaan yang dipandu penyair Taufik Ismail berjalan cukup marak dan mobil. Kemampuan Nurcholish Madjid memberikan jawaban, menambah bobot diskusi yang melibatkan banyak kalangan. Nurcholish Madjid membawakan makalah berjudul “Beberapa Renungan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”.

Nabi pernah berkata bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyah al-samḥah*. Yakni yang bersemangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa. Tekanan pengertian itu pada suatu agama terbuka, atau cara penganutan agama yang toleran. Ini sebetulnya sudah dipahami, terutama di kalangan kaum sufi, sejak dulu.

Lalu apa kaitannya dengan cara beragama Nabi Ibrahim dalam surat *Âl-u 'Imrân* ayat 67, yang Anda sebut-sebut dalam ceramah itu?

Maksud saya, ayat tentang Nabi Ibrahim itu bisa diterjemahkan dalam bahasa modern. "*Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi dia seorang yang lurus, lagi pula seorang yang menyerahkan diri (pada Allah), dan sekali-kali dia bukanlah dari golongan yang musyrik,*" (Q 3:67).

Itu maknanya, beliau tak terikat dalam agama komunal dan agama formal. Itu sebabnya disebutkan beliau bukan seorang Yahudi maupun Nasrani, dua agama yang sudah mengalami formalisasi, sudah menjadi agama terorganisasi. Itu suatu gambaran tentang pencarian kebenaran tanpa lingkaran dan batasan-batasan komunal. Kata akhir dalam ayat itu, "*ḥanîf-an muslim-an*", maknanya adalah semangat kebenaran yang naluriah dan asli serta hasrat tunduk pada kebenaran.

Maksud Anda, kini Islam pun menjadi agama komunal dan formal?

Sekarang ya, begitu itu. Tapi sebetulnya dulu dalam perjalanan sejarahnya tidak begitu. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang dalam mencari kebenaran lantas terkungkung dalam kategori-kategori historis-sosiologis. Karena memang dalam semangat mencari kebenaran kita harus bisa mentrasendenkan diri kita di atas kategori historis-sosiologis. Tapi minat bagi orang untuk bisa memahami ini.

Apa salahnya kalau Islam kini menjadi agama komunal dan formal?

Orang lalu serta-merta mengikuti kebenaran hanya karena masuk dalam “komunitas” ini. Sedangkan pencarian kebenaran itu sendiri tidak ada. Bahasa kasarnya “tiket surga” menjadi kategori historis-sosiologis. Padahal “tiket surga” itu *kan* kategori pencarian kebenaran. Makanya orang sulit sekali memahaminya. Kata *al-islâm* itu sebenarnya bukan nama agama. Tapi sikap. Buya Hamka saja menerjemahkannya begitu. Mungkin orang tidak membaca atau tidak mengerti implikasinya. Coba lihat tafsir-tafsir Buya Hamka dan uraiannya.

Cuma pandangan Anda ini tidak lazim.

Ya, padahal itu suatu hal yang sangat prinsipil. Karena itu, kalau diukur dari perkembangan zaman, pengertian ini memang termasuk dalam pos-modern, bahkan pasca neo-modern. Dalam bahasa akrabnya, kalau mula-mula tahapnya berjihad (yang konotasinya fisik), lalu ijihad (tahap intelektual), kemudian dilanjutkan dengan mujahadah (tahap spiritual). Tapi rumit memang.

Pandangan ini mirip dengan teologi universal?

Kalau Islam itu memang *kâffat-an li al-nâs*, untuk seluruh umat manusia, ya harusnya begitu.

Bukankah ini lantas menjungkirbalikkan teologi konvensional yang sudah diyakini kebenarannya oleh banyak orang?

Memang. Tapi itu disebabkan karena agama Islam dari semula disadari oleh banyak orang, maaf, sebagai agama yang lain daripada yang lain. Seharusnya rasa kesinambungan dengan agama terdahulu lebih kuat pada orang Islam daripada pemeluk agama lain. Itu

bukan apologia dari seorang Muslim, tapi banyak sekali disebut sendiri oleh orang luar, misalnya seperti Marshal G.S. Hodgson, yang antara lain merintis tiga jilid buku *The Venture of Islam*. [❖]

TUHAN: ANTARA ALLAH DAN DEWATA RAYA¹

Di tahun 1985-1986, melalui wawancara dan ceramahnya yang disiarkan oleh beberapa media massa, Nurcholish Madjid kembali membuat “kisah” menarik, karena beberapa pendapatnya yang menghentak. Pro-kontra pun kemudian lahir ke permukaan. Tragisnya, oleh kelompok yang kontra, Cak Nur, begitu ia disapa, seperti telah “diadili secara absensia”. Berikut ini petikan wawancara wartawan Harian *Pelita*, M. Ichwan Sam dan H. Hartono Ahmad Jais.

Beberapa gagasan dan pemikiran Anda, ternyata banyak mendapat reaksi, bahkan dipertanyakan oleh banyak orang tentang keabsahannya, baik oleh mereka yang tergolong ahli atau orang-orang awam. Persoalan pertama yang mereka resahkan, adalah soal terjemahan kalimat “*lâ ilâh-a illâ Allâh*”, menjadi “tiada tuhan selain Tuhan (t kecil dan T besar). Bagaimana ini?

Ya, saya sayangkan itu. Habis mereka kurang membaca buku. Misalnya terjemahan *The Holy Quran* oleh A. Yusuf Ali yang diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami. Di sini bisa kita cek, misalnya dalam surat *Muhammad*, ayat 19: “*Fa‘lam annahu lâ ilâha illâ Allah....*,” diterjemahkan dalam bahasa Inggris: “*Know, therefore,*

¹ Harian *Pelita*, “Antara Tuhan dengan Tuhan atau Dewata Raya”, 17-21 Oktober 1986. Pewawancara M. Ichwan Sam dan H. Hartono Ahmad Jais.

that there is no god but God” (*god* dengan g kecil, dan *God* dengan g besar). Kitab terjemahan ini diterjemahkan oleh Rabithah Alam Islami, sehingga menunjukkan tingkat keabsahannya. Di sini Allah bisa diterjemahkan dengan *God*, dan di sini tidak ada sama sekali perkataan Allah dalam bahasa Inggris. Semuanya jadi *God*.

Bisa juga dilihat dari Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, artikel (2) ayat (10). Dasar negara Islam Iran itu monoteisme, tauhid. “*As reflected... there is no god but God*”. Ini versi resmi konstitusi Iran dalam bahasa Inggris. Karena orang Iran antara Allah dan Khuda (dalam bahasa Persi) bisa berganti-ganti.

Sekarang kita buka kitab tafsir Muhammad Asad, orang yang terkenal dan bukunya banyak sekali. Dia mengarang kitab tafsir, namanya *The Message of the Koran*. Di surat *Muhammad* ayat 19 tadi diterjemahkan dengan: “*Know, then, o man, that there is no deity save God*” (halaman 780). Dalam ayat ini “*ilâh*” diterjemahkan dengan *deity*, Allah dengan *God*. Buya Hamka juga mengartikan senada dengan ini.

Apakah para ulama umumnya sepakat, tentang dilakukannya penerjemahan seperti itu?

Para ulama memang berselisih pendapat, apakah bisa atau tidak kata “Allah” itu diterjemahkan. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika orang-orang Persi, sebagai orang-orang bukan Arab mulai memeluk Islam, merekalah sebetulnya yang pertama kali menghadapi masalah terjemahan. Mereka sampai sekarang tetap menggunakan bahasa Persi, tidak mau diarabkan. Di sini masalah terjemahan selalu dipersoalkan. Persi memang lain dengan Mesir, yang mengalami pengaraban total setelah masuk Islam.

Ternyata masalah ini dulu pernah diulas oleh Buya Hamka dalam tulisannya “Tuhan atau Allah, Sembahyang atau Shalat”. Dalam hal ini Buya Hamka menyatakan bisa. Namun karena beliau menyadari masalah ini masalah kontroversial, maka beliau mem-

berikan kebebasan kepada umat Islam untuk menganut mana saja yang dianggap benar. Bagi beliau, ini masalah ijtihad.

Yang sering dipertanyakan orang, bahwa Allah adalah sebuah nama yang khas, sebagai suatu ciri. Di sini, apakah sikap monopoli mengenai nama Tuhan sebagai Zat Yang Mahatinggi memang memungkinkan adanya pilihan yang macam-macam?

Betul masalahnya begitu. Dulu Buya Hamka yang mengemukakan argumen demikian. Di zaman Jahiliyah, nama Allah juga dipakai oleh orang Jahiliyah. Tapi kemudian Nabi Muhammad membawa ajaran yang membersihkan konsep tentang Allah itu dari unsur-unsur syirikinya (penyekutuan). Kita juga bisa membawa konsep tentang Tuhan, lalu kita bersihkan unsur-unsur syirikinya.

Jadi, mengapa harus Allah?

Ya. Sebab kalau harus hanya Allah, dan tidak boleh dinamakan dengan bahasa lain, lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa dulu, misalnya, menyembah siapa. Dalam al-Qur'an memang disebut menyembah Allah, tapi dia sendiri tidak menyebut dengan Allah, tapi Yahweh, Johova.

Coba dibaca dalam buku Buya Hamka, *Membahas Soal-soal Islam*, halaman 61. Di sini Buya Hamka menyebut, bahwa dulu di Semenanjung Melayu orang menyebut Allah Ta'ala disalin dengan bahasa Melayu dengan Dewata Mulia Raya. Tidak ada ulama-ulama yang membantah, baik ketika mulai menyalin ke dalam bahasa Melayu maupun sampai kini.

Jadi seperti Anda sebut tadi, reaksi terhadap pendapat-pendapat Anda itu, lahir karena mereka mengalami keterbatasan referensi. Mereka kurang membaca, begitu?

Betul. Istilah saya, mereka itu kehilangan jejak riwayat intelektualisme Islam, akibat adanya suatu fase dalam pemikiran Islam di Indonesia yang ramai-ramai meninggalkan kitab lama. Di sinilah relevansinya kita menyerukan untuk kembali melihat kita-kitab lama.

Marilah kita lihat *Fath al-Rahmân*, kitab indeks al-Qur'an. Dalam kitab ini rupanya Allah dilihat sebagai nama, karenanya lafaz Allah disendirikan dalam *bâb al-hamzah*. Di sini Allah disebutkan 924 kali, Allahi 1131 dan Allaha 591 kali. Hanya begitu saja. Tetapi dalam *al-Mu'jam al-Mufabras* penulisnya berpendapat bahwa lafaz Allah itu berasal dari *al-ilâh*, karena ditempatkan di bawah *heading* (judul) *hamzah, lâm, hâ'*. Kita lihat Allah itu *al-*nya merupakan *hamzah washl*. Karena itu menjadi *wallâhi, billâhi*, dan sebagainya. Itu berarti kata Allah bukan merupakan akar kata yang asli. Sebab akar kata yang asli pasti menggunakan *hamzah qath'*. Jadi menurut *al-Mu'jam al-Mufabras* ini, kata Allah asalnya memang dari akar kata *al-ilâh*.

Penjelasan Anda tampaknya memang disandarkan pada alasan yang kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka yang berpendapat Allah sebagai Yang Mahatinggi adalah khas, dan mereka bersikukuh dengan pendapatnya ini. Kalau kita boleh mengira, timbulnya pendapat itu, apakah dalam rangka pemurnian doktrin ketuhanan, misalnya, atau karena ada sesuatu yang lain?

Bisa jadi begitu. Secara *husn al-zhann* (berbaik sangka), mereka itu tampaknya mau asli-murni, tetapi salah. Niatnya baik, tapi kesimpulannya salah. Maunya asli, otentik, tapi kemudian salah dalam memandang persoalan. Sebab Allah itu sebetulnya sebutan untuk konsep mengenai wujud Yang Mahatinggi. Sebagai wujud Yang Mahatinggi, maka Dia bisa disebut apa saja oleh bangsa yang berbeda-beda. Jadi, itulah salah mereka. Karena itu, saya, Gus Dur (Abdurrahman Wahid — Ketua PBNU), dan Pak Munawir Sjadzali sering mengemukakan, bahwa kita harus membaca warisan kita lagi,

agar tak kehilangan jejak. Orang-orang itu berpendapat demikian, karena mereka itu memang kehilangan jejak.

Tentang Allah dan *God* dalam teks Inggris, bagaimana?

Saya banyak mendapatkan buku, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris, termasuk dari Kedutaan Besar Iran. Dalam buku-buku yang berbahasa Inggris, ada juga yang menggunakan kata Allah, tapi banyak juga yang sama sekali tidak menggunakan kata Allah. Satu buku, semua menggunakan kata-kata *God*, bukan Allah. Tadi saya katakan, bahwa Allah itu merupakan sebutan dalam bahasa Arab untuk konsep Wujud Yang Mahatinggi, *the Supreme Being*. Oleh karena itu, *Supreme Being* ini bisa disebut macam-macam dalam bahasa berbagai bangsa.

Coba kita lihat juga, kitab yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, salah seorang pendiri Madrasah Thawalib di Padang Panjang. Dia menyebutkan bahwa yang disebut Ahli Kitab itu tidak hanya Kristen dan Yahudi, tapi juga orang Majusi, orang Sabean, Hindu, Kong Hu Cu, bahkan juga orang Shinto. Pendapat Abdul Hamid Hakim ini mengutip dari al-Thabari, Ibn Jarir al-Thabari, pengarang kitab *Tafsîr al-Thabarî*.

Tulisan ini dibuat dalam rangka polemiknya dengan salah satu kelompok dalam Islam yang menyatakan sekarang ini orang Islam laki-laki tidak boleh lagi kawin dengan perempuan Kristen, karena katanya, orang Kristen sudah musyrik, sebab mereka percaya kepada Trinitas (Tritunggal, bahwa Tuhan terdiri atas tiga unsur: unsur Bapak, Anak dan Roh Kudus).

Pendapat ini oleh Abdul Hamid Hakim dibantah, bahwa persoalan ini pernah dibawa kepada Syaikh Rasyid Ridla (muridnya Muhammad Abduh). Jawaban Rasyid Ridla secara ringkas menyatakan, bahwa orang-orang musyrik yang diharamkan Allah untuk dinikahi oleh orang Islam adalah musyrik Arab. Itulah pendapat yang dirajihkan, diunggulkan oleh tokoh mufassir terbesar, yaitu Ibn Jarir al-Thabari. Dinyatakan pula bahwa orang-orang Majusi, orang

Sabean, orang Hindu, begitu juga orang-orang Cina dan Jepang, semua itu *ahl kutub musytamilah 'alâ al-tawhîd ilâ al-ân* (yang kitab-kitab itu semuanya mengandung tauhid sampai sekarang). Tapi perlu ditekankan di sini kata *musytamilah* (mengandung), artinya ada unsur tauhid di sana.

Cerita selanjutnya, Abdul Hamid Hakim mengutip beberapa firman Allah, yang intinya menyatakan bahwa untuk setiap bangsa itu pernah diutus seorang utusan. “*Wa anna kutub-ahum samawiyah*”, semuanya itu kitabnya kitab Samawi (berasal dari Allah).

Jadi agama samawi itu bukan hanya Islam, Kristen, Yahudi, seperti biasanya dipahami, tapi juga agama yang lain-lain itu. Ini juga berarti dibenarkan menyebutkan Wujud Yang Mahatinggi itu dengan bahasa masing-masing.

Tidak usah kita mencari contoh jauh-jauh. Di Jawa saja orang menyebut Pangeran, Gusti Pangeran. Padahal “Pangeran” banyak juga, ada Pangeran Diponegoro segala. Dikatakan pula “*Ora ono Pangeran ananging kejobo Gusti Allah*”, tapi ada Pangeran Diponegoro. Jadi masalahnya, masalah peristilahan.

Jadi masalah peristilahan saja yang kurang mereka pahami? Karena mereka kehilangan jejak warisan lama akibat kurang membaca, begitu?

Ya. Mereka kehilangan jejak dalam tradisi intelektual Islam. Oleh karena itu cara mengobatinya adalah dengan menumbuhkan tradisi intelektual; yang berkesinambungan, kontinyu. Kita tengoklah berbagai pendapat dan tradisi pemikiran Islam yang pernah ada sejak dulu. Kita dengar misalnya pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Abu Hanifah atau Imam Hanafi adalah orang Persi. Ia mengizinkan orang sembahyang dalam bahasanya masing-masing. Ini harus dilihat, karena dialah seorang Imam mazhab yang mewakili suatu kelompok dalam umat Islam yang pertama

kali menyadari perlunya masalah terjemahan, karena mereka itu bukan orang Arab.

Tapi, kalau harus memilih, mana yang lebih baik.

Mana yang lebih baik, sembahyang dalam bahasa Arab atau diterjemahkan? Tentu saja jauh lebih baik kalau dalam bahasa Arab. Sebab di sini sudah tidak ada keraguan lagi.

Tapi persoalannya adalah, persoalan akademis, bukan persoalan harus memilih mana yang lebih baik, apa sebaiknya. Kalau persoalannya harus memilih mana yang lebih baik menyebut Allah atau Tuhan, tentu kita akan memilih menyebut Allah. Tapi dari sudut pandang akademis, itu masih bisa dipersoalkan, karena memang ada masalah di sana. Dan ini ada kaitannya dengan Pancasila. Karena unsur penolakan sebagian orang terhadap Pancasila, dan mereka menganggap bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila itu bukan tauhid, karena di situ disebut Tuhan, bukan Allah.

Ada kelompok yang berpendapat demikian?

Ada. Ada yang berpendapat demikian.

Masalah lain, tentang pendapat Anda, agar umat Islam meninggalkan absolutisme. Bagaimana hal ini bisa Anda jelaskan?

Soal absolutisme, menurut saya merupakan konsekuensi dari ucapan syahadat — *lâ ilâh-a illâ Allâh* — tidak ada yang absolut kecuali Allah. Dan Allah sebagai konsep tentang wujud Yang Mahatinggi, tidak bisa kita ketahui. Oleh karena itu manusia tidak bisa mengetahui yang mutlak, sebab yang mutlak berarti Tuhan. Dan yang mutlak itu harus satu. Kalau ada dua yang mutlak, itu tidak lagi mutlak namanya. Jadi mengetahui kebenaran mutlak itu sama dengan mengetahui Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Lihat saja cerita Isra' Mi'raj. Rasulullah menceritakan tentang Mi'raj itu,

seperti terungkap dalam surat *al-Najm*: “*idz yaghsyâ al-sidrat-a mâ yaghsyâ*” (ketika pohon Sidrah — Sidratul Muntaha — diliputi oleh cahaya atau sesuatu yang meliputi secara tak terlukiskan), kemudian Nabi *saw* tidak bisa berbuat apa-apa, terpukau, sama sekali. Lalu Nabi menerima wahyu.

Nah, Nabi ketika itu ditanya: Bagaimana rupa Tuhan itu? Nabi bilang, dia tidak bisa mengetahui. Sebab Sidratul Muntaha itu adalah batas pengetahuan manusia. Di balik Sidratul Muntaha itu hanya Tuhan yang tahu, ia adalah misteri bagi manusia.

Karena itu tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah, yang berarti juga mengorientasikan hidup hanya kepada Allah, itu dipertentangkan dengan *Thâghût*. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Tuhan telah mengutus utusan kepada setiap manusia untuk menyampaikan ajaran, hendaknya manusia menyembah Allah, dan menjauhi *Thâghût*.

Apa itu *Thâghût*? Akar katanya sama dengan *thaghâ*, *thughyân*, yang tidak lain adalah tiran. Di mana pun yang namanya tiran itu selalu dimulai dengan klaim sebagai yang paling benar. Karena itu setiap tirani dengan sendirinya otoriter, *authoritarian*, perlu pengakuan sebagai yang paling tahu.

Tampaknya, yang dipersoalkan banyak orang, berkaitan dengan nilai-nilai keimanan. Dalam arti, kalau kita sudah beriman dan dalam keimanan kita itu tidak ada kepercayaan yang mutlak, bukankah itu berarti keimanan yang tidak penuh. Keimanan macam apakah itu?

Lho, itnan itu mutlak, karena Allah itu yang mutlak. Yang mutlak juga Allah sebagai tujuan hidup, sebagai *paraning urip*, sebagai *sangkan paraning urip*, yang sebetulnya merupakan pemahaman orang Jawa terhadap kalimat “*innâ li ’l-Lâhi wa-innâ ilay-hi râji’ûn*”, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang mutlak. Kita berjalan di garis jalan yang menuju Allah, tapi kita tidak bisa mengetahui Allah. Yang bisa kita lakukan

adalah mendekat kepada Allah. Karena itu, dalam al-Qur'an konsep yang dominan adalah *taqarrub*, mendekati Allah, bukan *ma'rifat Allâh* (mengetahui Allah). Meskipun *ma'rifat* juga digunakan, tapi penggunaannya tidak dalam arti mengetahui Zat-Nya. Lebih merupakan *liqâ'* (perjumpaan).

Tentang ayat: “*inna al-dîn-a ‘inda Allâh al-islâm*”, misalnya. Sering disebut-sebut sebagai sandaran argumen bahwa Islam agama yang paling benar. Cak Nur sendiri bagaimana menerjemahkan ayat ini?

Oke. Itu surat *Âl-u ‘Imrân* ayat 19. Mari kita terjemahkan. Saya banyak menggunakan tafsir *The Holy Qur’an* karangan Muhammad Asad ini, karena menurut saya, kitab ini dikerjakan dengan banyak menggunakan referensi tafsir-tafsir lama. Ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya: “*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah sikap pasrah kepada-Nya*”. Islam di sini juga diterjemahkan, bukan sebagai agama, tapi Islam sebagai sikap pasrah kepada Tuhan. Itulah sebabnya seluruh agama nabi-nabi terdahulu disebut Islam, karena semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Allah.

Apakah dulu Nabi Musa menamakan agamanya dengan perkataan Islam, memang tidak. Karena Islam adalah sikap pasrah itu. Anda boleh sebut bahwa referensi saya tentang penerjemahan ini adalah Tafsir Muhammad Asad, tafsir ini saya anggap memiliki otoritas, karena banyak sekali mendasarkan pada tafsir-tafsir lama, seperti *Tafsîr al-Thabarî*, *al-Kasasyâf*, juga dari Mu'tazilah.

Tentang ayat: “*Wa man yabtaghî ghayr al-Islâm-a dîn-an ...*,” surat *Âl-u ‘Imrân* ayat 85?

Ya. Ini dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan: “*Barang siapa mencari agama yang lain daripada sikap pasrah kepada Tuhan, maka dia tidak akan diterima*”. Artinya meskipun mengaku beragama

Islam, tetapi kalau kita tidak pasrah kepada Allah, tidak akan diterima. Jadi soalnya kita ini banyak membaca atau tidak. Dan ini yang tidak dibaca oleh orang-orang itu.

Juga tentang *Khâtam al-Nabîyîn*, penjelasannya bagaimaniana?

Semua agama itu Islam, dalam arti mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan. Tetapi lihat saja, di antara semua agama, yang mengakui agama lain hanya Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad. Ini berarti bahwa agama ini adalah agama yang paling unggul dan paling sempurna. Yang demikian ini tidak usah kita ragukan. Justru kesempurnaannya Islam itu adalah karena agama ini bersifat *ngemong*, mengayomi semua agama yang ada. "*Mushaddiq-an li-mâ bayna yadayhi wa muhaymin-an 'alayhi...*" *Muhaymin-an* artinya adalah melindungi, mengayomi, juga terhadap agama-agama yang lain.

Sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat nabi kepada orang-orang Kristen dan pemeluk agama-agama lain yang macam-macam itu. Di seluruh dunia Islam, yang tidak ada orang bukan Islam *kan* cuma di Hijaz saja, yang sekarang diperluas ke Saudi Arabia. Tapi di Yaman, di Oman, Bahrain, dan di mana-mana, orang Yahudi, Kristen, itu banyak sekali. Mereka itu orang-orang Arab juga, dan tidak diapa-apakan. Jadi Islam itu sebenarnya luar biasa toleran dan terbuka.

Apakah mereka yang di-*emong* dan diayomi itu, juga termasuk dalam kategori Islam?

Lho, tidak. Mereka itu memang tidak termasuk kategori Islam ("versi" Nabi Penutup), tapi agama mereka itu mengandung unsur tauhid. Persoalannya sekarang, bagaimana orang-orang itu kemudian membawa tauhid yang benar pada agama mereka sendiri.

Jadi kadar ketauhidan yang ada pada mereka, untuk mengukur keabsahannya, bagaimana ini?

Begini. Lihatlah dalam kitab *al-Mu'in al-Mub'in* jilid 4, karangan Abdul Hamid Hakim ini. Di sini dinyatakan: Bahwa buku-buku mereka, buku Kong Hu Cu dan sebagainya itu semuanya samawiyah. Tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan, sebagaimana terjadi pada kitab-kitab Yahudi dan Kristen yang datangnya lebih kemudian dalam sejarah. Artinya, agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan lain-lain, lebih tua.

Menurut Abdul Hamid Hakim, pada pokoknya perbedaan antara Islam dengan Ahli Kitab (Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Shinto, dan sebagainya) menyerupai perbedaan antara orang-orang Islam yang betul-betul berpegang kepada "Kitab dan Sunnah" dengan para "ahli bid'ah". Jadi sepertinya mereka itu dianggap telah melakukan "bid'ah". Kalau untuk intern Islam disebut bid'ah, untuk Ahli Kitab disebut *tabrif* (penyelewengan).

Dalam pandangan Abdul Hamid Hakim, agama Hindu itu sebenarnya mengandung kepercayaan tauhid, di samping ada konsep Trimurti, mereka juga punya Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal. Kita sendiri selaku umat Islam, dalam beriman juga berproses. Dulu tidak ada rumusan sifat dua puluh, kini kita punya. Karena itu saya katakan iman itu mutlak, karena Allah itu mutlak. Tapi kita semua tahu, sejarah itu berkembang, termasuk sejarah rumusan akidah dalam Ilmu Kalam.

Bagaimana pendapat Anda, tentang sebuah hadis Nabi, yang menyatakan bahwa Nabi marah ketika sahabat Umar *ra* bertanya tentang isi Taurat. Menurut Nabi, lebih baik menanyakan isi al-Qur'an, karena kitab-kitab yang lalu itu sudah tercakup dalam al-Qur'an.

Saya kira hal itu harus kita lihat kesempatan dan situasinya. Artinya, hadis itu harus dibaca dan dipahami dalam situasi apa dikemukakan oleh Nabi. Sebab para ulama terdahulu ternyata banyak sekali yang mempelajari Taurat dan Injil. Seperti Ibn Taimiyah, misalnya, berpendapat sebagian besar isi Taurat

masih benar. Ibn Taimiyah menulis buku *al-Jawâb al-Shahîh li-man Baddala Dîn al-Masih* (Jawaban yang benar untuk orang yang mengubah agama al-Masih). Menurut dia, apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu sebagian besar benar, dan itu disebutkan juga dalam beberapa buku yang lain. Hal-hal semacam ini, yang merupakan ruang lingkup kajian lama, juga harus kita kuasai. Jangan hanya tahu dari buku-buku Barat. Tradisi intelektual kita harus *lumintu*, kontinu begitu.

Jadi, karena mereka kurang membaca kitab-kitab lama, lalu mereka salah paham terhadap pandangan-pandangan Cak Nur, begitu?

Ya, harus saya akui, orang yang paling paham terhadap hal-hal semacam ini justru Gus Dur, Kiai Sahal (KH Sahal Mahfudz dari Kajen, Pati) dan beberapa yang lain. Karena apa, karena mereka membaca semua kitab-kitab itu. Tapi orang-orang yang tidak pernah membaca kitab, justru yang paling banyak salah paham. Sebenarnya kalau memang mereka banyak membaca, HAR Gibbs sebetulnya sudah mengingatkan bahwa kaum modernis akan mengalami pemiskinan intelektual kalau mereka sendiri menampik kekayaan lamanya. Dan yang paling terkesan oleh peringatan itu adalah Fazlur Rahman. Maka dia mempelajari sungguh-sungguh kekayaan klasik.

Tapi ada sebagian yang berpendapat, bahwa gagasan-gagasan Cak Nur yang dilontarkan kurang menguntungkan bagi perkembangan Islam. Mereka berpendapat, bahwa gagasan-gagasan Anda tidak menyentuh masalah praktis yang dibutuhkan umat. Singkatnya, tidak memecahkan problema yang sedang dihadapi umat.

Ya, bisa saja mereka menilai demikian. Tapi ingat, dulu orang juga memberikan reaksi yang macam-macam kepada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah waktu itu mendirikan HIS, MULO, AMS,

dan macam-macam, yang dianggap berbau Belanda, Muhammadiyah juga dikecam pedas. Tidak hanya dari sebagian orang NU, tapi juga orang-orang PSII menuding bahwa Muhammadiyah adalah agen Belanda. Dan ribut, waktu itu. Saya melihat semua itu ketakutan terhadap bayangan yang sebetulnya tidak ada. Dibayangkan seolah-olah ada orang yang akan menghancurkan Islam dan sebagainya. Apakah itu yang disebut kebutuhan umat?

Soal penilaian Cak Nur. Orang yang simpati terhadap Anda, mengatakan bahwa yang Anda lakukan adalah usaha dinamisasi, penyadaran terhadap situasi umat yang terlelap. Tapi mereka yang sinis mengatakan, Anda ini sedang cari popularitas, senang *dikeploki*, dan sebagainya.

Ya, saya *toh* tidak harus membenarkan atau membantah. Kalau ada yang mengatakan saya cari popularitas atau senang *dikeploki* (dielukan dengan tepuk tangan), tentu saja saya jawab: tidak! Tapi jawaban itu tentu saja *muspra* (*mubazir*, sia-sia). *Toh* bukan itu jawaban yang diharapkan. Jadi yang paling baik saya kira ya mari, silakan dibuktikan saja.

Tapi orang pun perlu tahu, latar belakang munculnya gagasan-gagasan Anda.

Wah itu panjang ceritanya. Lain kali saya memang akan cerita tentang ini. Tapi secara singkat ingin saya katakan, saya ini dibesarkan di Jombang, yang lahir dan dibesarkan dalam kultur pesantren. Ayah saya seorang yang sangat taat kepada KH Hasjim Asy'ari, pemimpin pesantren Tebuireng, Jombang dan tokoh pendiri NU, yang masih ada pertalian hubungan kerabat. Ketika dulu NU memisahkan diri dengan Masyumi, ayah saya tidak mau ikut NU dan tetap di Masyumi. Ya tentu saja waktu itu dia dimusuhi. Dan saya sebagai anaknya ikut kecipratan juga. Saya waktu itu, di Pesantren Rejoso Jombang, diledek, katanya anak orang Masyumi kesasar.

Saya terus dipindahkan ke Gontor, Ponorogo, lalu ke IAIN, Jakarta, dan masuk HMI. Lalu saya melihat kesenjangan intelektual di kalangan modernis ini. Kesenjangan intelektual, maksud saya jejak pemahamannya terhadap Islam tidak lengkap, seperti saya katakan terdahulu. Mereka kebanyakan tahu Islam dari kaum Orientalis, bukan dan khazanah Islam yang ada. Mereka tidak lengkap membaca kitab-kitab lama sebagai warisan tradisi intelektual Islam, tapi dari sarjana Belanda, Inggris, dan sarjana-sarjana Barat lainnya. Islamnya mereka itu “Islam sekolahan”, kata orang-orang generasi bapak saya. Mereka lupa atau tidak tahu tradisi.

Ini yang ingin saya ingatkan, ingin saya perbaiki, kalau bisa. *Lho*, ironisnya *kok* saya malah dituduh mewakili kaum Orientalis. Padahal mereka yang tidak tahu tradisi intelektual Islam. Karena itu, hadirnya pemikiran-pemikiran H. Agus Salim dan Hamka, sangat penting untuk dikaji ulang. Mereka, Agus Salim dan Hamka, merupakan orang-orang yang tahu tradisi dan mampu melakukan terobosan-terobosan secara efektif. Saya kira itu dulu sebagian dari sebab, mengapa saya berpendapat seperti yang disetujui atau disalahpahami orang. [❖]

ISLAM DAN SEMPALAN EKSTRIM¹

Nurcholish Madjid pernah menggemparkan karena pemikirannya yang dianggap kontroversial. Penggemparan itu terjadi sebelum ia pergi ke negeri Paman Sam, Amerika. Baru beberapa bulan tinggal di Indonesia, setelah meraih gelar doktor di Universitas Chicago, AS, dalam ilmu filsafat dan teologi Islam ia kembali menurunkan pikiran-pikiran yang kritis. Berikut ini petikan penuturannya kepada Bambang Harymurti dari Majalah *TEMPO* perihal hubungan ABRI dengan Islam di Indonesia:

Sebenarnya saya khawatir kurang *up to date* karena sudah enam tahun tidak di sini. Jadi, yang saya berikan kesan saja, yang belum tentu didukung dengan fakta yang kuat.

Pertama, saya berpendapat bahwa ABRI itu maunya netral terhadap agama Islam. Dalam arti — mungkin banyak yang tidak setuju dengan istilah ini — mau berdiri di atas semua kelompok agama. Bukan berdiri di atas agama, tapi di atas semua kelompok agama. Soalnya, ABRI merasa sebagai pewaris yang sebenarnya dari nilai-nilai 45, yang agaknya dipersepsi sebagai nilai revolusi dan nilai keindonesiaan yang sebenarnya.

ABRI antikomunis, dan sikap ini diikuti dengan tindakan nyata untuk menentang komunisme, bahkan juga Marxisme. Ini mempunyai implikasi yang positif sekali terhadap umat Islam.

¹ Majalah *TEMPO*, “Islam dan Sempalan Ekstrim”, 27 Oktober 1984. Pewawancara Bambang Harymurti.

Dengan kata lain, ABRI secara tidak langsung sangat menguntungkan kaum Islam, sebab di Indonesia ini tidak ada saingan yang begitu vokal dan militan terhadap Islam seperti komunisme.

Lebih dari itu, secara individual, orang-orang ABRI juga banyak sekali berbuat untuk agama Islam, misalnya lewat PTDI. Yang aktif di Muhammadiyah juga banyak. Kemudian ada juga PADI yang agak eksklusif ABRI. Lalu ada mubalig individual, seperti Isa Edris dan Yunan Helmi Nasution.

Tentu saja ada sudut pandangan lain, yaitu: Apa yang tidak diperbuat ABRI terhadap Islam. Itu pendekatannya negatif, dengan tidak. Seperti tidak mendirikan ini, tidak membangun itu.

Sikap ABRI terhadap Islam ada tahapan-tahapannya juga. Lihat saja, misalnya jika kita ambil pemilu sebagai indikator. Pada pemilu pertama 1955, ada optimisme dari golongan Islam bahwa mereka yang dipimpin Masyumi, akan menang. Sebaliknya, ada juga kekhawatiran — yang tampaknya berlebihan — bahwa Islam akan menang dan Indonesia akan menjadi negara Islam. Ternyata, umat Islam hanya mendapat posisi kedua dan ketiga (urutannya PNI, Masyumi, NU, dan PKI).

Pada Pemilu 1971, ABRI mengambil-alih ketakutan PNI dan PKI terhadap kemenangan Islam. Karena itu ABRI, melalui Golkar, memasang kuda-kuda, agar Islam tidak menang. Kekhawatiran ini sebagian karena kesalahan umat Islam sendiri. Sampai sekarang kebanyakan orang Islam masih mempunyai persepsi, kalau menang dalam pemilu, itu terjemahannya kemenangan politik. Dan ada kelompok-kelompok yang menganggap, kemenangan politik itu harus diterjemahkan dalam bentuk negara Islam. Saya kira, latar belakang mengapa Presiden Soeharto menginginkan betul agar partai-partai berasas tunggal Pancasila ya, supaya tidak terjadi hal semacam itu.

Secara terus terang, pada Pemilu 1971 pendekatan Golkar dalam menghadapi pemilu agak negatif terhadap Islam. Karena itulah dipasang orang-orang yang diharapkan merupakan saingan atau pengerem, kemungkinan Islam itu maju, misalnya orang-orang kepercayaan.

Pemilu 1977 sudah berbeda sekali. Memang ada konsistensi, tapi juga ada proses. Waktu itu Golkar sangat mendekati Islam, sampai seorang pengamat dari luar, R. William Liddle, dari Universitas Ohio, AS, mengatakan bahwa Golkar pada tahun 1977 itu menganut *me tooism*, saya juga Islam. Untuk itu mereka menggunakan mubalig, dai, dan sebagainya.

Sepanjang pengetahuan saya, pendekatan yang pernah dilakukan Jenderal Widodo dan Widjojo Sujono pada akhir 1970-an mewakili suatu gejala dalam ABRI. Yakni semacam perasaan aman yang tumbuh terhadap Islam. Artinya Islam dianggap bisa dikendalikan. Kemudian mereka pun merasa aman untuk menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini tumbuh terus sampai sekarang.

Gejala tumbuhnya fundamentalisme memang ada, tapi bukan ideologis, melainkan sosial psikologis. Jadi sebetulnya ada perasaan tidak berdaya menghadapi Barat, yang menimbulkan reaksi fundamentalistis. Ironisnya, perasaan ini memperoleh ekspresi terkuat justru di kalangan orang Islam yang mulai ikut serta dalam kebudayaan Barat, dalam arti terdidik secara Barat. Seperti ketika Masyumi mengemukakan ingin mendirikan negara Islam, unsur-unsurnya kebanyakan yang berpendidikan Barat.

Saya melihat bahwa generasi yang sekarang ini, lebih bisa memahami dan menerima Pancasila. Saya kira Pancasila harus dipersepsi sebagai ideologi terbuka, jangan dijadikan atau dirumuskan menjadi dogma-dogma. Jadi ideologi terbuka hingga mempunyai kemampuan untuk mewedahi siapa saja. Tentu saja dalam wadah yang demikian lebar harus ada aturan permainan, yang dalam Pancasila sendiri telah ditetapkan. Misalnya prinsip musyawarah dan mufakat.

Kejadian yang baru-baru ini, saya kira itu tak akan menjadi *setback*. Lihat saja sikap Jenderal Try setelah peristiwa Tanjung Priok, atau pernyataan Jenderal Benny, ketika menegaskan, peristiwa itu bukan peristiwa agama. Dan ini betul. Saya melihat pernyataan itu benar, dalam arti tidak mau meruncingkan. Sebab meski pemeran peristiwa itu orang Islam, karena Indonesia itu

kebanyakan penduduknya orang Islam. Kalau seandainya mayoritas penduduknya Katolik, ya, orang Katolik ekstrim yang akan melakukan itu.

Ide negara Islam, saya kira, sekarang hanya tumbuh di kalangan sempalan yang ekstrem. Umat Islam sendiri tentunya mengalami evolusi pemikiran. Dan itu mulai terbaca oleh ABRI. Karena itu pendekatan ABRI kini mulai positif, dan itu baik sekali untuk perkembangan seluruh Indonesia. Adanya imbauan Pangab agar umat Islam sendiri melakukan pengamanan, merupakan suatu indikasi bahwa di kalangan umat Islam sendiri ada kelompok yang bisa mencegah. [❖]

APA KATA KIAI SAJA¹

Kalau merampas kemerdekaan pribadi, jadi berhala. Semua yang merampas kebebasan pribadi itu adalah berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita ciptakan, yang setelah jadi tidak bisa lagi kita kuasai, bahkan berbalik menguasai kita. Perampasan kemerdekaan pribadi, memang hilir-mudik di depan kita, bahkan seolah-olah, menjadi satu agenda kehidupan yang kita jalani bersama, yang menjurus pada pemakluman akan perampasan kemerdekaan pribadi tersebut. Pikiran tersebut ikut mewarnai percakapan Nurcholish Madjid dengan Adra P. Daniel, Saiman dan Yudhistira ANM Massardi dari majalah *HumOr*.

Cak Nur, 20 tahun lalu Anda menyerukan semboyan semut, *eb*, “Islam, Yes; Partai Islam, No!” Kemarin, dalam ceramah di Taman Ismail Marzuki, Anda mengklaim bahwa semboyan itu tetap relevan. Apakah itu berarti bahwa “Islam” harus selalu dipertentangkan dengan “Partai” sebagaimana “Yes” bertentangan dengan “No”?

Itu saya kemukakan 22 tahun yang lalu, tapi memasyarakatnya baru 21 tahun yang lalu. Yang bikin geger sih, waktu saya mengungkapkannya di Menteng Raya 58, sekitar bulan Januari 1979.

Apa itu tetap relevan dengan keadaan sekarang?

¹ Majalah *HumOr*, “Apa Kata Kiai Aja”, No. 52/25 November - 8 Desember 1992. Pewawancara Adra P. Daniel, Saiman dan Yudhistira ANM Massardi.

Menurut saya, tetap relevan. Saya kira malah bikin kuat. Orang bergembira dengan Islam, bersungguh-sungguh dengan Islam. Bukan dengan Partai Politik Islam. Karena, Partai Politik Islam *kan* sesuatu yang berinstitusi: wujudnya orang-orang juga.

Apakah tidak ada alternatif “jalan tengah” antara “Islam” dan “Partai” sebagaimana ada pilihan “Abstain” atau “Terserah” untuk “Yes” dan “No?”

Lho, Anda gimana *sih*? Itu sudah jalan tengah. Kita menolak partai politik, lalu — apa itu namanya — apakah mesti ada Partai Politik Islam sebagai alternatif? Kalau *No* ya *No*, kalau *Yes* ya *Yes*.

Begitu, ya?

Lho, iya. Saya bilang orang lebih melihat Islamnya daripada sekadar partainya. Artinya partai apa pun bisa diterima, asalkan di situ ada aspirasi keislaman yang universal. *Nggak* peduli PPP, Golkar atau PDI. Terus-terang, untuk menjelaskan ini tak bisa semenit dua menit didiskusikan, jadi saya anjurkan Anda baca buku saya yang setebal 700 halaman itu (Cak Nur menunjuk buku *Islam, Doktrin dan Peradaban*).

Apakah Anda ingin mengatakan bahwa “Partai” merupakan sebuah “berhala modern?”

Kalau merampas kemerdekaan pribadi, jadi berhala. Semua yang merampas kebebasan pribadi itu adalah berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita ciptakan, yang setelah jadi tidak bisa lagi kita kuasai bahkan berbalik menguasai kita.

Kalau begitu, Undang-undang bisa dikategorikan berhala juga, *dong?*

Oleh karena itu, saya setuju dengan Bung Karno, bukan manusia untuk Undang-undang melainkan Undang-undang untuk manusia. Itu juga Bung Karno tidak orisinal karena ia mengutip dari begitu banyak pemikir penting.

Bisakah Anda memberi contoh, apa saja yang tergolong sebagai “berhala modern?”

Banyak sekali. Misalnya, orang punya mobil, ternyata mobil itu kemudian merampas kemerdekaannya dan menguasai kesenangannya, hingga ia tak bisa lagi membayangkan jika suatu kali harus tidak punya mobil, harus jalan kaki. Seorang yang bebas harus bisa membayangkan hidup dalam situasi apa pun tanpa perlu kehilangan esensi kemanusiaannya.

Ketergantungan pada teknologi, itu berhala juga, kan?

Ya. Tapi selama barang hasil rekayasa teknologi yang kita ciptakan itu masih mengabdikan pada kita, itu justru dianjurkan.

Anda juga memperingatkan mengenai bahaya kultus dan fundamentalisme. Apakah Madonna, Rambo, Maradona, Zainuddin MZ, Rhoma Irama, Nurcholish Madjid, sudah memasuki wilayah kultus dan menyebarkan kegawatan fundamentalisme?

Kultus yang saya maksudkan sebenarnya — apa itu namanya — dalam pandangan saya adalah *cult system*, sesuatu yang menyangkut ajaran spiritual yang berpusat dari seseorang hingga pengkultusan kepada orang itu menjadi mutlak. “Dialah yang sanggup mengajak ke keselamatan.” Betapa banyak orang yang mengangungkan suatu kultus. Contohnya, ada yang percaya bahwa tanggal 28 Oktober kemarin adalah hari kiamat. Bahkan, di Korea sampai ada seorang ibu hamil yang nekad menggugurkan kandungannya. Alasannya, karena takut memberatkan dia naik ke langit!

Apa kultus individu di Indonesia juga begitu?

Biasanya ini kembali ke jargon. Masa Orba dan Orla dulu, orang-orang melakukan kultus individu terhadap Bung Karno. *It's a good way!* Tapi, kultus dalam pengertian *cult* sendiri bukan yang begitu!

Menurut Anda, apakah fundamentalisme ada hubungannya dengan jubah dan jenggot panjang?

Nggaaaak. Tidak *dong!* itu tidak diukur dengan *performance* semata, melainkan mental atau *mind set*. Almarhum Hadi Subeno bisa-bisa bilang, “orang sarungan itu fundamentalis”. *Wah* kalau gitu, orang telanjang tidak mungkin jadi pengikut fundamentalisme, *dong?*

Apabila Islam memang tidak mengenal sistem klerikal dan kependetaan, lantas mengapa harus ada kiai, ustaz, khatib, dan da'i?

Di situ kesalahpahamannya. Itu dari bahasa Jawa. Kiai itu bahasa Arabnya *'ulamâ'* atau *'âlim*, artinya orang yang berilmu. Oleh karena itu wewenangnya hanya ilmu, bukan agama. Juga tidak bisa menjamin keselamatan. Soal surga dan selamat, itu urusan kita dengan Tuhan. Bedanya dengan pendeta, kalau Anda orang Katolik mana boleh membantah pastor? Bisa masuk neraka!

Memang, ada orang Islam yang menganggap apa itu — keselamatannya itu tergantung pada gurunya. Prinsipnya, apa kata Kiai aja! *Wah!*

Dulu, Anda menganjurkan “sekularisme”, dan umat Islam geger menyerang Anda. Kini, Anda menganjurkan agar Islam menjadi agama yang “terbuka dan toleran”. Apakah Anda tidak kapok?

Dari siapa Anda tahu? Apa betul begitu? Saya *kok* nggak merasa. Atau Anda yang salah. Saya justru anti-sekularisme. Saya menganjurkan sekularisasi. *It's very different between secularism and secularization.*

Ya, maaf saja kalau begitu!

Nggak apa. Itu sama halnya dengan rasionalisme dengan rasionalisasi. Saya menentang rasionalisme, karena yang begini hanya menyembah dan mengagungkan rasio alias otak. Tapi saya anjurkan rasionalisasi, yakni pengembangan rasio. Beda, *kan?*

Apakah “terbuka dan toleran” itu berarti: “semua boleh, silakan saja?” apa Anda tidak takut kalau anjuran Anda itu disalahtafsirkan dengan paham “buka-bukaan?”

Ah, Anda itu — wah — gimana, *sib?* Keterbukaan sangat aksiomatik di dalam Islam. Sejarah Islam itu *kan* begitu: kosmopolitanisme. Anda *kan* tahu, orang Islam itu mengambil ilmu dari segala penjuru. Dari India dan Cina. Yang sepele saja, angka nol dari huruf Arab itu konon diambil dan Sumatera, kalau nggak salah dari Sriwijaya.

Jadi, tak mungkin disalahtafsirkan dengan buka-bukaan, ya?

Ha, ha, ha, ha...!

Tapi, apakah Anda cukup toleran terhadap bikini, rok mini atau malah terhadap Rukmini?

Ha, ha, ha. Tidak! Rok mini jelas menyalahi pertimbangan yang prinsipil. Tanyakan pada orang-orang yang memakai rok mini, apa tujuannya? Biar praktis? *Hub*, bohong! Buktinya kalau duduk, terpaksa tarik sana-tarik sini, biar ujung roknya menutupi

lututnya. Itu *kan* cuma ingin menarik perhatian orang, tapi tidak rasional.

Betulkah kebudayaan Islam itu hasil pinjam sana-sini?

Betul. Kebudayaan Islam itu semuanya pinjaman yang disatukan dan dijadikan sesuatu yang baru. Contohnya bangunan masjid. Kubahnya dari Bizantium, menaranya dari Persia. Dalam bahasa Arab, menara itu *manârah* (tempat api), bangunan “menara” dipinjam dari orang Majusi yang menggambarkan Tuhan dengan api dan menyembah api. Untuk menjaga kesuciannya, itu ditaruh di tempat yang tinggi. Di sinilah jelasnya, Islam itu kosmopolitan.

Apakah ada hasilnya?

Ada, sesuai dengan hikmah, “Ambillah hikmah itu dari mana pun, dan tidak akan berpengaruh buruk pada kamu dari bejana apa pun yang akan datang.” Maksudnya, tidak melihat dari siapa, tapi dari apanya.

Menurut Anda, mana yang benar: Islam yang disesuaikan zaman, atau zaman yang menyesuaikan diri dengan Islam?

Ah, itu *kan* cuma retorika! Yang dimaksud, *kan* prinsipnya. Prinsip itu syariat atau jalan. *Nah* sebagai jalan, maka siapa saja yang berada di situ harus bergerak, biar tidak macet. Kalau berhenti di tempat, selain menyalahi aturan jalan, juga bisa berbahaya, karena bisa dianggap telah sampai. Sampai pada Tuhan. Orang begini namanya musyrik, karena mengaku telah “sampai” kepada Tuhan yang Mutlak.

Tapi Anda juga pernah bilang, fiqih Islam banyak yang tak sesuai lagi dengan zaman, benarkah itu?

Betul sekali. Misalnya para petani semuanya wajib zakat, tapi orang Pondok Indah tidak wajib. Bagaimana itu?

Apakah zakat dan pajak, bersaudara dengan upeti di zaman raja-raja dulu?

Setahu saya, upeti itu dalam agama tidak ada. Yang ada cuma pajak. Jadi, beda *lho*?

Anda juga pernah bilang, di Indonesia baru sila ketiga dari Pancasila yang bisa berjalan. Kenapa begitu?

Iya, benar. Baru Persatuan Indonesia yang bisa kita galang. Kalau Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mana? Buktinya, pedagang kaki lima dikejar-kejar. Kalau Ketuhanan yang Maha Esa? Alhamdulillah masih ada yang beragama, tapi substansinya *kan* mesti terus berlanjut.

Beberapa waktu lalu, Mensesneg Moerdiono menguraikan beberapa “kelemahan” negara yang berdasarkan agama. Pendapat Anda?

Saya kira, Pak Moerdiono tak sepenuhnya betul. Dia selalu mempunyai gambaran bahwa negara agama itu teokrasi yang di Barat itu. Dalam Islam, tidak ada suatu rezim yang mengaku sebagai *holy* atau suci. Tapi di Barat ada *Holy Roman Empire*, menindas sama sekali.

Menurut Anda, apa yang terjadi jika suatu negara mayoritas penduduknya Islam, atau sebaliknya?

Di Filipina, begitu banyak orang non-Islam, tapi mana ada menteri yang Islam? Tapi di Irak yang mayoritas Islam, perdana menterinya saja orang Kristen. Tidak ada stigma atau perasaan

macam-macam pada orang Irak, biasa-biasa saja. Kalau sebuah negeri yang mayoritas Islam, agama lain itu bukan masalah. Tapi, kalau dibalik, sebuah negeri mayoritas bukan Islam, maka agama lain terutama Islam akan mendapat masalah. Contohnya di Thailand, Birma, Yugoslavia. Banyak lagi.

Oya, kenapa sih, Anda belajar filsafat Islam di Amerika, bukannya di Mesir atau Arab?

Begini saja. Orang Makkah, kalau belajar agama ke mana? Ya, ke Madinah, *kan? Nah*, kalau tamat dari Madinah lantas ke mana? Dia akan ke al-Azhar, Mesir. Kalau sudah dari Al-Azhar? Terus ke Universitas Kairo. Kalau di Kairo sudah selesai, mau ke mana lagi? Sudah tentu akan ke Oxford di Inggris, atau ke Amerika! Kenapa begitu? Substansi ilmu memang berada di Arab atau Mesir. Tapi metodologinya ilmu, di Baratlah yang lebih baik.

Sekarang, kalau Anda mau belajar bahasa Jawa mesti ke mana?

Bukan ke Solo, tapi ke Leiden, Belanda. Karena, di sanalah penelitian ilmiah bahasa Jawa. Jadi, bukan orang Solo yang jago bahasa Jawa, tapi orang Belanda.

Apakah Anda tidak terpengaruh paham-paham Barat?

Tergantung orangnya, *dong*. *Nggak* usah ke Barat, di Jakarta saja pengaruh Barat sudah *kenceng, kok*. Banyak orang di Jakarta yang lebih Barat dari orang New York. *Night Club*-nya lebih vulgar. Menyedihkan sekali memang. Makanya *HumOr* jangan ketawa terus.

Soal jilbab. Banyak perdebatan. Apa betul itu pakaian Islam?

Ada yang menganggap begitu. Kita ini *kan* menganut kebebasan beragama. Karikатурnya, kalau ada yang menganggap memukul

bedug tiap hari bikin dia naik sorga, ya dia berhak melakukannya. Biarin saja. Tapi saya tidak setuju. Istri saya di rumah tidak memakai jilbab.

Bagaimana dengan sunat (khitan), budaya atau kewajiban?

Namanya saja sunat. Artinya nggak wajib. Tak ada mutlak-mutlakan. Tak ada orang yang dikafirkan karena *nggak* sunat. Makanya saya sesalkan juga ada orang yang sudah tua masuk Islam, dipaksa-paksa mesti sunat. Tapi kalau punya pertimbangan demi kesehatan, ya silakan saja.

Lalu bagaimana pandangan Anda tentang alkohol?

Alkohol sendiri nggak najis. Yang najis itu bila dijadikan minuman, karena dikaitkan dengan berhalala tadi. Kalau menurut saya, alkohol itu *kan* sumber kejahatan, lebih *safe* untuk dihindari. Tapi orang Islam di sini kadang-kadang aneh. Mereka mengharamkan bir, tapi menghalalkan tapai. Padahal tapai *kan* kadar alkoholnya lebih besar. Kalau dikaitkan dengan kesehatan, bahwa alkohol bisa merusak sel otak, maka tapai lebih berbahaya daripada bir.

Tentang homoseksualitas?

Wah, itu sudah deh. Sudah nggak dihalalkan lagi! Harus dicari pengobatannya. Kebetulan saya tidak mendalami ini. Yang penting, jangan kita musuhi.

Kalau bunga bank?

Mazhab saya Masyumi. Menurut Pak Syafrudin Prawiranegara, bunga bank itu beda dengan riba. Alasannya, riba *kan* menjurus ke eksploitatif. Ada orang yang butuh duit, lalu didesak boleh pinjam

asal bunganya seabreg-abreg. Beda dengan bank. Yang pinjam ke bank *kan* orang-orang bonafid!

Kalau judi? Bang Ali Sadikin pernah bilang; Jakarta lebih dari 50 persen dibangun dari perjudian?

Berarti, al-Qur'an benar. Ada bahaya dan manfaatnya. Tapi, bahayanya lebih besar. Ali betul, bila melihat manfaatnya *doang*. Tapi, kerusakan mental yang diwariskan sehingga orang giat berjudi dan kurang bekerja keras, itu lebih berbahaya. Kalau ada ahli yang menghitung, jumlah kerugiannya mungkin lebih besar dari keuntungannya.

Kalau aborsi?

Ah, kalau itu sulit. Artinya, variasinya cukup banyak. Ada yang bilang, bila pada janin belum ditiupkan ruh, boleh. Pada mazhab Abu Hanifah, boleh. Tapi orang Indonesia umumnya menganut Madzhab Syafi'i.

Sepengetahuan Anda, apakah ada agama yang menganjurkan umatnya untuk menggalakkan humor?

Memang ada. Sebetulnya banyak sekali. Semuanya untuk ke-gembiraan.

Kalau di rumah, apakah Anda diam membisu saja?

Sama Anda saja saya ribut, masa di rumah kayak patung?

Dari seminar ke seminar, apakah Anda punya pengalaman-pengalaman unik?

Nggak ada yang unik. Saya *nggak* pernah nyari yang aneh-aneh *sib*.

Berapa koran atau majalah yang Anda baca dalam sehari?

Nggak tentu.

Kenapa buku Anda tebal-tebal dan mahal-mahal?

Orang *kan* cenderung untuk menghargai sesuatu dari mahalnyanya dan tebalnya. Kenapa orang beli baju di butik? Ya, karena suka sama mahalnyanya.

Kaum sufi katanya *nggak* suka humor, betul begitu?

Mereka *nggak* suka sama orang yang ketawa-tawa. Katanya, itu hidup yang *nggak* serius.

Tapi, *kan* banyak humor-humor sufi yang kocak?

Ya, kehidupan mereka memang memberi hal-hal yang berbau humor menurut lingkungannya.

Apakah Anda ingin menyampaikan pesan khusus?

Ketawalah yang banyak! [✧]

KITA INI MASIH KANAK-KANAK¹

Nurcholish Madjid, kembali memancing polemik. Karena gagasannya yang kontroversial, ia dituding dengan berbagai tuduhan. Oleh beberapa kalangan Islam, seperti H. Daud Rasyid dan Ridwan Saidi, ia “diadili” dalam sebuah dialog di Taman Ismail Marzuki, 13 Desember 1992.

Buah pemikirannya tentang Islam dianggap menyimpang. Bahkan keabsahan disertasi doktor Nurcholish, yang diajukan di Universitas Chicago, Amerika Serikat, dipertanyakan kembali. Kabarnya, “pengadilan” terhadap Cak Nur itu juga dilakukan oleh beberapa penceramah di banyak masjid. Semua itu dihadapi Nurcholish dengan tidak memberikan komentar. “Setelah Sidang Umum MPR, baru kita bicarakan lagi dengan tenang,” katanya.

Berikut ini petikan wawancara Cak Nur dengan wartawan majalah *Forum Keadilan*.

Mengapa pendapat Anda tentang Islam mengundang kontroversi?

Saya sudah capek sekali kalau bicara masalah itu, yang lain sajalah. Kita sekarang ini justru sedang *calm down*.

Apa sebenarnya yang melandasi pendapat Anda tersebut?

¹ Majalah *Forum Keadilan*, “Kita ini Masih Kanak-Kanak”, Nomor 24, 18 Maret 1993.

Wah, gimana, ya. Itu kan sudah taken forgranted. Seperti kalau kita tanya, makan itu untuk apa?

Ada yang mengatakan, pendapat Anda itu menjadi kontroversial karena sebagian masyarakat kita belum berpikir sejauh Anda.

Di Mesir, masalah seperti itu luar biasa besar, kita ini dapat dikatakan masih kanak-kanak dibanding orang Mesir. “Kagetisme”-nya masih tinggi, jadi kaget itu merupakan fungsi dari ketidaksamaan, ketidaktahuan sumber-sumber.

Jadi Anda sudah menduga akan terjadi seperti itu?

Saya jangan ditanya itu lagi. Lebih baik, sekarang ini kita *calming down*. Apalagi saya anggota MPR, dan mau rapat fraksi segala.

Anda sering diadili....

Itu politis sekali, jadi jangan bicara masalah itu.

Anda juga selalu datang dalam acara yang mengadili Anda itu....

Ya. Untuk meminimalkan eksploitasi politiknya. Sebab kalau tidak datang, nanti dieksploitir sebagai tamu tidak mau diundang. Nanti *kan* mempunyai dampak politik. Banyak sekali yang kemudian menjadi simpati kepada saya.

Jadi masalah yang sekarang ini berkembang, tidak bisa saya jelaskan karena dampaknya akan berbahaya bagi semuanya.

Apa ada tekanan dari atas?

Tidak ada. Tapi ada informasi dari berbagai sumber, termasuk luar negeri.

Tapi, apakah Anda tetap berkonsentrasi dengan gagasan-gagasan tersebut, walaupun banyak yang menentang?

Ya, tapi sekaligus kita ini *kan* intelektual, artinya tidak dogmatis. Kalau ada bahan yang lebih benar, tentunya kita akan mengubah. Jadi sama sekali tidak dogmatis. Karena itu, kita tidak pernah berdebat atau berpolemik, tapi berdialog.

Termasuk isu sektarianisme?

Ya, sektarianisme itu *kan* suatu gejala. Jadi, saya kira Gus Dur (Abdurrahman Wahid — *ed.*) selalu berbicara benar bila ia mengatakan begitu. Gus Dur mengatakannya secara langsung. Tapi kalau saya melihat dari segi fungsinya, jadi kalau dilihat banyak sekali kelompok, mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kita ingin agar kelompok-kelompok itu jangan saling menyalahkan.

Seperti ICMI, justru dirancang untuk non-sektarianisme, tidak memperhatikan kelompok. Namanya Islam, karena sebagian besar dari kita Islam. Dan di antara golongan-golongan yang ada di Indonesia yang memerlukan dorongan untuk naik, ya orang Islam. Jadi itu sama dengan memihak kepada si *underdog*. Anda melihat ada yang gagah perkasa, kemudian ternyata ada kelompok yang memelas, ya dengan sendirinya Anda mempunyai kewajiban moral untuk mengangkat mereka, bagaimana agar menjadi rata, begitu.

Bagaimana Anda melihat kebangkitan umat Islam sekarang ini?

Itu bisa kita bicarakan dengan tenang setelah Sidang Umum MPR. Sekarang ini ada unsur politis yang *ruwet* sekali, kaitannya luas sekali. Agama *kan* menyangkut variabel yang orang tidak menduga karena menyangkut niat. Yang jelas, pembicaraan masalah ini jangan sebelum Sidang Umum MPR, karena ada komitmen-komitmen dan ada soal politik yang gawat.

Bagaimana komentar Anda tentang beberapa artis yang masuk Islam?

Itu bisa dijelaskan dengan menarik sekali, tapi nanti setelah Sidang Umum MPR. Karena begitu Anda tulis, nanti akan ada efek-efek politik. Akan ada yang mengeksploitir baik dalam arti positif maupun negatif, karena banyak sekali informasi sampai kepada saya. Tapi nanti kalau sudah Sidang Umum MPR. Kita bisa bicara enak. Kalau sekarang susah.

Apa benar gejala beberapa orang masuk Islam, hanya untuk berlindung di balik agama dengan pemeluknya yang mayoritas ini?

Kalau soal itu, di balik apa saja orang bisa berlindung. Di mana saja ada yang seperti itu. Apa tidak ada orang yang berlindung di balik Kristen?

Dengan adanya ICMI, apakah sudah saatnya umat Islam mendapat porsi politik yang lebih besar?

Ya. Tapi itu harus dibiarkan berlangsung dalam proses yang wajar, misalnya melalui mobilitas vertikal seperti pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Tidak boleh misalnya, dengan suatu rekayasa, karena ini nanti akan bersifat destruktif.

Bukankah banyak tokoh ICMI yang terjun di bidang politik?

Ya, itu *kan* sementara saja. ICMI itu, sesuai dengan sifatnya sebagai organisasi cendekiawan, menekankan kontribusi di bidang keilmuan. Bukan dukungan politik. [❖]

MAHASISWA JADI KATUP PENGAMAN¹

Aksi-aksi mahasiswa di sepanjang tahun 80-an akhir, semakin menarik perhatian banyak pihak. Mengapa mereka bergerak? Apa dampaknya terhadap konstelasi politik di Indonesia? Syafiq Basri dari *TEMPO* mencoba menggali beberapa pikiran Nurcholish Madjid di sekitar pergerakan mahasiswa. Berikut ini petikan percakapannya:

Gerakan mahasiswa tidak hanya baik untuk mahasiswa sendiri, tapi juga bagi bangsa secara keseluruhan. Gerakan mahasiswa itu antara lain perlu untuk meratakan jalan menuju keinsafan tujuan (*sense of purpose*) bangsa Indonesia yang kini sedang membangun. Sebab setiap bangsa memerlukan keinsafan tujuan bersama yang perlu diperbarui setiap periode tertentu.

Zaman Orla dulu, *sense of purpose* Bung Karno adalah Kemerdekaan dan *Nation Building*. Itulah obsesi Bung Karno dengan segala eksekunya. Sekarang ini, secara keseluruhan *sense of purpose*-nya kira-kira adalah “hidup secara pantas dan tidak berlapar-lapar terus”. Sampai batas tertentu, kita harus akui bahwa ini berhasil. Taraf hidup misalnya, naik menjadi 500-600 dolar per kapita per tahun, yang berarti sekitar 10 kali dibandingkan dengan tahun 60-an.

¹ Majalah *TEMPO*, “Mahasiswa Bisa Jadi Katup Pengaman”, 29 April 1989. Pewawancara Syafiq Basri.

Tapi siklus ini berjalan terus. Dan banyak orang percaya, di Indonesia ini ada siklus dua puluhan tahun. *Nah*, berarti sekarang adalah 20 tahun yang ketiga. Dan ini berarti harus ada *sense of purpose* baru yang diartikulasikan oleh para pemimpin. Jika ini tidak dilakukan, bisa timbul suasana jenuh yang bisa merupakan *pent up feeling*, perasaan tertekan di kalangan orang banyak yang bisa meledak sewaktu-waktu.

Saya memperkirakan *sense of purpose* kita yang akan datang adalah demokratisasi. Soalnya, saya khawatir pembangunan sebagai *sense of purpose* sudah terpakai semua. *Nah*, gerakan mahasiswa baik untuk meratakan jalan menuju *sense of purpose* baru dari masa ke masa. Ada *New Deal*, ada Reaganomics, dan sebagainya. Tampilnya seorang pemimpin yang efektif selalu dikaitkan dengan ide-ide besar, yang merupakan ekspresi dari *sense of purpose* suatu bangsa.

Mahasiswa sendiri sebetulnya adalah kelompok yang paling tepat untuk jadi ujung tombak dalam memproses ini semua. Mereka punya 4 faktor yang khas: muda, sehat badan, sehat ekonomi, dan punya kecerdasan cukup. Gabungan empat faktor itu menjadikan mahasiswa punya posisi yang baik sekali. Mereka tidak kehilangan apa-apa. Mereka masih melihat ke depan.

Kalau kita lihat dari stratifikasi sosial, secara sosiologis, mahasiswa Indonesia sebetulnya jauh lebih elit daripada mahasiswa di negara maju. Mahasiswa di Indonesia adalah pilihan dari semua pilihan, apalagi di tempat-tempat yang biasa disebut sebagai *centers of excellence* (pusat-pusat keunggulan).

Dibandingkan dengan penduduk, jumlah mahasiswa kita relatif sangat sedikit. Maka sebagai suatu kelompok yang sangat elit, dibutuhkan partisipasi mereka, baik dalam bentuk peningkatan keahlian (melalui studi) maupun dalam *social concern*. Tanpa sumbangan semacam itu, biaya menjadi mahasiswa menjadi relatif terlalu mahal, terutama jika dibandingkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki negara berkembang macam Indonesia.

Indonesia tidak mungkin terkecualikan dari hukum sejarah yang kini telah melanda Korea dan beberapa negara lain. Adalah *nonsense* untuk menganggap bahwa Indonesia “lain sendiri”.

Meskipun juga sangat heterogen secara kultural, untungya kita bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Tapi kita tidak boleh *taken for granted*. Kita perlu letupan-letupan kecil lewat mahasiswa. Jika tidak, saya khawatir muncul ledakan besar karena suasana kejenuhan di kalangan orang banyak. Jadi sebetulnya mahasiswa bisa menjadi katup pengaman.

Bagaimana sebaiknya sikap penguasa? Mereka perlu terbuka. Keterbukaan antara lain berguna untuk mencegah menjadi-jadinya desas-desus. *Sas-sus* itu mudah dibakar dan mudah terbakar. Tapi banyak orang berbuat berdasarkan *sas-sus*. Maka salah satu kebaikan mahasiswa adalah merintis jalan ke arah komunikasi yang lebih terbuka, dan dialog yang mencegah ramainya *sas-sus* itu.

Meskipun begitu cara yang ditempuh harus tanpa kekerasan. Karena begitu ada *violence*, kita tidak tahu bagaimana lagi menyelesaikannya. Malah biasanya akan terjadi akselerasi. Tapi bagaimanapun mahasiswa perlu belajar. Belajar menyatakan pikiran, belajar demokrasi, meskipun dalam perjalanannya mungkin mereka melakukan kesalahan. Kalau mahasiswa tidak pernah belajar dari kesalahannya, mereka bisa jadi diktator-diktator.

Menurut saya, kebebasan merupakan suatu yang dinamis. Dalam memperolehnya perlu ada unsur *trial and error* bersama pengalaman kita. Kalau kita tidak pernah mengalami kebebasan, kita tidak bakal bisa bebas. Kita harus mengalami kebebasan itu sedikit demi sedikit. Dan kita belajar dari pengalaman dan kesalahan kita.

Sebab kalau kita mengabaikan proses untuk belajar, baik belajar untuk bebas maupun belajar demokrasi, kita akan beranggapan bahwa ini semua seolah mirip suatu benda yang bisa diraih, disimpan. Kalau begitu halnya, kita bisa kejeblus pada pengalaman tahun 50-an, ketika kebebasan dinyatakan dalam bentuk yang tidak terkontrol, lalu menimbulkan *chaos*.

Dan situasi *chaos* di mana pun, sesuai dengan dalil Hatta, selalu mengundang munculnya kediktatoran, yang justru lawan kebebasan itu sendiri. Maka perlu jaminan, misalnya dengan memberikan bimbingan, semacam *Tut Wuri Handayani* — bukannya represi. Pemerintah memberi kelonggaran. Nantinya, kalau terjadi kekeliruan diperbaiki, tapi bukan dengan represi melainkan dengan keterbukaan, dengan cara yang lebih produktif.

Dengan begitu, saya kira mahasiswa bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dan bisa timbul *bandwagon effect*, efek rombongan musafir. Artinya jika nanti di perjalanan ada yang lewat dan melihatnya baik, mereka akan ikut. Hingga seluruh bangsa yang semula tidak berani mengekspresikan dirinya, akan menjadi berani dan sebagainya.

Gerakan mahasiswa perlu untuk meratakan jalan menuju keinsafan tujuan bersama (*sense of purpose*) bangsa Indonesia. [❖]

PARAMADINA DAN INVESTASI KEMANUSIAAN¹

Modal-modal tertentu dalam Islam, kalau bisa dikembangkan secara wajar, ia akan mendukung modernitas. Maka di masa yang akan datang di suatu dunia yang sama sekali modern, dan ketika orang Islam masih dalam tahap mencari — yang dibutuhkan adalah suatu kelompok kecil, tetapi secara intelektual sangat intensif. Itulah sebenarnya, yang ingin dilakukan Yayasan Wakaf Paramadina, sebagai satu komunitas kecil yang bergerak di wilayah intelektual. Pikiran tersebut lahir dari penggagas Yayasan Wakaf Paramadina, Nurcholish Madjid, kepada Heri Akhmadi dari *Jawa Pos*.

Dalam diskusi di sini (Washington), Anda telah mengutarakan kurang dewasanya Muslim terpelajar Indonesia. Upaya apa yang sedang dan akan Anda lakukan untuk menghadapi masalah tersebut?

Salah satu tesis untuk menghadapi masalah tersebut adalah perlunya gerakan intelektual. Tentu saja, saya tidak bisa mengakui tesis ini sebagai pendapat orisinal saya sendiri, karena beberapa orang sebelumnya telah membicarakannya; antara lain Marshall Hodgson. Menurut Hodgson, oleh karena adanya modal-modal tertentu dalam Islam, kalau dikembangkan secara wajar dia akan mendukung modernitas. Maka di masa yang akan datang — di suatu dunia yang semakin modern, dan ketika orang Islam

¹ Harian *Jawa Post*, “Saya Dahulukan Paramadina dari ICMI”, 9 April 1992. Pawawancara Heri Akhmadi.

masih dalam tahap mencari — yang dibutuhkan adalah suatu kelompok kecil, tetapi secara intelektual sangat intensif. Itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan dengan Yayasan Paramadina. Konsep gerakan Paramadina bisa disejajarkan dengan aliran di Malaysia atau kelompok *Islam and Modern Society* di India.

Saya memperoleh kesan Anda mengambil jarak dengan ICMI. Bagaimana Anda menempatkan Paramadina di tengah maraknya ICMI sekarang?

Sengaja sejak awal pembentukan ICMI saya tidak melibatkan diri secara mendalam. Kebetulan sekali waktu itu saya sakit. Pada hemat saya, ICMI memang berguna untuk merintis jalan bagi modernisasi sikap umat Islam terhadap pemerintah, sehingga pada tingkat tertentu dapat mengambil bagian di dalamnya. Tetapi kalau diurutkan, saya akan memilih Paramadina lebih dahulu.

Tentang program Paramadina?

Tema yang selalu saya katakan adalah bahwa program Paramadina merupakan “*human investment*” yang bersifat jangka panjang, sehingga harapan jangka pendek dapat diantisipasi. Apalagi kalau harapan-harapan itu bersifat politik. Itu justru kita hindari. Dalam gerakan intelektual, dimensi waktu kita sadari dalam skala besar, karena itu bersifat prediksi. Prediksi dari harapan yang akan dicapai Paramadina adalah demokratisasi. Yaitu demokratisasi dalam konteks keindonesiaan. Bagi saya, Indonesia telah memiliki bentuk yang mantap, tetapi tidak demikian dengan keindonesiaan.

Keindonesiaan itu barangkali bisa dibandingkan dengan Amerikanisme di Amerika ini. Sekalipun bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa dan agama, basis karakter dan etika sosial Amerika sebagian besar berakar dalam Protestanisme dan tradisi budaya Eropa Barat Laut. Kita bisa berharap bahwa bangsa Indonesia akan seperti itu. Dalam perhitungan apa pun, kecuali bagi mereka yang sedikit

traumatis terhadap Islam, sudah semestinya basis karakter bangsa Indonesia yang kuat sebagian besar akan berasal dari Islam.

Apakah itu berarti formalisasi Islam dalam kehidupan negara?

Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud adalah Islam yang telah menjadi nilai-nilai umum atau etika umum. Kita tidak bicara mengenai lambang-lambang atau hukum-hukum yang mapan, apalagi kelompok atau Partai Politik Islam. Nilai-nilai dasar Islam yang telah dihayati sepenuhnya oleh Muslim Indonesia dan kemudian dinyatakan sebagai nilai bermasyarakat secara umum.

Tentang masyarakat Islam, beberapa minggu yang lalu, di Ithaca, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa NU tidak menuntut adanya masyarakat Islam, tetapi cukup masyarakat Indonesia yang dapat menjamin umat Islam untuk melaksanakan ibadah sepenuhnya. Sementara itu, Anda percaya pada perwujudan masyarakat Islam di Indonesia?

Ucapan Gus Dur itu *kan* sama saja. Itu hanyalah redaksi yang berbeda. Kalau Anda memahami kata ibadah dalam Islam, maka Anda akhirnya akan masuk ke persoalan yang sama. Ibadah dalam Islam bukan hanya berarti ritual tetapi mencakup hal-hal lain yang lebih luas. Saya tidak akan mengatakan “Negara Islam No, masyarakat Islam Yes” karena itu terasa berlebihan. Menurut persepsi saya, Indonesia sekarang ini sudah merupakan masyarakat Islam. Hanya saja, penerapan etika Islam dalam kehidupan masyarakat memang masih belum kuat.

Kalau penerapan etika Islam belum kuat, bagaimana pendapat Anda dengan adanya kecenderungan formalisasi hukum Islam, misalnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama?

Itu memang penting, karena memberikan legitimasi. Tetapi tidak sentral. Segi positif adanya legitimasi itu adalah mendorong

masyarakat Islam merasa ikut memiliki dan ikut serta dalam negara. Selama ini banyak anggota masyarakat Islam yang merasa di luar pagar, hanya menjadi penonton saja.

Bukankah dengan demikian akan tercipta dualisme hukum yang bersifat diskriminatif?

Tetapi bagaimana dengan hukum yang diwariskan Belanda yang juga diskriminatif terhadap masyarakat Islam? Misalnya hukum perkawinan. Masyarakat agama lain yang menikah di depan catatan sipil akan diakui di seluruh dunia, tetapi tidak demikian orang Islam yang kawin di depan KUA.

Apakah sikap untuk menentang hukum yang diskriminatif dengan melahirkan hukum yang diskriminatif dapat dibenarkan? Bukankah yang kita butuhkan hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara?

Idealnya memang demikian, dan usaha ke arah sana sedang dilakukan, misalnya oleh Pak Ismail Saleh dan almarhum Padmowahyono. Bahkan dalam sebuah makalah, seorang sarjana Katolik dari Universitas Parahiyangan menyatakan bahwa hukum nasional yang akan datang harus memperhitungkan kondisi kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Itu berarti mau tidak mau, sebagian besar hukum nasional itu akan diambil dari unsur Islam.

Apakah dengan demikian dapat disimpulkan, kalau formalisasi hukum Islam itu hanya bersifat transisional untuk menuju hukum nasional yang berlaku untuk semua?

Betul demikian. Karena pada akhirnya kita akan menuju suatu hukum nasional yang benar-benar nasional, bukan warisan Belanda yang diskriminatif terhadap umat Islam. [❖]

SASTRA SUFISTIK SEBAGAI ESKALASI KESADARAN¹

Gerakan sufi muncul sebagai bandingan dari gerakan sekular yang mengacu ke benda-benda. Jika kekuasaan politik telah merampas hak-hak asasi manusia, jika kekuasaan ekonomi telah merampok kekuasaan hati nurani dan menjejalkan kerakusan-kerakusan akan harta benda, jika kekuasaan hukum hanya menjadi dalih bagi kepentingan pribadi dan mengabaikan kedaulatan manusia, maka gerakan sufi bertujuan mempertahankan kekuasaan batin yang berlandaskan agama, guna memperoleh pencerahan dan kekayaan jiwa. Merujuk ke argumen itulah, sastra sufi memekar dan memperoleh momentumnya. Pikiran tersebut jadi bahan yang menarik perbincangan Nurcholish Madjid dengan M. Nasruddin Anshory Ch, dan majalah *Horison*.

Anda tahu, bahwa sufi atau tasawuf, atau yang dalam bahasa populer disebut mistisisme, adalah bagian integral dari kebudayaan Islam. Bahkan dalam literatur pesantren ditegaskan, bahwa sufi merupakan salah satu dari empat besar ilmu rasional atau *'aqli* yang lebih bersifat tradisional atau *naqli*. Seusai serangan al-Ghazali atas ilmu-ilmu rasional yang diwakili oleh filsafat, yang melalui ilmu ini Teologi Mu'tazilah berhasil menampilkan rasionalisme Islam selama empat abad, dari abad dua sampai lima hijriyah, sufi menjalin hubungan dengan teologi tradisional, yaitu: Asy'ariah.

¹ Majalah *Horison*, "Sastra Sufistik Sebagai Eskalasi Kesadaran", No. 4, 23 April 1989. Pewawancara M. Nasntddin Anshory Ch.

Melalui teologi Asy'ariah inilah sufi mengambil-alih ilmu Islam selama tujuh abad berikutnya dan sepanjang periode kerajaan Ottoman hingga gerakan pembaruan modern. Pertanyaan saya ialah, apa sebenarnya substansi sufi itu, sehingga ia memperoleh momentum dalam dunia Islam?

Sebenarnya sudah banyak sekali di Indonesia ini bacaan tentang apa itu sufi. Apalagi dalam dunia pesantren seperti yang saudara sebutkan tadi. Tapi baiklah, saya akan mencoba memberikan suatu persepsi. Saya pikir sufi atau tasawuf, kalau dilihat dari sudut ajaran atau filosofisnya, itu memperoleh momentum oleh al-Ghazali. Dengan buku-bukunya, seperti *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, *al-Munqidz min al-Dlalâl*, dan *Minhâj al-Âbidîn* itu, maka al-Ghazali begitu populer. Bahkan *Minhâj al-Âbidîn* itu sekarang ini sudah diberikan *syarh* atau telaah yang begitu panjang lebar oleh Kiai Ihsan dari Jampes dalam bahasa Arab yang bagus sekali dan mendapat pengakuan internasional. Tapi selain al-Ghazali ini memang ada tokoh-tokoh sufi, seperti Dzu al-Nun, al-Hallaj, Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Yazid al-Busthami, dan beberapa yang lain. Juga ada orang seperti Ibn al-'Arabi, Ibn Sina, dan al-Kindi.

Nah, substansi sufi itu apa, barangkali bisa kita sebutkan bahwa kekayaan Islam tentang literatur sufi itu betul-betul tidak tertandingi. Islam sangat kaya dengan literatur sufi ini. Substansi sufi itu adalah, penghayatan esoteris dari kesadaran agama. Jadi lebih bersifat batin. Karena itu, dulu di Jawa ini dikenal adanya golongan kebatinan. Sebetulnya golongan kebatinan ini merupakan kelanjutan dari gerakan sufi. *Nah*, perkataan batin itu sendiri sudah menunjukkan kedalaman, suatu hal yang bersifat pribadi dan spiritualistik, sebagai bandingan dari golongan "lahiri". Tapi dalam bahasa Indonesia perkataan "lahiri" tidak banyak dipakai. Tidak ada golongan yang menamakan kelompok lahiriah. Dalam bahasa Arab golongan zahiriyah atau lahiriah itu ada. Kalau golongan kebatinan disebut *ahl al-bawâthin*, maka kelompok zahiriyah disebut *ahl al-zhawâhir*.

Jadi pada umumnya, golongan yang disebut *ahl al-zhawâhir* ini adalah para ahli fiqih. Yaitu orang yang menghayati agama Islam lebih banyak sebagai suatu sistem hukum. Karena itu, kesibukannya lebih terletak pada pengaturan masyarakat, atau yang biasa disebut keterlibatan sosial. Sedangkan sufi sebagai *ahl a-bawâthin* atau golongan kebatinan itu lebih banyak *riyâdlah* atau *exercise*. Lalu ada istilah *riyâdlah rûhâniyah*, yang sebenarnya bermakna *spiritual exercise*.

Untuk itu, para sufi membahas persoalan-persoalan agama mengenai hal-hal yang lebih bersifat spiritual. Contohnya begini: kalau para ahli fiqih membahas mengenai shalat, biasanya akan dibahas segi-segi shalat itu yang ada kaitannya dengan sah dan tidaknya shalat. Seperti pakainya bagaimana, suci dan tidak sucinya, wudu dan kiblatnya, bahkan sampai gerak shalatnya. Dalam membahas gerak ini, sampai-sampai mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, kalau orang sedang bersembahyang bergerak tiga kali berturut-turut, maka ia batal.

Kesemuannya itu dalam pandangan kaum sufi, *trivial things*, suatu hal yang remeh sekali. Bagi para sufi, sembahyang itu sebagai suatu peristiwa menghadap Allah (*tawajjuh*); shalat itu sebagai peristiwa dialog dengan Allah, serta sebagai peristiwa mengintenskan kesadaran akan kehadiran seorang makhluk di depan Khaliknya dan kehadiran Khalik dalam hidup seseorang. Maka para sufi ini suka mengatakan, bahwa shalat itu merupakan mi'raj atau eskalasi orang yang beriman. Jadi kalau Nabi Muhammad mi'rajnya menghadap Tuhan di *sidrat al-muntahâ* atau di atas langit ke tujuh, maka orang beriman mi'raj melalui shalatnya. *Nah*, itulah yang disebut esoterisme.

Kemudian, karena tindakan para sufi yang lebih menekankan hal-hal yang batin tersebut, maka seringkali lalu timbul ekses. Peneakanannya pada segi-segi yang intrinsik dan seolah-olah mengabaikan yang instrumental itulah yang sebenarnya menjadi ekses. Karena yang instrinsik dalam sembahyang itu mengingat Tuhan, maka kadang-kadang para sufi itu loncat dengan dalil: Kalau begitu,

shalat sebagai sesuatu yang nilainya instrumental, suatu ketika bisa tidak perlu. Hal semacam itu, yang sering mengganggu di mata kaum fiqih. Sebab apa? Sebab sekali agama diajarkan semacam itu, maka agama akan mengalami *interpretation away*, terus-menerus ditafsirkan, sehingga habis.

Sebetulnya, banyak unsur filsafat di dalam sufi atau tasawuf ini, misalnya saja filsafat Isyraqiyah yang sangat banyak terpengaruh oleh neo-platonisme, yakni mengenai teori emanasi. Dan yang kemudian merembes atau terwariskan melalui berbagai karya filsuf, termasuk Ibn Sina. *Nah*, Ibn Sina ini, disinyalir bahwa dia seorang Syi'ah aliran Isma'iliyah. Dan aliran Isma'iliyah ini yang sering disebut *al-bâthinîyûn* atau kaum kebatinan. Jadi al-Ghazali waktu mengangkat pena untuk menuliskan karya-karya polemisnya itu, sebetulnya yang ada di benak al-Ghazali itu adalah Ibn Sina. Sewaktu al-Ghazali menulis *Tahâfut al-Falâsifah* atau Kerancuan Para Filsuf, sebenarnya yang hendak ia hantam adalah Ibn Sina. Jadi boleh diganti menjadi *Tahâfut Ibn Sînâ* atau Kerancuan Ibn Sina.

Sebab apa? Di dalam filsafat Ibn Sina itu memang ada hal-hal yang sulit diterima oleh kaum ortodoks, terutama mengenai takwil (interpretasi) yang bersifat metaforik. Artinya, suatu pendekatan kepada agama yang mencoba untuk memahami apa yang ada di balik lafal-lafal lahiriah dan mau mencapai hal-hal yang lebih batiniah. Sebab orang-orang kebatinan dalam arti Isma'ili ini, sangat banyak menggunakan takwil. Karena itu mereka tidak begitu banyak terikat pada kewajiban-kewajiban lahir. Shalat misalnya, mereka itu kurang begitu memperhatikan. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka itu kurang saleh. Hanya saja, kewajiban-kewajiban yang sifatnya lahiriah itu tidak terlalu diperhatikan.

Sebenarnya, sufi atau tasawuf ini lebih banyak di kalangan kaum Sunni dibanding kaum Syi'ah. Karena apa? Sebab di kalangan kaum Sunni, tasawuf berfungsi sebagai reaksi terhadap orientasi eksoteris terutama dari segi hukum. Sedangkan di dalam Syi'ah, antara fiqih dan tasawuf berjalan seimbang. Antara dimensi esoteris

dan dimensi eksoteris berjalan sekaligus. Karena itu kaum Syi'ah tidak begitu perlu kepada sufi. Sebab kesufian itu menjadi *built in* di dalam kesyi'ahan sendiri. Sedangkan di dalam Sunni, sufi merupakan sesuatu yang berdiri sendiri.

Sufi itu akan diamalkan orang dalam bentuk amalan-amalan atau ritus-ritus nyata melalui tarekat. Jadi tarekat itu adalah wujud nyata dari sufi, meskipun sufi itu sendiri tidak selalu menghasilkan tarekat. Seperti al-Ghazali sendiri, misalnya, ia tidak mengikuti salah satu tarekat, meskipun kesufian di dalam dirinya jelas. Sebaliknya ada orang seperti Naqsyabandi, Rifa'i, Tijani, Abdul Qadir al-Jaelani, dan banyak lagi para sufi yang mendirikan tarekat. Makna dari tarekat itu sendiri ialah jalan menuju kesucian batin.

Cukup luas dan jelas Anda menjawab. Argumentasi yang lebih bersifat historis mengenai kemunculan sufi, menurut saya, tidak hanya sebagai bandingan atas membengkaknya eksoterisme. Memang benar bahwa gerakan sufi menangkal adanya bahaya yang datang dari teologi Mu'tazilah dan filsafat. Tapi terdapat hal lain yang menandai kebangkitan gerakan sufi ini, seperti akal yang telah dijadikan sumber kebenaran dan pengetahuan yang sejajar dengan wahyu; lima rukun Islam ditransformasikan kepada bentuk-bentuk ritual murni, yang berarti artikulasi anggota tanpa peningkatan spiritual; pemupukan modal melalui perdagangan dan gaya hidup yang materialistis dan konsumeristis; ancaman-ancaman budaya luar yang merusak tata krama dan sopan santun; serta berbagai macam motivasi lain. Tapi, intinya sama, yaitu sebagai mekanisme defensif untuk melawan ancaman-ancaman tersebut. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Bagaimana sosok sufi di Indonesia itu?

Sufi di Indonesia cukup jelas dan banyak, terutama dalam tarekat itu. Sudah jelas bahwa buku-buku al-Ghazali dibaca oleh kalangan ulama dan santri, yang berarti ada sikap untuk mengapresiasi karya-karya kesufian. Malahan seperti Buya Hamka

almarhum, banyak sekali dipengaruhi oleh al-Ghazali. Meskipun sebagai orang Muhammadiyah, beliau itu banyak mengambil prinsip-prinsip dasar dari keyakinan keagamaannya orang seperti Ibn Taimiyah, tetapi dia, seperti tercermin dalam buku-bukunya itu, sangat banyak dipengaruhi oleh al-Ghazali. Dan memang Buya Hamka adalah orang yang punya akses, karena ada kemampuan untuk membaca. Sehingga wajar kalau dia menjadi kaya dalam pemikiran sufi ini. Saya kira tidak banyak orang seperti Buya Hamka itu, di mana di satu pihak begitu modernis dan reformis, tapi di pihak lain dia juga menerima dan mengembangkan sufi. Maka dia juga menulis buku *Tasawuf Modern*.

Dalam *Tasawuf Modern* itu, Buya Hamka bermaksud menonjolkan segi-segi kesufian dari ibadah Islam, tanpa menjadi pengikut gerakan tarekat. Jadi bertasawuf dalam artinya yang murni.

Apakah relevansi sufi dengan sastra?

Banyak sekali. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dari pikiran kesufian dan institusi-institusi kesufian yang berbentuk sastra. Karena sastra memang adalah suatu pengungkapan yang halus dari dalam diri manusia, dan sastra menjadi wahana yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep-konsep kesufian. *Rubâ'iyât* Umar al-Khayyam, misalnya, itu suatu karya sastra yang tinggi sekali, sekaligus merupakan karya sufi yang tinggi juga.

Saya tidak tahu bagaimana sastra sufi di Indonesia pada zaman klasik. Tapi orang seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, dan Raja Ali Haji, juga mengutarakan pikiran-pikiran kesufiannya dalam bentuk sastra. Jadi cabang-cabang keilmuan dalam Islam yang banyak menggunakan idiom-idiom sastra untuk mengekspresikan dirinya memang sufi. Saya pikir karena sastra mampu dipakai untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang halus dan menjadi medium yang tepat bagi sufi.

Lain sekali dengan ilmu kalam atau teologi. Ilmu ini tidak mengangkat sastra sama sekali, kecuali hanya untuk keperluan

pedagogik. Ada kitab dari ilmu kalam ini seperti *'Aqîdat al-'Awâm* dan *Jawharat al-Tawhîd*, yang sengaja dibentuk seperti puisi, tapi sebetulnya itu bukan puisi. Itu hanya untuk keperluan pedagogik, supaya orang mudah menghafal.

Tapi ekspresi sastra atau ekspresi puitis yang sebenarnya, di dalam Islam ya berisi kesufian. Misalnya saja, kita ambil contoh yaitu Ibn al-'Arabi. Dia menulis buku *Fushûsh al-Hikam (Bezels of Wisdom)*. Di dalam buku tersebut, kalau dia harus mengemukakan pikirannya yang mendalam tapi singkat, maka larinya ke puisi. Buku *Fushûsh al-Hikam* itu sendiri berupa prosa panjang, yang sesekali diselingi puisi.

Ibn al-'Arabi ini terkenal sebagai pengembang *wahdat al-wujûd* (monisme) yang ekstrim sekali. Ini bisa kita lihat ketika dia membuat puisi yang berbunyi:

*fa-yahmadu-nî wa-ahmadu-hû
wa-ya'budu-nî wa-a'budu-hû
fi hîn-in uqirr-u bi-hî
wa fi al-ahyân-i ajhad-uhû*

Ini satu puisi yang kalau orang tidak terbiasa dengan literatur kesufian, maka pasti kaget. Karena di dalam puisi itu, Ibn al-'Arabi mengklaim bahwa Tuhan itu memuji dia, lalu dia membalas memuji Tuhan. Dan Tuhan menyembah dia, lalu dia balas dengan menyembah Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan diakui dan dibela, tapi pada saat yang lain dia tentang Tuhan. *Nah*, ini merupakan contoh dari sastra kesufian, yang sebetulnya sangat simbolik chill metaforik. Jadi tidak bisa dipahami secara *le Herlijk*. Masa Tuhan menyembah Ibn al-'Arabi? *Kan* tidak.

Karena itulah, orang yang tidak terbiasa dengan karya sufi akan kaget dan menolak. Ini juga yang menyebabkan kenapa Ibn al-'Arabi mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau kita gabung secara keseluruhan, artinya kita pahami Ibn al-'Arabi secara menyeluruh, dia sebetulnya tidak perlu dituduh yang macam-macam. Kalau dia

betul-betul mengklaim bahwa Tuhan menyembah dia, *kan* musyrik jadinya. Tapi karena ini suatu ekspresi simbolik dan metaforik, sebetulnya ini merupakan suatu pelukisan atau penggambaran betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Lalu, dengan puisi dia bercanda dengan Tuhan.

Contoh lain, misalnya, Abu Yazid al-Busthami yang mengatakan: “*Anâ 'l-lâh! Lâ ilâh-a illâ anâ, fa-'bud-nî*”. Akulah Tuhan! Tidak ada Tuhan selain Aku! Maka, sembahlah Aku. Lalu, dalam kesempatan lain dia berteriak: “*Subhânî!*” Maha Suci Aku. Juga al-Hallaj dan Rabi'ah al-'Adawiyah yang begitu masyhur itu.

Memang, dalam al-Qur'an banyak keterangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu transendental. Jadi seperti yang Dia firmankan sendiri: “*wa-lam yakun la-hû kufuw-an ahad*”. Yaitu tidak ada seorang pun yang menyerupai Tuhan. Dan Tuhan disebut *al- 'Âlî* (Mahatinggi), *al-Lathîf* (Mahalembut), *al-Qahhâr* (Mahaperkasa), dan lain-lain, yang kesemuanya itu transendental. Tapi sebetulnya di dalam al-Qur'an juga banyak indikasi bahwa Tuhan itu immanen (Mahahadir). Seperti misalnya, “*wa-huwa ma'a-kum ayna mâ kuntum*”. Tuhan itu beserta kamu di mana pun kamu berada. Tuhan itu lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya sendiri. Juga, Tuhan itu menjadi penghalang antara seseorang dengan dirinya sendiri. Maksudnya, Tuhan menjadi penengah antara hati dan keinginan-keinginan orang tersebut. Ini yang menyebabkan adanya *wahdat al-wujûd* (monisme) sebagai pengembangan lebih lanjut, dan secara eksekutif terus memekar daripada doktrin-doktrin mengenai immanenisme Tuhan. Dan situ lalu muncul orang seperti al-Hallaj, Abu Yazid al-Busthami, dan Ibn al-'Arabi.

Tapi di Indonesia sendiri, menurut pengamatan Anda sebagai pakar agama, apa ada sastra sufi seperti yang Anda kemukakan itu? Kalau ada, kapan sastra sufi itu dimulai?

Di Indonesia, bisa saya sebut Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniry di zaman klasik, lalu sesudah itu, seakan terputus.

Penyebabnya mungkin karena kita terlalu dilanda oleh orientasi budaya yang didominasi oleh kaum kolonialis dan imperialis. Juga tumbuhnya sekularisme yang cukup pesat. Tapi saya melihat akhir-akhir ini, ada kecenderungan untuk menghidupkan kembali sastra sufi di Indonesia.

Kalau di dunia Islam secara keseluruhan, memang sejak awal sudah ada sastra sufi. Banyak kaum sufi sendiri yang mengklaim bahwa ajarannya itu diambil dari Sayyidina Ali. Dan memang Ali ini cukup banyak mewariskan ajaran-ajaran kesufian. Misalnya saja, *Nahj al-Balâghah*, di sana dapat kita temukan ekspresi kesufian berbentuk sastra. Apalagi kalau sastra tidak terbatas hanya pada puisi, *Nahj al-Balâghah* sendiri merupakan satu karya sastra *masterpiece*. Lalu yang cukup populer di negara-negara Barat sekarang ini, ialah *Rubâ'iyât* Umar al-Khayyam. Malahan, saya yakin seperti *al-Barzanjî* itu sendiri, merupakan karya sastra dan bermuatan kesufian yang cukup baik. Baik dari sudut keindahan bahasa maupun pengutaraannya.

Sekarang kembali ke persoalan sufi itu sendiri. Karena sufi lahir dari kondisi historis untuk menghadapi dan menanggulangi dekadensi budaya dan degradasi hukum, yang lalu berkembang untuk mencegah kekalahan politik dan militer dalam bentuk sublimasi bagi kemenangan batin, lalu sekarang ini dapatkah gerakan sufi ini membantu dalam menanggulangi kekalahan militer, politik, ekonomi, sosial, dan budayanya yang seringkali kita namakan keterbelakangan itu? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, pertanyaan saya berbunyi: Bisakah Anda membantu menjelaskan tentang fenomena sufi melalui variabel sosial-ekonomi dan variabel politik-budaya?

Dari variabel sosial-ekonomi, kaum sufi sendiri melihat dirinya sebagai *al-faqîr*. Sebetulnya, arti umum dari *al-faqîr* itu sendiri ialah orang yang perlu. Mereka sebagai manusia merasa perlu dengan Tuhan. Jadi jelasnya, bagi gerakan sufi, dunia menjadi rintangan

untuk menuju kepada Tuhan. Bagi gerakan sufi ini, demi mencapai tingkat tertinggi agar lebih dekat dengan Tuhan, maka kemiskinan menjadi alternatif. Tapi lama-kelamaan terbalik. Kesufian pada akhirnya menjadi alternatif bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, banyak terjadi adanya semacam keparalelan, yaitu kesufian adalah tempat pelarian. Tentu saja sufi yang begini tidak *genuine*. Tidak banyak nilainya kalau sufi hanya dipakai sebagai tempat pelarian. Sebab dalam bentuknya yang asli, tidak ada korelasi antara kemiskinan dan kesufian. Begitu juga di dalam menjelaskan tentang variabel politik budaya dalam sufi. Para pengikut Abah Anom di Tasikmalaya, misalnya. Para pemilik perusahaan di Tasikmalaya itu banyak sekali yang menjadi pengikut Abah Anom. Mereka ini dari golongan kelas menengah ke atas dalam sosial-ekonominya. Kemudian tentang variabel politik-budaya, saya kira banyak juga orang yang kesadaran politiknya tinggi dan kesadaran budayanya memadai yang juga ikut terlibat dalam salah satu tarekat tertentu. Prinsipnya, gerakan sufi ini ingin mengembalikan kerangka dasar ihwal perjuangan antara kebenaran melawan kebatilan. Mengajak jalan kebaikan dan menolak jalan yang sesat. Sebab gerakan kesufian ini merupakan penyaluran dari kebutuhan spritual yang hakiki. Jadi tidak bisa diklaim bahwa sufi identik dengan eskapisme.

Tapi, apakah ada rekayasa sosial dalam gerakan sufi?

Umumnya, karena gerakan sufi ini lebih bersifat esoteris, maka ya tidak punya *concern* terhadap pengembangan masyarakat dalam artinya yang eksoteris. *Impact* tidak langsung memang ada, yaitu mengenai konsep kerakyatan. Karena cita-citanya hanya membangun budi-pekerti dan menyempurnakan akhlak manusia, maka gerakan sufi ini jelas anti kepada kezaliman. Tapi bentuk intinya ini umumnya pasif.

Kita kembali ke sastra sufi lagi. Apa ada konsep kesusastraan bagi gerakan sufi itu?

Saya tidak pernah mendapatkan suatu elaborasi mengenai bagaimana para sufi melihat kesusastraan. Tapi yang jelas, memang medium ekspresi dari kesufian itu kebanyakan lewat sastra. Sastra merupakan wahana yang cocok bagi sufi. Itu saja.

Kasus al-Hallaj, menurut sastrawan dari Mesir, Saleh Abdul Shabur, akibat propaganda politik. Menurut Anda bagaimana?

Yang menjadi propaganda politik itu tidak hanya kaum sufi semata. Ibn al-'Arabi, Ibn Taimiyah, al-Asy'ari, semua tokoh ini juga menjadi korban propaganda politik. Yaitu dari suatu pemerintah yang otoriter dan diktator. Juga di banyak cabang-cabang keilmuan lain, yang jadi korban para diktator dan otoriter tersebut cukup banyak jumlahnya. Di negara-negara Barat, ilmuwan dan sastrawan yang menjadi korban *Inquisition* itu juga cukup banyak jumlahnya. [❖]

ANTARUMAT JANGAN SALING MENGGENERALISASI¹

Meski harus melewati masa-masa penuh ketegangan dalam mendebarakan pikiran-pikirannya, yang menurut Nurcholish Madjid sendiri — masa yang dibaluti kesalahpahaman dan kecurigaan, dan tidak jarang fitnah serta hasutan, yang diarahkan kepadanya — gagasan-gagasannya, kini banyak diterima beragam kalangan di Indonesia. Salah satu bukti nyata, ketika Yayasan Wakaf Paramadina merayakan ulang tahunnya yang ke-10, di Jakarta Convention Centre, bertaburan berbagai tokoh masyarakat, Islam dan non-Islam, yang ikut serta hadir pada acara tersebut. Muarif dari Harian *Republika*, mewawancarai Nurcholish Madjid di kediamannya.

Ulang tahun ke-10 Paramadina, banyak mendapatkan respon yang cukup besar dari media massa. Dan yang hadir di acara ulang tahun, sangat beragam. Apakah ini memperlihatkan bahwa Paramadina telah semakin diterima?

Tentu tak ada kelompok yang bisa diterima semua orang. Muhammadiyah yang besar, tidak juga disetujui semua kelompok. NU juga begitu. Apalagi Paramadina. Namun paling tidak, insya Allah kami bisa mengklaim bahwa Paramadina memiliki basis pendukung yang luas, dari pejabat sampai mahasiswa.

¹ Harian *Republika*, “Antar Umat Saling Menggeneralisasi”, Minggu, 10 November 1996. Pewawancara Muarif.

Dan kalau Anda katakan tadi, perayaan yang dilakukan secara besar-besaran, itu sebenarnya kehendak anggota. Bukan yayasan. Saya sendiri nggak tahu sama sekali. Anggota yang mempersiapkan. Kalau kita tanya, mereka selalu bilang, “sudahlah, pokoknya semua beres”. Jadi saya sendiri tidak akan mengira akan sebesar itu.

Bukankah acara tersebut, bisa melahirkan kesan elitis?

Selalu bisa lahir kesan seperti itu. Tetapi, elitisme itu bukan ideologi melainkan metodologi kami. Dasar pikirannya adalah masyarakat selalu berbentuk seperti kerucut, dan semua harus digarap sebagai obyek dakwah. Karena selama ini sasaran dakwah hanya kelas menengah ke bawah, maka kita melihat adanya segmen masyarakat yang terabaikan.

Karena itu, menggarap mereka itu, secara fikihnya, menurut kami adalah fardu kifayah, artinya harus ada yang melakukannya. Kalau tidak, dosanya, risikonya kita tanggung bersama.

Dari sudut pandang ilmu sosial, masyarakat itu tak pernah ditentukan oleh mayoritas, melainkan oleh kelompok kecil yang berkualitas. Jadi dalam struktur itu, ada atas-bawah, puncak-basis, dan yang menentukan itu selalu yang di atas. Seperti contohnya lampu. Ada hohlamnya, ada tombolnya. Kita tidak mematikan lampu dengan cara memutar bohlamnya. Yang kita lakukan, menekan tombolnya. Itu namanya metode sibermetik.

Kami menggunakan itu, yaitu mencari titik yang paling strategis, dan itu yang kita garap. Kami menggarap kelompok *trend makers*, atau kalau bisa bahkan *decision makers*. Kita memang tak punya potensi terlalu banyak, namun paling tidak kelompok penentu kecenderungan masyarakat itu kita garap.

Elit di sini tak merujuk pada ekonomi, melainkan intelektual. Banyak kalangan kaya atau pejabat tinggi, rendah intelektualnya. Mereka tak akan cocok dengan Paramadina. Sebaliknya banyak kalangan muda yang tak punya uang tapi berminat sekali pada apa yang disajikan kami di sini. Ya kami ajak mereka, gratis.

Apakah Anda menilai bahwa masyarakat Indonesia semakin bisa menerima perbedaan pendapat?

Ya, jelas jauh lebih kaya dari dulu. Dalam bidang apa pun, termasuk agama, politik. Saya beri contoh. Di Jakarta, dalam acara peluncuran buku Siswono, Baramuli diminta membandingkan nasionalisme Orde Lama dan Orde Baru. Dengan sendirinya dia mengkritik Bung Karno yang dikatakannya menyimpang dari UUD '45 dan sebagainya. Di *floor* banyak orang PNI. Sejumlah tokoh itu dengan memukau menyerang Baramuli. Mereka bilang, "Saudara Baramuli hanya berani mengkritik Bung Karno setelah beliau meninggal. Saya sekarang berani mengkritik Pak Harto pada saat dia masih berkuasa".

Yang ingin saya tunjukkan, senior-senior PNI itu berani mengkritik Pak Harto dan tidak diapa-apakan. Itu artinya ada perbaikan sangat besar dalam alam keterbukaan kita. Itu tak mungkin dilakukan sepuluh tahun yang lalu, apalagi pada zaman Bung Karno. Coba seandainya dia mengkritik Bung Karno pada zaman Bung Karno, apa nasib dia?

Jadi ada perbaikan yang luar biasa. Tapi tentu saja belum final, dan perlu banyak sekali yang dikembangkan. Termasuk misalnya kebebasan pers.

Tapi orang justru melihat ada perseteruan antaragama yang meruncing. Misalnya baru saja melalui media massa, kita membaca polemik antara Frans Seda yang menuduh adanya islamisasi dengan Amien Rais?

Saya setuju dengan Amien Rais. Frans Seda itu pura-pura tidak tahu dengan apa yang dikatakan Amien, bahwa ada semacam konspirasi terhadap umat Islam di masa lalu. Yaitu dengan jalan menempatkan orang-orangnya Frans Seda di posisi-posisi strategis, baik di wilayah akademik maupun pemerintahan.

Kasusnya seperti Universitas Gajah Mada, pemerintah Jawa Tengah. Sampai Kabupaten, Sekwilda-sekwilda itu katanya non-Muslim. Sekarang sudah berubah semuanya. Dalam perubahan ini, mereka mengalami kesulitan dan tidak bisa berbuat semauanya.

Saya rasa ini wujud prasangka orang-orangnya Frans Seda terhadap umat Islam. Dan prasangka ini sudah ada sejak di Eropa, ketika dia menjadi duta besar di Brussel, yang sekaligus menjadi koordinator dubes-dubes di Eropa. *Konon* dia pernah membuat *briefing* pada mahasiswa Katolik yang belajar di Eropa bahwa Islam adalah ancaman, terutama melalui HMI dan alumninya.

Karena itu, kabarnya dia memberikan petunjuk agar sesampainya di Indonesia mereka mengganjal HMI dan alumninya. Saya tidak tahu apakah pernyataan Amien itu adalah wujud dari apa yang dikatakan Frans Seda itu.

Frans Seda itu mungkin mewakili suatu kelompok yang memutarbalikkan fakta. Tapi kita juga jangan menggeneralisasi bahwa semua orang Kristen dan Katolik seperti itu. Karena orang Islam sendiri *kan* ada yang seperti itu.

Dan sebaliknya kita juga berharap mereka tak pukul rata kepada orang Islam. Apalagi orang Islam itu 80 persen masyarakat Indonesia, sehingga segala macam gaya dan penampilan itu ada. Kalau lantas orang-orang non-Muslim membuat generalisasi, ya jelas akibatnya parah. Seperti juga kalau orang Islam menggeneralisasi mereka.

Al-Qur'an saja tidak membuat generalisasi. Dikatakan misalnya,

“Dalam kelompok ahli itu ada kelompok yang konsisten, yang selalu mempelajari ajaran-ajaran Tuhan, dan beribadat di waktu malam, mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan melakukan Amar Makruf Nahi Munkar, banyak melakukan kebajikan dan mereka adalah orang-orang saleh,” (Q 3:113-114).

Al-Qur'an bilang begitu. Jadi tidak semuanya sama. Kita tidak boleh menggeneralisasi.

Tapi benarkan hubungan ini memburuk?

Itu tak bisa disebut semakin memburuk. Kesan itu timbul karena kita hidup dalam era di mana komunikasi dipermudah; itu menimbulkan efek intensifikasi: sesuatu tampak lebih intensif. Tapi dari segi volumenya sebenarnya jauh menurun. Misalnya ketidak-senangan sebagian umat Islam kepada non-Muslim, dulu jauh lebih besar. Tapi karena dulu komunikasi, transportasi, informasi masih terbatas, jadi tidak begitu menonjol.

Di sebagian kalangan, ada yang memandang Anda itu anti-Katolik atau anti-Kristen. Anda misalnya berdebat soal keagamaan secara panjang dengan Frans Magnis Suseno (melalui surat pribadi, namun foto kopinya tersebar di kalangan terbatas).

Orang bisa saja menarik-narik begitu. Tapi, kalau orang bisa melihat kasus per kasus, kesimpulannya akan beda sekali. Taruhlah saya berpolemik dengan Magnis, tapi hanya dalam rangka kejelasan. Tak ada kesengitan, dingin saja. Semua dalam kerangka ilmiah, semua bicara soal data.

Saya memintanya mengomentari tulisan Steenbrink,² bahwa umat Katolik sejak masa penjajahan Belanda melakukan konspirasi, dan ia menyebut secara langsung nama Magnis sebagai bagian dari konspirasi itu.

Dalam hal ini, taruhlah benar. Tapi orang *kan* berubah? Kita tidak bisa terus-menerus menghukum seseorang karena perbuatan masa lalunya. Tuhan saja pemaaf. *Masak* kita tidak bisa memaafkan orang? Memaafkan itu antara lain melupakan masa lalu, karena kita berharap keadaan sudah berubah.

² Yang dimaksud Nurcholish Madjid adalah tulisan Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, (Bandung: Mizan, 1995).

Terhadap Magnis misalnya, selanjutnya tak ada kepahitan di antara kita. Karena itu tetap saja ia diundang ke Paramadina, meluncurkan buku, memberikan kuliah umum.

Namun ada anggapan juga di sebagian kalangan bahwa umat Islam ber manis-manis dengan kalangan lain, itu menunjukkan bahwa umat Islam lembek?

Tafsiran lemah-kuat itu bermacam-macam. Ada yang menafsirkan kuat sebagai garang. Tapi juga ada interpretasi bahwa kuat itu teguh, dan teguh itu adalah bagian dari percaya diri. Secara psikologi, agresif itu pertanda orang lemah yang berusaha menutupi kelemahannya. Kalau dia percaya diri, dia akan mudah menghargai orang karena dia tak akan kehilangan apa-apa. Kalau dia minder, dia cenderung menghina.

Umat Islam itu tidak diperintahkan untuk bersikap garang. Misalnya soal izin berperang dari Allah sebagaimana termuat dalam surat *al-Hajj* (ayat 39-40). Banyak ulama tidak menerangkan bahwa izin perang itu dikeluarkan Allah untuk melindungi semua agama. Ide perang dalam Islam adalah defensif, melindungi orang yang terusir karena berkata, “Tuhan Kami hanyalah Allah”.

Dan dikatakan lagi, *“Kalau bukan karena Allah menolak keganasan sebagian manusia pada sebagian manusia lainnya, maka tentulah sudah hancur biara-biara, sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”*

Sebagian orang menafsirkannya bahwa dalam gereja-gereja, biara-biara, ada orang-orang berzikir menyebut, “Allah, Allah.” Tidak begitu. Artinya di sana dipelihara etos-etos keagamaan yang antara lain adalah memelihara budi pekerti luhur. Semua agama mengarah ke sana.

Karena itu para sahabat dulu saat melepaskan tentara selalu berpesan, “Jangan membunuh anak, jangan memotong pohon-pohonan, jangan membunuh ternak, jangan merusak rumah

peribadatan, jangan mengganggu mereka yang sedang beribadat di tempat-tempat ibadat itu”. Jelas itu.

Seperti dalam kasus Situbondo, saya rasa pilihan Gus Dur untuk meminta maaf dan turut membantu pembangunan kembali gereja-gereja yang dihancurkan, itu tepat sekali.

Tapi justru ada anggapan itu berlebihan?

Tidak berlebihan kalau diingat ada asumsi bahwa yang melakukan perusakan itu umat NU. Mungkin pengkritiknya melihat itu menjadi alat pembenar pembangunan gereja, karena banyak gereja di sana yang berdiri tidak dengan prosedur yang benar. Dari 27 gereja itu kabarnya hanya beberapa yang mendapatkan izin, yang lain tidak.

Jadi kalau mau wajar, setelah gereja itu diperbaiki, baru dipersoalkan izinnya. Kalau sekarang *kan* nggak enak. Secara moral *nggak* betul. Umat Islam sudah merusak, jadi seharusnya ikut juga membantu.

Beralih ke topik lain. Ada anggapan Cak Nur mulai “turun gunung” melakukan aktivitas-aktivitas di luar wilayah keagamaan, seperti menjadi anggota Komnas HAM dan KIPP.

Saya agak menyesal kalau orang sampai berpikir seperti itu. Kenapa saya bicara oposisi, kenapa saya bicara demokrasi? Itu konsekuensi dari semua apa yang saya bicarakan soal agama. Agama adalah dasar dari semuanya. Itu semua masih dalam satu lingkungan.

Jadi istilah “di luar wilayah keagamaan” itu tidak tepat. Seolah-olah kita batasi agama dalam hal-hal tertentu saja. Agama itu selalu berujung pada masalah etika, dan etika selalu berimbas pada semua bagian kehidupan. Jadi agama adalah bagian organik dari segenap bagian kehidupan. Orang Katolik juga begitu, orang Budha juga begitu.

Kalau meminjam istilah Amien Rais, kita bicara soal “*high politics*”. Kita bicara moral, norma-norma demokrasi, bukan pada penempatan orang-orang. Seperti KIPP, *kan* tidak memiliki tujuan penempatan orang-orang. Yang bisa ditumbuhkan hanyalah efek moral. Kita tidak menuntut efek legal, apalagi efek politik. Efek moral itu paling abstrak. LBH misalnya mengarah pada efek legal. Golkar pada efek politik.

Tapi ada anggapan bahwa dalam kondisi saat ini, pilihan untuk berpolitik praktis bagi umat Islam justru merupakan keharusan?

Di satu sisi saya setuju dengan pilihan itu. Namun di sisi yang lain, saya merasa ada banyak orang yang mengatakan itu sekadar mencari pembenaran terhadap tindakan politik praktisnya, untuk mencari kedudukan. Itu saya tidak setuju. Itu hanya merupakan semacam tugas dari suatu kelompok tertentu untuk mengemban tugas lebih besar. Namun seluruh umat Islam itu harusnya kembali kepada masalah yang paling pokok, yaitu yang termuat dalam istilah amar makruf nahi munkar, menegakkan nilai-nilai terbaik.

Pada tahap sekarang ini justru dibutuhkann sikap untuk merem terjadinya ekses dari perjuangan dalam mencari posisi politik praktis, dengan mengingatkan bahwa setiap kenaikan posisi seorang Islam dalam politik praktis harus disertai kenaikan nilai-nilai Islam yang berdaya. Karena itu kalau ada politisi Islam naik ke atas, atau naik atas nama Islam, dan tidak mencerminkan akhlak Islam, itu namanya pengkhianatan.

Dan itu mempunyai efek mengganggu, merongrong atau bahkan meniadakan legitimasi Islam untuk masa depan. Itu berbahaya sekali. Untuk merehabilitasinya susah.

Kritik pada ICMI misalnya adalah bahwa banyak orang ICMI yang lebih berpikir pada politik praktis, pada penempatan orang-orang.

Tapi *kan* kesempatannya langka untuk memperoleh posisi itu?

Ya tapi apa artinya kesempatan itu harus dibayar dengan segala ongkos. Tidak dong. Kita juga harus memperkuat posisi tawar.

Adalah salah mengira naiknya Islam itu karena belas kasihan orang yang di atas. Kenaikan Islam di Indonesia terjadi karena faktor obyektif-historis-sosiologis-demografis, terutama yang berkaitan dengan masalah peningkatan pendidikan. Siapa pun yang berkuasa tidak akan bisa mengabaikan faktor Islam.

Islam sebagai kekuatan muncul dari bawah secara obyektif. Kalau umat Islam selalu berpikir bahwa dia ditolong, maka cara berpikirnya jatuh pada kolusi dan kooptasi.

Nabi mengatakan, “*Jangan berikan kekuasaan pada yang menghendaki*”. Maksudnya berikan tampuk kekuasaan pada siapa pun yang terpilih melalui proses obyektif dan alami, bukan karena rekayasa, bukan karena macam-macam.

Apakah itu tidak membutuhkan waktu lama?

Tidak lama. Karena itu saya bicara tentang perimbangan baru di Indonesia. Saat ini perimbangannya memang masih tidak wajar, karena kita masih didominasi oleh *elite* bentukan zaman kolonial. Setelah 1980-an dan 1990-an, itu mulai diimbangi oleh *elite* yang datang dari kalangan rakyat dan kebetulan santri.

Tapi ini belum selesai, karena yang ada saat ini masih Islam modernis, yang kira-kira acuannya pada Masyumi. NU belum, padahal ia merupakan faktor kunci karena jumlahnya yang besar dan sangat berakar. NU itu terlambat kira-kira 20 tahun. Mulai tahun 1970-an, anak-anak NU menyerbu sekolah-sekolah umum, dan sekolah-sekolah NU pun dimodernisasi. Jadi tambah saja 20 tahun dari sekarang, kita akan menyaksikan bahwa dari NU tumbuh lapisan terdidik yang sangat besar. Pada masa itulah terjadi ekuilibrium baru.

Sekarang ini karena orang Kristen-Katolik memiliki keunggulan teknis, peranannya tidak proposional. Lihat saja SIUPP. Grup Kompas punya 40-an SIUPP. NU yang begitu besar tak punya

SIUPP. Itu berkaitan dengan kemampuan teknis. BPR-nya NU gagal karena ekonominya NU masih ekonomi natura, bukan ekonomi moneter.

Karena itu sangat penting munculnya tokoh-tokoh NU yang bisa membawa NU ke arah yang lebih terbuka. Karena bila benar pada tahun 2010 nanti hadir generasi NU yang akan turut tampil di pusat-pusat kekuasaan sementara pola konflik lama NU-Masyumi masih berlangsung, akan hancur Indonesia.

Karena itu pula Anda lihat saya tidak akan pernah mengkritik Gus Dur. Saya pernah diapakan saja oleh Gus Dur, saya diam saja. Karena saya sadar, secara makro, dia ini luar biasa. Secara mikro, gaya pribadinya, kita mungkin terganggu sekali. Tapi itu tak boleh menghalangi kita untuk menghargai dia. Kita tak boleh kehilangan orang seperti Gus Dur.

NU adalah kekuatan yang memiliki kekayaan luar biasa namun belum memiliki metodologi untuk mengolah kekayaan itu. Saya selalu katakan, “Muhammadiyah memiliki katalog namun tidak memiliki kitab, sedangkan NU memiliki kitab yang sangat kaya namun tidak memiliki katalog”. Bagaimana kita bisa memanfaatkan begitu banyak kitab, kalau kita tidak memiliki katalog.

Muhammadiyah-NU itu seperti Jepang-Indonesia. Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tapi tak tahu cara mengolahnya. Jepang tak memiliki apa-apa selain kemampuan mengolah. Jadi keunggulan bisa diperoleh bila orang menguasai metodologi. Muhammadiyah itu maju sekali, melampaui kelompok-kelompok Islam di seluruh dunia.

Saya katakan pada orang-orang NU, NU bisa menjadi besar dan menjadi seperti Amerika, bukan Indonesia. Amerika adalah negara yang kaya sumber alam, sekaligus kaya metodologi. Karena itu menjadi *super power*. NU pun bisa begitu.

Pada tahun 2010 itu kita mengharapkan lahirnya NU modern. Dan saat itu pilihan untuk memasuki NU atau Muhammadiyah tak berkaitan dengan masalah “shalat tarawihnya” NU 23 rakaat,

sementara Muhammadiyah 11 rakaat”. Itu menjadi tak relevan sama sekali.

Dan itu terjadi. Lihat saja HMI. Di sana tidak penting Anda itu berasal dari Muhammadiyah atau NU atau apa pun. Tak ada stigma. Paramadina juga begitu. Karena itu ada yang datang ke Paramadina dan kecele karena berharap memperoleh panduan mengenai bagaimana cara berwudu yang benar. Ya itu *kan* seharusnya sudah selesai pada usia tujuh tahun?

Dengan optimisme semacam itu, Anda tidak melihat kemungkinan bahwa proses masuknya umat Islam ke wilayah kekuasaan ini bisa dibalikkan?

Ada faktor obyektif yang membuat saya percaya itu tak bisa dibalikkan. Dihambat mungkin bisa, tapi dihentikan atau dibalikkan tidak bisa. Pendidikan yang diberikan masa Orde Baru ini berkonsekuensi pada lahirnya kalangan terdidik. Tak ada yang bisa membendung. Hambatan itu saya kira akan datang dari kelompok masyarakat yang — terlepas dari agamanya — ingin mempertahankan *privilege* yang selama ini mereka nikmati yang sebagian besar adalah warisan dari zaman kolonial.

Tapi kalau mereka bertingkah seperti itu, mereka akan hancur. Lebih baik mereka *sharing*, kalau mereka ingin selamat.

Bagaimana korelasinya lembaga-lembaga pendidikan seperti SMU Madania atau Universitas Paramadina Mulya, dalam konteks kelahiran generasi baru kelas menengah Muslim?

Ya, dalam rangka menopang itu.

Tapi kenapa mahal?

Ya itu *kan* soal pembagian kerja lagi. Kalau kita juga disuruh mengurusinya, yang ini tercecer lagi. Fardu kifayah lagi *kan*. Sebenar-

nya kalau untuk yang ini ada yang menggarap, kita akan dukung. Tapi sejauh ini tak ada yang maju, ya sudah kita lakukan saja. Kalau-kalau bisa.

Karena kalau kita ingin ambil bagian dalam kekuasaan, kita harus meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalangan nonpribumi memiliki dan sadar itu. Itu bukan soal konspirasi. Tapi karena mereka mampu. Di luar negeri, mereka belajar komputer, belajar *robotics*, soal robot.

Saat ini dari setiap satu juta orang Indonesia itu, hanya ada 65 lulusan S3. Amerika itu 6.500. Prancis 5.000. Jerman 4.000. Mesir 400. India 1.200. Israel, 16.500. [❖]

ADA YANG MENGORBANKAN ICMI¹

1 DESEMBER 1996, dalam debat buku *Islam: Demokrasi Atas-Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, menjadi ajang “persengketaan” kecil antara dua kubu — Gus Dur dan Amien Rais — yang telah lama dianggap memendam perseteruan. Dan secara kebetulan, Nurcholish Madjid, salah satu dari sedikit pemikir Islam yang bisa diterima oleh berbagai kelompok Islam, hadir sebagai penengah. Cak Nur, sapaan akrabnya, berusaha meredam anggapan adanya “perseteruan” antara Gus Dur dan Amien Rais. Pikiran-pikiran kritis Cak Nur dalam forum diskusi tersebut, selalu menampakkan kecerdasan dan kejernihan seorang cendekiawan, yang dibauri oleh panggilan hati nurani yang jujur, tanpa pretensi. Mursidi Hartono dan Muchlis Ainurrafik dari Tabloid *PARON* mencoba menggali pikiran-pikiran kritis Cak Nur dari berbagai sudut pandang. Berikut petikan wawancaranya:

Apa arti pertemuan Amien Rais-Gus Dur di Masjid Sunda Kelapa bagi perjuangan umat Islam?

Saya kira salah satu cara melihatnya ialah bahwa dua orang ini tidak sebagai pribadi, tapi sebagai pemimpin dari dua organisasi Islam terbesar. Dan dalam sejarah negara kita, kedua organisasi

¹ Tabloid *PARON*, “Ada yang Mengorbankan ICMI”, No. 33/21 Desember 1996. Pewawancara Mursidi Hartono dan Muchlis Ainurrafik.

ini paling tangguh, paling independen, paling sulit diintervensi dari luar. “Pertemuan Sunda Kelapa” menjadi semacam humas — malahan Gus Dur menyebutnya dengan istilah “*cosmetical*” — tapi sekurang-kurangnya dapat menurunkan ketegangan-ketegangan, terutama sekali pada level *grassroot*, akar rumput.

Ada anggapan, selama ini ada “ketegangan” di antara kedua tokoh Islam tersebut.

Dengan pertemuan kemarin paling tidak, bisa dibebaskan prasangka-prasangka yang sangat mengejutkan emosi. Apalagi jika disatukan langkahnya. Tanpa mengenali sosok kedua pemimpin tersebut, dan organisasinya, orang tidak akan mengenal eksistensi bangsa Indonesia. Saya menyebut dengan istilah bangsa Indonesia karena umat Islam itu 90%. Karena itu, apa pun yang mempengaruhi umat Islam dengan sendirinya akan mempengaruhi bangsa Indonesia.

Anda dianggap sebagai orang yang bisa menengahi “ketegangan” tersebut?

Memang saya diminta untuk berbicara pada sesi terakhir. Saya menekankan segi positif dari kedua orang itu, apalagi jika segi positif itu bersifat prinsipil betul. Sebetulnya memang hampir tidak ada bedanya dari kedua orang itu. Amien Rais, dengan gayanya sendiri, sangat besar obsesinya terhadap masalah-masalah Islam. Orang boleh saja tidak suka dengan gaya Amien yang kadang-kadang “tajam”, tapi kita jangan lupa dengan esensinya.

Gus Dur, sepanjang yang saya kenal, mempunyai obsesi memihak kelompok kecil, kelompok “memelas”, kelompok *underground*, baik Islam maupun bukan Islam. Tapi umat Islam salah paham dengan dia. Karena dia membela Syi’ah, membela Ahmadiyah, Darul Arqam. Semua kelompok-kelompok seperti itu dia rangkum. Gus Dur sekaligus juga merangkul kelompok non-Muslim.

Orang lebih melihat kedekatan Gus Dur dengan kelompok non-Muslim daripada umat Islam sendiri?

Dalam pandangan dia, kelompok non-Muslim itu “memelas”. Tidak dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi justru terbalik, orang Islam yang memelas. Tapi, dari segi politik dan potensi sosial, pada umumnya mereka itu memelas.

Apa yang dilakukan Gus Dur memang menimbulkan ekses. Tapi, setiap orang juga bisa menimbulkan ekses. Tak perlu itu ditonjolkan. Seperti yang sering saya katakan, melihat orang itu selain tidak menutup mata dari segi negatifnya, juga harus lebih merujuk pada positifnya. Itu namanya ihsan.

Kita tidak hanya dititahkan untuk adil, melihat orang sebagai apa adanya, tetapi juga diperintahkan untuk lebih melakukan ihsan. Mengakui kebaikan orang lain.

Bagaimana Anda melihat kedekatan Gus Dur dengan kelompok non-Muslim itu?

Apa yang dilakukan Gus Dur sekadar menciptakan suasana peri kemanusiaan, keterbukaan, dan demokrasi. Walaupun efeknya untuk pembinaan umat, agar umat mempunyai toleransi serupa. Dan jangan lupa, Gus Dur juga membina pendidikan umat, misalnya lewat Ma’arif. Kalau orang selama ini tidak melihat Gus Dur melakukan upaya pemberdayaan umat, itu karena kesan saja. Kesan itu timbul karena membandingkan NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu universitasnya di mana-mana. Apa sebabnya? Karena NU itu boleh dibilang terlambat 20 tahun dalam pengembangan SDM. Misalnya, Gus Dur ingin mendirikan Bank Perkereditan Rakyat (BPR). Tapi mungkin waktu itu Gus Dur tidak melihat bahwa warga NU ekonominya masih ekonomi natura, bukan monoter.

Banyak yang melihat pertemuan tokoh NU-Muhammadiyah itu sebagai fenomena menguatnya masyarakat sipil, menurut Anda?

Kalau definisi masyarakat sipil salah satunya ialah independensi, maka jelas itu adalah penguatan masyarakat sipil. Dan kalau demokrasi itu punya rumah, rumahnya itu ialah masyarakat sipil. Tidak akan ada demokrasi tanpa adanya masyarakat sipil. Pengertian sipil di sini tidak berarti bukan militer, tapi dalam arti warga negara. Dan cirinya memang independensi, sebagai pengimbang dari penguasa.

Masyarakat sipil di mana-mana akan mempunyai peranan aktif. *Pertama*, kalau independen. *Kedua*, kalau mampu menjadi *counter* antara pemerintah dengan rakyat. Artinya tidak semua kebijakan pemerintah mesti terlaksana sebagaimana adanya, tetapi melalui saringan-saringan masyarakat sipil. Jadi *counter* sekaligus filter.

Dalam waktu yang sama, masyarakat sipil juga harus berperan sebagai penerjemah timbal-balik dari pemerintah kepada rakyat dan dari rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu masyarakat sipil harus positif terhadap pemerintah.

Orang melihat Gus Dur berjuang dari bawah, sementara Amien Rais dari atas. Tepatkah pembagian itu?

Gus Dur selalu menegaskan bahwa dia tidak mengajak para anggota NU untuk melawan pemerintah. Tidak. Dia hanya mengontrol. Sebaliknya pada Amien Rais, seperti yang dibahas dalam bukunya kemarin, terkesan dia melakukan pendekatan dari atas. Itu *kan* konotasinya ialah mendukung pemerintahan.

Dalam hal ini, menarik bagi para pengamat. Oleh karena Amien Rais ini menuntut term yang sama sekali berbeda. Mengapa dia berubah seperti itu? Karena faktor-faktor yang obyektif. Bahwasanya pemerintah menunjukkan sikap-sikap yang positif kepada umat Islam.

Dengan begitu, bisa juga disimpulkan bahwa Amien Rais ini menghendaki warga Muhammadiyah untuk menepati berbagai ketentuan kenegaraan. Tapi sebaliknya dengan sikap-sikap politik Amien Rais, maka dia juga berfungsi sebagai *counter* dan filter.

Apakah pertemuan itu bisa disebut sebagai awal rekonsiliasi umat Islam?

Rekonsiliasi mengasumsikan selama ini memang ada konflik. Baik Amien maupun Gus Dur, dengan cara sendiri-sendiri, selama ini selalu membantah bahwa ada konflik. Bahkan Amien Rais, di Sunda Kelapa, menampilkan berbagai bentuk konkret bagaimana kerjasama arus bawah antara Muhammadiyah dan NU berlangsung selama ini. Karena itu saya kira pertemuan itu bukan rekonsiliasi, tapi peneguhan-peneguhan dari perkembangan yang ada.

Di samping itu, juga kita tidak boleh dan tidak perlu berharap bahwa langkah dari kegiatan tersebut sama sekali salah. Pertemuan itu harus dilihat sebagai usaha pengelolaan konflik-konflik.

Ada yang melihat pertemuan Sunda Kelapa itu sebagai agenda awal. Agenda berikutnya, mempertemukan Gus Dur dengan Menristek Habibie?

Saya ingin mengatakan kita harus tahu bagaimana cara Gus Dur melihat Habibie. Gus Dur melihat Habibie tidak sepadan dengan dirinya. Habibie hanyalah ketua dari sebuah kelompok kecil, biar pun peranannya besar. Tapi peran besar itu tidak selamanya, karena ICMI cuma bergerak di bidang ilmu pengetahuan, sementara dari segi *grassroot* ICMI tidak punya. Karena itu Gus Dur tidak pernah melihat Habibie sebagai perbandingannya.

Maka dia selalu sinis terhadap ide-ide mempertemukan dia dengan Habibie. Kita harus tahu itu. Bagi dia, pertemuan dengan Habibie tidak terlalu penting.

Gus Dur memberi syarat, mau bertemu dengan Habibie kalau Habibie mau berjanji bahwa ICMI tidak akan mendominasi kekuasaan?

Karena itu, dia merasa janggal kalau Habibie mencoba mendominasi inisiatif-inisiatif sosial politik. Pernyataan itu menunjukkan seolah-olah Gus Dur mengatakan, “kamu *kan nggak* sah....”

Apakah itu tidak menunjukkan aroganisme Gus Dur?

Jelas sekali, seperti saya katakan tadi. Kalau dengan Amen Rais dia tidak mengatakan itu, karena Amien Rais mewakili sekian juta umat Muhammadiyah, dan peranannya proporsional dengan kadar intelektual dia.

Bukankah Gus Dur memperhitungkan soal representasi seseorang?

Yang dilakukan Gus Dur selama ini *kan* memang begitu. Dia mengkritik mereka yang bilang mewakili umat. Umat mana? Dia bilang, orang mengaku mewakili umat, tapi kami tidak termasuk.

Apakah itu bukan sikap paradoks? Di satu sisi Gus Dur tidak menghendaki politik representasi, tapi dia juga ingin menunjukkan superioritas “kekuasaannya”?

Kalau soal paradoks, tidak ada orang yang tidak paradoks. Ke-paradoksalan merupakan pembawaan diri seseorang. Al-Ghazali (tokoh pemikir Islam) pun paradoks, banyak pemikirannya yang paradoks.

Dalam hal ini kita tidak tahu seberapa serius paradoksnya Gus Dur. Tapi yang jelas, dalam soal nilai, dia tidak melihat representasi. Namun dalam soal simbolisasi, dia akan sedih sekali kalau orang

mengatasnamakan umat Islam, tapi seolah-olah NU tidak terbawa-bawa.

Banyak kalangan Islam, seperti diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra, bingung menilai Gus Dur?

Umat Islam *kan* macam-macam. Memang itulah, kadang-kadang kita menjadi korban dari kesan-kesan. Kesan-kesan itu selalu dibentuk dengan unsur subyektif. Kalau mau obyektif, harus melihat secara keseluruhan. Misalnya, kalau Gus Dur sekarang kerjasama dengan orang-orang non-Muslim, itu *kan* karena Tuhan sendiri mengatakan boleh.

Kadang-kadang orang Islam sendiri tidak adil terhadap al-Qur'an. Ayat yang banyak dikutip justru yang "keras-keras". Sedang yang "lunak", adil, dan bersahabat, tidak dikutip. Memang dalam al-Qur'an ada perintah, agar tidak mengangkat orang non-Muslim sebagai penuntun atau kawan. Tetapi di tempat lain al-Qur'an mengatakan Allah tidak melarang untuk melakukan pergaulan yang sebaik-baiknya dan adil terhadap mereka yang tidak memerangi agama kita. Itu jelas sekali.

Anda tampaknya lebih dekat dengan Gus Dur ketimbang Amien Rais?

Mungkin antara lain, karena sama-sama dari Jombang (Jawa Timur). Tapi kalau dihitung-hitung, saya lebih sering ke kantor PP Muhammadiyah daripada PBNU.

Umat Islam melihat wawancara Uskup Belo dengan Der Spiegel dalam perspektif agama. Adilkah itu?

Sebetulnya reaksi orang terhadap Belo dalam "kasus Nobel" *kan* tidak seberapa. Yang mungkin keras terhadap Ramos Horta. Tapi dalam kasus Der Spiegel, ya Belo harus dilihat bukan sebagai

tokoh agama, melainkan sebagai warga negara. Tentu saja sebagai warga negara Belo tidak boleh berbicara seperti yang dimuat dalam *Der Spiegel*. Tapi Belo *kan* sudah membantahnya.

Coba bayangkan, dalam *Der Spiegel* itu Belo menyatakan bahwa tentara Indonesia membunuh lebih dari 650 ribu orang Timtim. Penduduk Timtim berapa, *kok* terbunuh sekian besar. Lalu kalau Belo mengatakan pernyataannya diselewengkan, orang berharap dia menindaklanjuti, misalnya melakukan tuntutan. Yang jelas, ini bukan masalah agama.

Bagaimana dengan usulan Belo untuk menjadikan Timtim sebagai daerah khusus, karena faktor agama dan kultur?

Saya kira, dia memang beralasan. Boleh dipertimbangkan. Timtim memang berbeda. Budayanya Portugis, budaya Latin. Hanya saja perlu kita ingatkan, bahwa keputusan memberi (predikat) daerah istimewa untuk Aceh dan Yogyakarta, tidak bermakna apa-apa. Misalnya Aceh boleh melaksanakan syariat Islam. Ternyata itu tidak terjadi. Bagi saya itu *kan* persoalan formalitas saja.

Anda pernah menolak formalisme dalam beragama. Tapi, kemudian Anda ikut mendirikan ICMI. Apa yang Anda cari?

Begini. Pada sekitar tahun 1970-an, banyak sekali anak-anak santri yang menjadi sarjana. Begitu besar jumlahnya. Saat itu dampaknya belum terasa, karena mereka pada umumnya masih sibuk dengan urusan domestik. Tapi pada tahun 1980-an, mereka mulai melihat “keluar”. Lalu di mana-mana terjadi gejala Islam. Mereka menjadi sponsor-sponsor kegiatan Islam di semua tempat, termasuk di kantor-kantor, rumah sakit, universitas-universitas.

Nah, yang muncul adalah antusiasme, antusiasme kolektif. Dan setiap antusiasme itu emosional. Karena itu menjadi pemarah, gampang tersinggung, segala macam. Sampai sekarang masih ada

sisanya. Kalau gejala ini kita analogikan dengan psikologi pribadi, itu adalah masa puber.

Kondisi ini membuat saya dengan beberapa teman mulai berpikir, kalau jumlah lulusan universitas yang santri begitu besar, tapi *mind set*-nya kepahitan dan perlawanan, *fight againts*, ini berbahaya. Maka kami bikin ICMI.

ICMI dibentuk agar intelektual Islam tidak marah?

ICMI itu gampangnya atau secara karikatural begini. “Ala... kamu gampang saja ngomong di luar, cobalah kamu masuk”. Sebab seberat-berat mata memandang, lebih berat bahu memikul. Begitu gampangnya.

Jadi memang ICMI didesain untuk mempermudah orang masuk birokrasi. Itu yang menjadi kritik banyak orang. Tapi itu sebagian. Sebagian lagi, menjadikan ICMI sebagai gerakan intelektual. Yang lebih penting, berpikir positif tentang negara. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan kebebasan bergerak. Kalau kita kehilangan kebebasan bergerak, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu penting sekali untuk dipahami.

ICMI ingin melakukan kritik dari dalam?

ICMI menerapkan rumusan ilmu strategi modern. Yang disebut menang itu bukan menghancurkan musuh. Itu sudah kuna. Yang disebut menang adalah bila Anda bisa membuat situasi sedemikian rupa sehingga Anda mempunyai lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan berbuat apa saja.

Orang Islam banyak yang mengira bahwa menang itu adalah menghancurkan musuh. Dalam ucapan Pak Harto, menang tanpa *ngasorake* (menang tanpa merendahkan martabat musuhnya). Jadi *to secure the freedom ofaction*. ICMI untuk itu.

Berhasilkah niatan awal ICMI itu?

Kalau dilihat intelektual Muslim sudah memiliki kembali kebebasan bergerak, ICMI berhasil. Sekarang masalahnya adalah penggunaannya. Dan ini memakan waktu. Sama saja ibaratnya kita baru bangun tidur, *kan gedandapan* (gelagapan). Karena itu kami giring agar menjadi dewasa. Mudah-mudahan tahun 2000-an sudah berkembang menjadi dewasa.

Sikap Anda yang “lunak” ini bukan sebuah perubahan?

Ini cuma soal perspektif, sudut pandang. Misalnya dulu Anda di sebelah kiri, karena saya di sebelah kanan. Sekarang Anda duduk di sebelah kanan saya, *kan* saya jadi berada di sebelah kiri. “Tuduhan” itu muncul karena orang tidak paham saya.

Coba bayangkan, saya tahun 1977 kampanye untuk PPP. Padahal saya pernah bilang, “Islam yes, partai Islam no”. Tapi saya tetap kampanye untuk PPP. Ide saya adalah untuk *the balance of power politics*. Nah, kalau orang tidak bisa melihat hal-hal yang subtil seperti ini, orang bisa melihat ini perubahan niat.

Tapi, belakangan Anda malah mengambil jarak dengan ICMI, bergabung dengan KIPP, dan melontarkan ide-ide oposisi.

Saya ingin melihat ICMI tumbuh, tapi sekaligus mengawasinya. Jangan sampai ada ekses-ekses yang mengorbankan ICMI sebagaimana saya sering bicara tentang perimbangan kekuatan, arah saya juga ke sana. Kalau ada kelompok-kelompok (dalam ICMI) yang ambisius untuk mencari posisi, ya biarkan saja. Asalkan mereka tetap membawa nilai-nilai Islam.

Bentuk keterlibatan saya di ICMI, terutama dalam ide. Karena itu, saya diminta untuk merumuskan *khiththah*. Kami harapkan *khiththah* ini akan menjadi pegangan betul. Untuk itu, kami merencanakan mengadakan training-training ICMI lagi. Dan pada level paling atas, saya harus menerapkannya. Supaya mereka jangan terlanjur naik ke atas, tapi sebetulnya tidak membawa nilai-nilai Islam.

Untuk apa Anda melakukan semua itu?

Orientasi kekuasaan akan membuat Islam jadi tidak *legitimized*. Itu hanya akan membuat Islam menjadi *delegitimized*. Dan kalau itu terlanjur terstruktur untuk meluruskan kembali akan sulit sekali. Jadi ibarat pepatah, lebih baik mandi keringat pada waktu persiapan, daripada mandi darah pada waktu kejadian. Dan saya ingin sekarang ini kita mandi keringat betul.

Ekses apa yang sebetulnya mengkhawatirkan Anda dari ICMI sekarang ini?

Munculnya antusiasme pada Islam, seperti dekade 80-an. Seperti halnya pendulum kadang bergerak ke ekstrim kiri, kadang ke ekstrim kanan. *Nah*, kalau tidak ada yang menarik ke arah lain, maka akan bertahan pada titik ekstrim itu. Dalam perspektif sesaat, orang yang mengejar kekuasaan, bisa jadi hanya sebagai suatu ekses. Tapi sebaliknya, ada yang melihat sebagai sesuatu yang berbahaya secara fatal.

Karena itu, serangan Gus Dur ada baiknya, untuk menentang, *to oppose*, pada gejala seperti itu. Tapi posisi Gus Dur sendiri tidak sepenuhnya frontal. Sementara dia menyerang ICMI, tapi dia juga menempatkan orang-orangnya di ICMI. Dr. Muhammad Tahir itu *kan* orangnya Gus Dur.

Tapi posisi Gus Dur itu baik, karena membuat ICMI lalu tidak *taken for granted*. Sebab kalau sampai terjadi politisasi agama, itu berbahaya sekali. Akan terjadi absolutisasi.

Anda melihat ICMI bergerak pada satu titik ekstrim tertentu?

Ya, terlalu ekstrim ke kanan. Yang saya maksudkan adalah, karena Islam naik, maka sebagian umat Islam sekarang ini, seperti saya singgung di ICMI, sedang menerima *balâ'-un hasan-un* (cobaan baik). Kalau sembrono, dan tiba-tiba orang Islam naik

semuanya, struktur akan didominasi oleh umat Islam. Tapi nilai-nilainya bukan Islam. Itu yang saya sebut pengkhianatan.

Anda sering kritis terhadap kekuasaan, sementara banyak kawan-kawan Anda sendiri sedang berkuasa?

Oh nggak apa-apa. Kami sering kumpul-kumpul, tidak ada masalah. Dalam Silaknas ICMI kemarin, saya diberi kesempatan pertama untuk ceramah. Di situ saya bicara tentang *khiththab*. Sama dengan yang pernah saya sampaikan di mana-mana, termasuk di Sunda Kelapa, bahwa kesempatan yang sekarang meluas di hadapan umat Islam itu harus dianggap sebagai *balâ'-un hasan-un*, cobaan yang baik. Kalau kita salah menggunakannya, bisa berubah menjadi azab (siksa).

Anda selalu mengkritik lembaga, padahal bisa jadi yang salah personalnya?

Betul. Saya memang selalu begitu, tidak pernah menyebut orang, dan sedapat mungkin menghindari ungkapan-ungkapan yang vulgar dan sarkastik. Kelemahan Amien Rais di situ. Dia selalu menggunakan ungkapan-ungkapan sarkastik. Isinya benar, tapi karena menggunakan ungkapan-ungkapan seperti itu orang lalu cenderung marah.

Jadi banyak orang yang pikirannya segar, liberal, terbuka, tapi *style*-nya mengesankan seperti orang yang keras. Misalnya, Bang Imad (Dr. Imaduddin). Bang Imad itu keras, tapi pikirannya liberal sekali.

Dulu Anda juga dikenal “keras”. Misalnya, menolak untuk membeberkan ide “Islam dan Sekularisasi” di hadapan jamaah Masjid Sunda Kelapa. Mengapa?

Waktu itu fitnah dan prasangka begitu kental. Saya tidak tahu ada diskusi itu, kebetulan saya pergi ke luar negeri. Fitnah berlang-

sung luar biasa. Waktu itu (tahun 1970-an), orang Islam yang tidak berpartai politik Islam hampir-hampir dibilang kafir. Jadi karena mayoritas masyarakat waktu itu begitu rupa, saya tidak layani.

Belakangan Anda merangkul “kelompok Islam kota” lewat pengajian-pengajian Paramadina. Mengapa memilih mereka?

Itu *kan* pembagian kerja, fardu kifayah, karena belum ada yang menggarap kelompok ini. Seperti yang dikemukakan Emil Salim saat meresmikan Paramadina. Paramadina, kata Emil, sebagai penentu kecenderungan, *trand maker*, *opinion maker*.

Jamaah Anda wangi-wangi. Keluar dari ruang pengajian, mungkin mereka tetap mengenakan *hotpan*, misalnya.

Saya tidak tahu apa ada orang Paramadina yang seperti itu. Kalaupun ada, ya itu masih proseslah. Tapi jangan dikira mode-mode busana Muslim itu diterima.

Waktu saya mengajar di Kanada, ada mahasiswa Indonesia membawa majalah Amanah, dan di situ ada gambar-gambar busana Muslim. Tapi mahasiswa Timur Tengah pameran mode busana Muslim serupa itu bersifat skandal. Karena itu adalah bisnis. Jadi relatif sekali *kan*? Bahayanya beragama itu ialah kalau orang berhenti di tempat. [❖]